



PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP



CILACAP
BERCAHAYA
MAJU BESAR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RPJMD 2025-2029

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cilacap"



bappeda_clp



bappeda.cilapkab.go.id



Jl. Kauman No. 28 B, Cilacap

2025
BAPPEDA



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berperan sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih terlantik yang bertujuan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 207);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cilacap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Cilacap.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

- adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
 14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 17. Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
 18. Misi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029.
 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II RPJMDAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi;
 - d. arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan

- e. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJM Daerah;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJM Daerah; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJM Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJM Daerah;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJP Daerah pada tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJM Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 20 AUG 2025

BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 20 AUG 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Satrio Moko Danardono

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-149/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran, dan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJP Nasional kemudian dituangkan ke dalam RPJM Nasional. RPJM Nasional bertujuan memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJM Nasional diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik, dan terukur.

Selain mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada tata cara evaluasi dan mekanisme perubahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah,
- b. Strategi pembangunan daerah,
- c. Kebijakan umum pembangunan,
- d. Program pembangunan daerah,
- e. Program kewilayahan, serta
- f. Rencana kerja yang dilengkapi dengan kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJM Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Penyusunan RKPD pada

setiap tahun anggaran, serta Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Melalui RPJM Daerah, pemerintah daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 210

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum..... I-2

1.3. Hubungan Antara Dokumen I-5

1.4. Maksud dan Tujuan..... I-8

1.5. Sistematika Penulisan..... I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-39

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah..... II-72

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-95

2.2. Gambaran Keuangan Daerah..... II-129

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah..... II-127

2.2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD II-127

2.2.3. Neraca Daerah II-135

2.2.4. Ratio Likuiditas..... II-137

2.2.5. Analisis Solvabilitas..... II-140

2.2.6. Analisis Leverage II-138

2.2.7. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030..... II-139

2.2.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah II-142

2.2.9. Alternatif Sumber Pendanaan Lain..... II-149

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis..... II-150

2.3.1. Permasalahan Pembangunan II-150

2.3.2. Isu Strategis Daerah..... II-157

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1

3.1.1. Visi dan Misi III-1

3.1.2. Tujuan dan sasaran III-6

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas III-12

3.2.1. Strategi..... III-12

3.2.2. Arah Kebijakan III-28

3.2.3. Program Prioritas III-31

3.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah..... III-67

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah IV-1

4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah IV-2

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar..... IV-5

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan IV-13

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah IV-15

4.1.5. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-
2030 dan Kerangka Pendanaan..... IV-19

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV-45

4.2.1. Indikator Kinerja Utama IV-45

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah IV-46

BAB V PENUTUP..... V-1

5.1. Kaidah Pelaksanaan..... V-1

5.2. Pedoman Transisi V-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani	II-3
Tabel 2.2	Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024.....	II-4
Tabel 2.3	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020-2024.....	II-4
Tabel 2.4	Luas Panen Hortikultura di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.5	Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-6
Tabel 2.6	Produksi Tanaman Perkebunan di Kab. Cilacap	II-7
Tabel 2.7	Luas Area Panen Tanaman Perkebunan di Kab. Cilacap Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.8	Jumlah Populasi Ternak di Kab. Cilacap	II-8
Tabel 2.9	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Kab. Cilacap).....	II-9
Tabel 2.10	Produksi Perikanan Kabupaten Cilacap	II-10
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.12	Neraca Air Kabupaten Cilacap Berbasis Grid Tahun 2022	II-14
Tabel 2.13	Daya Dukung Air Kabupaten Cilacap Tahun 2022, Tahun 2025 dan Tahun 2029.....	II-15
Tabel 2.14	Perhitungan Daya Dukung Lahan untuk Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dan 2029	II-16
Tabel 2.15	Jenis Pemanfaatan Energi Kabupaten Cilacap	II-22
Tabel 2.16	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2024.....	II-25
Tabel 2.17	Tabel Komposit Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-28
Tabel 2.18	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2.19	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-32
Tabel 2.20	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2030	II-37
Tabel 2.21	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2024.....	II-38
Tabel 2.22	Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-56
Tabel 2.23	Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2024.....	II-57
Tabel 2.24	Sarana Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2024	II-58
Tabel 2.25	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-62



Tabel 2.26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024.....	II-78
Tabel 2.27	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-79
Tabel 2.28	Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-79
Tabel 2.29	Tabel Indikator IBEI Kabupaten Cilacap	II-84
Tabel 2.30	Tabel Asuransi Nelayan APBD Kabupaten Cilacap	II-87
Tabel 2.31	Tabel Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-87
Tabel 2.32	Disparitas Harga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.33	Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.34	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-95
Tabel 2.35	Gambaran Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.36	Gambaran Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-103
Tabel 2.37	Gambaran Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.38	Gambaran Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel 2.39	Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.40	Tabel 2. 40 Gambaran Kinerja Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.41	Gambaran Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2.42	Gambaran Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.43	Gambaran Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-110
Tabel 2.44	Gambaran Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-110
Tabel 2.45	Gambaran Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-111
Tabel 2.46	Gambaran Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.47	Gambaran Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.48	Gambaran Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.49	Gambaran Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-114

Tabel 2.50	Gambaran Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.51	Gambaran Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.52	Gambaran Kinerja Urusan Koperasi & UMKM Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.53	Gambaran Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.54	Gambaran Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.55	Gambaran Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.56	Gambaran Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.57	Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.58	Gambaran Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.59	Gambaran Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.60	Gambaran Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.61	Gambaran Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.62	Gambaran Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.63	Gambaran Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.64	Gambaran Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.65	Gambaran Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.66	Gambaran Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.67	Gambaran Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.68	Gambaran Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.69	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (Rp.000)	II-133
Tabel 2.70	Neraca Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2023 (Rp. 000)	II-136
Tabel 2.71	<i>Current Ratio</i> Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.72	<i>Quick Ratio</i> Kabupaten Cilacap Tahnun 2020-2024	II-137
Tabel 2.73	Rasio Solvabilitas Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2.74	Rasio <i>Leverage</i> Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-139



Tabel 2.75	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 – 2030.....	II-147
Tabel 2.76	Realisasi Pelaksanaan TJSLP / CSR di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2024	II-159
Tabel 2.77	Isu Global dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional	II-158
Tabel 2.78	Isu Strategi dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional	II-159
Tabel 2.79	Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Cilacap	II-175
Tabel 3.1.	Kesesuaian Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD.....	III-4
Tabel 3.2.	Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3.	Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030.....	III-10
Tabel 3.5.	Keselaran Priorotas Daerah dan Prioritas Nasional	III-17
Tabel 3.6.	Keselaran Pentahapan RPJMD Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah.....	III-20
Tabel 3.7.	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029	III-30
Tabel 3.8.	Program Prioritas RPJMD dalam Mencapai Sasaran Daerah	III-32
Tabel 3.9.	Program Prioritas RPJMD dalam Mencapai Prioritas Kerja Bupati.....	III-42
Tabel 3.10.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cilacap.....	III-47
Tabel 3.11.	Dukungan Kabupaten Cilacap terhadap 35 Kegiatan yang Didelegasikan Kabupaten/Kota	III-61
Tabel 4.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupeten Cilacap	IV-18
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap	IV-70
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap	IV-71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-8
Gambar 2.1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-19
Gambar 2.3	Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-20
Gambar 2.4	PoU Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2.5	Posisi Relatif PoU Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-22
Gambar 2.6	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-28
Gambar 2.8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024	II-29
Gambar 2.9	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2.10	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	II-34
Gambar 2.11	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2.12	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2.13	Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2024	II-37
Gambar 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2.15	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024	II-40
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2.17	Posisi Relatif Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-42
Gambar 2.18	Garis Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.20	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.21	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-45
Gambar 2.22	Indeks Gini Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-45



Gambar 2.23	Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024.....	II-46
Gambar 2.24	PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-47
Gambar 2.25	Perkembangan Angka Pengangguran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2.26	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) abupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-49
Gambar 2.27	Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap, Jawa tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-50
Gambar 2.28	Posisi Relatif IPM Kab. Cilacap dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-50
Gambar 2.29	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun).....	II-51
Gambar 2.30	Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar (tahun) Tahun 2024	II-52
Gambar 2.31	Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-52
Gambar 2.32	Prevalensi Stunting Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-53
Gambar 2.33	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-54
Gambar 2.34	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.35	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun).....	II-58
Gambar 2.36	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Tahun).....	II-59
Gambar 2.37	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun).....	II-60
Gambar 2.38	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Tahun).....	II-60
Gambar 2.39	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-61
Gambar 2.40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-63
Gambar 2.41	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-64
Gambar 2.42	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-65
Gambar 2.43	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan	

	Mengarusutamakan Kebudayaan	
	Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024.....	II-66
Gambar 2.44	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024	II-67
Gambar 2.45	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024.....	II-68
Gambar 2.46	Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2.47	Perkembangan IPG Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-69
Gambar 2.48	Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.49	Perkembangan IKG Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-71
Gambar 2.50	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024.....	II-72
Gambar 2.51	Perkembangan Angka Ketergantungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-72
Gambar 2.52	Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-73
Gambar 2.53	Gambar 2. 53. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-74
Gambar 2.54	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-75
Gambar 2.55	PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-76
Gambar 2.56	Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-77
Gambar 2.57	Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-80
Gambar 2.58	TPAK Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-81
Gambar 2.59	TPAK Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-81
Gambar 2.60	TPAK Perempuan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-82
Gambar 2.61	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024.....	II-89
Gambar 2.62	Persentase Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-90
Gambar 2.63	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-91
Gambar 2.64	Angka Kecelakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II_92
Gambar 2.65	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024.....	II-92

Gambar 2.66	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)	II-93
Gambar 2.67	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2.68	Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2.69	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-97
Gambar 2.70	Indeks Integritas Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024	II-97
Gambar 2.71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.72	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-99
Gambar 2.73	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.74	Megatren Global 2045	II-158
Gambar 3.1	Logframe Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029	III-7
Gambar 3.2	Tema Pentahapan Strategi.....	III-19
Gambar 3.3	Arahan Kebijakan WP Cibanglinmas	III-71
Gambar 3.4	Pengembangan Wilayah Perkotaan Cilacap dan Sekitarnya	III-72
Gambar 3.5	Pengembangan Wilayah Perkotaan Kroya dan Sekitarnya	III-73
Gambar 3.6	Pengembangan Wilayah Perkotaan Sidareja dan Sekitarnya	III-73
Gambar 3.7	Pengembangan Wilayah Perkotaan Majenang dan Sekitarnya	III-74

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terencana dan tepat sasaran. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Landasan hukum perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kedua undang-undang ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan) yang disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan berkeadilan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi panduan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen RPJPD 2025-2045 dan sebagai pondasi dalam pembangunan jangka panjang.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa RPJMD disusun dengan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan RPJMD juga berorientasi pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dokumen ini kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan, yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang pada akhirnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Penetapan RPJMD melalui Perda bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun. Hal ini menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Perda RPJMD menjadi pedoman yang mengikat seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan aspirasi masyarakat.

Dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada tanggal 20 Februari 2025, maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah 2025-2030 dan penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Demikian pula dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang disematkan dalam visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kabupaten Cilacap wajib menyusun dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahun ke depan yang adaptif dan responsif.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180); dan
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Analisis akan dilakukan terhadap berbagai dokumen perencanaan. Dokumen-dokumen ini mencakup perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta dokumen perencanaan multi sektor. Dokumen multi sektor yang akan dianalisis antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, RPJMD daerah sekitar, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap, RTRW daerah sekitar, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dokumen lain yang akan dianalisis termasuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penjelasan hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap memedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.

2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap memedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

3. **RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap, yaitu pada periode pertama RPJMD. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045.

4. **RTRW Kabupaten Cilacap**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

5. **RTRW Provinsi Jawa Tengah**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

6. **RTRW Daerah Sekitar**

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan RTRW Daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

7. **RPJMD Daerah Sekitar**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Cilacap.

8. **RKPD**

RPJMD Kabupaten Cilacap setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

9. **Renstra-PD Tahun 2025-2029**

RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renstra-PD yang

merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

10. Dokumen KLHS

Dokumen KHLHS RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan permasalahan isu strategi, strategi dan arah kebijakan.

11. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. RIPJPID ini akan dipedomani dalam penyusunan RPJMD terutama dalam penyusunan isu strategis, strategi dan arah kebijakan.

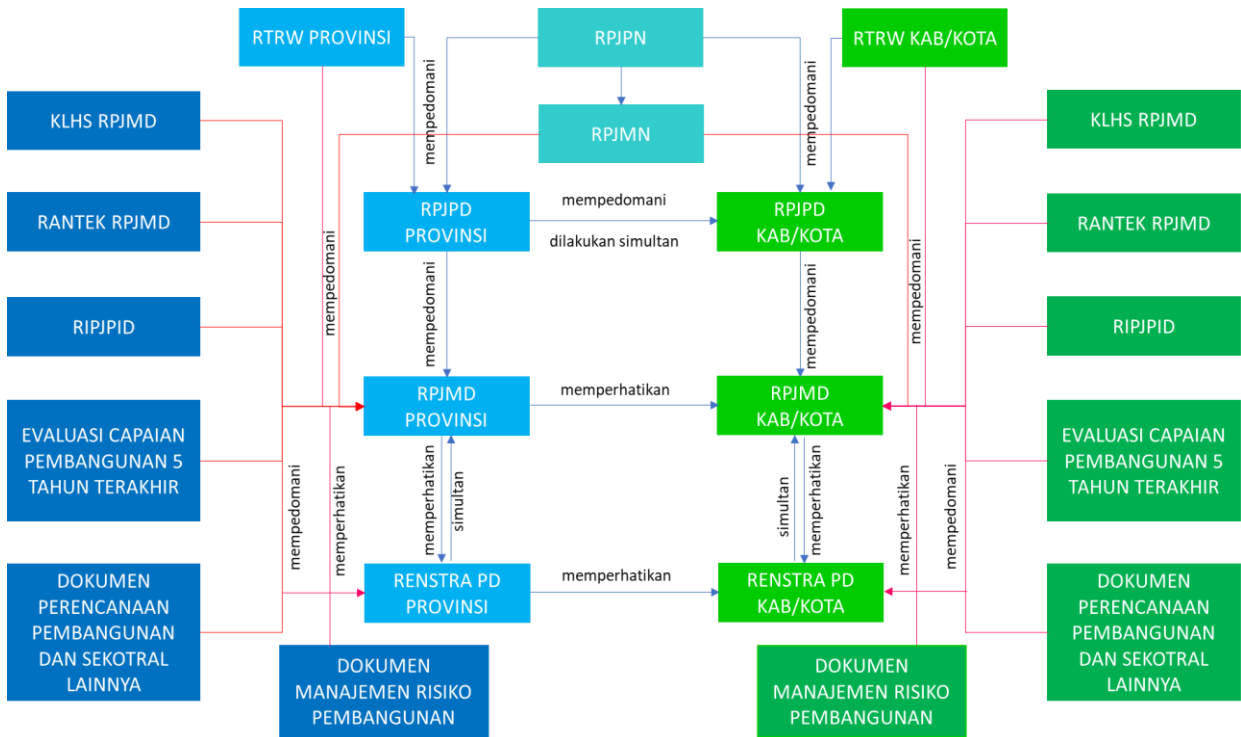
12. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

13. Dokumen Mitigasi Risiko

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan tidak terlepas dari berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penyusunan Dokumen Mitigasi Risiko menjadi sangat penting sebagai instrumen pendukung RPJMD guna memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai rencana induk jangka menengah sebagai acuan untuk merumuskan arah kebijakan tahunan. RPJMD menyajikan data dan informasi pembangunan daerah, meliputi kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang mendukung penapaaian Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap.
4. Menjadi acuan bagi stakeholder dalam melaksanakan kegiatan searah dengan pembangunan daerah
5. Menjadi acuan bagi desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis termuat dalam Bab ini.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai visi, misi, serta berisi tujuan dan sasaran bupati dan wakil bupati terpilih. Serta berisi strategi, arah kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan berisi indikator program, target dan pagu indikatif. Serta memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Cilacap dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara 108° 4' 30" – 109° 30' 30" (Garis Bujur Timur) serta 7° 30' - 7° 45' 20" (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sebesar 2.249,28 Km² (namun tidak termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,00 Km²) atau sekitar 6,48% dari luas Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan di sebelah utara, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran di sebelah barat, Kabupaten Kebumen di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Kabupaten Cilacap secara administratif dibagi menjadi 24 Kecamatan yang terdiri dari 269 Desa, 15 Kelurahan, 2.335 Rukun Warga (RW), dan 10.535 Rukun Tetangga (RT).

Secara topografi, ketinggian wilayah Kabupaten Cilacap berkisar antara 1-198 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayah Kabupaten Cilacap yang membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia terdapat sebuah pulau Nusakambangan yang memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak ± 30 kilometer. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Cilacap jika dilihat dari sisi ekonomi merupakan salah satu kontributor utama PDRB di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Pada tahun 2024, data BPS menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan, dengan dominasi sektor industri pengolahan dan pertambangan sebagai penyumbang terbesar. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai lebih dari Rp115 triliun, sementara PDRB per kapita tercatat sebesar Rp62,4 juta per tahun, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menempatkan Cilacap sebagai daerah dengan kekuatan ekonomi yang signifikan di luar wilayah metropolitan seperti Semarang dan Surakarta.

Salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Cilacap adalah keberadaan Pelabuhan Tanjung Intan, yang merupakan pelabuhan laut dalam strategis dan menjadi pintu gerbang ekspor-impor di

pesisir selatan Pulau Jawa. Pada tahun 2024, pelabuhan ini mencatat aktivitas bongkar muat sebesar 1,67 juta ton komoditas non-migas, naik sekitar 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Infrastruktur pelabuhan terdiri dari 8 dermaga dengan panjang total 833 meter, kolam pelabuhan seluas 180 hektare dengan tingkat pemanfaatan mencapai 70%, serta didukung lapangan penumpukan seluas 8,7 hektare dan gudang penyimpanan 7.100 m². Komoditas utama yang dilayani mencakup batubara, semen, pupuk, dan produk pertanian, menjadikan pelabuhan ini sebagai simpul logistik penting di Jawa.

Secara spasial, Kabupaten Cilacap memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di bagian barat dan berdekatan dengan Kabupaten Banyumas dan Kebumen di utara dan timur. Posisi ini menjadikan Cilacap sebagai penghubung antara wilayah barat dan tengah Jawa. Konektivitas ini semakin diperkuat dengan keberadaan infrastruktur jalan nasional dan pelabuhan, yang mempercepat arus barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja lintas wilayah. Hubungan spasial ini berperan dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan selatan Jawa dan membuka peluang pengembangan kawasan hinterland serta pusat pertumbuhan baru di perbatasan provinsi.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.849 Ha, sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian seluas 171.464 Ha dan sisanya seluas 42.385 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti jalan, perumahan, dan lain-lain. Lahan pertanian 171.464 Ha, sebagian besar digunakan untuk kepentingan lahan pertanian bukan sawah yaitu seluas 104.937 Ha untuk kebun/perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, padang rumput dan empang. Lahan digunakan untuk sawah seluas 66.527 Ha, baik sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut maupun untuk rawa lebak.

Dengan luas lahan tersebut menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai daerah produsen beras terbesar dan menjadi penyangga utama bagi ketahanan pangan di Jawa Tengah. Tahun 2023 produksi padi di Kabupaten Cilacap sebesar 766.923 ton dan memberikan kontribusi sekitar 8,5 persen terhadap produksi padi Jawa Tengah.

Infrastruktur juga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan pada sektor pertanian. Salah satunya yaitu jaringan irigasi tersier yang merupakan saluran pembawa air bagi lahan pertanian. Kondisi jaringan irigasi tersier usaha tani pada tahun 2024 tercatat hanya 21,62 persen atau 542.689 meter yang memiliki konstruksi permanen, sementara 78,38 persen atau 1.967.453 meter masih berupa konstruksi alam/tanah. Kondisi jaringan

irigasi tersier konstruksi permanen tersebut pada tahun 2024 tercatat 17,15 persen kondisi baik, 2,78 persen kondisi sedang, 1,19 persen rusak ringan dan 0,50 persen rusak berat.

Tabel 2. 1.
Kondisi Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani
di Kabupaten Cilacap Tahun 2024

NO	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Panjang (meter)	Konstruksi (meter)		Kondisi (meter)			
				Permanen	Tanah	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dayeuhluhur	2.463	129.395	29.865	99.530	23.285	3.885	1.067	1.628
2	Wanareja	4.234	136.161	30.588	105.573	27.583	1.850	1.054	102
3	Majenang	3.816	250.653	45.643	205.010	38.270	7.046	328	-
4	Cimanggu	3.758	52.617	14.905	37.712	12.446	2.287	173	-
5	Karangpucung	1.737	83.027	14.016	69.011	13.269	216	475	57
6	Cipari	2.207	139.549	14.028	125.521	12.384	1.649	-	-
7	Sidareja	1.380	94.331	19.135	75.197	15.448	1.557	816	1.314
8	Kedungreja	4.829	283.438	59.210	224.229	51.802	5.630	1.778	-
9	Patimuan	4.710	184.276	25.513	158.764	25.279	129	105	-
10	Gandrungmangu	5.161	215.032	40.081	174.951	31.913	4.541	552	3.075
11	Bantarsari	3.028	57.714	26.030	31.684	21.693	2.487	1.934	-
12	Kawunganten	4.470	31.292	28.050	3.243	23.085	4.727	238	-
13	Kampunglaut	2.324	3.880	2.476	1.404	1.917	105	147	308
14	Jeruklegi	1.234	13.307	7.366	5.942	4.822	1.864	680	-
15	Kesugihan	2.928	107.037	30.911	76.126	22.064	4.905	88	3.855
16	Adipala	3.896	64.482	28.495	35.987	18.610	5.451	3.029	1.406
17	Maos	2.013	99.057	21.957	77.100	16.337	3.904	1.345	371
18	Sampang	1.850	104.880	24.637	80.243	18.609	3.498	2.531	-
19	Kroya	2.987	73.541	25.311	48.230	17.952	5.772	1.022	566
20	Binangun	2.922	240.044	23.648,7	216.395	11.171	2.971	9.507	-
21	Nusawungu	3.330	122.852	25.304	97.548,3	20.384	3.774	1.203	-
22	Cilacap Selatan	188	700	350	350	-	350	-	-
23	Cilacap Tengah	500	2.027	1.973	54	923	1.000	50	-
24	Cilacap Utara	562	20.850	3.200	17.650	1.153	245	1.802	-
	Jumlah	66.527	2.510.142	542.689	1.967.453	430.394	69.839	29.920	12.681

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Komoditas tanaman pangan yang banyak dibudidaya di Kabupaten Cilacap antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Namun saat ini padi, jagung dan kedelai menjadi komoditas utama petani sementara komoditas lain masih belum banyak diminati. Rendahnya minat petani dan kurang intensnya penanaman tanaman palawija maka dari tahun ke tahun produksi dari tiap-tiap komoditi menjadi tidak menentu. Hal tersebut disebabkan harga jual palawija yang terlalu murah sehingga kurang menguntungkan bagi petani. Produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas

masing - masing komoditas. Luas panen dan produksi tanaman pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 2.
Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi Sawah	Ha	129.318	125.351	127.387	122.550	120.472
2	Padi Gogo	Ha	4.664	2.884	2.429	1.409	1.012
3	Jagung	Ha	11.885	8.699	8.724	7.610	7.403
4	Kedelai	Ha	2.472	3.057	2.222	4.988	1.003
5	Kacang Tanah	Ha	1.965	2.065	1.753	890	767
6	Kacang Hijau	Ha	5.496	4.818	613	3.450	2.637
7	Ubi Kayu	Ha	3.113	3.085	2.174	2.036	1.822
8	Ubi Jalar	Ha	434	425	330	277	321

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Tabel 2. 3.
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi Sawah	Ton	843.909	817.272	829.997	789.583	776.159,71
2	Padi Gogo	Ton	25.094	15.171	12.514	7.100	5.100
3	Jagung	Ton	74.073	56.970	61.421	53.811	52.039
4	Kedelai	Ton	3.036	3.849	2.828	6.250	1.359
5	Kacang Tanah	Ton	3.050	3.005	2.686	1.343	1.165
6	Kacang Hijau	Ton	7.150	6.261	838	4.140	3.721
7	Ubi Kayu	Ton	88.234	87.745	60.222	57.847	53.252
8	Ubi Jalar	Ton	12.607	11.303	9.298	8.615	9.767

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Luas panen tanaman pangan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Luas penen komoditas padi turun 9,33%, jagung turun 37,72%, kedelai turun 59,42%, kacang tanah turun 60,96%, kacang hijau turun 52,02%, ubi kayu turun 41,48% dan ubi jalar turun 25,91%.

Produksi tanaman pangan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan fluktuasi tiap tahun. Produksi padi dari sebanyak 869.003 ton pada tahun 2020 turun menjadi 781.260 ton pada tahun 2024 atau turun 10,1%. Produksi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela/ ubi kayu dan ubi jalar juga mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 46,13%.

Penurunan luas panen berkorelasi dengan penurunan produksi tanaman pangan. Penurunan ini disebabkan oleh faktor adanya serangan hama, jadwal tanam mundur yang dapat menyebabkan panen padi

terjadi diluar tahun periode. Bukan hanya itu saja, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terutama kondisi ketersediaan air. Penurunan produksi padi, jagung dan kedelai pada tahun 2024 disebabkan oleh Elnino. Kondisi lahan yang kering tidak memungkinkan untuk ditanami padi sehingga sebagian petani beralih komoditas lain (palawija) seperti kacang hijau. Lahan yang kering akibat elnino juga menyebabkan hasil ubi kayu dan ubi jalar bobot produksinya tidak optimal. Data BPS Kabupaten Cilacap menunjukan produktivitas padi sawah tahun 2021 sebesar 64,92 Kw/Ha, dan turun pada tahun 2022 menjadi 64,90 Kw/Ha, tahun 2023 64,27 Kw/Ha dan tahun 2024 64,31 Kw/Ha. Namun demikian upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan tetap menjadi perhatian diantaranya melalui gerakan pengendalian hama dan penyakit, peningkatan keterampilan petani dan pemanfaatan teknologi.

Produksi tanaman hortikultura secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi baik luas panen maupun jumlah prosuksi tiap komoditas. Hal ini dikarenakan pengaruh perubahan iklim dan minat petani.

Tabel 2. 4.
Luas Panen Hortikultura di Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cabe	Ha	1.151,00	1.283,00	1.820,00	1.614,53	1.608,01
2.	Jeruk Siam	Ha	61.271,00	43.981,00	68.289,00	46.296,00	55.742,00
3.	Sukun	Ha	12.492,00	8.597,00	6.940,00	9.622,00	6.361,00
4.	Manggis	Ha	65.424,00	3.760,00	5.541,00	84.359,00	80.881,00
5.	Pepaya	Ha	43.020,00	70.529,00	91.091,00	78.445,00	73.627,00
6.	Semangka	Ha	156,00	117,50	60,00	144,50	119,60
7.	Jahe	Ha	250.702,00	501.181,00	306.821,00	189.514,00	159.258,00
8.	Jamur	Ha	20.150,00	36.189,00	22.262,00	31.197,60	35.362,68
9.	Pisang	Ha	482.123,00	609.466,00	473.580,00	456.985,00	450.711,00
10.	Bawang Merah	Ha	156,00	93,50	50,20	113,53	73,58

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Tabel 2. 5.
Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cabe	Ton	9.832,10	12.856	13.569	9.635,77	11.168,59
2.	Jeruk Siam	Ton	3.752,60	3.180	3.723,52	1.968,84	3.246,05
3.	Sukun	Ton	1.001,70	503	337,8	1.123,96	2.069,47
4.	Manggis	Ton	5.149,20	184	149,12	20.389,07	37.470,32
5.	Pepaya	Ton	3.416,40	2.654	4.181,03	8.595,35	7.567,00
6.	Semangka	Ton	3.353,10	1.521	683,2	1.366,45	1.564,45
7.	Jahe	Ton	766,2	1.020	521,31	447,11	521,74
8.	Jamur	Ton	99,73	512	808,57	427,99	429,79
9.	Pisang	Ton	34.097,60	51.324,40	34.404,90	42.607,80	49.303,30
10.	Bawang Merah	Ton	830,3	768,4	458,26	951,12	674,12

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Jumlah produksi sepuluh komoditas hortikultura mengalami fluktuasi setiap tahun. Produksi komoditas cabe, sukun, manggis, papaya, jamur dan pisang mengalami kenaikan sejak 2020 sampai dengan 2024 dengan kenaikan tertinggi yaitu komoditas manggis. Kenaikan ini salah satunya sebagai dampak elnino, cuaca yang kering membantu tanaman manggis dan semangka untuk berbunga dan berbuah optimal. Selain itu adanya bantuan sarana dari pemerintah juga menjadi faktor pendukung kenaikan produksi.

Sementara untuk komoditas jeruk siam, semangka, jahe dan bawang merah mengalami penurunan pada akhir 2024. Penurunan produksi ini disebabkan adanya perubahan iklim yang diikuti juga dengan serangan hama tanaman. Adanya perubahan iklim ini juga membuat petani mengganti ke komoditas hortikultura yang lain. Penggunaan benih yang tidak berlabel dan terlambat pindah tanam juga menjadi penyebab penurunan produksi. Beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan diantaranya dengan pemberian bantuan pestisida, benih berlabel dan pembinaan kepada kelompok tani.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi perkebunan yaitu tanaman kelapa dalam, kelapa deres, kopi, kakao, pala, cengkeh, dan karet. Produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6.
Produksi Tanaman Perkebunan di Kab. Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kelapa dalam	Ton	14.172,97	13.939,63	14.034,14	14.448,06	12.999,11
2	Kelapa deres	Ton	43.825,90	43.957,76	44.313,68	44.316,81	45.658,52
3	Kopi	Ton	144,08	135,13	153,92	153,67	147,71
4	Kakao	Ton	73,94	64,04	85,34	85,36	81,28
5	Pala	Ton	65,58	66,67	95,91	99,22	117,33
6	Cengkeh	Ton	360,81	333,14	390,67	381,79	472,45
7	Karet	Ton	3.187,17	3.104,68	3.293,27	3.289,21	3.721,26
8	Lada	Ton	40,28	37,58	45,59	45,60	38,40

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Tabel 2. 7.
Luas Area Panen Tanaman Perkebunan di Kab. Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kelapa dalam	Ha	12.455,44	12.597,94	12.746,94	12.746,94	13072,56
2	Kelapa deres	Ha	4.817,03	4.814,03	4.839,03	4.839,03	4.789,23
3	Kopi	Ha	201,13	207,63	227,23	227,23	229,27
4	Kakao	Ha	82,64	93,17	107,27	107,27	103,82
5	Pala	Ha	250,2	250,2	366,2	378,2	481,49
6	Cengkeh	Ha	966,79	966,79	1044,29	1044,29	1003,42
7	Karet	Ha	2.456,62	2.510,62	2.596,62	2.596,62	2.723,82
8	Lada	Ha	64,24	64,24	74,24	74,24	67,24

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, 2025

Berdasarkan tabel tersebut komoditas perkebunan yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2024 yaitu kakao dan karet, sementara komoditas lainnya fluktuatif. Penurunan produksi pada komoditas akibat petani beralih menanam komoditas yang sedang bagus baik dari segi harga dan permintaan. Penurunan ini juga akibat banyaknya tanaman yang sudah berusia tua tetapi belum dilakukan penggantian seperti kelapa, adanya hama penyakit dan alokasi pupuk subsidi komoditas perkebunan yang terbatas. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi petani khususnya terkait penanganan hama dan budidaya yang baik.

Beberapa jenis komoditas peternakan yang perkembangannya cukup baik adalah sapi/kerbau, kambing/domba dan ayam/itik/unggas. Populasi sapi potong tahun 2024 menurun sebesar 1.032 ekor dari tahun 2023. Hal ini akibat adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada tahun sebelumnya menyebabkan banyak petani/peternak masih belum memulai kembali usahanya. Perkembangan

populasi hewan ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 8.
Jumlah Populasi Ternak di Kab. Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sapi Potong	Ekor	13.364	14.458	15.312	16.824	15.792
2	Sapi Perah	Ekor	31	20	16	20	19
3	Kerbau	Ekor	1.360	1.353	776	699	364
4	Kambing	Ekor	149.266	161.251	142.968	159.431	156.954
5	Kambing Perah	Ekor	-	-	2.278	1.986	1.415
6	Domba	Ekor	36.399	37.269	36.041	41.485	38.521
7	Kuda	Ekor	257	277	242	229	160
8	Babi	Ekor	1.372	1.796	1.313	1.268	1.727
9	Kelinci	Ekor	12.165	13.618	15.469	15.576	1.643
10	Ayam Kampung	Ekor	1.187.296	1.156.853	1.129.742	1.105.538	1.113.448
11	Ayam Layer	Ekor	305.701	308.497	266.326	250.829	358.875
12	Itik	Ekor	268.726	285.958	288.728	280.139	326.649
13	Angsa	Ekor	5.189	5.668	5.245	4.883	3.558
14	Puyuh	Ekor	97.242	88.492	78.467	100.360	208.542
15	Ayan Ras Pedaging	Ekor	5.574.168	6.288.714	6.237.853	6.193.975	6.608.557

Sumber: Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, produksi daging sapi dan kerbau menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Realisasi produksi tahun 2021 sebesar 1.547.000, mengalami peningkatan sebesar 9,64% dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 1.410.974kg. Produksi tahun 2022 meningkat sebesar 6,72% menjadi 1.651.000 kg dan tahun 2023 kembali meningkat 3,87% menjadi 1.714.920 kg, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,03% menjadi 1.680.142 kg.

Produksi daging kambing dan domba pada periode 2020-2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, produksi mencapai 323.904 kg, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 19,73%, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 54,62%, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing 6,65% dan 5,49%. Pencapaian produksi daging sapi/kerbau maupun kambing/domba sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi ternak.

Perkembangan produksi daging unggas selama 2020-2024 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 produksi daging unggas sebanyak 5.952.596 kg dan secara konsisten meningkat menjadi 6.643.145 kg pada tahun 2024 . Produksi telur pada tahun 2020-2024 cukup berfluktuasi namun cenderung meningkat.

Sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebesar 129.858 kg dari tahun 2020, kemudian secara konsisten meningkat menjadi 7.565.311 kg pada tahun 2024. Perkembangan produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9.
Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Kab. Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sapi/ Kerbau	Kg	1.410.974	1.547.000	1.651.000	1.714.920	1.680.142
2	Kambing/ Domba	Kg	323.904	260.000	402.000	375.264	354.672
3	Ayam/ Itik/ Unggas	Kg	5.952.596	6.404.000	6.949.000	6.659.003	7.357.387
4	Produksi Telur	Kg	4.227.858	4.098.000	4.837.000	7.577.000	9.791.428
5	Susu Sapi	Liter	32.200	34.500	14.400	20.805	19.765

Sumber: Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2025

Menurunnya populasi dan produksi peternakan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan kematian ternak. Tingkat kesakitan ternak khususnya ternak sapi/kerbau, kambing, dan domba cukup tinggi. Penyakit-penyakit tersebut antara lain demam 3 hari, bloat/kembung, parasite, cacing hati, scabies, dan pink eye/mata merah.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang memiliki pantai dan kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 201,9 kilometer dan merupakan kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Tengah.

Berdasarkan data panjang garis pantai Kabupaten Cilacap, diketahui sepanjang 105 kilometer diantaranya berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan sisanya sepanjang 96,9 kilometer merupakan garis pantai yang berhadapan dengan Pulau Nusakambangan serta Kawasan Segara Anakan.

Daerah perikanan juga terdapat potensi adanya produksi udang Vaname berada pada Kecamatan Cilacap Selatan yang mencapai 30,057 Ton, serta didukung melalui adanya infrastruktur perikanan berupa 1 PPSC, 18 Cold storage, 10 TPI dan 4 SPBU Nelayan.

Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai kawasan pengembangan perikanan nasional di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan, mengingat potensi besar yang dimiliki baik di sektor perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Meskipun produksi perikanan budidaya masih lebih rendah dibandingkan perikanan tangkap, kedua sektor ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap mencapai 42.974,77 ton, mengalami kenaikan berkat dukungan stimulus dari pemerintah, seperti bantuan BBM untuk mengendalikan inflasi yang diberikan kepada 2.606 nelayan (masing-masing

menerima Rp 300.000) serta bantuan sarana konverter kit kepada 1.921 nelayan.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan dengan capaian 16.106,64 ton di tahun 2023. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya minat masyarakat terhadap konsumsi ikan air tawar, seperti lele, gurami, dan nila, serta keberhasilan program bantuan sarana produksi perikanan budidaya yang diberikan kepada para pembudidaya ikan. Dengan dukungan pemerintah dan antusiasme masyarakat, Kabupaten Cilacap terus memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan perikanan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan menjadi 47.967,17 ton, Kenaikan produksi perikanan tangkap disebabkan karena adanya penambahan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC) dan peningkatan pendataan produksi perikanan tangkap akibat penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan menjadi 17.367,24 ton. Peningkatan ini tidak terlalu signifikan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan akibat perubahan iklim sehingga kondisi menjadi kering dan susah air untuk dilakukan budidaya ikan. Peningkatan produksi perikanan budidaya disebabkan peningkatan bantuan sarana perikanan budidaya kepada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 10.
Produksi Perikanan Kabupaten Cilacap

Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Realisasi Capaian tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan tangkap	Ton/tahun	26.568,99	25.759,12	27.129,54	42.974,77	47.967,17
Produksi Perikanan budidaya	Ton/tahun	13.887,72	14.339,04	15.610,56	16.106,64	17.367,24

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, 2025

Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi wisata baik alam maupun buatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2022 tentang Penggolongan Jenis Obyek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Terdapat 20 daya tarik wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap yang masuk ke dalam Perbup, di luar Perbup terdapat 45 daya tarik wisata yang dikelola oleh perorangan dan organisasi masyarakat, sehingga daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 65 daya tarik wisata.

Kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kunjungan wisata pada tahun sebanyak 2020 472.384 orang. Mulai tahun 2021 kondisi sudah semakin membaik. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata menjadi 846.380 kunjungan pada tahun 2021, tahun 2022 semakin meningkat menjadi 1.069.293 kunjungan wisata. Tahun 2023 kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan menjadi 1.450.268 atau sebesar 35,63 persen atau naik 380.975 orang. Namun pada tahun 2024 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 1.320.706. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan minat kunjungan wisatawan sebesar 129.562 orang atau menurun 8,93 persen di banding tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, tren pariwisata yang bergeser, maupun faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cilacap.

Destinasi wisata yang dikelola secara langsung oleh Kabupaten Cilacap adalah Destinasi Wisata Air Panas Cipari, sedangkan destinasi wisata yang lain masing-masing dikelola oleh pihak lain karena terkait dengan kewenangan pengelolaannya.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Cilacap. Sampai akhir tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/794/27/2022 tanggal 17 Desember 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan 29 Desa Wisata, sedangkan pada tahun 2023 bertambah 1 Desa Wisata berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/243/27/Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 sehingga jumlah Desa Wisata yang ada di Kabupaten Cilacap menjadi Desa Wisata yang akan dikembangkan. Jumlah Desa Wisata tahun 2024 masih bertahan di angka 30 Desa Wisata sama seperti tahun sebelumnya. Meskipun belum ada penambahan secara kuantitas, desa-desa wisata ini terus mengalami peningkatan dalam hal kualitas pelayanan dan fasilitas, 30 desa wisata tersebut yaitu:

1. Desa Wisata Samudera Mandiri Desa Widarapayung, Kecamatan Binangun;
2. Desa Wisata Karangbanar Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu;
3. Desa Wisata Cimendaway Indah Desa Datar, Kecamatan Dayeuhluhur;
4. Desa Wisata Curug Geulis Desa Desa Cisuru, Kecamatan Cipari;
5. Desa Wisata Genta Wisata Desa Gentsarai, Kecamatan Kroya;

6. Desa Wisata Wagir Indah Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala;
7. Desa Wisata Bojong Tirta Indah Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja;
8. Desa Wisata Rahayu Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya;
9. Desa Wisata Lewih Manggu Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja;
10. Desa Wisata Talabunsa Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung;
11. Desa Wisata Kumandang Wisata Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Selatan;
12. Desa Wisata Tambaksari Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja;
13. Desa Wisata Alam Lestari Desa Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur;
14. Desa Wisata Curug Tonjong Panto Cinagara Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang;
15. Desa Wisata Kamulyan Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;
16. Desa Wisata Jambusari Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi;
17. Desa Wisata Pesona Serayu Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan;
18. Desa Wisata Bunton Desa Bunton, Kecamatan Adipala;
19. Desa Wisata Ekosistem Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur;
20. Desa Wisata Salam Sari Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu;
21. Desa Wisata Cipari Desa Cipari, Kecamatan Cipari;
22. Desa Wisata Karangsari Desa Karangsari, Kecamatan Adipala;
23. Desa Wisata Sindang Kencana Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;
24. Desa Wisata Padangbumi Kamulyan Desa Salebu, Kecamatan Majenang;
25. Desa Wisata Karangmangu Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya;
26. Desa Wisata Mandala Giri Desa Mandala, Kecamatan Jeruklegi;RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 II-136
27. Desa Wisata Kompas Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu;
28. Desa Wisata Mentasan Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;
29. Desa Wisata Sport Center Desa Panisihan, Kecamatan Maos; dan
30. Desa Wisata Bhumi Nawasena Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung.

Tabel 2. 11.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Daya Tarik Wisata	dtw	41	32	45	65	60
2.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	472.384	846.380	1.069.293	1.450.268	1.320.706
3.	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	desa	17	22	29	29	30

Sumber: Disparpora Kabupaten Cilacap, 2025

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan potensi untuk penurunannya cukup besar baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga diharapkan untuk lebih bijaksana dan terarah dalam pemanfaatannya. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan.

a. Daya dukung Daya Tampung Air

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar WHO (1.000 m³/kapita/tahun) maupun Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun. Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian dihitung berdasarkan luasan dan Standar Nasional Indonesia sebesar 10.368 m³/ha/tahun. Kebutuhan air untuk keperluan industri sebesar 23.652 m³/ha/tahun.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029, Daya dukung air dari potensi air permukaan dan mata air memiliki status sedang atau bersyarat dengan nilai 2,08 pada tahun 2022, dan turun menjadi 2,01 pada tahun 2029. Untuk menghitung nilai status daya dukung air, diperoleh dari memanfaatkan seluruh potensi air yang ada di Kabupaten Cilacap. Potensi ketersediaan air permukaan didapat dari potensi debit air sungai yang dapat dimanfaatkan dan mata air totalnya 2.886.605.712 m³/th. Potensi CAT menjadi cadangan potensi ketersediaan air. Guna pemanfaatan potensi sumber daya air maka diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang memadai.

Perhitungan neraca air berbasis grid dilakukan dengan dasar pembagian grid ukuran 150 m x 150 m didapat luasan dalam 1 grid yaitu 2,25 Ha yang di mana sesuai dengan kedetailan yang diamanatkan dalam pedoman penyusunan D3TLH. Setelah dilakukan distribusi grid kedalam

wilayah kabupaten sehingga didapat yang selanjutnya dilakukan analisa lebih lanjut terkait kecenderungan neraca air dapat dilihat dalam bentuk spasial kondisi neraca air tahun 2022, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Tabel 2. 12.
Neraca Air Kabupaten Cilacap Berbasis Grid Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan Air 2022 (m3/tahun)	Kebutuhan Air 2022 (m3/tahun)	Selisih	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
Adipala	93.493.512	117.347.478	-23.853.966	25,51	74,49
Bantarsari	136.773.217	58.272.098	78.501.118	57,40	42,60
Binangun	68.960.132	76.230.052	-7.269.920	10,54	89,46
Cilacap Selatan	175.078.688	10.532.839	164.545.849	93,98	6,02
Cilacap Tengah	54.137.503	36.696.857	17.440.646	32,22	67,78
Cilacap Utara	31.147.892	22.715.719	8.432.173	27,07	72,93
Cimanggu	178.703.360	89.748.741	88.954.619	49,78	50,22
Cipari	121.888.884	102.782.907	19.105.977	15,67	84,33
Dayeuhluhur	207.588.403	100.247.263	107.341.140	51,71	48,29
Gandrungmangu	158.554.868	113.745.641	44.809.227	28,26	71,74
Jeruklegi	127.412.118	20.789.234	106.622.884	83,68	16,32
Kampung Laut	161.513.856	45.437.681	116.076.175	71,87	28,13
Karangpucung	142.652.036	35.403.716	107.248.320	75,18	24,82
Kawunganten	162.074.328	111.945.882	50.128.446	30,93	69,07
Kedungreja	121.775.366	107.096.455	14.678.911	12,05	87,95
Kesugihan	92.953.213	92.965.142	-11.929	0,01	99,99
Kroya	75.073.107	71.145.984	3.927.124	5,23	94,77

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap 2025-2029

Terdapat 9 dari 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang persentase terlampaui daya dukung airnya lebih luas daripada wilayah yang belum terlampaui pada tahun 2022. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cipari, Gandrungmangu, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kroya, Kecamatan Maos, Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Sampang dan Kecamatan Sidareja.

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standart WHO (1.000 m3/kapita/tahun) maupun Standart Nasional Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8 m3/kapita/tahun. Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian dihitung berdasarkan luasan dan Standart Nasional Indonesia sebesar 10.368 m3/ha/tahun. Kebutuhan air untuk keperluan industri sebesar 23.652 m3/ha/tahun. Secara lebih rinci perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13.
Daya Dukung Air Kabupaten Cilacap Tahun 2022, Tahun 2025 dan Tahun 2029

Uraian	Satuan	Kebutuhan Air	Volume 2022	Daya Dukung Air 2022	Volume 2025	Daya Dukung Air 2025	Volume 2029	Daya Dukung Air 2029
		(m ³ /orang/thn)						
		(m ³ /ha/thn)						
Jumlah Penduduk	Jiwa	43,8	1.988.622	87.101.644	2.057.106	90.101.244	2.152.101	94.262.011
Luas Pertanian	Ha	10.368	120.491	1.249.250.688	117.237	1.215.513.216	117.237	1.215.513.216
Luas Industri	Ha	23.652	2.159	51.071.764	5.286	125.024.472	5.286	125.024.472
Jumlah Kebutuhan air (DA)				1.387.424.095		1.430.638.932		1.434.799.699
Potensi 20 % Air Sungai Permukaan				2.795.939.712		2.795.939.712		2.795.939.712
Potensi Mata Air				90.666.000		90.666.000		90.666.000
Total Ketersediaan dari debit sungai dan mata air (SA)				2.886.605.712		2.886.605.712		2.886.605.712
SA-DA				1.499.181.617		1.455.966.780		1.451.806.013
				Surplus		Surplus		Surplus
SA/DA				2,08		2,02		2,01

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya dukung air dari potensi air permukaan dan mata air memiliki status sedang atau bersyarat dengan nilai 2,08 pada tahun 2022, dan turun menjadi 2,01 pada tahun 2029. Untuk menghitung nilai status daya dukung air, diperoleh dari memanfaatkan seluruh potensi air yang ada di kabupaten Cilacap. Potensi ketersediaan air permukaan didapat dari potensi debit air sungai yang dapat dimanfaatkan dan mata air totalnya 2.886.605.712 m3/th. Potensi CAT menjadi cadangan potensi ketersediaan air. Guna pemanfaatan potensi sumber daya air maka diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang memadai.

b. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Perhitungan data dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi berdasarkan data BPS Kabupaten Cilacap. Produksi padi baik yang berasal dari sawah maupun ladang di Kabupaten Cilacap mengalami fluktuatif tahun 2022, dengan luas pertanian sebesar 60.721,00 Ha dan produksi padi 6,4 ton/ Ha, maka jumlah produksi mencapai 388.614,40 ton. Setelah mengetahui jumlah produksi padi, maka dapat ditinjau daya dukung pangan di Kabupaten Cilacap. Konsumsi beras mulai tahun 2022 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 81,23 kg/kap/tahun.

Tabel 2. 14.
Perhitungan Daya Dukung Lahan Pangan Kabupaten Cilacap
Tahun 2022 dan 2029

Uraian	2022	2029
Luas Pertanian (Ha)	60.721,00	60.721,00
Jumlah produksi (ton) BPS 2023 (6,4 ton/Ha)	388.614,40	388.614,40
Konversi gabah kering giling ke Beras (62,74%)	243.816,67	243.816,67
Jumlah penduduk Cilacap	1.988.622	2.152.101
Angka Konsumsi beras Bapanas 2023 (81,23 kg/kap/tahun)	81,23	81,23
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	161.535,77	174.815,14
DDL untuk pangan	1,51	1,39
Surplus beras (ton)	82.280,91	69.001,53

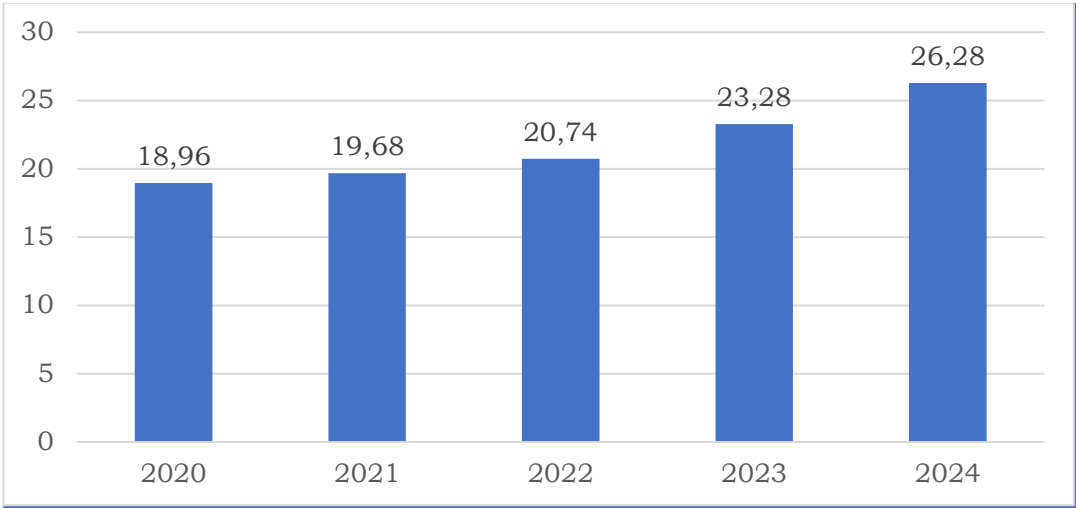
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap 2025-2029

Daya dukung lahan pangan di Kabupaten Cilacap ditinjau dari komoditas beras berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui mengalami surplus atau kelebihan beras pada tahun 2022-2029. Pada tahun 2022, konversi gabah ke beras 243.816,67 ton, dengan kebutuhan konsumsi 161.535,77 ton, sehingga menghasilkan daya dukung lahan pangan sebesar 1,51 dan pada tahun 2022 Kabupaten Cilacap surplus sebanyak 82.280,91 ton.

Pada tahun 2029, jumlah produksi beras di Kabupaten Cilacap sebesar 388.614,40 ton dengan kebutuhan konsumsi 174.815,14 ton, sehingga menghasilkan daya dukung lahan pangan sebesar 1,39 artinya pada tahun 2029 Kabupaten Cilacap surplus beras, namun tingkat surplusnya menurun dibandingkan tahun 2022. Surplus beras tahun 2029 sebanyak 69.001,53 ton. Kondisi yang terus menurun ini, harus diperhatikan, perlu ada upaya peningkatan produktivitas beras di masa yang akan datang. Salah satunya adalah meningkatkan intensifikasi pertanian dan meningkatkan nilai rendemen, agar nilai daya dukung lahan pangan dapat bertahan pada nilai 1,63 dan surplus beras relative stabil.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Persentase rumah tangga perkotaan di Kabupaten Cilacap yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan mengalami kenaikan konsisten dari 18,96% pada 2020 menjadi 26,28% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penyediaan layanan air minum aman. Pada awal periode, 2020–2021, kenaikan masih relatif kecil karena pelaksanaan proyek infrastruktur air minum terpengaruh pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19, meskipun pemerintah daerah dan PDAM tetap melanjutkan perluasan sambungan rumah baru. Memasuki 2021–2022, pertumbuhan mulai menguat seiring pemulihan kegiatan pembangunan, percepatan program perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan adanya subsidi sambungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lonjakan yang lebih besar pada 2022–2023 dipicu oleh investasi signifikan dalam pembangunan jaringan pipa dan peningkatan kapasitas produksi air baku, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air minum yang aman. Peningkatan terbesar terjadi pada 2023–2024, ketika sejumlah proyek jaringan pipa utama selesai dibangun dan regulasi kualitas air non-perpipaan diperketat, mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke layanan perpipaan. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan sinergi antara kebijakan, pendanaan, dan perubahan perilaku masyarakat, meskipun cakupan layanan masih perlu terus diperluas untuk memenuhi target nasional.



Gambar 2. 1.
**Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024**

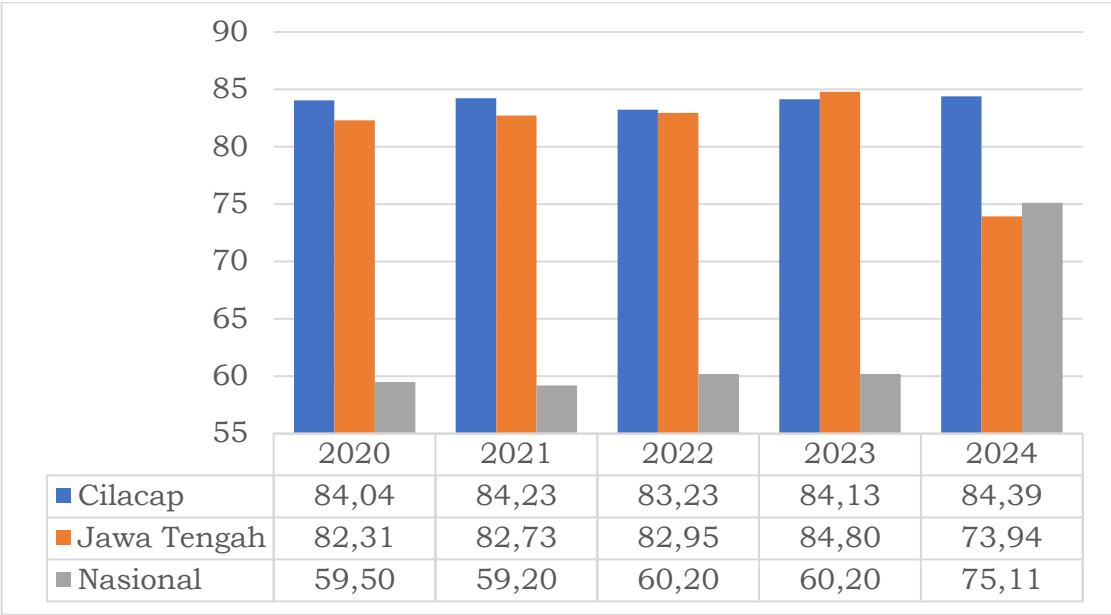
Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2020–2024 dari Badan Pangan Nasional (2025), Kabupaten Cilacap secara konsisten mencatat nilai IKP lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah maupun nasional. Pada 2020, IKP Cilacap berada di angka 84,04, sedikit meningkat pada 2021 menjadi 84,23, dan mencapai 84,69 pada 2024. Kenaikan yang cenderung stabil ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sementara itu, IKP Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif dari 82,31 pada 2020 menjadi 84,80 pada 2023, meskipun pada 2024 turun menjadi 73,94 yang kemungkinan besar disebabkan oleh revisi metodologi penghitungan atau adanya gangguan signifikan pada rantai pasok pangan di tingkat provinsi.

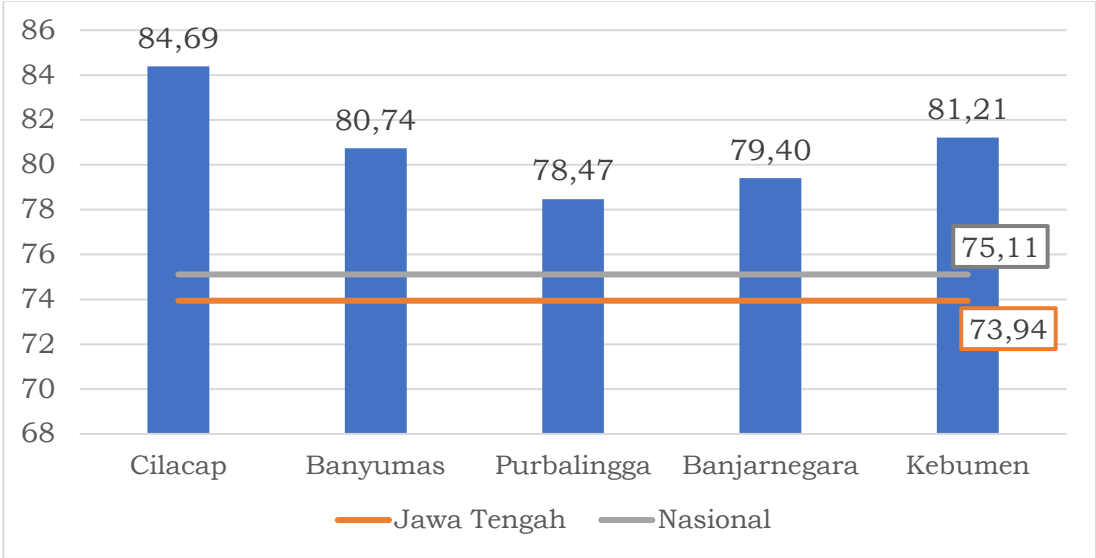
Secara nasional, IKP menunjukkan tren peningkatan dari 59,50 pada 2020 menjadi 60,20 pada 2023, lalu melonjak signifikan menjadi 75,11 pada 2024. Kenaikan tajam di tahun terakhir ini kemungkinan dipengaruhi oleh penguatan program nasional ketahanan pangan, seperti diversifikasi pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah, dan perbaikan distribusi pangan lintas wilayah yang lebih merata. Di sisi lain, penurunan tajam IKP Jawa Tengah pada 2024 menjadi 73,94 dari 84,80 pada tahun sebelumnya berpotensi terkait dengan faktor gangguan produksi pangan akibat anomali iklim, seperti kemarau panjang atau banjir, yang berdampak pada

ketersediaan pangan lokal. Berbeda dengan itu, Kabupaten Cilacap justru berhasil mempertahankan IKP yang relatif stabil hingga 84,69 di 2024, mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki ketahanan pangan yang lebih tangguh berkat kombinasi produksi pangan lokal yang kuat, infrastruktur distribusi yang memadai, serta program intervensi gizi yang konsisten. Perbedaan tren ini menunjukkan bahwa Cilacap mampu meredam dampak gangguan pada skala provinsi dan nasional melalui kemandirian pangan daerah serta koordinasi lintas sektor yang baik.



Gambar 2. 2.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

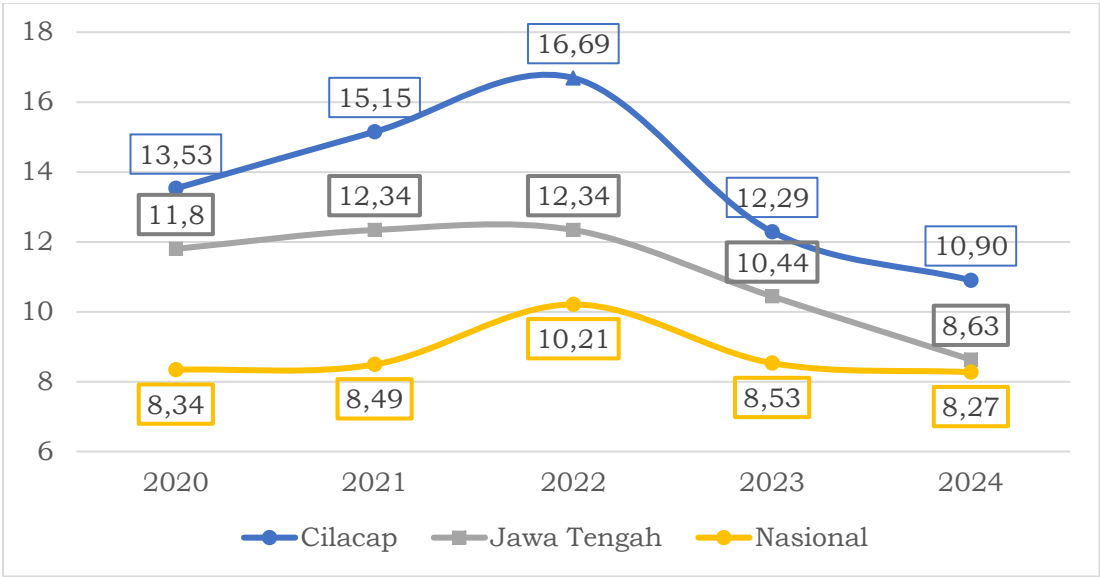
Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024, Kabupaten Cilacap menunjukkan posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, yaitu mencapai angka 84,69. Angka ini jauh berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,94) maupun nasional (75,11). Dibandingkan kabupaten tetangga seperti Banyumas (80,74), Kebumen (81,21), Banjarnegara (79,40), dan Purbalingga (78,47), Kabupaten Cilacap unggul signifikan. Hal ini mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif lebih baik, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan. Capaian tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat, mengingat dinamika wilayah sekitar menunjukkan kondisi yang masih di bawah rerata kabupaten Cilacap. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 3.
Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

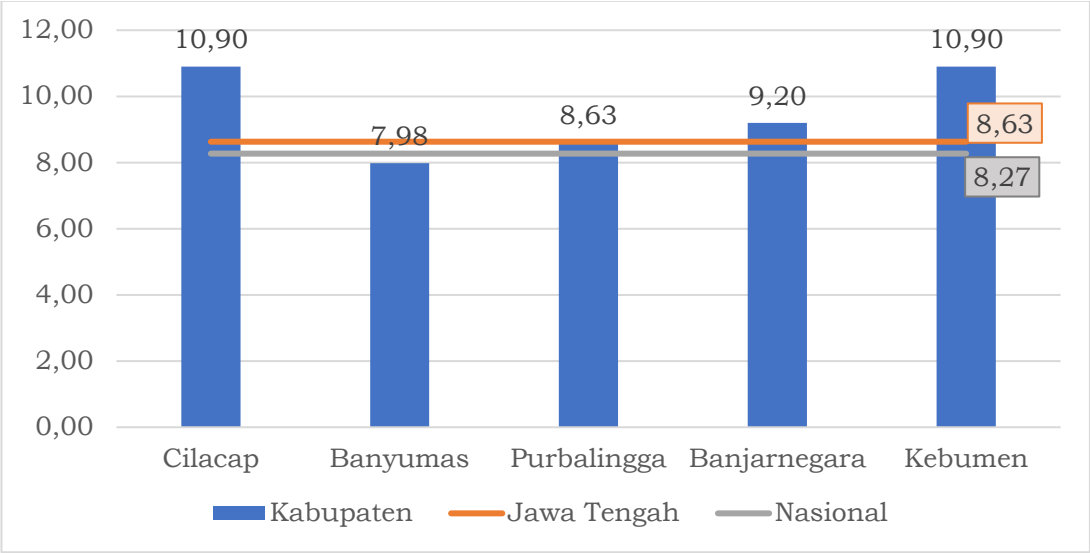
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dari Badan Pangan Nasional (2025), Kabupaten Cilacap menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun pada akhir periode. Pada 2020, angka PoU di Cilacap berada di 13,53% dan meningkat cukup signifikan menjadi 15,15% pada 2021, lalu mencapai puncak 16,69% pada 2022. Peningkatan pada periode ini kemungkinan disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang memengaruhi daya beli masyarakat, distribusi pangan, dan ketersediaan pangan berkualitas, sehingga risiko kekurangan gizi meningkat. Setelah 2022, PoU Cilacap menurun tajam menjadi 12,29% pada 2023 dan 10,90% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pangan, penguatan program perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi yang meningkatkan daya beli masyarakat.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, tren PoU provinsi juga menunjukkan kenaikan dari 11,8% pada 2020 menjadi 12,34% pada 2021–2022, sebelum turun ke 10,44% pada 2023 dan 8,63% pada 2024. Sementara itu, tingkat PoU nasional relatif lebih rendah dari Cilacap dan Jawa Tengah di seluruh periode, meski juga mengalami lonjakan pada 2022 hingga 10,21% sebelum menurun kembali menjadi 8,27% di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Cilacap memiliki capaian penurunan signifikan pasca-2022, tingkat PoU-nya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga upaya penguatan ketahanan pangan dan pemerataan akses pangan bergizi tetap menjadi prioritas penting.



Gambar 2. 4.
PoU Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan grafik *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tahun 2024, Kabupaten Cilacap memiliki tingkat PoU sebesar 10,90%, sama dengan Kabupaten Kebumen, dan menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten sekitar seperti Banyumas (7,98%), Purbalingga (8,63%), dan Banjarnegara (9,20%). Angka ini juga lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah (8,63%) dan nasional (8,27%). Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Cilacap mengalami penurunan PoU signifikan dibanding tahun sebelumnya, prevalensinya masih relatif tinggi di kawasan sekitarnya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan pemerataan akses pangan bergizi, terutama di wilayah atau kelompok masyarakat rentan. Faktor penyebabnya dapat mencakup ketergantungan sebagian masyarakat pada komoditas pangan tertentu, distribusi pangan yang belum merata antarwilayah dalam kabupaten, serta kondisi sosial ekonomi yang masih beragam di perkotaan dan perdesaan. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa strategi penurunan PoU di Cilacap perlu difokuskan pada penguatan kemandirian pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan akses ekonomi masyarakat terhadap pangan berkualitas, agar posisinya dapat setara atau lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional.



Gambar 2. 5.
Posisi Relatif PoU Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekita
Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Pada aspek kemandirian energi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi salah satu strategi penting, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang belum terjangkau jaringan listrik nasional secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga pada konteks lokal, kemudahan perawatan, serta pemberdayaan masyarakat. Berikut ini jenis pengembangan sumber energi terbarukan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 15.
Jenis Pemanfaatan Energi Kabupaten Cilacap

No.	Jenis Pemanfaatan Energi	Lokasi	Peruntukan	Kapasitas
1.	PLTS	Desa Mrenek, Kecamatan Maos	Sebagai Sumber Energi untuk kegiatan di Kawasan Pertanian (Hidroponik, Sumber cahaya)	4,4 kWp
2.	PLTS	Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan	Digunakan untuk menggerakkan kincir air pada kolam budidaya ikan sidat	4,4 kWp
3.	PLTS	Desa Adiraja Kecamatan Adipala	Pembangkit ini digunakan untuk menggerakkan Pompa Air Tenaga Surya yang dimanfaatkan untuk Pengairan Lahan Sawah	12 kVA
4.	Biogas	Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu	Pemanfaatkan limbah kotoran Sapi menjadi Biogas dan pupuk organik	Tahun 2024 2 unit Biogas yang dapat dimanfaatkan untuk 12 Kepala Keluarga

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Kabupaten Cilacap telah diterapkan di berbagai sektor dan wilayah dengan inovasi yang beragam. Di Desa Mernek, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 4,4 kWp dimanfaatkan sebagai sumber energi utama seluruh kegiatan di kawasan wisata pertanian, termasuk untuk mengoperasikan sistem hidroponik, penerangan lampu, serta penyediaan listrik saat kegiatan atau acara berlangsung. Sementara itu, di Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, PLTS digunakan untuk menggerakkan kincir air pada kolam budidaya ikan sidat dalam program budidaya perikanan terpadu, sehingga mendukung keberlanjutan produksi perikanan. Inovasi lain juga terlihat di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, yang ditetapkan sebagai Desa Energi Berdikari. Desa ini mengembangkan pompa air tenaga surya untuk mengairi lahan sawah sebagai solusi atas keterbatasan irigasi teknis yang tidak menjangkau wilayah tersebut. Air diambil dari sumur bor, lalu dialirkan menggunakan pompa tenaga surya yang mampu menghemat biaya hingga Rp9 juta per tahun. Dengan sistem ini, produksi padi dapat mencapai tiga kali panen per tahun, dan lahan di sela tanaman padi dimanfaatkan untuk menanam sayuran bernilai ekonomis tinggi seperti cabai, kacang, kedelai, dan tomat yang memiliki masa panen lebih cepat.

Selain itu, di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, penerapan teknologi tepat guna dilakukan melalui pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik, yang dikelola oleh Posyantek Desa “Karya Mulya” berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 48 Tahun 2021. Desa ini memiliki potensi peternakan yang besar, sehingga kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur biogas. Pada 2023, telah dibangun tiga unit biogas, dengan satu unit mampu melayani enam kepala keluarga sebagai pengganti gas elpiji. Pada 2024, rencananya dibangun dua unit tambahan yang akan melayani 12 kepala keluarga. Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung penyediaan energi alternatif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengembangan energi terbarukan berjalan seiring dengan peningkatan pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat, yang mencerminkan pertumbuhan kebutuhan energi seiring berkembangnya aktivitas ekonomi, sektor industri, dan kualitas hidup penduduk. Di Kabupaten Cilacap, kilang minyak *Refinery Unit* (RU) IV Cilacap bernilai strategis untuk Ketahanan Energi karena memasok 34 persen kebutuhan

Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional atau 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa dan adanya 2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Besar (PLTU Adipala, PLTU Karangandri). Konsumsi Listrik Penduduk merujuk pada jumlah energi listrik yang digunakan oleh seluruh penduduk dalam suatu wilayah administratif (kabupaten/kota) selama periode tertentu. Konsumsi ini diukur dalam satuan kilowatt-jam (kWh) dan mencerminkan tingkat kebutuhan, aktivitas ekonomi, dan tingkat elektrifikasi masyarakat di wilayah tersebut. Konsumsi listrik Kabupaten Cilacap menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, ditandai dengan lonjakan jumlah pelanggan, daya terpasang, dan penjualan energi listrik yang mencapai lebih dari 2 miliar kWh. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi elektrifikasi, peningkatan aktivitas industri besar seperti PLTU dan pabrik, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga dan sektor sosial. Dengan estimasi konsumsi per kapita yang naik dari sekitar 318 kWh menjadi lebih dari 1.000 kWh per tahun, Berikut merupakan capaian konsumsi listrik Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 16.
Tabel Konsumsi Listrik Penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024

Tarif	Pelanggan					Daya (VA)					Penjualan (KWH)				
	2020	2021	2022	2023	2.024	2020	2021	2022	2023	2.024	2020	2021	2022	2023	2024
S.1 / 220 VA	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
S.2 / 450 VA I	5.225		5.534	5.128	1.061	2.351.250		2.490.300	2.307.600	4.774.500	1.510.224		632.548	4.423.511	1.070.019
S.2 / 900 VA I	4.344		4.882	4.810	11.578	3.909.600		4.393.800	4.329.000	10.420.200	2.344.950		510.219	6.095.965	1.216.960
S.2 / 1300 VA	1.296		1.452	1.479	3.282	1.684.800		1.887.600	1.922.700	4.266.600	1.028.140		204.492	2.424.269	511.407
S.2 / 2200 VA	781		1.099	1.202	2.591	1.718.200		2.417.800	2.644.400	5.700.200	959.705		248.350	3.068.524	592.503
S.2 / 3500 VA s/d 200	1.197		1.552	1.734	3.462	3.131.000		14.944.300	16.151.500	33.801.400	6.978.099		1.477.494	19.183.835	3.588.436
S.3 / 20,0 kVA	4		6	8	15	145.000		3.425.000	4.460.000	11.965.000	802.001		519.388	7.025.872	1.921.063
Jumlah S	12.847		14.525	14.361	31.538	24.459.850		29.558.800	31.815.200	70.927.900	13.623.119		3.592.490	42.221.976	8.900.389
R.1 / 450 VA I	280.112		297.187	281.706	564.221	126.050.400		133.734.150	126.767.700	253.899.450	150.110.462		24.061.804	270.783.383	45.405.773
R.1 / 900 VA I	52.051		57.822	59.555	122.223	46.845.900		52.039.800	53.599.500	110.000.700	34.106.904		6.319.278	75.567.797	13.418.139
R.1 M / 900 VA I	-		-	167.334	292.385	-		-	150.600.600	263.146.500	-		-	189.352.088	27.682.817
R.1 / 1300 VA	28.145		31.780	32.742	54.917	37.368.500		41.314.000	42.546.600	71.392.000	23.672.640		4.387.728	53.584.739	7.527.930
R.1 / 2200 VA	8.984		11.300	12.306	20.525	19.764.800		24.860.000	27.073.200	45.115.000	11.400.228		2.303.833	28.887.485	4.285.068
R.2 / 3500 VA s/d 5500	3.172		4.334	4.732	8.005	13.261.600		18.075.700	20.277.500	34.197.000	6.725.957		1.356.358	16.876.813	2.427.122
R.3 / 6600 VA ke atas	275		499	574	888	10.486.700		12.830.300	13.758.000	16.783.200	9.433.403		1.625.798	20.746.226	2.266.400
Jumlah R	511.510		565.848	558.949	1.063.164	378.008.900		429.787.150	434.641.100	794.663.950	316.275.635		55.813.907	655.798.490	103.013.149
B.1 / 450 VA I	1.977		1.991	1.885	3.699	889.650		895.950	848.250	1.664.550	927.207		112.142	1.899.828	211.455
B.1 / 900 VA I	3.001		2.976	2.781	4.474	2.700.900		2.678.400	2.502.900	4.026.600	3.200.483		382.188	4.212.512	525.021
B.1 / 1300 VA	3.576		4.200	4.940	12.349	4.648.800		5.460.000	6.422.000	16.053.000	3.046.471		603.017	8.226.147	1.899.930
B.1 / 2200 VA s/d 5500	4.307		5.273	5.963	13.097	13.668.200		17.168.900	19.682.800	43.123.800	8.939.467		1.803.807	23.361.246	4.500.344
B.2 / 3500 VA s/d 200 kVA	1.901		2.304	2.442	447	37.067.500		43.564.700	23.664.700	8.056.500	29.400.278		5.996.695	74.018.438	1.157.594
B.3 / > 200 kVA	25		29	29	36	16.285.000		20.435.000	25.245.000	3.535.500	10.318.513		2.610.948	33.150.214	3.817.993

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



Tarif	Pelanggan					Daya (VA)					Penjualan (KWH)				
	2020	2021	2022	2023	2.024	2020	2021	2022	2023	2.024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah B	14.787		16.773	18.040	38.102	75.260.050		90.202.950	101.585.850	180.968.650	54.662.019		11.525.926	800.666.976	22.530.206
I.1 / 450 VA I	1		1	1	2	450		450	450	900	117		147	495	2.53
I.1 / 900 VA I	1		-	1	19	900		-	900	17.1	9.946		-	450	2.53
I.1 / 1300 VA	9		34	103	758	11.700		44.200	133.900	985.4	11.288		5.849	123.301	84.811
I.1 / 2200 VA	16		23	52	512	35.200		50.600	114.400	1.126.400	32.128		6.045	78.415	53.294
I.3 / 3500 s/d 14 kVA	602		768	854	2.522	4.788.300		6.350.600	7.102.200	19.481.500	3.108.298		604.515	6.728.802	1.638.739
I.2 / 14 kVA s/d 200 kVA	182		225	242	486	12.746.000		16.354.000	17.943.000	36.778.700	11.095.097		2.235.022	25.791.346	4.336.576
I.3 / > 200 kVA	28		29	31	58	23.455.000		24.585.000	26.800.000	40.088.000	25.934.897		3.379.145	48.041.120	6.617.712
I.4 / > 30000 kVA ke atas	4		5	5	5	15.150.000		211.500.000	211.500.000	211.500.000	159.454.220		42.993.269	468.461.967	36.073.670
Jumlah I	843		1.086	1.289	4.362	192.537.550		258.885.750	263.594.850	309.978.000	199.646.801		49.224.033	549.405.896	48.807.331
P.1 / 450 VA	63		69	64	219	28.550		31.050	28.800	98.55	27.175		5.483	64.175	11.752
P.1 / 900 VA	121		127	128	387	108.900		114.300	115.200	348.3	101.758		14.429	169.166	30.508
P.1 / 1300 VA	87		83	76	258	113.100		107.900	98.800	335.4	106.896		25.663	175.334	38.814
P.1 / 2200 VA s/d 5500	260		280	350	903	875.200		943.800	1.233.200	3.309.800	679.631		136.142	1.534.523	290.002
P.1 / 6600 VA s/d 200 kVA	253		275	288	486	5.726.600		6.455.800	6.694.700	11.452.000	4.404.870		834.464	9.584.015	1.304.277
P.2 / > 200 kVA	3		5	5	-	166.000		6.230.000	2.350.000	-	715.626		159.706	1.846.701	-
P.3	2.745		2.945	2.902	-	6.821.935		6.796.645	6.494.505	-	874.196		1.273.871	14.217.931	-
Jumlah P	3.532		3.784	3.813	8.729	15.334.085		16.799.495	17.014.805	28.867.135	14.750.152		2.449.759	27.592.429	3.581.694
T / > 200 kVA	-		-	0	-	-		-	0	-	-		-	0	-
C/TM / > 200 kVA	-		-	0	-	-		-	0	-	-		-	0	-
L	63		106	113	156	324.650		456.850	360.700	516.9	5.753.136		137.760	9.777.004	1.795.023
Jumlah	543.582		602.122	596.565	1.146.051	685.997.985		825.691.195	849.012.505	1.385.922.535	604.710.862		122.743.875	2.085.462.770	188.627.793

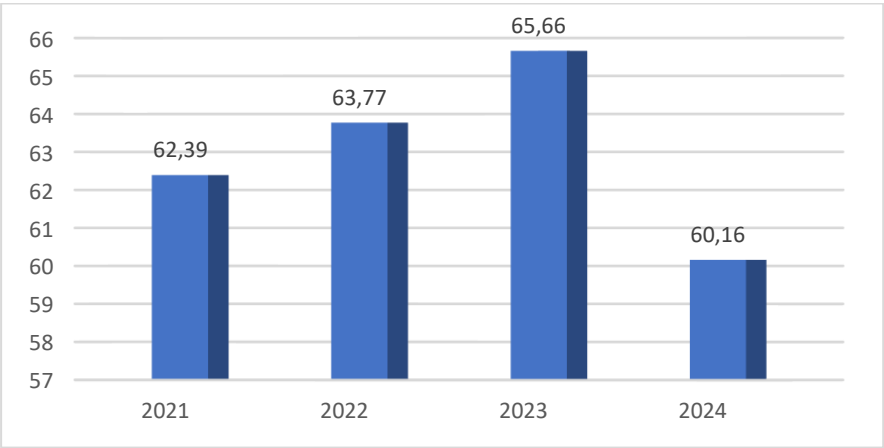
Sumber: PLN Kabupaten Cilacap, 2025

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan indeks yang menunjukkan kualitas Lingkungan suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Nilai komposit IKLH terdiri dari IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Perhitungan IKLH berdasarkan aplikasi SITALA yang dimulai perhitungannya pada tahun 2021, sedangkan perhitungan IKLH sebelum tahun 2021 dihitung dengan menggunakan formula peraturan sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Capaian IKLH di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 adalah sebesar 60,16 menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian IKLH disebabkan adanya penurunan nilai IKU dan IKTL yang cukup signifikan. Penurunan nilai IKU dan IKTL ini disebabkan karena :

1. Penambahan data pantau NO2 dan SO2 dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (pemantauan udara secara online) untuk menghitung nilai IKU. Penambahan ini merupakan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada akhir tahun 2024 di mana pada saat penentuan target nilai IKU tahun 2024 hanya menggunakan data pantau model manual pasif (*Passive Sampler*) dan belum direncanakan menggunakan data pantau dari pemantauan secara online. Hal ini berdampak pada capaian nilai IKU Kabupaten Cilacap tahun 2024 hanya sebesar 79,05.
2. Berkurangnya luasan wilayah tutupan hutan dan luasan rehabilitasi hutan-lahan (RHL) di wilayah Kabupaten Cilacap berdasarkan pemetaan citra satelit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Luasan wilayah tutupan hutan dan RHL berkurang sekitar 1.300 ha dibandingkan dengan hasil pemetaan lahan tahun 2022. Hal ini berdampak pada penurunan IKTL 0,4 dibandingkan nilai IKTL tahun 2023.



Gambar 2. 6.
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024
Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2025

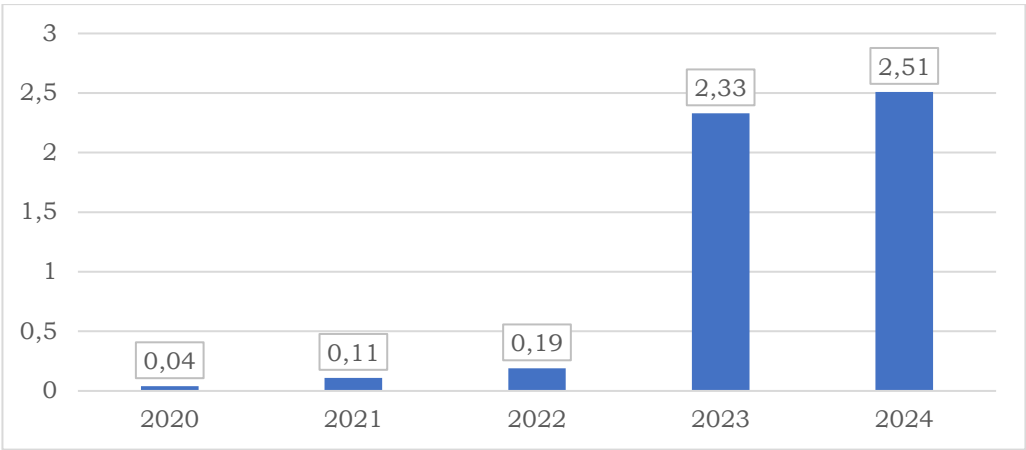
Komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cilacap tahun 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan di antara tiga komponen penyusunnya sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17.
Tabel Komposit Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Komposit IKLH	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	38,89	44,14	48,95	48,97
Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,52	93,02	92,45	79,05
Indeks Tutupan Lahan (IKTL)	43,32	43,37	44,82	44,42

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Akses sanitasi aman adalah rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga di Kabupaten Cilacap dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2020 sebesar 0,84%, terus mengalami peningkatan menjadi 2,51% di tahun 2024. Selengkapnya terkait perkembangan rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



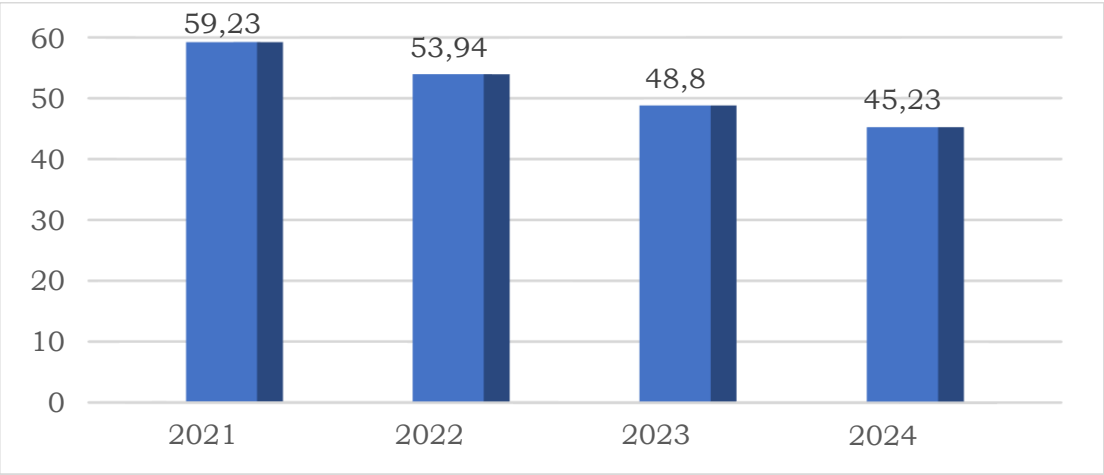
Gambar 2. 7.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pemrosesan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pemrosesan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan

alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi : persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA.

Berdasarkan data timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024, terlihat tren cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 sebanyak 15,45% sampah berhasil diolah, meningkat menjadi 16,36% pada tahun 2021. Sempat turun menjadi 16,21% pada tahun 2022 lalu meningkat lagi menjadi 17,4% pada tahun 2023 dan 17,98% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sampah, baik dari sisi kapasitas fasilitas pengolahan, efektivitas sistem pengumpulan, maupun partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk peningkatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.



Gambar 2. 8.
Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Neraca pengelolaan sampah Kabupaten Cilacap tahun 2024 menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dari total timbunan sampah sebesar 351.771,64 ton per tahun, 47.770,96 ton (13,58%) yang berhasil dikurangi melalui upaya pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang, sementara penanganan sampah mencapai 229.284,76 ton atau 65,18%. Kabupaten Cilacap pengolahan sampah telah dilakukan melalui pengangkutan atau pengolahan seperti pemilahan atau pemanfaatan sebagai energi maupun bahan baku lainnya sebesar 93.681,63-ton dan 27.977,81 yang telah menjadi energi. Sampah yang terkelola menjadi tinggi dampak dari pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi 277.055,72-ton yang terkelola atau 78.76%.

Kondisi ini memerlukan pengembangan Kembali melalui peningkatan fasilitas pengolahan, edukasi masyarakat, regulasi yang tegas, serta penguatan kelembagaan dan pembiayaan agar pengelolaan sampah di Cilacap dapat lebih berkembang lagi serta berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 2. 18.
Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Cilacap Tahun 2024

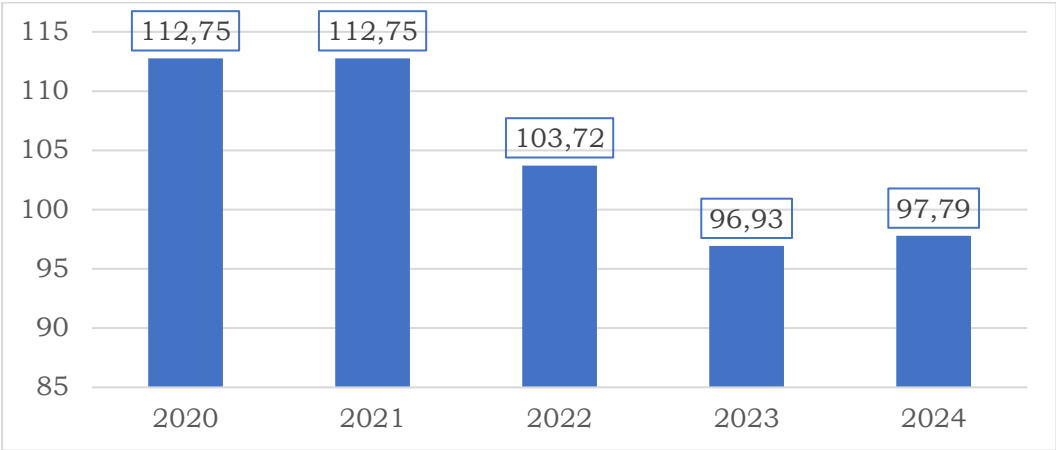
No.	Keterangan	Nilai (Ton/tahun)
I	Jumlah Timbunan Sampah	351.771,64
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbunan Perkapita)	
II	Jumlah Pengurangan Sampah	47.770,96
	Persentase Pengurangan Sampah	13,58
a	Jumlah Pembatasan Timbunan Sampah	5.663,66
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	4.582,99
c	Jumlah Pendaur Ulang Sampah	37.524,31
III	Jumlah Penanganan Sampah	229.284,76
	Persentase Penanganan Sampah	65,18
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
f	Pengolahan	
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i>)	93.681,63
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	27.977,81
g	Pemrosesan akhir	
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	107.625,32
IV	Sampah Yang Dikelola (II + III)	277.055,72
	Persentase sampah terkelola	78,76
V	Sampah Tidak Dikelola (I - IV)	74.715,92
	Persentase sampah tidak terkelola	21,24

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2025

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kondisi klimatologi Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2024 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (595 mm) dan terendah terjadi pada bulan Mei (7,6 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 24 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Mei sebanyak 3 hari hujan. Suhu maksimum tercatat 35,9°C terjadi pada bulan Maret, sedangkan suhu minimum 20,4°C terjadi pada bulan Agustus. Sedangkan rata-rata suhu udara pada tahun 2024 sekitar 25,58-28,56°C. Kelembaban minimum April (50,0%) dan kelembaban maksimum terjadi di bulan Februari (100%). Rata-rata kelembaban di Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2024 sekitar 81,1-84,84%.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Tingkat ancaman bencana Kabupaten Cilacap berdasarkan IRBI tahun 2024 menunjukkan tingkat ancaman sedang dengan skor terakhir sebesar 97,79 dengan status sedang. Indeks risiko bencana di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 9.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah kejadian bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2024, diketahui bahwa bencana paling dominan terjadi adalah angin kencang/puting beliung sebanyak 118 kejadian, tanah longsor sebanyak 72 kejadian, dan banjir sebanyak 71 kejadian, yang seluruhnya terkonsentrasi paling tinggi di wilayah Kecamatan Cilacap. Kecamatan Cimanggu, Majenang, dan Wanareja juga menunjukkan tingkat kerawanan tinggi terhadap tanah longsor dan angin kencang. Selain itu, kekeringan dilaporkan terjadi di hampir seluruh kecamatan bagian barat dan selatan, menunjukkan kerentanan terhadap perubahan iklim. Tidak terdapat kejadian tsunami maupun banjir bandang yang tercatat pada tahun tersebut. Kondisi ini menandakan pentingnya penguatan sistem mitigasi dan

kesiapsiagaan bencana, khususnya di wilayah-wilayah dengan intensitas kejadian tinggi.

Tabel 2. 19.
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Angin Kencang/ Puting Beliung	Tsunami	Banjir Bandang	Kekeringan
Dayeuhluhur	-	-	10	14	-	-	1
Wanareja	1	-	13	7	-	-	1
Majenang	9	-	11	8	-	-	1
Cimanggu	3	-	20	10	-	-	1
Karangpucung	-	-	5	-	-	-	1
Cipari	3	-	3	6	-	-	-
Sidareja	7	-	1	9	-	-	1
Kedungreja	-	-	-	6	-	-	-
Patimuan	-	-	-	5	-	-	1
Gandrungmangu	2	-	-	7	-	-	1
Bantarsari	6	-	4	8	-	-	1
Kawunganten	6	-	-	1	-	-	1
Kampung Laut	1	-	-	2	-	-	1
Jeruklegi	2	-	4	5	-	-	1
Kesugihan	5	-	1	1	-	-	1
Adipala	2	-	-	5	-	-	1
Maos	-	-	-	5	-	-	-
Sampang	-	-	-	1	-	-	-
Kroya	9	-	-	4	-	-	-
Binangun	-	-	-	3	-	-	-
Nusawungu	6	-	-	5	-	-	-
Cilacap Selatan	3	-	-	-	-	-	-
Cilacap Tengah	3	-	-	2	-	-	-
Cilacap Utara	3	-	-	4	-	-	-
Cilacap	71	-	72	118	-	-	14

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Cilacap memiliki hubungan erat dengan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), mengingat tingginya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Kenaikan emisi GRK dapat memperburuk kerentanan wilayah, terutama pada daerah pesisir dan kawasan rawan bencana. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Dari data detail di web : <https://signsmart.menlhk.go.id>, dapat diketahui kondisi emisi GRK dari sektor energi di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- Pembakaran bahan bakar di Cilacap dominan meningkat menggunakan batu bara dari pada High Speed Diesel (HSD);
- Bahan Bakar di Refinery Minyak & Gas Bumi dominan meningkat menggunakan Industrial Diesel Oil (IDO) dibandingkan menggunakan gas alam;
- Bahan Bakar pada Industri Manufaktur & Konstruksi dominan menggunakan Solar dibandingkan Minyak Diesel;
- Bahan Bakar untuk Transportasi paling tinggi menggunakan bio solar diikuti Ron 90, Ron 92, Solar, Ron 88 dan Avtur;
- Bahan Bakar di Rumah Tangga semua menggunakan LPG. Tidak ada yang menggunakan minyak tanah, gas alam atau kayu bakar;
- Produksi & Distribusi Batu Bara & Migas, hanya ada produksi minyak, tidak ada produksi Batubara dan gas.

Kondisi emisi GRK dari sektor IPPU di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- Produksi hanya klinker;
- Industri hanya menggunakan pelumas, tidak ada yang menggunakan paraffin.

Kondisi emisi GRK dari sektor pertanian di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

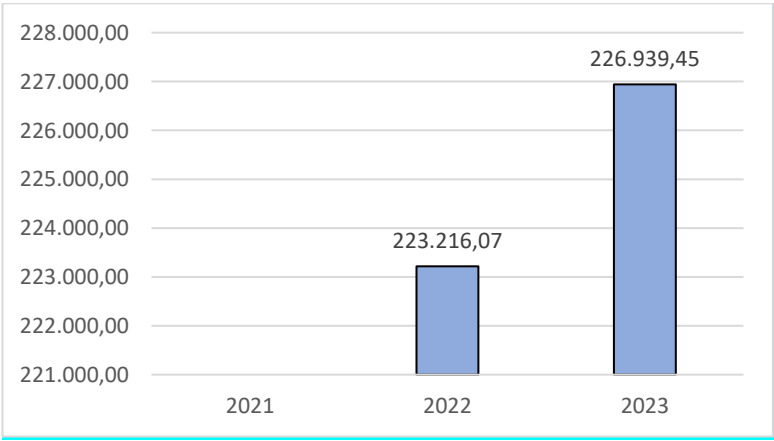
- Populasi Ternak cukup besar di Kabupaten Cilacap untuk semua jenis ternak.;
- Luas panen dan produktifitas Sawah cukup besar. Produktifitas tahun 2023 64,43 Kw/Ha dengan luas panen 122.550 Ha;
- Luas panen tanaman jagung paling luas dibandingkan kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ubi jalar dan ubi kayu;
- Luas lahan Perkebunan karet paling luas diikuti luas lahan kebun kakao;
- Konsumsi pupuk urea paling tinggi dibandingkan konsumsi pupuk NPK dan ZA;

Kondisi emisi GRK dari sektor limbah di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- Kependudukan meningkat setiap tahun. 30% penduduk tinggal di pedesaan, 70% tinggal di perkotaan dan konsumsi protein sebesar 19,46 Kg/kapita/tahun. Jumlah penduduk tahun 2023 mencapai 2.007.830 jiwa;

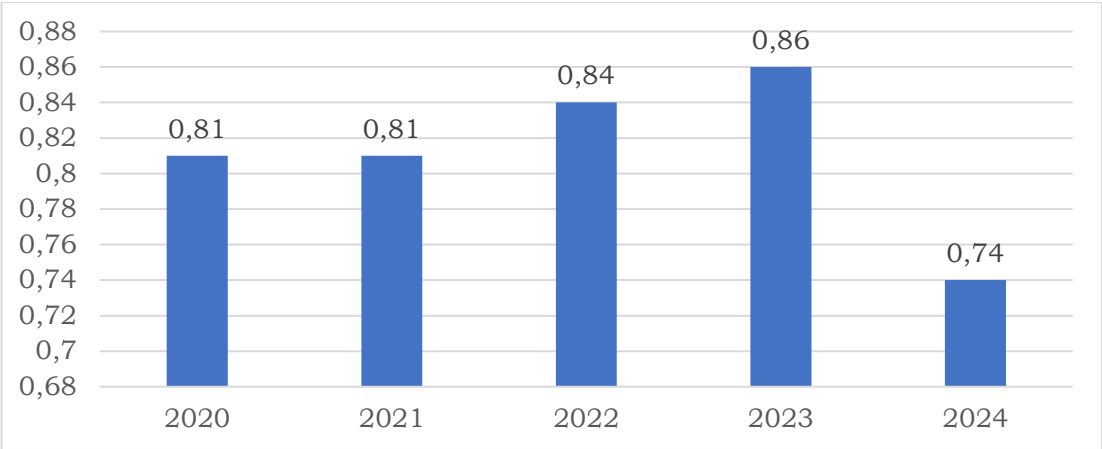
- b. Timbulan sampah meningkat setiap tahun. Data timbulan tahun 2023 sebesar 348.406.56 ton dan laju timbulan sampah 0,18 ton/jiwa/tahun;
- c. Distribusi pngelolaan sampah tahun 2023 tercatat terangkut ke TPA 66,07%, ditimbun dalam tanah 0,11%, dibuat kompos 0,85%, dibakar 0,01%, dibuang ke badan air 0,01%, dibuang ke lahan kosong 0,01%, didaur ulang 0,15%;
- d. Komposisi & Kandungan Bahan Kering Sampah Domestik tahun 2020: komposisi sisa makanan 57,67%, Bahan kering sisa makanan 59,61%,. Komposisi kertas 9,71%. Dan bahan kering kertas 66,18%;
- e. TPA Sampah TPA Kepudang Kec. Binangun 2006 ditutup tahun 2021, TPA Kunci Kec. Sidareja 1993 ditutup 2023, TPA Malabar Kec. Wanareja 1993 ditutup 2023, TPA Tritih Lor 1995 ditutup 2019;
- f. Sarana Pembuangan Air Limbah Domestik terdapat tangka septik perkotaan 40%, perdesaan 31,23%. Cubluk di perdesaan 20,68%;
- g. Limbah cair industry hanya ada tahun 2020, berupa limbah cair dari industri Petroleum Refineries.

Berdasarkan data total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Cilacap tahun 2022–2023, terlihat peningkatan. Tahun 2021 Penurunan Emisi GRK Kumulatif belum tercatat di aplikasi AKSARA. Pada tahun 2022, total penurunan emisi tercatat sebesar 223.216,07 ton CO₂eq, kemudian meningkat menjadi 226.939,45 ton CO₂eq pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan upaya pengendalian emisi, baik melalui pengelolaan limbah, efisiensi energi, maupun program-program mitigasi perubahan iklim lainnya. Capaian ini menunjukkan kontribusi positif Kabupaten Cilacap dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca, dan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke depan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 10.
Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara>

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024, terlihat tren yang semula meningkat namun kemudian menurun tajam pada akhir periode. Pada tahun 2020 dan 2021, indeks berada pada angka yang sama yaitu 0,81, kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,84 di tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada 0,86 di tahun 2023, mencerminkan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan wilayah. Namun, pada tahun 2024, indeks menurun drastis menjadi 0,74, yang dapat mengindikasikan adanya penurunan kesiapsiagaan, lemahnya sistem mitigasi risiko, atau meningkatnya ancaman bencana yang tidak tertangani secara optimal. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan penurunan kualitas ketahanan daerah secara signifikan hanya dalam satu tahun, dan harus segera ditindaklanjuti dengan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

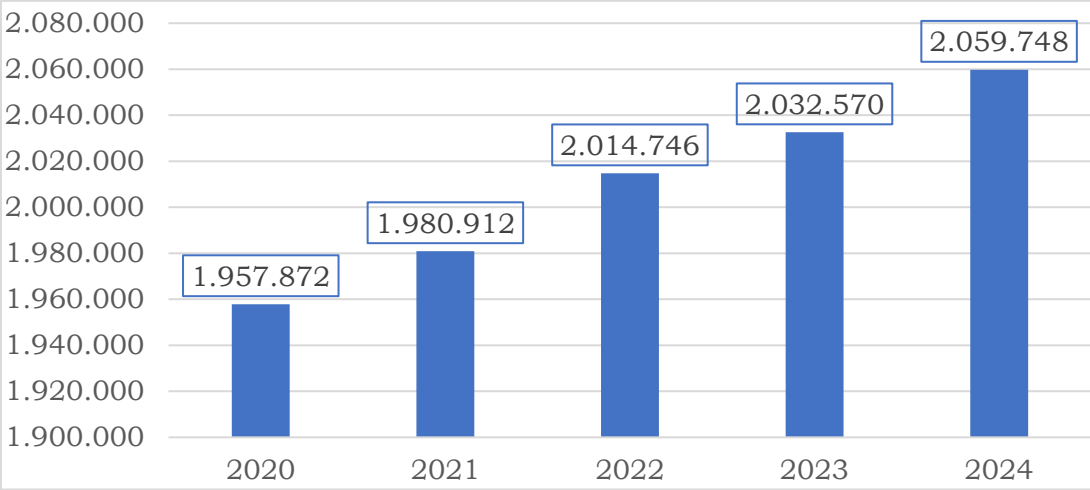


Gambar 2. 11.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2025

7. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2020-2024 cenderung menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebanyak 1.957.872 jiwa, kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 sebanyak 2.059.748 jiwa. Dalam periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk rata-rata tercatat sebesar sekitar 1,27% per tahun. Peningkatan jumlah penduduk dapat membawa konsekuensi terhadap tekanan pada pasar kerja, kenaikan harga bahan pangan, serta peningkatan biaya pendidikan dan kesehatan, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak ini dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif, termasuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

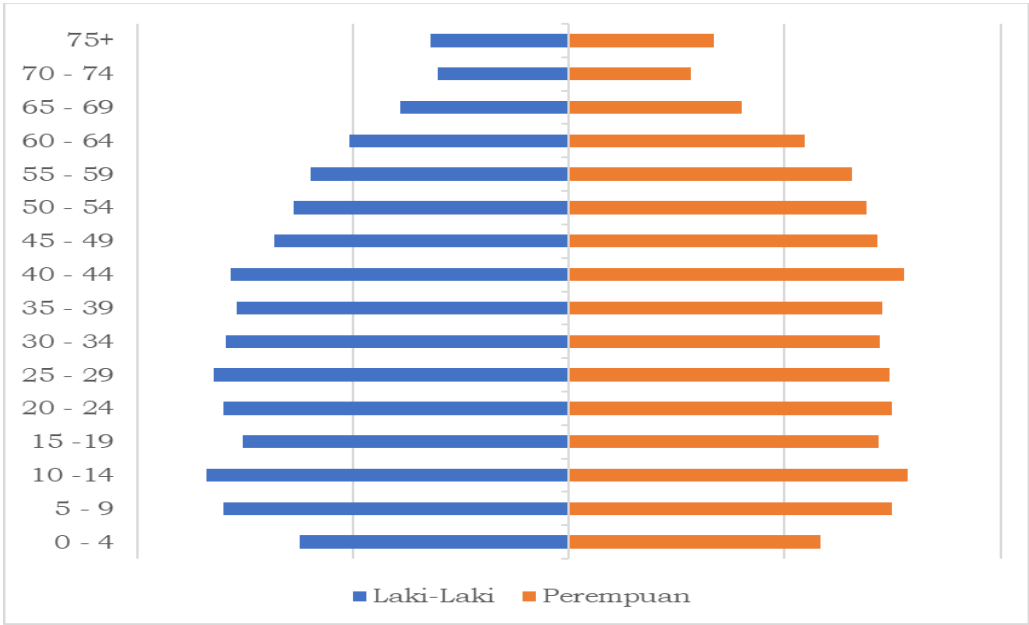


Gambar 2. 12.
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur digunakan untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2024 (15–64 tahun) sebesar 1.418.631 jiwa atau 68,87 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65 tahun) sebanyak 203.350 jiwa atau 9,87 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 437.767 jiwa atau 21,25 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 68,87 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Cilacap, terlihat bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, yaitu sekitar 68,87 persen. Kondisi ini berpotensi besar untuk mencapai bonus demografi, yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan. Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cilacap, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.



Gambar 2. 13.
Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025, Data Diolah

Analisis proyeksi penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kelompok umur akan memberikan gambaran tentang bagaimana struktur demografis penduduk di wilayah tersebut akan berkembang selama beberapa tahun mendatang. Perubahan yang signifikan dalam distribusi kelompok usia penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2025 – 2030, terdapat peningkatan jumlah penduduk dari sebanyak 1.946.193 jiwa pada tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 2.132.091 pada tahun 2030 atau bertambah sebanyak 344.754 jiwa selama 10 tahun. Peningkatan penduduk tersebut termasuk pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan penduduk pada kelompok usia tertentu bertambah dan pada kelompok usia lainnya mengalami penurunan. Hal ini akan memiliki dampak pada berbagai aspek, seperti kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan di masa depan.

Gambaran proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kelompok umur dari tahun 2020-2030 dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2. 20.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2030

Kelompok Umur	2020	2025	2030
0-4	137.531	158.040	152.288
5-9	146.249	137.953	158.538
10-14	149.814	146.843	138.526
15-19	149.484	149.726	146.782
20-24	157.958	149.013	149.264
25-29	154.510	158.248	149.298
30-34	154.772	155.070	158.816
35-39	147.106	155.395	155.700

Kelompok Umur	2020	2025	2030
40-44	137.551	147.381	155.723
45-49	135.544	136.690	146.523
50-54	123.221	133.580	134.834
55-59	109.400	119.579	129.849
60-64	86.542	103.710	113.694
65-69	67.796	79.078	95.266
70-74	42.723	58.099	68.448
75+	45.992	57.987	78.542
Jumlah	1.946.193	2.046.392	2.132.091

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2030 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap tidak merata. Kecamatan Majenang selama lima tahun terakhir, memiliki penduduk yang paling banyak. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Majenang sebanyak 148.968 jiwa (7,23 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 143.108 jiwa (6,95 persen). Sedangkan Kecamatan yang berpenduduk paling kecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah Kecamatan Kampung Laut. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kampung Laut sejumlah 16.639 jiwa atau 0,81 persen dari total penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2024.

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 896 jiwa/km² pada tahun 2022 menjadi 916 jiwa/km² pada tahun 2024. Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 10.582,21 jiwa/km². Sementara itu Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 5,67 persen dari total luas Kabupaten Cilacap hanya dihuni 121,97 jiwa/km².

Tabel 2. 21.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Cilacap Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Dayeuhluhur	191,73	50.940	259,46
2	Wanareja	195,92	111.984	551,32
3	Majenang	167,60	148.968	858,58
4	Cimanggu	163,35	109.816	645,37
5	Karangpucung	124,74	84.357	653,10
6	Cipari	107,53	69.769	648,39
7	Sidareja	49,31	65.662	1.306,19

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
				(Jiwa/km ²)
8	Kedungreja	82,01	93.787	1.129,33
9	Patimuan	78,68	52.578	648,27
10	Gandrungmangu	119,26	117.155	962,61
11	Bantarsari	99,49	79.085	789,65
12	Kawunganten	138,09	90.631	640,06
13	Kampunglaut	134,07	16.639	121,97
14	Jeruklegi	99,41	82.113	830,13
15	Kesugihan	89,10	143.108	1.583,27
16	Adipala	74,65	100.809	1.335,79
17	Maos	34,30	48.807	1.380,82
18	Sampang	28,89	45.438	1.563,24
19	Kroya	61,68	121.317	1.938,99
20	Binangun	53,73	72.968	1.360,60
21	Nusawungu	66,98	92.329	1.363,77
22	Cilacap Selatan	8,04	85.099	10.582,21
23	Cilacap Tengah	51,00	90.470	1.801,39
24	Cilacap Utara	29,72	85.919	2.898,59
Kabupaten Cilacap		2.249,28*	2.059.748	916

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

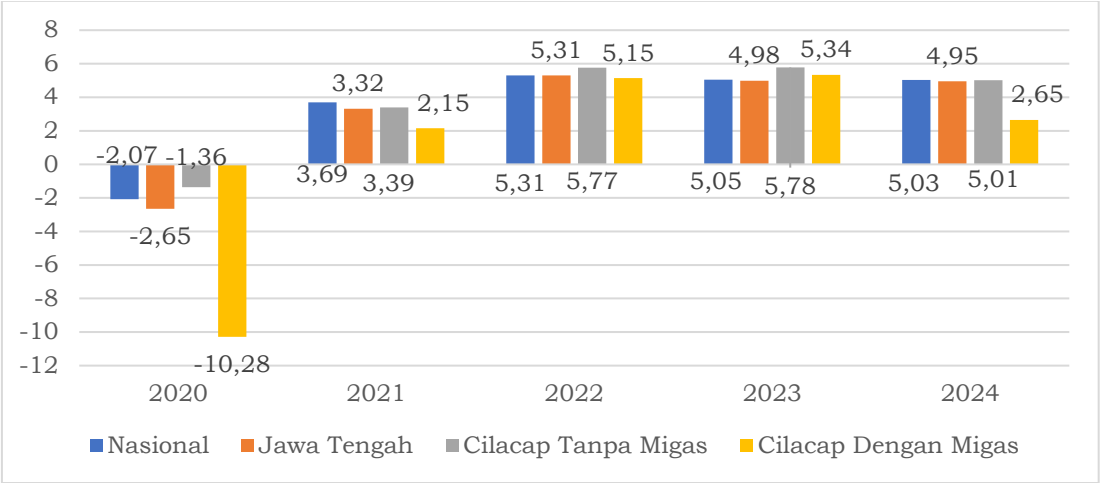
* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusakambangan, luas Pulau Nusakambangan 115,00 km². Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusakambangan adalah sebesar : 871 jiwa/ km².

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

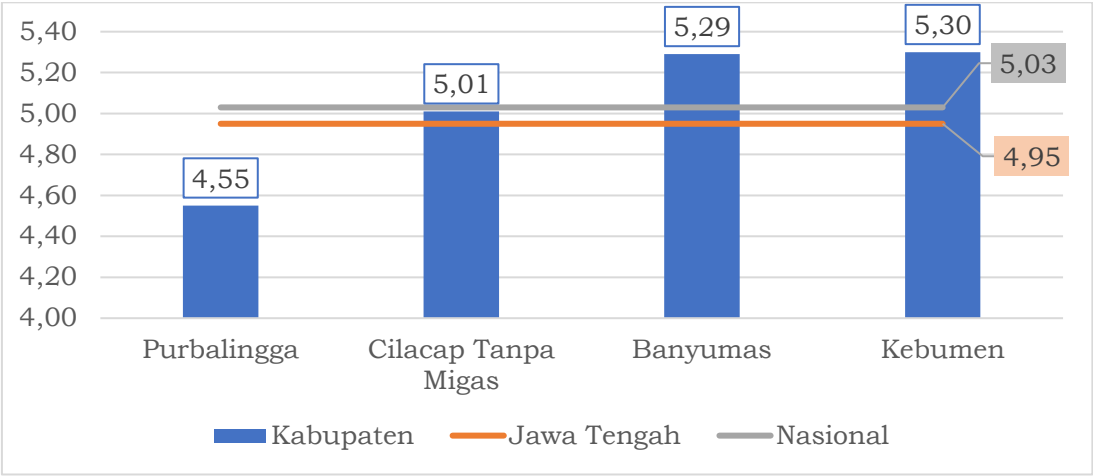
Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas dan dengan migas di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu lima tahun (2020-2024), pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -1,36 persen, sementara pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 5,01 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, di mana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami peningkatan menjadi 2,65 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas (5,01%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan di bawah Nasional (5,03%). Sementara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dengan migas (2,65%) pada tahun 2024 posisinya di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (4,95%) dan Nasional (5,03%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

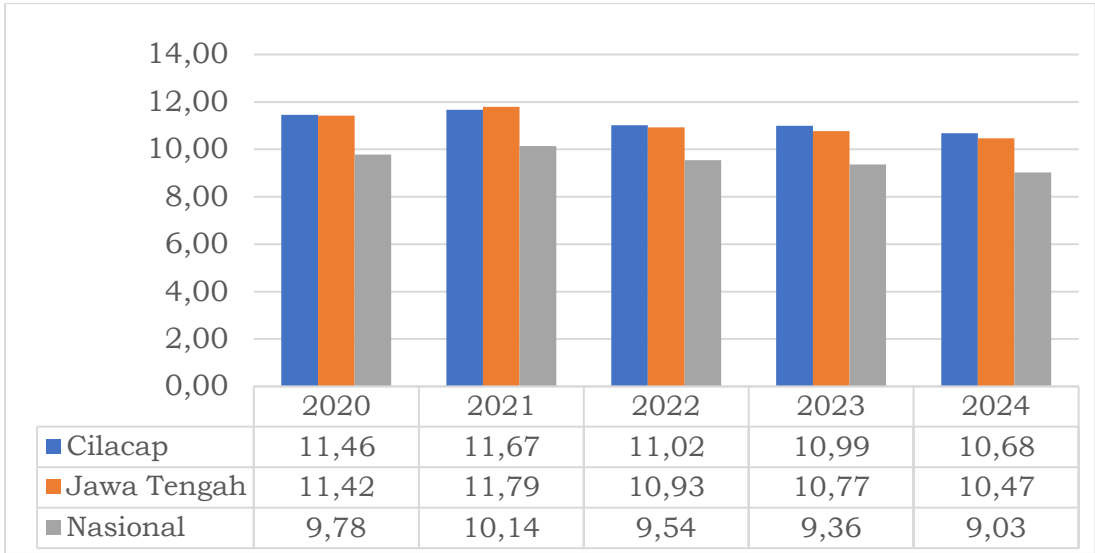
Berdasarkan grafik posisi relatif pertumbuhan ekonomi tahun 2024, Kabupaten Cilacap (tanpa sektor migas) mencatat pertumbuhan sebesar 5,01%, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Tengah (4,95%) dan sebanding dengan rata-rata nasional (5,03%). Capaian ini menempatkan Cilacap di atas Purbalingga yang memiliki pertumbuhan terendah di wilayah sekitar, yaitu 4,55%, namun masih di bawah Banyumas (5,29%) dan Kebumen yang memimpin dengan 5,30%. Posisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Cilacap cukup kompetitif di tingkat regional, meskipun belum menjadi yang tertinggi. Kinerja positif ini didorong oleh kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas, perdagangan, pertanian, dan jasa yang tumbuh stabil. Namun, untuk mengejar posisi kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi, Cilacap perlu mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperluas sektor-sektor potensial yang memiliki daya dorong besar terhadap pertumbuhan, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri berbasis sumber daya lokal.



Gambar 2. 15.
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Meskipun nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap meningkat hingga mencapai sekitar Rp115 triliun pada tahun 2024, tingkat kemiskinan masih tercatat sebesar 10,68% pada tahun 2024, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,83% (BPS Kabupaten Cilacap, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat sektoral dan belum inklusif, karena belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tenaga kerja sektor informal.

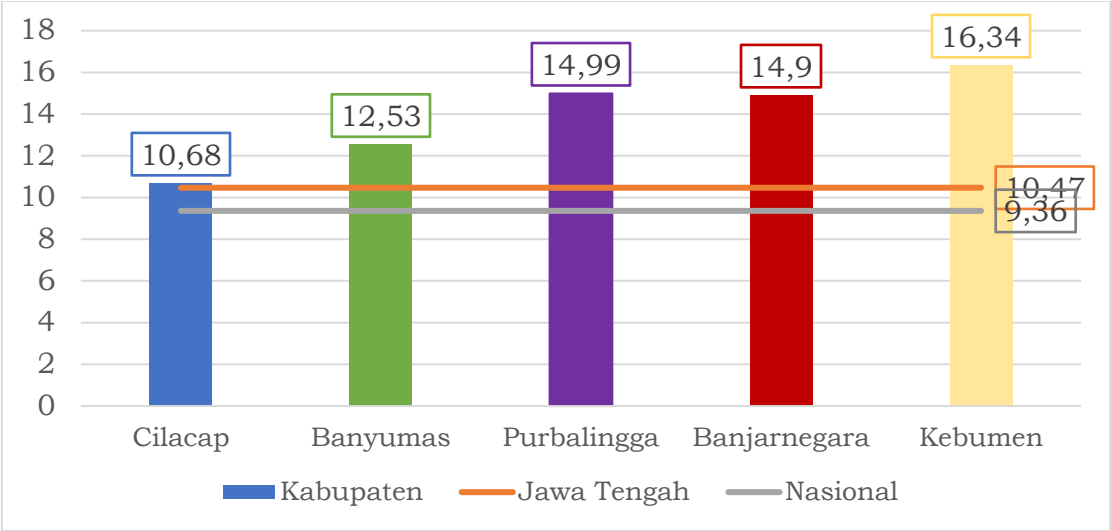
Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap selama tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebesar 11,46% naik menjadi 11,67% pada tahun 2021, dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 10,68%. Jika dibandingkan dengan persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah dan Nasional, capaian Kemiskinan Kabupaten Cilacap relatif lebih tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 16.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

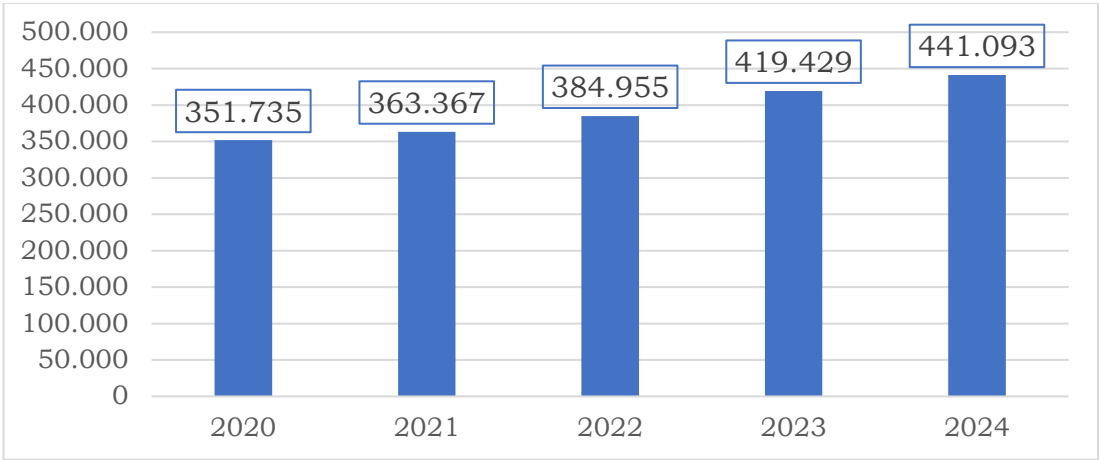
Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 17.
Posisi Relatif Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

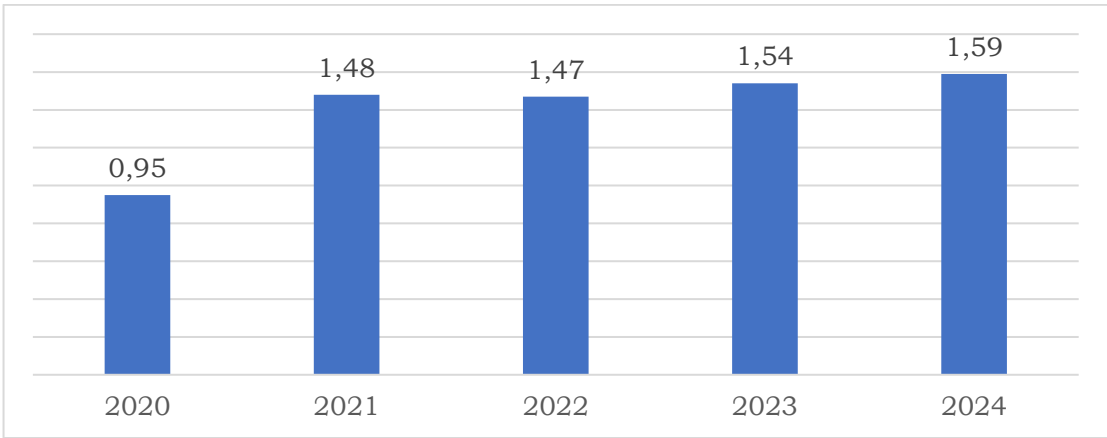
Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Kabupaten Cilacap menjadi lokus penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 sebesar 2,19 persen atau 37.958 jiwa, sedangkan tahun 2024 berhasil diturunkan menjadi 1,28 persen atau menjadi 22.500 jiwa. Hal ini karena adanya intervensi ke sasaran jiwa miskin dari hasil verifikasi dan validasi data yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap guna penurunan angka kemiskinan ekstrem. Untuk mempercepat dan mengintensifkan intervensi, Kabupaten Cilacap telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor : 400.9.14/784/34/tahun 2024 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, di 37 Desa pada 16 Kecamatan.

Garis kemiskinan merupakan indikator penting yang digunakan untuk menentukan batas minimum pengeluaran atau pendapatan yang dibutuhkan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan biasanya dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Garis Kemiskinan pada Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan dari tahun 2020 sebesar 351.735 menjadi 441.093 pada tahun 2024. Selengkapnya dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 18.
Garis Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

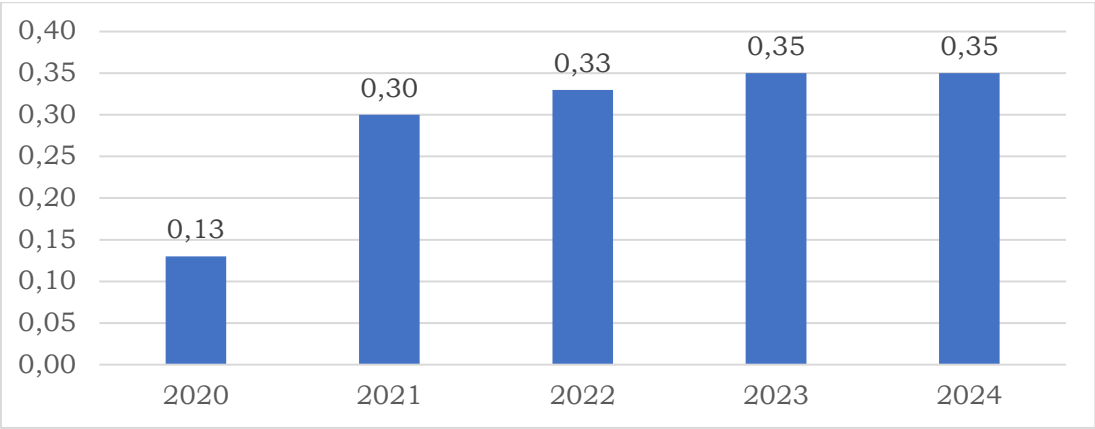
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2020-2024 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2020 sebesar 0,95. Selanjutnya naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,48. Namun pada tahun 2022 indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,01 yaitu menjadi 1,47 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,59. Selengkapnya dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 19.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS

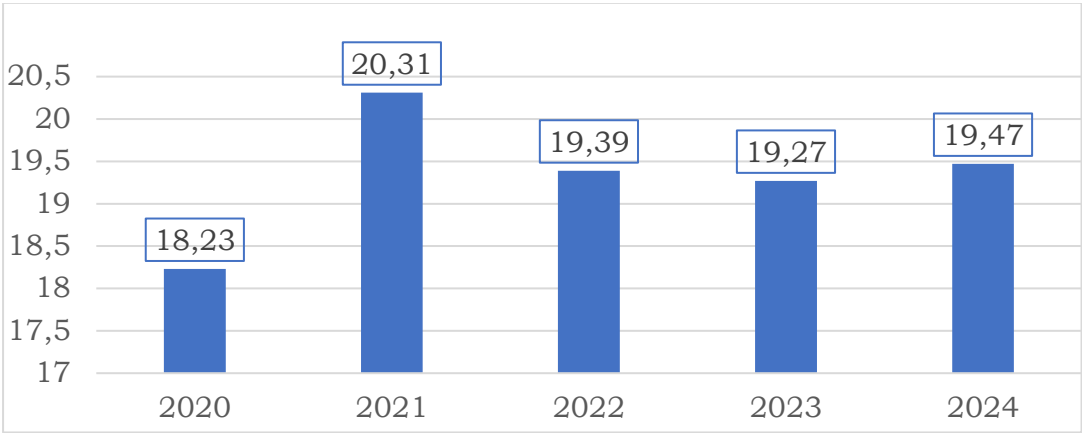
dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebesar 0,13. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 indeks ini mengalami peningkatan menjadi 0,30, kemudian indeks ini justru naik lagi pada 2022 menjadi 0,33 dan di tahun 2024 naik menjadi 0,35. Artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2024 semakin meningkat dibanding tahun 2020. Selengkapnya dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 20.
Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

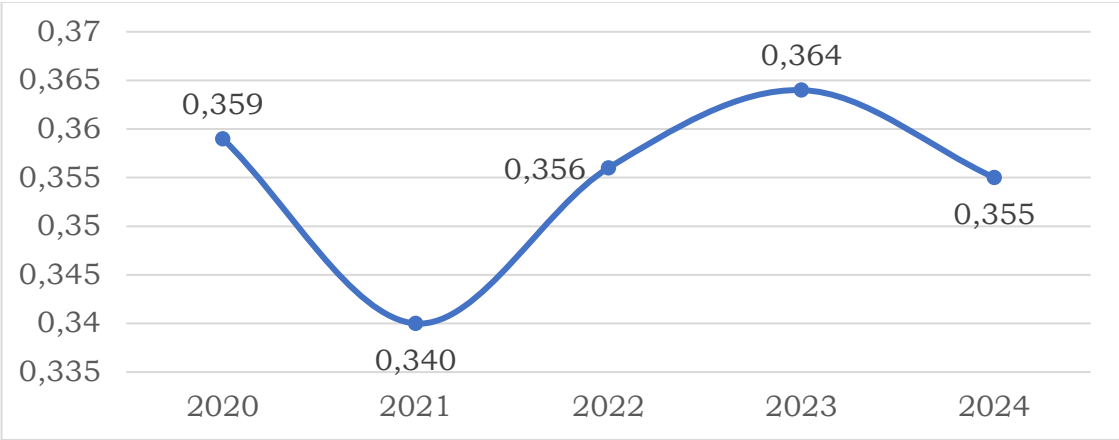
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank dunia sebesar 18,23%, mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir hingga mencapai 19,47% di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 21.
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2024

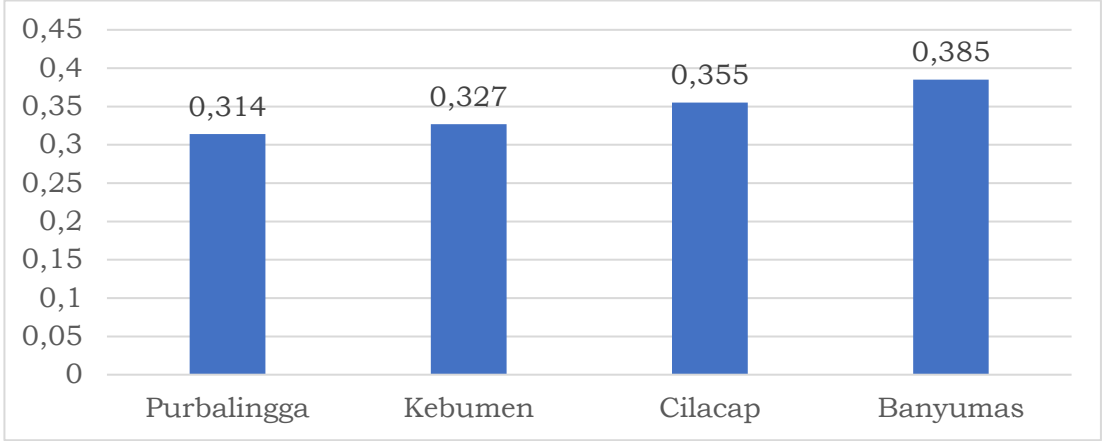
Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian pendapatan dalam populasi tersebut.

Indeks gini Kabupaten Cilacap menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 dan 2024. Penurunan indeks gini dari 0,359 pada tahun 2020 menjadi 0,340 pada tahun 2021 mengindikasikan penurunan ketimpangan pendapatan, sejalan dengan tujuan ke-10 SDGs. Namun, indeks gini kembali mengalami peningkatan menjadi 0,355 di tahun 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Cilacap berada dalam kategori ketimpangan moderat. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mencapai tujuan SDGs.



Gambar 2. 22.
Indeks Gini Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 0,355. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga (0,314) dan Kabupaten Kebumen (0,327), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas (0,385). Posisi relatif tersebut menempatkan Kabupaten Cilacap pada urutan ketiga dalam lingkup regional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu diakomodasi dalam perumusan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas dan keadilan ekonomi daerah pada periode perencanaan yang akan datang.



Gambar 2. 23.
Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

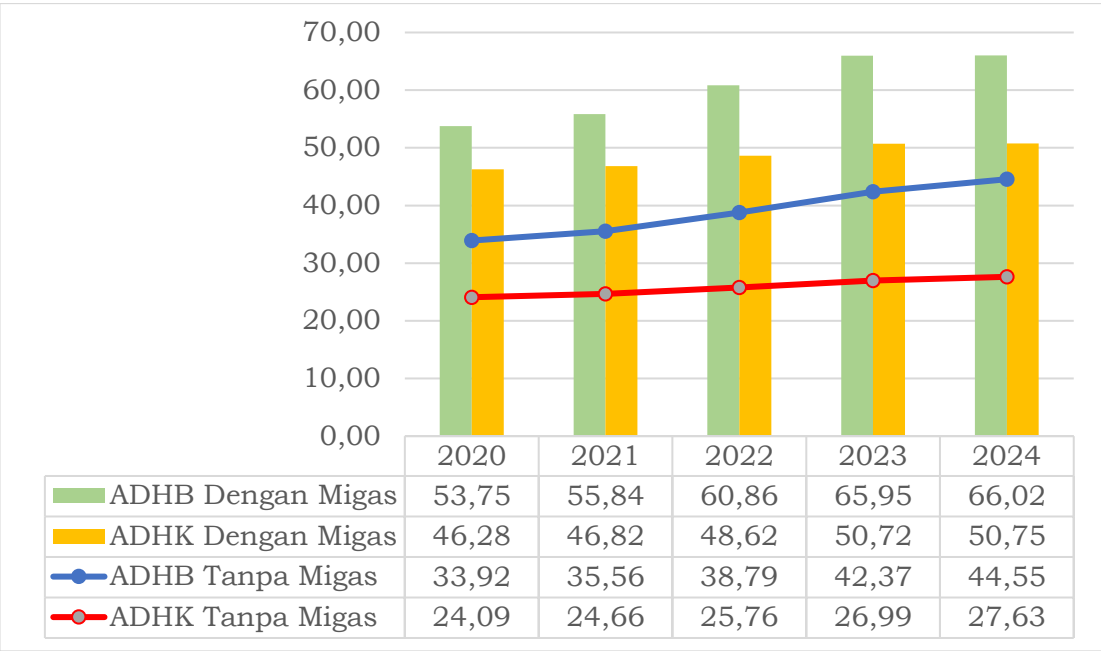
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

PDRB Per Kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. PDRB Perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Cilacap tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terjadi tren peningkatan baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), dengan maupun tanpa migas. Pada tahun 2024, PDRB per kapita ADHB dengan migas mencapai Rp66,02 juta, meningkat dari Rp53,75 juta pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada PDRB per kapita ADHK dengan migas, dari Rp46,28 juta pada tahun 2020 menjadi Rp50,75 juta pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB per kapita tanpa migas juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun dalam nominal yang lebih rendah, yaitu

dari Rp33,92 juta (ADHB) dan Rp24,09 juta (ADHK) pada tahun 2020 menjadi masing-masing Rp44,55 juta dan Rp27,63 juta pada tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir. Namun demikian, kesenjangan antara nilai PDRB per kapita dengan dan tanpa migas mengindikasikan bahwa sektor migas masih menjadi kontributor dominan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, diperlukan upaya untuk memperkuat struktur ekonomi melalui diversifikasi sektor unggulan nonmigas, mendorong hilirisasi industri, serta peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor produktif guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya terkait PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

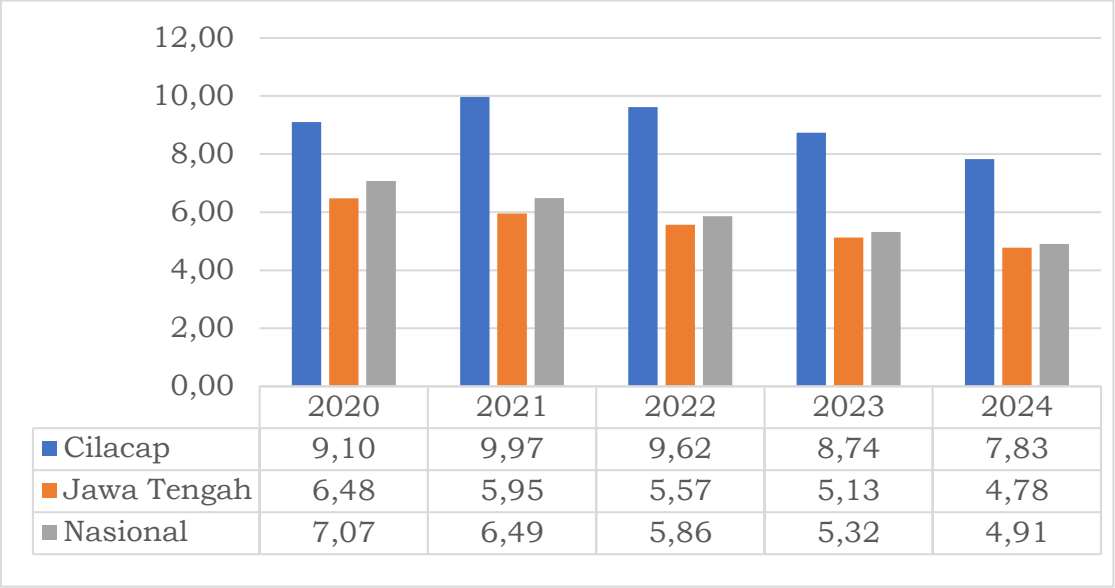


Gambar 2. 24.
PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
Sumber : BPS kabupaten Cilacap Tahun 2024

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Cilacap merupakan daerah Maju Tapi Tertekan (PDRB perkapita relatif besar namun selama lima tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan relatif rendah). Untuk mengatasi kondisi ini, Cilacap perlu kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, investasi infrastruktur, inovasi industri, dan peningkatan daya saing tenaga kerja agar pertumbuhan ekonominya kembali meningkat. Berdasarkan analisis diatas sektor unggulan adalah Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor potensial adalah pertanian dan industri pengolahan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap.

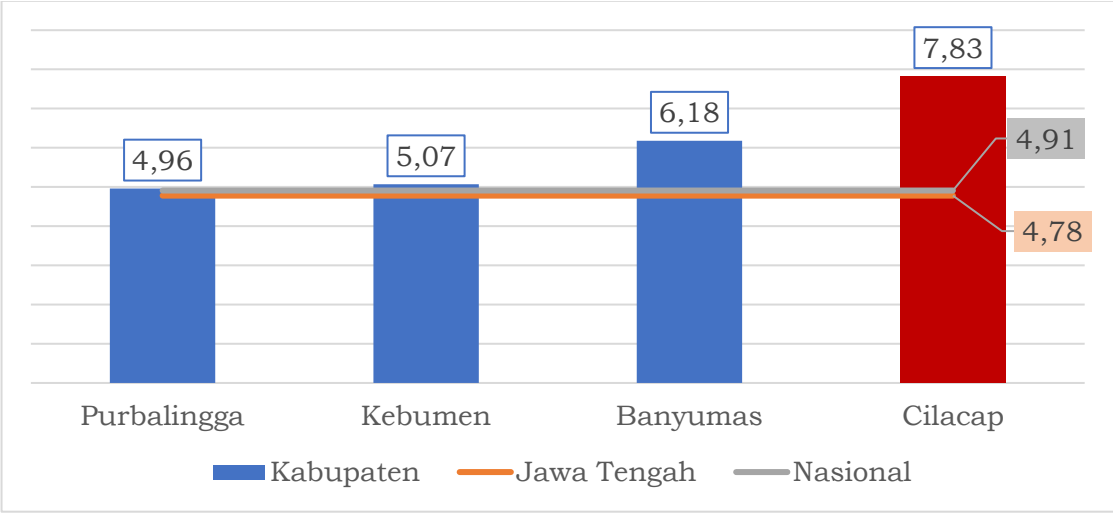
Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dan tren meningkat, pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cilacap sebesar 9,10%. Namun, meningkat menjadi sebesar 9,97% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak pekerja yang diberhentikan. Selain itu banyaknya usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 9,62% dan kembali menurun menjadi 7,83% di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa tengah dan Nasional, capaian TPT Kabupaten Cilacap lebih tinggi.



Gambar 2. 25.
Perkembangan Angka Pengangguran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

TPT Kabupaten Cilacap pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga berada pada posisi tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.

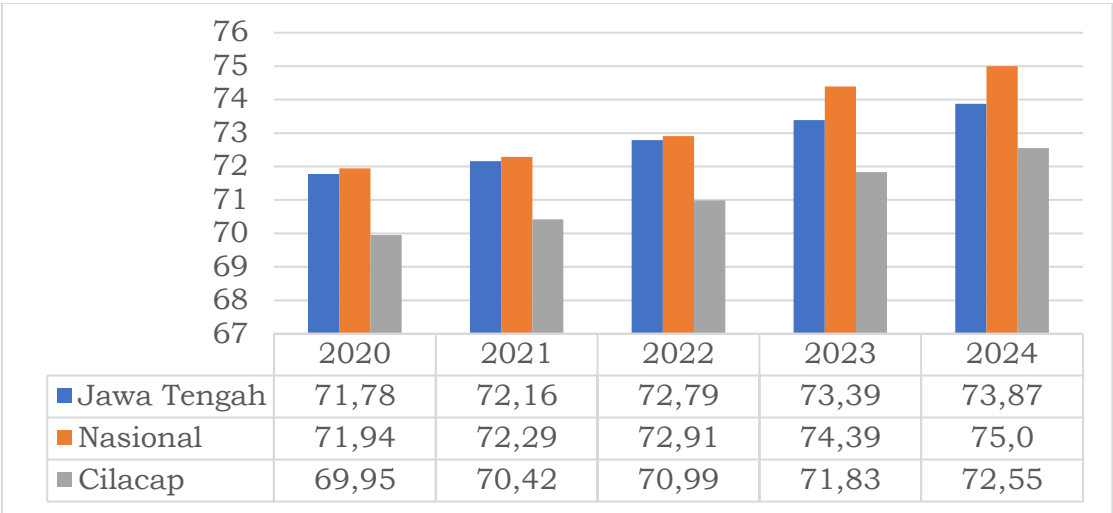


Gambar 2. 26.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Cilacap memiliki satu Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bentuk komitmen dalam penyediaan akses, layanan, dan dukungan ketenagakerjaan bagi kelompok disabilitas. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan ketrampilan kepada 15 orang penyandang disabilitas. Dan terdapat 2 perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 23 orang yang terdiri dari 13 orang tuna rungu 13 dan 10 orang tuna daksa.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), dan Pengeluaran Per Kapita (kesejahteraan/daya beli) untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

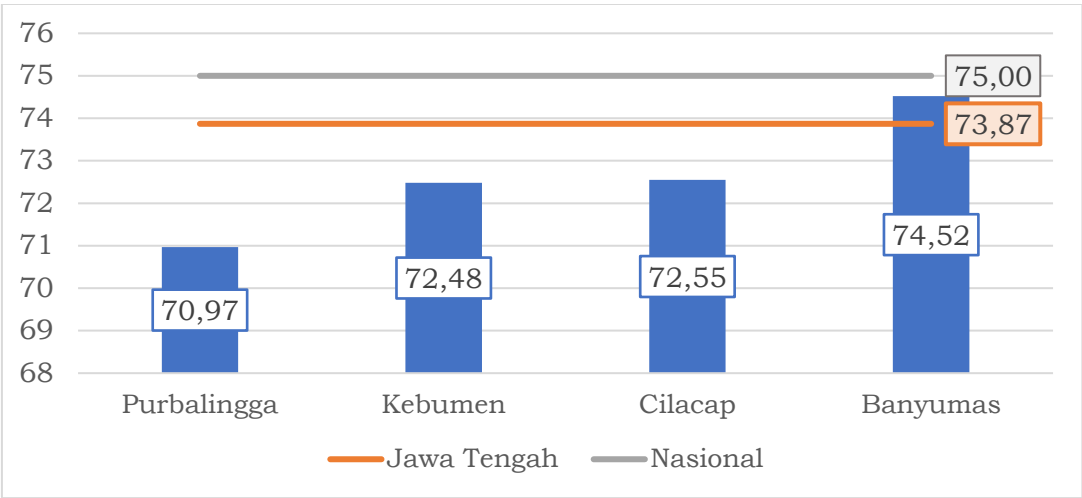
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada penurunan pada tahun 2020. Tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Cilacap sebesar 69,95 meningkat menjadi 70,42 pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 72,55. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2020-2024, akan tetapi capaian tersebut masih di bawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2. 27.
Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap, Jawa tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, capaiannya masih di bawah Kabupaten Banyumas, namun berada di atas capaian Kabupaten Kebumen dan kabupaten Purbalingga. Selengkapny terkait perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 28.
Posisi Relatif IPM Kab. Cilacap dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

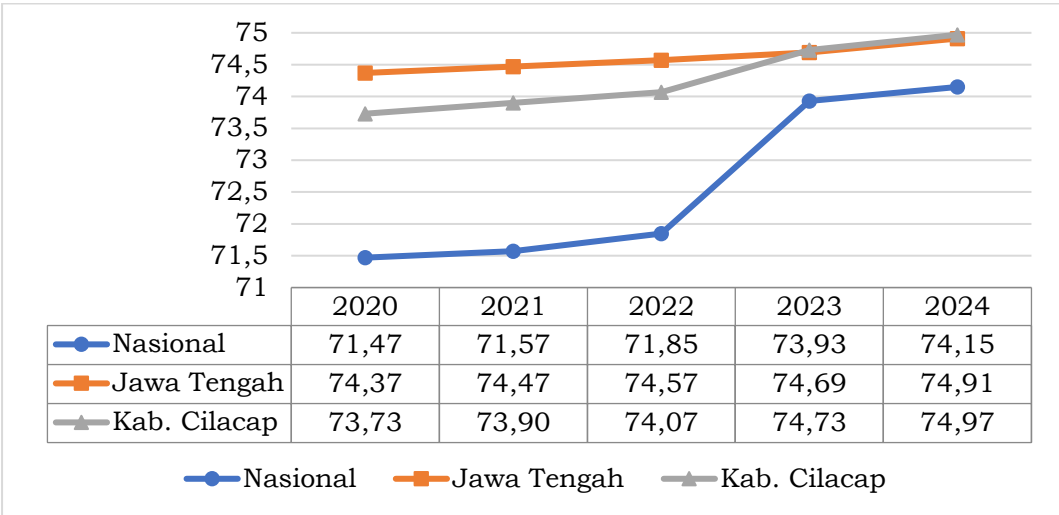
Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS untuk menilai kinerja dan perkembangan pengelolaan zakat secara nasional. Sejak 2016 telah dikaji dan disusun, IZN bertujuan memberikan gambaran sejauh mana zakat berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik serta efektivitas kelembagaan zakat, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah. Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 0,57, yang

berarti memiliki kinerja pengelolaan zakat pada range stabil jika merujuk pada kategori penilaian Indeks Zakat Nasional.

2. Kesehatan Untuk Semua

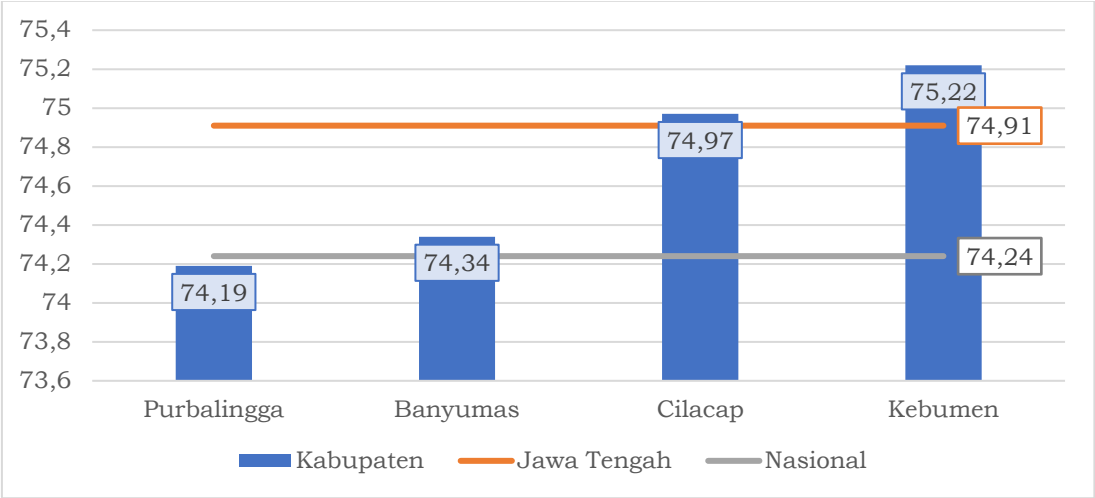
Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut. Dengan demikian pembangunan kesehatan mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pada tahun 2020 capaian UHH Kabupaten Cilacap mencapai 73,73 tahun meningkat menjadi 74,97 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 capaian Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibanding capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.



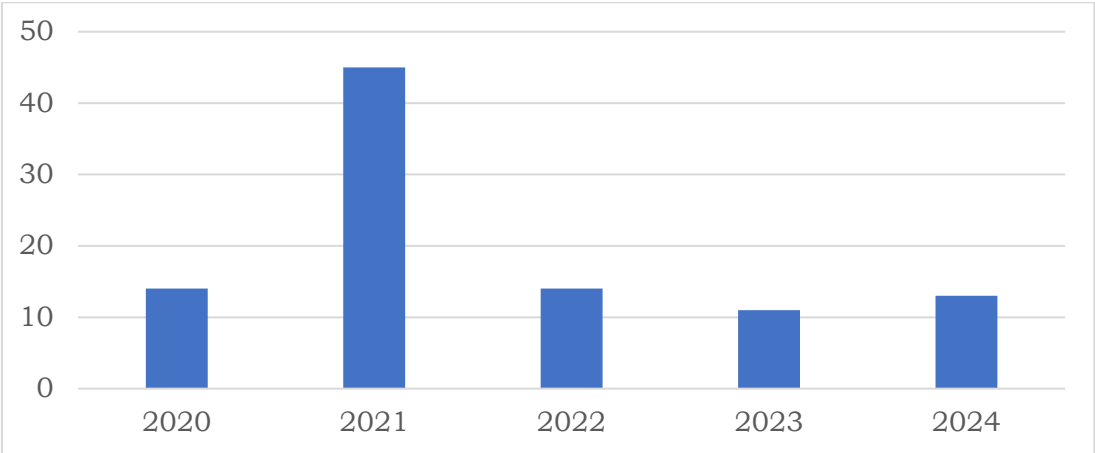
Gambar 2. 29.
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

UHH Kabupaten Cilacap capaiannya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, namun masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 30.
Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar (tahun) Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Jumlah Kematian Ibu mengukur tentang banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Cilacap sebanyak 14 kasus kemudian mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2024 terdapat 14 kasus kematian ibu jumlah kasus kematian ibu tertinggi di tahun 2021 sebanyak 45.

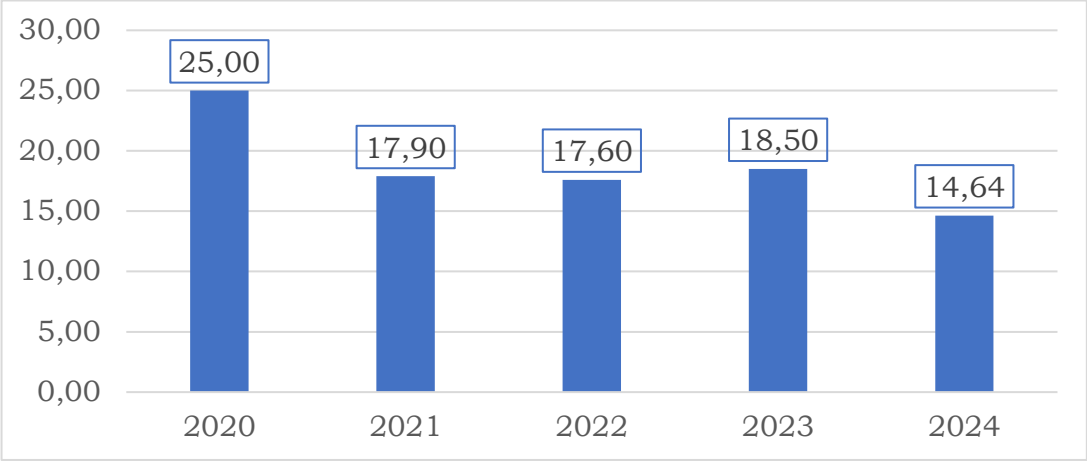


Gambar 2. 31.
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif dan

motorik. Faktor penyebabnya meliputi kekurangan gizi, sanitasi buruk, akses terbatas ke air bersih dan layanan kesehatan, serta kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi. Dampak stunting meliputi penurunan produktivitas ekonomi, peningkatan risiko penyakit, dan gangguan perkembangan sosial-emosional. Stunting diukur menggunakan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U), dengan kriteria sangat pendek (<- 3 SD) dan pendek (-3 SD hingga <-2 SD).

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Cilacap berdasarkan data SSGI dan SKI cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Cilacap sebesar 20,54%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 14,64%. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Cilacap disebabkan berbagai faktor, antara lain program stunting yang belum optimal, kurangnya koordinasi lintas sektor, kondisi gizi remaja dan ibu hamil KEK yang tinggi, serta akses terbatas terhadap sanitasi dan air bersih. Kondisi ini berpotensi menyebabkan stunting antar generasi, sehingga diperlukan intervensi yang komprehensif dan terintegrasi.

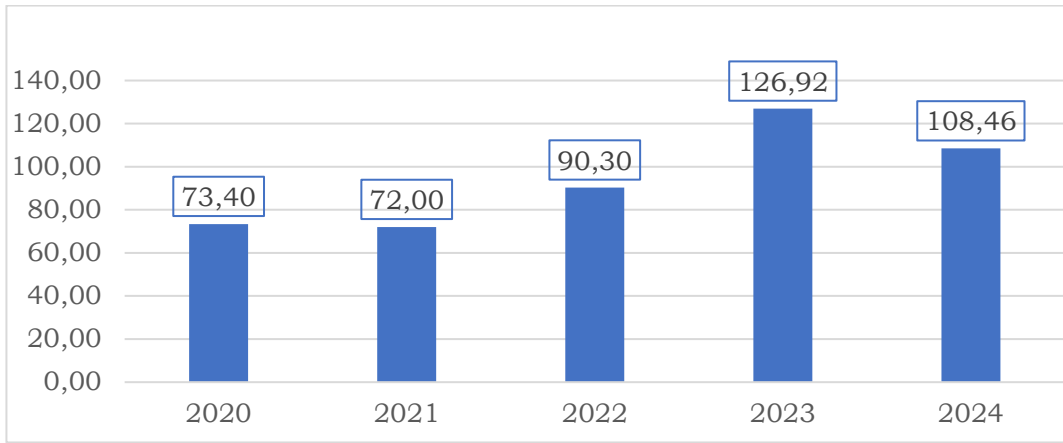


Gambar 2. 32.
Prevalensi Stunting Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang paling sering menyerang paru-paru namun juga dapat menyerang organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, atau ginjal. Penularannya terjadi melalui udara, biasanya ketika penderita TBC paru batuk, bersin, atau berbicara, sehingga partikel droplet yang mengandung bakteri terhirup oleh orang lain. Gejala umum TBC meliputi batuk berdahak selama lebih dari dua minggu, demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan kelelahan. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur menggunakan regimen obat anti-TB sesuai anjuran tenaga kesehatan, umumnya selama enam bulan atau lebih, tergantung jenis TBC yang diderita. Pencegahan TBC mencakup

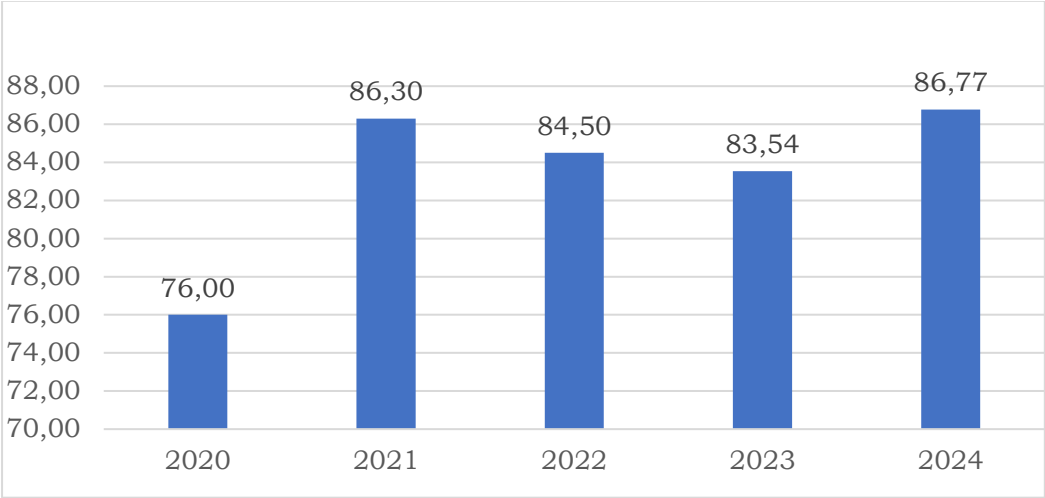
deteksi dini, pengobatan tuntas bagi penderita, vaksinasi BCG, dan menjaga daya tahan tubuh.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Pada tahun 2020 cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) sebesar 73,40% dan mengalami penurunan menjadi 72% di tahun 2021. Sedangkan tahun 2024 cakupan ini mengalami peningkatan sampai 108,46% dari target sasaran yang ditetapkan.



Gambar 2. 33.
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebesar 76%, mengalami fluktuatif sampai tahun 2024 menjadi 86,77%. Selengkapnya terkait perkembangan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 34.
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate)
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Konsep kesehatan untuk semua (*health for all*) berkaitan erat dengan data jumlah kasus PTM di Kabupaten Cilacap, karena tingginya kasus seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan obesitas menunjukkan perlunya pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta pengobatan yang cepat dan berkesinambungan perlu diperkuat agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat terlindungi dari risiko dan dampak penyakit tidak menular. Jumlah kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Cilacap selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan tren peningkatan pada beberapa penyakit namun juga penurunan pada sebagian lainnya. Hipertensi menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dan mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021 hingga mencapai 306.642 kasus, kemudian meningkat lagi pada 2022 dan 2023 sebelum menurun menjadi 321.055 kasus di 2024. Penyakit diabetes mellitus (DM) juga menunjukkan prevalensi yang tinggi, khususnya DM tidak tergantung insulin yang meningkat dari 23.045 kasus pada 2020 menjadi puncaknya 35.571 kasus pada 2023, sebelum sedikit menurun di 2024. Beberapa penyakit lain, seperti stroke dan obesitas, mengalami tren peningkatan yang cukup mencolok, di mana obesitas melonjak lebih dari 13 kali lipat dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 118.268 kasus pada 2024. Sebaliknya, beberapa penyakit seperti osteoporosis, asma bronkiale, dan PPOK cenderung menurun dalam periode tersebut. Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian PTM dapat ditekan, beban penyakit tertentu masih sangat tinggi dan berpotensi meningkat, sehingga memerlukan strategi pengendalian faktor risiko yang lebih intensif, promosi gaya hidup sehat, serta deteksi dini yang lebih masif.

Tabel 2. 22.
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kasus Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IMA	548	249	169	187	223
Decomp. Cordis	1.626	2.012	1.453	1.554	1.498
Hipertensi	83.947	306.642	353.002	357.355	321.055
Stroke	1.370	1.413	1.345	1.447	1.708
Dm Tergantung Insulin	3.330	464	480	565	486
DM Tak Tergantung Insulin	23.045	28.877	33.089	35.571	34.995
Ca Mammae	344	393	344	1.090	266
Ca Serviks	45	54	44	69	61
Leukimia	23	21	28	35	10
Retiniblastoma	403	10	10	13	-
Ca Kolorectal	32	11	8	15	6
Talasemia	NA	92	82	68	34
PPOK	1.164	2.394	2.060	1.981	1.861
Asma Bronkhiale	3.182	3.375	2.517	1.936	1.750
Ginjal Kronik	379	360	315	341	199
Osteoporosis	2.977	1.882	775	418	621
Obesitas	8.608	27.103	57.783	109.698	118.268

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Konsep kesehatan untuk semua (*health for all*) berkaitan erat dengan SDM kesehatan, hal ini dikarenakan tenaga kesehatan merupakan komponen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan SDM kesehatan yang memadai, terdistribusi secara proporsional, dan memiliki kompetensi yang baik akan memastikan setiap individu, tanpa memandang lokasi atau kondisi sosial ekonomi, dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Sebaliknya, kekurangan atau ketimpangan distribusi tenaga kesehatan akan menghambat tercapainya tujuan pemerataan layanan, sehingga visi kesehatan untuk semua sulit diwujudkan.

Jumlah sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Cilacap tahun 2024 menunjukkan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang cukup beragam, namun distribusinya belum merata. Terdapat 237 dokter spesialis dan 300 dokter umum dengan rasio gabungan 26 per 100.000 penduduk, sementara dokter gigi (termasuk spesialis) berjumlah 103 orang dengan rasio hanya 5 per 100.000 penduduk, relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan ideal. Bidan tercatat 1.158 orang, dan jumlah perawat mencapai 1.883 orang, menjadi tenaga kesehatan terbesar dari sisi jumlah. Selain itu, terdapat tenaga pendukung lain seperti tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, laboratorium, kefarmasian, serta

keterampilan fisik, yang berperan dalam memperkuat layanan kesehatan. Data ini mencerminkan bahwa meskipun tenaga kesehatan tersedia dalam berbagai kategori, tantangan masih ada pada rasio terhadap jumlah penduduk, sebaran geografis, dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Tabel 2. 23.
Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Sumber Daya Manusia Kesehatan	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Dokter Spesialis	Orang	149	88	237
Jumlah Dokter Umum	Orang	116	184	300
Rasio Dokter (spesialis+umum)	per 100.000 penduduk	-	-	26
Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	Orang	25	79	103
Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)	per 100.000 penduduk	-	-	5
Jumlah Bidan	Orang	-	1.158	-
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	-	0	-
Jumlah Perawat	Orang	848	1.276	1.883
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	-	-	0
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	37	92	129
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	21	62	83
Jumlah Tenaga Gizi	Orang	6	84	91
Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Orang	39	126	165
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Orang	46	41	87
Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik	Orang	12	34	46
Jumlah Tenaga Keteknisian Medis	Orang	64	186	250
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian	Orang	43	120	163
Jumlah Tenaga Apoteker	Orang	26	99	125
Jumlah Tenaga Kefarmasian	Orang	69	219	288

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya untuk mendukung pemerataan dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan 1 rumah sakit khusus, 21 puskesmas rawat inap, dan 17 puskesmas non-rawat inap, pelayanan kesehatan dasar dapat menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil melalui 38 puskesmas keliling dan 75 puskesmas pembantu. Selain itu, keberadaan 201 apotek, 82 klinik pratama, dan 13 klinik utama memperluas pilihan layanan kesehatan, baik untuk pengobatan maupun upaya promotif dan preventif. Ketersediaan sarana ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan konsep *health for all*, karena fasilitas yang

memadai dan terdistribusi secara merata akan memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau.

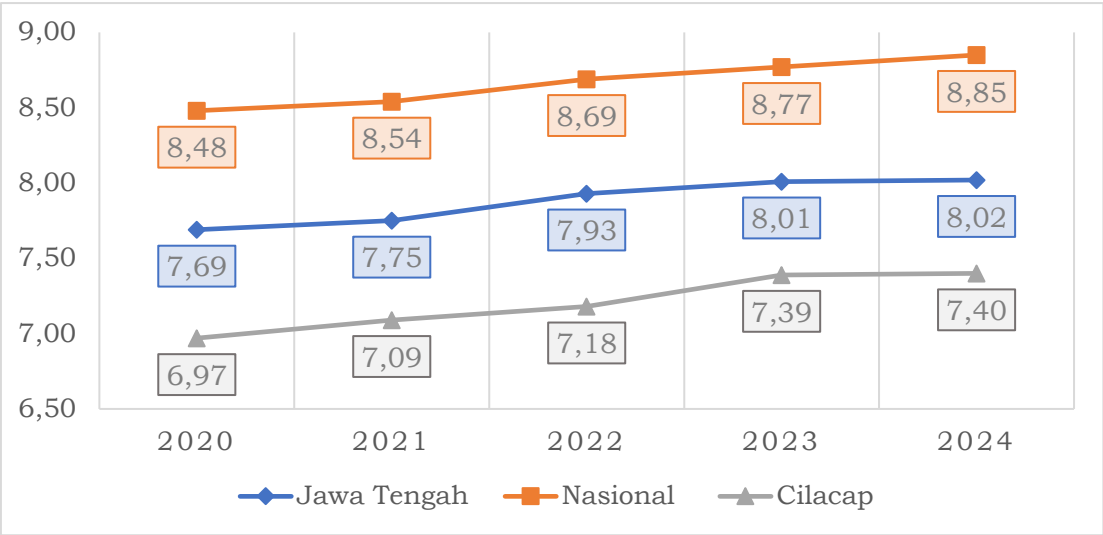
Tabel 2. 24.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah
Jumlah Rumah Sakit Khusus	1
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	21
Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	17
Jumlah Puskesmas Keliling	38
Jumlah Puskesmas pembantu	75
Jumlah Apotek	201
Jumlah Klinik Pratama	82
Jumlah Klinik Utama	13

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

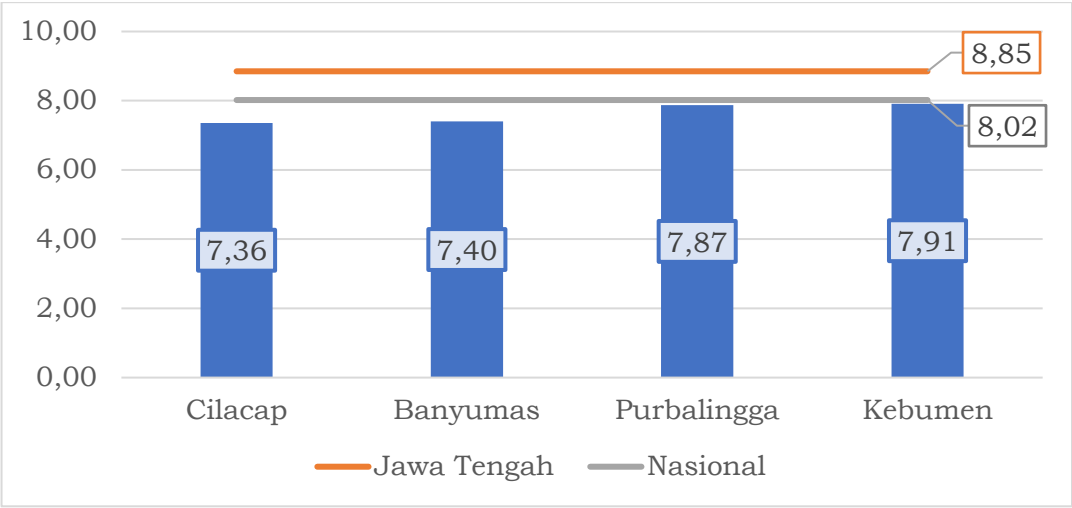
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2020-2024 mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4 SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2020 sebesar 6,97 tahun meningkat menjadi 7,40 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun 2020-2024 angka capaian Kabupaten Cilacap masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2. 35.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

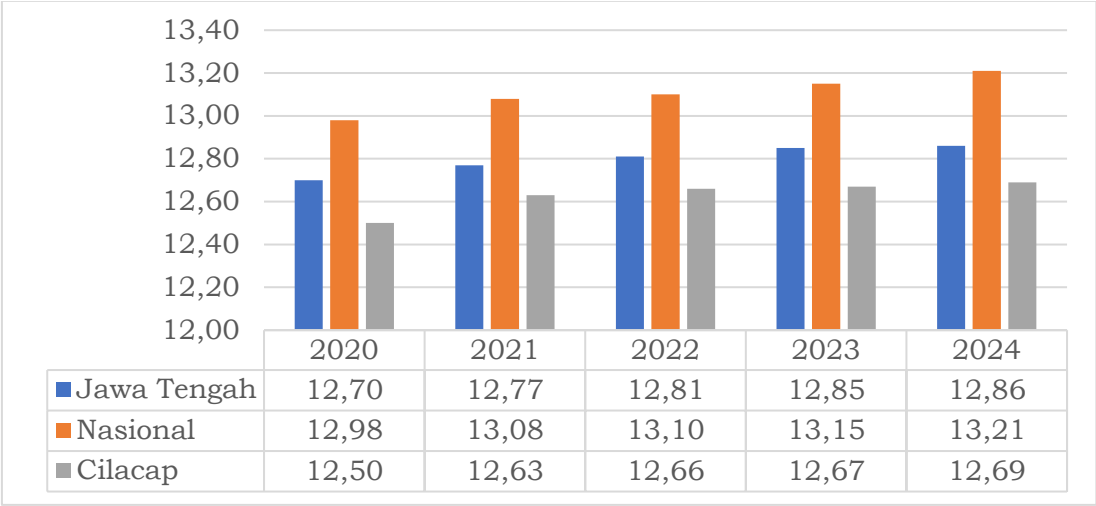
Berdasarkan grafik, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,36 tahun, sedikit lebih rendah dibanding Banyumas (7,40 tahun) dan lebih rendah dari Purbalingga (7,87 tahun) serta Kebumen (7,91 tahun). Seluruh kabupaten tersebut masih berada di bawah

rata-rata Jawa Tengah (8,85 tahun) dan rata-rata nasional (8,02 tahun). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan penduduk Cilacap masih belum setara dengan capaian provinsi dan nasional, serta relatif tertinggal dari beberapa kabupaten tetangga. Rendahnya RLS dapat dipengaruhi oleh faktor putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedesaan, dan keterbatasan ekonomi keluarga yang memaksa sebagian anak masuk ke dunia kerja lebih awal. Upaya peningkatan RLS dapat dilakukan melalui program wajib belajar yang efektif, perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan nonformal, serta intervensi sosial-ekonomi untuk menekan angka putus sekolah.



Gambar 2. 36.
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

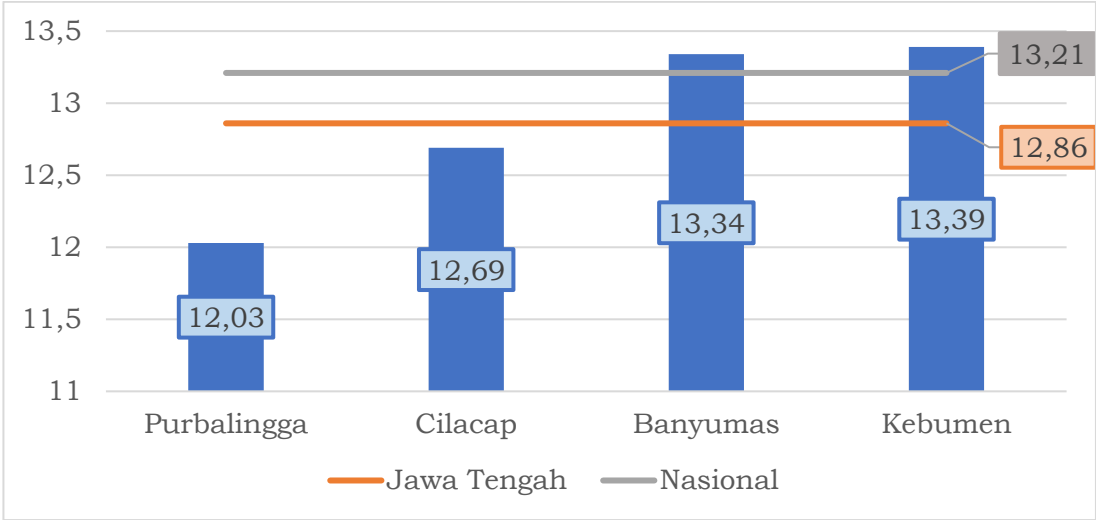
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah mencapai 12,50 tahun meningkat menjadi 12,69 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2. 37.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

HLS Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga berada di bawah capaian Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas serta berada di atas capaian Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

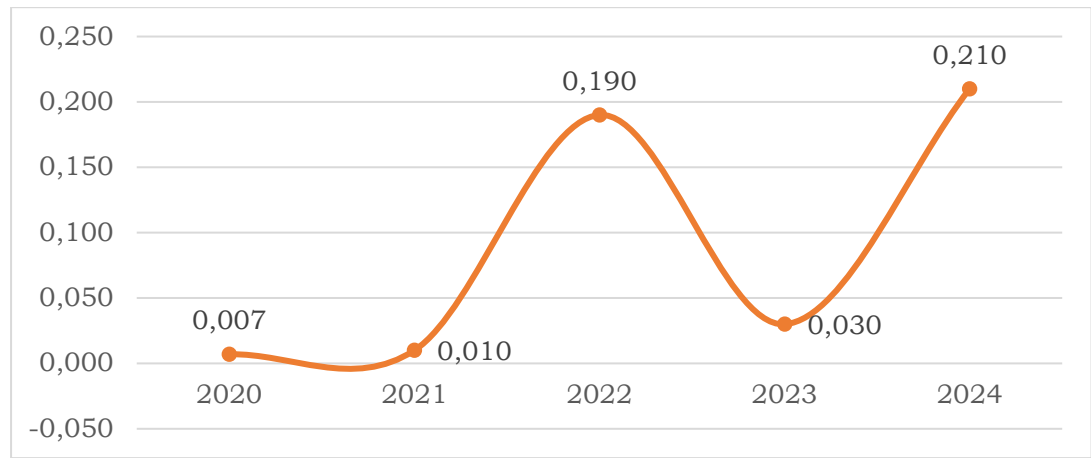


Gambar 2. 38.
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Pemanfaatan perpustakaan dan taman baca ini dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kegiatan untuk menunjang budaya literasi. Tingkat pemanfaatan perpustakaan baik secara online maupun offline masih tergolong sangat rendah. Pemanfaatan perpustakaan dan taman baca ini dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kegiatan untuk menunjang budaya literasi. Tingkat pemanfaatan perpustakaan baik secara online maupun offline masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2020 tingkat pemanfaatan perpustakaan hanya sebesar 0,007%, kemudian meningkat menjadi 0,210% di tahun 2024. Tingkat pemanfaatan

perpustakaan tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 0,190%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 39.
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap
Sumber : Dinas Arpus Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Literasi dan Numerasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi siswa dalam memahami pelajaran, berpikir kritis, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi membantu siswa memahami informasi dan berkomunikasi secara efektif, sedangkan numerasi memungkinkan mereka mengolah angka dan data untuk pengambilan keputusan yang logis. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan.

Persentase siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada Asesmen Nasional di Kabupaten Cilacap menunjukkan tren peningkatan pada seluruh jenjang dan bidang kompetensi sejak tahun 2023. Untuk literasi membaca, capaian siswa SD/ sederajat meningkat dari 58,21% pada tahun 2023 menjadi 66,67% di tahun 2024, sementara untuk jenjang SMP/ sederajat meningkat dari 68,5% menjadi 73,01%. Pada aspek numerasi, siswa SD/ sederajat menunjukkan peningkatan dari 44,39% pada tahun 2023 menjadi 55,22% di tahun 2024, sedangkan untuk SMP/ sederajat meningkat dari 57,08% menjadi 63,82%. Peningkatan ini mencerminkan hasil positif dari upaya perbaikan mutu pembelajaran dan penguatan kompetensi dasar siswa, serta dukungan kebijakan pendidikan di daerah dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

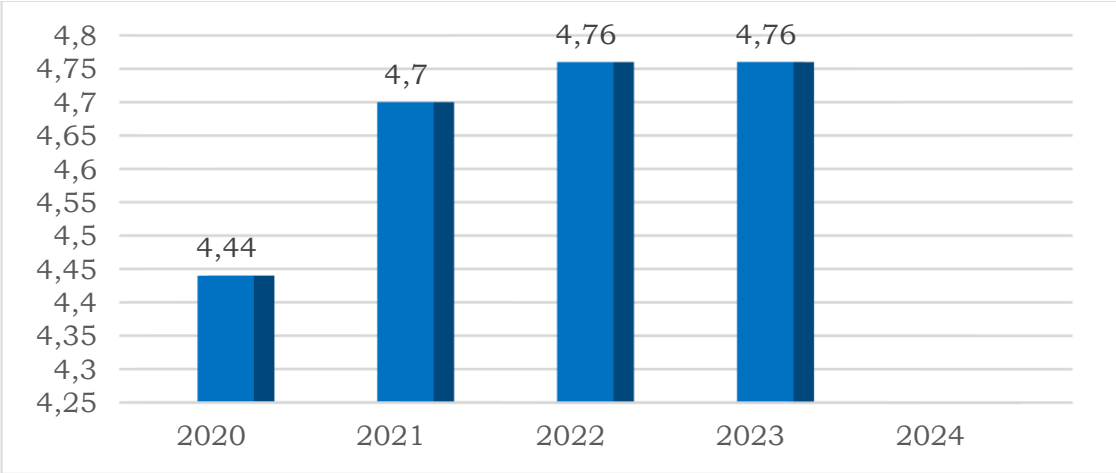
Tabel 2. 25.
Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada
Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang)
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	NA	NA	NA	58,21	66,67
b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	NA	NA	NA	68,5	73,01
c) Numerasi SD/Sederajat	%	NA	NA	NA	44,39	55,22
d) Numerasi SMP/Sederajat	%	NA	NA	NA	57,08	63,82

Sumber : Dinas P&K Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebesar 62,58%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 menjadi 52,58% di tahun 2020 namun di tahun 2024, angka partisipasi sekolah 5-6 tahun kembali meningkat menjadi 78,69%.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2019 sebanyak 4,4% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, kemudian meningkat menjadi 4,76% di tahun 2023. Walaupun hanya menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan namun ini merupakan hal yang positif karena tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Selengkapanya terkait perkembangan proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 40.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS kabupaten Cilacap Tahun 2025

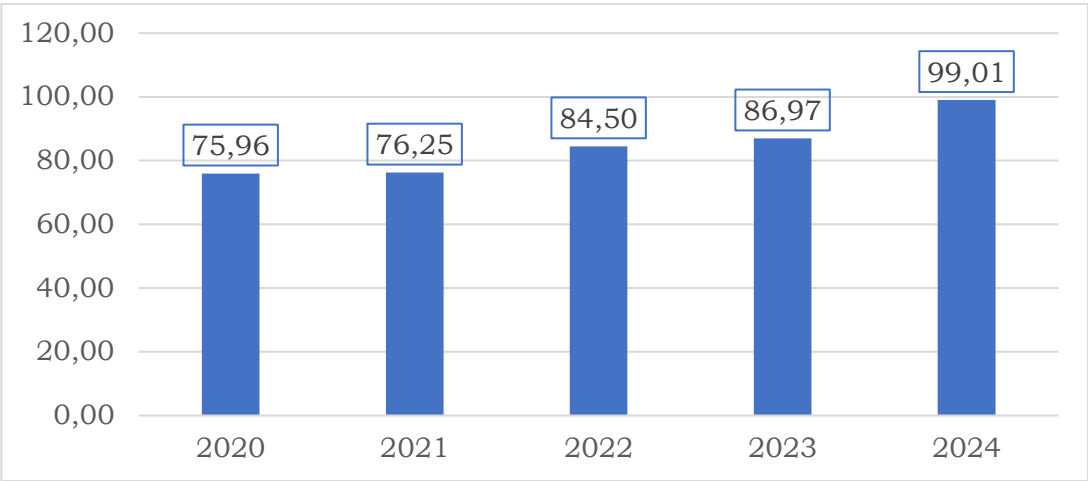
4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Setiap warga Kabupaten Cilacap memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau. Hal ini diwujudkan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi di Kabupaten Cilacap mencerminkan beberapa hal penting, yaitu: (1) Akses pelayanan kesehatan, di mana sebagian besar penduduk memiliki jaminan untuk memperoleh layanan kesehatan; (2) Kesadaran masyarakat, yang terlihat dari tingginya pemahaman akan pentingnya asuransi kesehatan untuk mendapatkan layanan yang berkualitas; (3) Komitmen Pemerintah Daerah, dalam memastikan penduduk terdaftar dan terlindungi oleh program JKN; serta (4) langkah strategis menuju Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa menghadapi hambatan finansial.

Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk memastikan setiap warganya memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu serta terjangkau. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tingginya cakupan JKN di Kabupaten Cilacap tidak hanya mencerminkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi sebagian besar penduduk, tetapi juga menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan. Selain itu, hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduk ke program JKN, sebagai langkah krusial menuju pencapaian *universal health coverage* (UHC), yaitu kondisi di mana setiap individu dapat

memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa menghadapi kesulitan finansial.

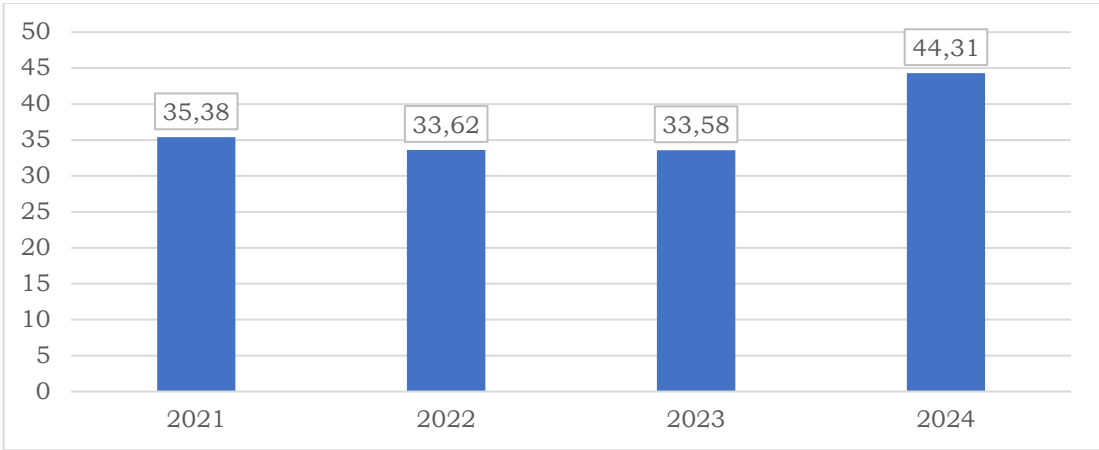
Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 75,96% menjadi 99,01% di tahun 2024. Namun demikian tingkat kepesertaan aktif JKN masih cenderung rendah, pada tahun 2023 baru sebesar 63,06% dan tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 64,01%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 41.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 35,38% meningkat menjadi 44,31% di tahun 2024.

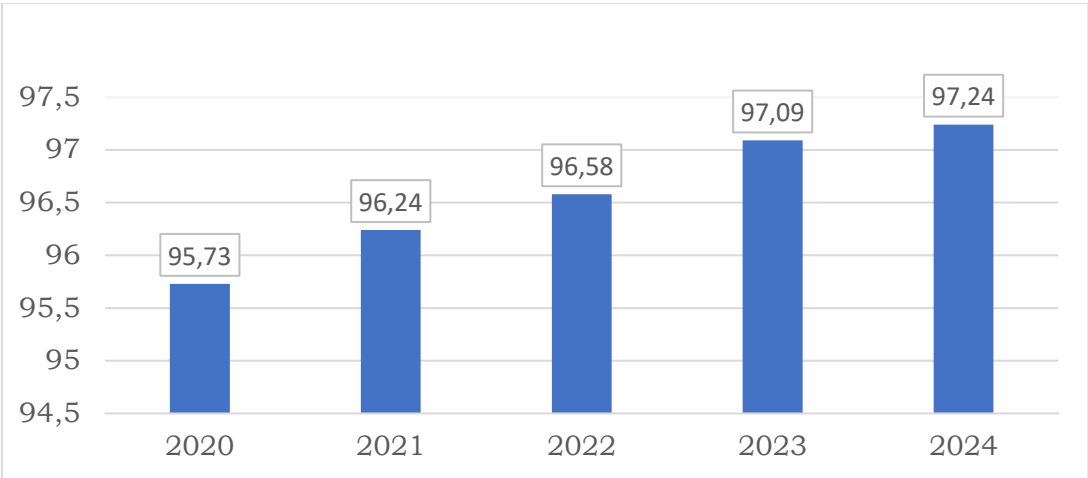


Gambar 2. 42.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, Tahun 2025

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Muatan Lokal dalam pendidikan dan kebudayaan penting untuk menanamkan identitas, nilai, dan karakter daerah kepada peserta didik, sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap budaya lokal. Pembelajaran berbasis muatan lokal juga menjadikan pendidikan lebih kontekstual, relevan dengan lingkungan sekitar, serta berperan dalam pelestarian kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, muatan lokal mendukung pembangunan karakter dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.

Persentase satuan pendidikan di Kabupaten Cilacap yang memiliki guru pengajar muatan lokal (bahasa daerah/seni budaya) dan mengarusutamakan kebudayaan menunjukkan tren peningkatan, dari 96,24% pada tahun 2021 menjadi 97,24% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen yang konsisten dalam penguatan pendidikan berbasis budaya serta pelestarian nilai-nilai lokal melalui jalur formal. Kondisi ini sejalan dengan upaya membentuk ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui integrasi nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran.

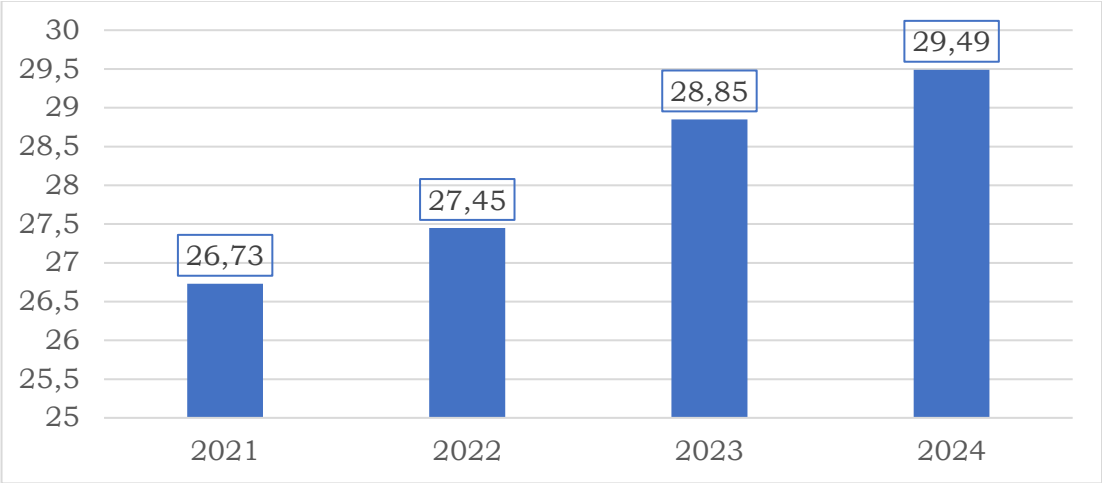


Gambar 2. 43.
**Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok
Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024**

Sumber : Dinas P&K Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan, sedangkan definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU No. 5 Th. 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Indikator ini menggambarkan sejauhmana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Cilacap beserta nilai pentingnya.

Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari 26,73% pada tahun 2021 menjadi 29,49% pada tahun 2024. Meskipun terdapat tren positif, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar potensi budaya belum sepenuhnya terdokumentasikan dan dilestarikan. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan kebijakan pelestarian budaya yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berkebudayaan maju, serta memastikan bahwa kekayaan budaya lokal dapat diwariskan kepada generasi mendatang.



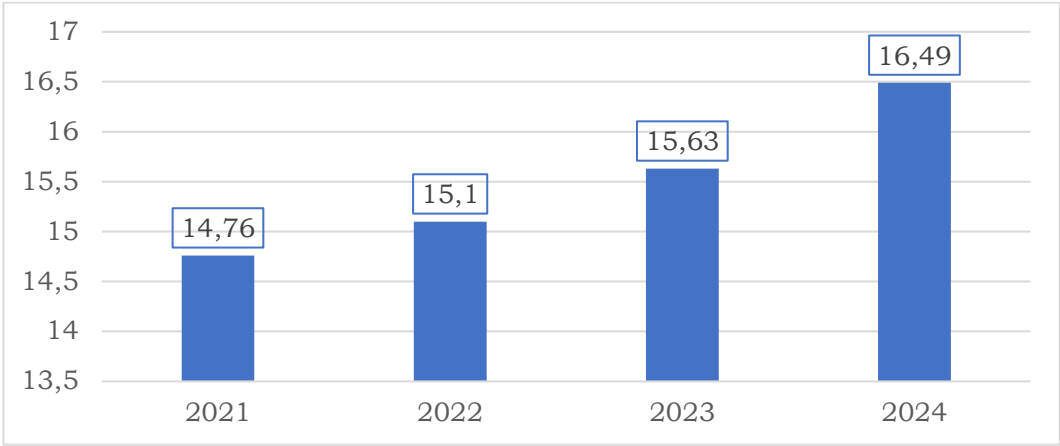
Gambar 2. 44.
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
yang Dilestarikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024
Sumber : Dinas P&K Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Kunjungan Tempat bersejarah memiliki hubungan erat dengan upaya mewujudkan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Melalui kunjungan tersebut, masyarakat dapat mengenal dan memahami nilai-nilai sejarah, keagamaan, dan budaya yang membentuk jati diri bangsa. Hal ini memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan prinsip maslahat dalam kehidupan beragama. Di sisi lain, pemanfaatan tempat bersejarah sebagai wahana edukasi budaya juga mendorong pelestarian warisan budaya serta pengembangan karakter yang berbasis pada nilai tradisi, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang berbudaya maju dan berkepribadian kuat. Indikator ini menggambarkan sejauhmana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Cilacap sebesar 42.449 orang, kemudian meningkat menjadi 46.990 orang di tahun 2024. Jumlah pengunjung ini berdasarkan data dari Musesum Susilo Sudarman dan Benteng Pendem.

Kelompok kesenian yang aktif berkontribusi dalam menjaga, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai budaya lokal yang sarat dengan pesan moral, spiritual, dan sosial. Aktivitas kesenian sering kali mengandung nilai-nilai luhur seperti toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan, yang sejalan dengan prinsip maslahat dalam kehidupan beragama. Selain itu, keberlangsungan kelompok kesenian memperkuat identitas budaya daerah dan membentuk ekosistem kebudayaan yang dinamis, inklusif, dan berkemajuan.

Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Cilacap

menunjukkan tren peningkatan, dari 14,76% pada tahun 2021 menjadi 16,49% pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya masih relatif lambat, kecenderungan ini menunjukkan adanya upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas kesenian di masyarakat. Peningkatan partisipasi kelompok kesenian penting dalam mendukung pelestarian budaya, memperkuat identitas lokal, serta menjadi sarana ekspresi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

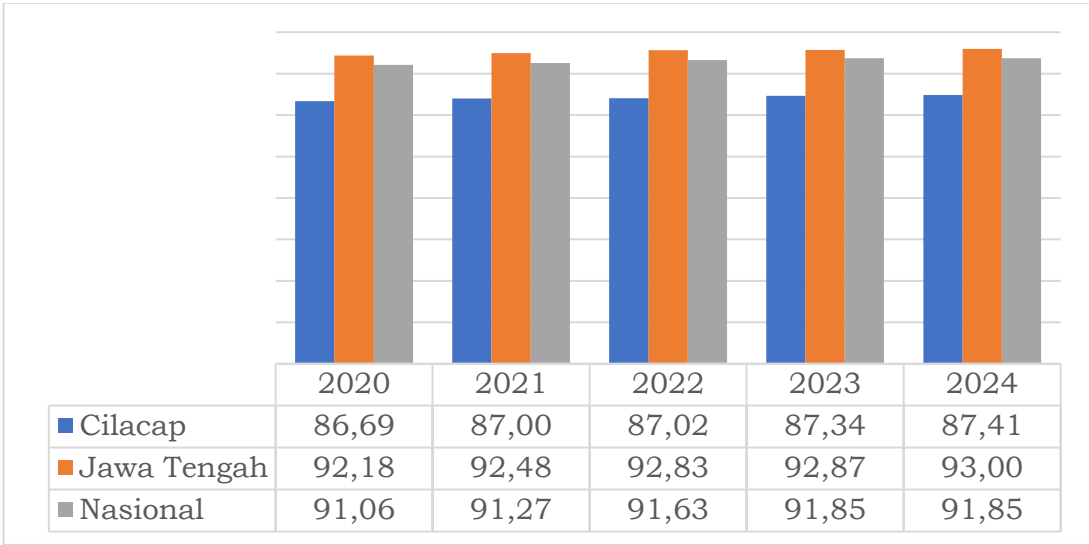


Gambar 2. 45.
**Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan
pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir di Kabupaten Cilacap
Tahun 2021-2024**

Sumber : Dinas P&K Kabupaten Cilacap Tahun 2025

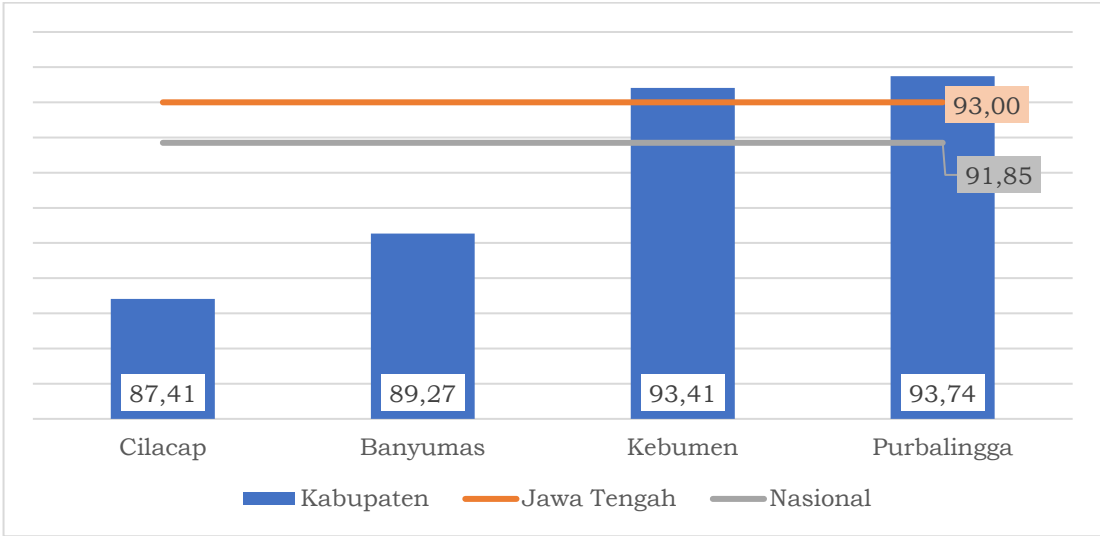
6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Capaian IPG Kabupaten Cilacap kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan cenderung meningkat. Tercatat posisi tertinggi capaian IPG Kabupaten Cilacap di tahun 2020 yaitu sebesar 86,69, sedangkan di tahun 2021 berada diangka 87,00 kemudian meningkat sehingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 87,41. Sementara itu, tren IPG Provinsi Jawa Tengah dan nasional menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten, yang menandakan adanya peningkatan dalam pembangunan gender di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pembangunan gender di Cilacap perlu ditingkatkan lebih agar sejalan dengan capaian provinsi dan nasional.



Gambar 2. 46.
Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

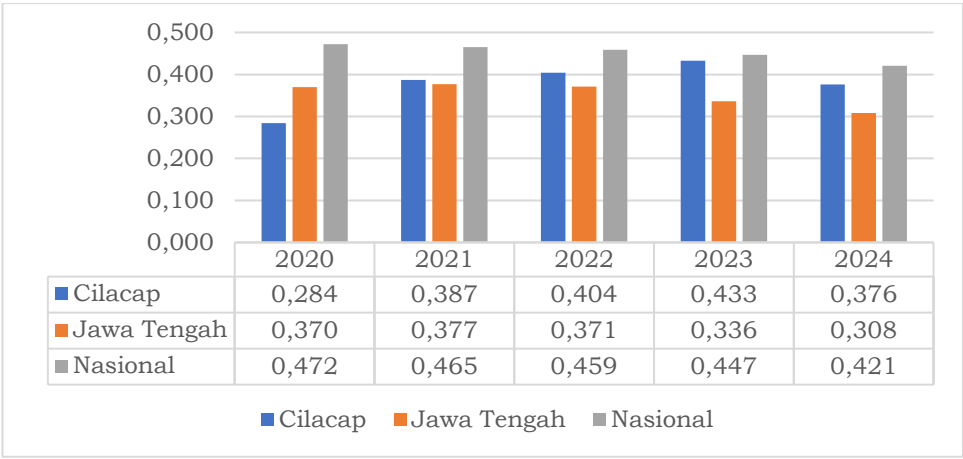
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 sebesar 87,41, menunjukkan ketimpangan gender yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Banyumas (89,27), Kebumen (93,41) dan Purbalingga (93,47). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan gender antara laki-laki dan perempuan di Cilacap masih menjadi tantangan serius, terutama dalam umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang cenderung lebih baik dalam pencapaian pembangunan gender, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pada sektor pembangunan gender di Kabupaten Cilacap.



Gambar 2. 47.
Perkembangan IPG Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi. IKG digunakan untuk mengukur kehilangan potensi pembangunan akibat adanya ketimpangan gender, sehingga semakin rendah nilai IKG menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih baik.

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2020–2024, Kabupaten Cilacap menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai IKG sempat menurun tajam menjadi 0,284 pada tahun 2020, namun kembali meningkat menjadi 0,433 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,376. Nilai IKG Cilacap pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,308) dan dibawah angka nasional (0,421), yang mengindikasikan tingkat ketimpangan gender di Cilacap masih relatif tinggi. Sementara itu, tren IKG Provinsi Jawa Tengah dan nasional menunjukkan kecenderungan menurun secara konsisten, yang menandakan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender di Cilacap perlu ditingkatkan agar sejalan dengan capaian provinsi dan nasional.

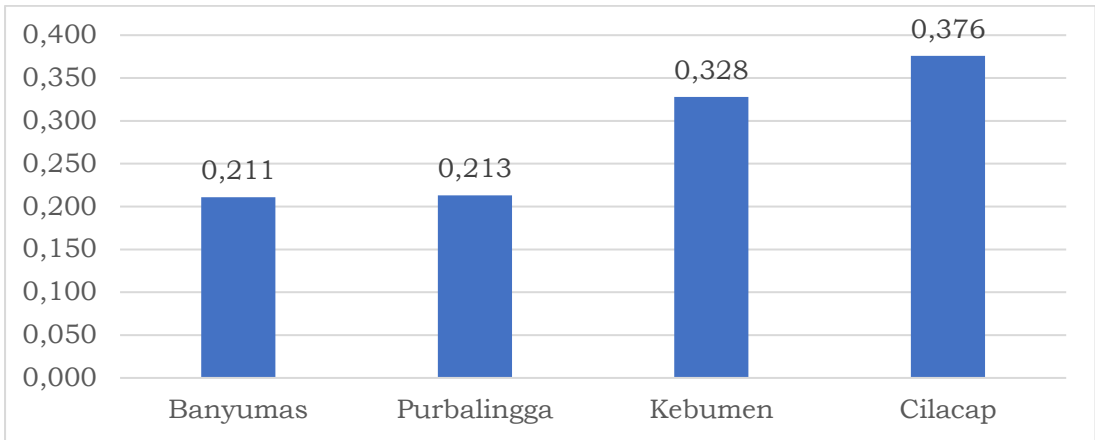


Gambar 2. 48.
Perkembangan IKG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 sebesar 0,376, menunjukkan ketimpangan gender yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Banyumas (0,211), Purbalingga (0,213), dan Kebumen (0,328). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Cilacap masih menjadi tantangan serius, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses ekonomi dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang cenderung lebih baik dalam pencapaian kesetaraan gender,

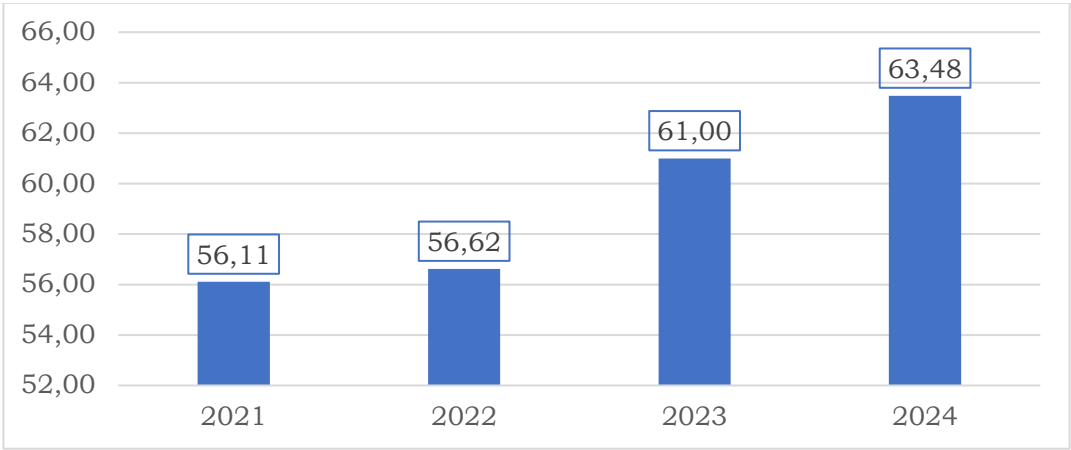
kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan afirmatif dan program responsif gender yang lebih terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.



Gambar 2. 49.
Perkembangan IKG Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini mencerminkan sejauh mana keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. iBangga digunakan secara nasional untuk menggambarkan kondisi pembangunan keluarga di seluruh wilayah Indonesia, serta menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang mendukung penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Cilacap (iBangga) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari 56,11 pada tahun 2021 menjadi 63,48 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pencapaian pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meningkatnya nilai iBangga menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Cilacap mulai menunjukkan hasil positif, meskipun masih diperlukan upaya yang konsisten untuk mempersempit kesenjangan gender secara lebih merata di seluruh sektor.

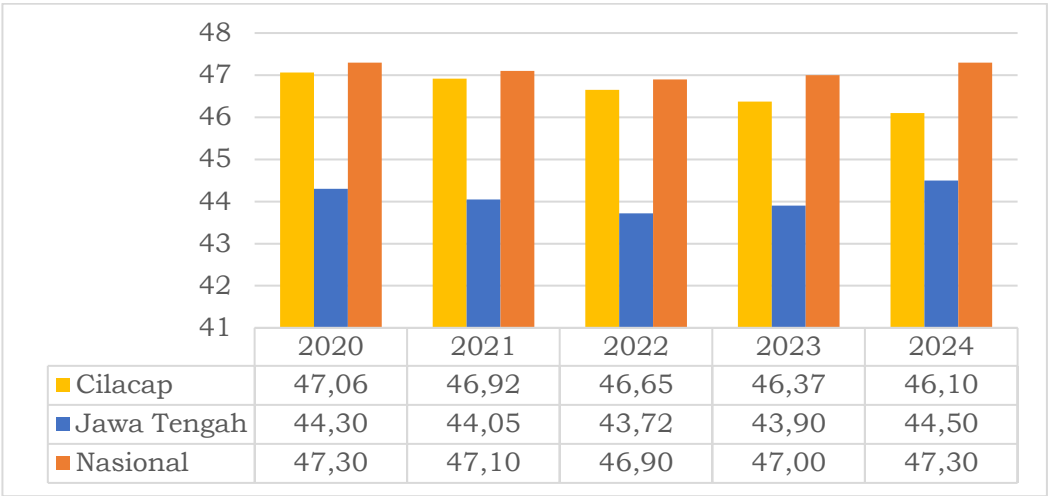


Gambar 2. 50.
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Cilacap
Sumber : <https://siperindu.online/pilar/>

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

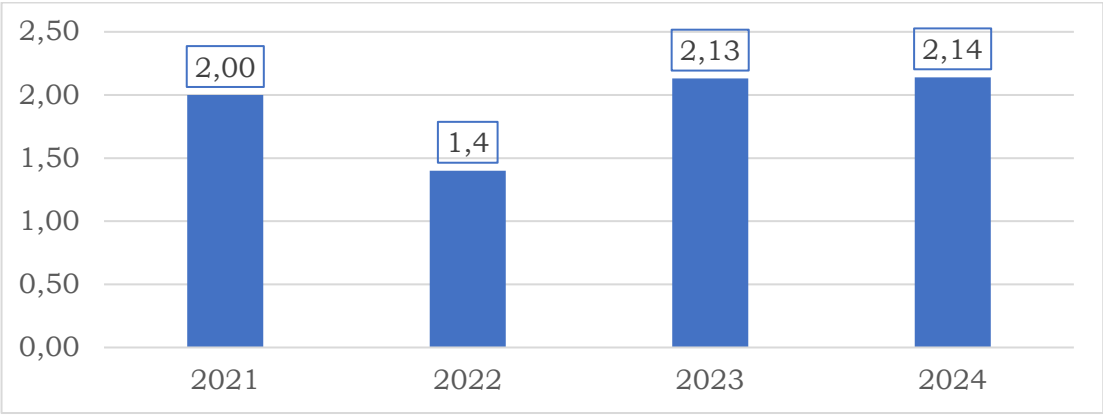
Angka Ketergantungan Penduduk merupakan indikator demografi yang menunjukkan rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Kabupaten Cilacap menunjukkan trend penurunan angka ketergantungan penduduk mulai dari tahun 2020 sebesar 47,06 menjadi 46,92 pada tahun 2021. Hingga pada tahun 2024 menurun hingga sebesar 46,10. Trend penurunan ini menunjukan bahwa proporsi penduduk usia produktif meningkat relatif terhadap penduduk usia non-produktif. Sehingga, Penurunan yang konsisten mengindikasikan stabilitas demografi yang baik. Selengkapnya dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 51.
Perkembangan Angka Ketergantungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi, dan Produktivitas
Ekonomi

Kapabilitas Inovasi dapat diartikan sebagai bentuk pengukuran bentuk kreatif dan adaptif pemerintahan daerah dalam melaksanakan pada sektor pelayanan publik. Kemudian dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan berbasis inovasi. Kabupaten Cilacap memiliki capaian Indeks Kapabilitas Inovasi pada tahun 2021 sebesar 2 angka kemudian meningkat menjadi 2,14 angka pada tahun 2024. Berikut merupakan capaian Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Cilacap.

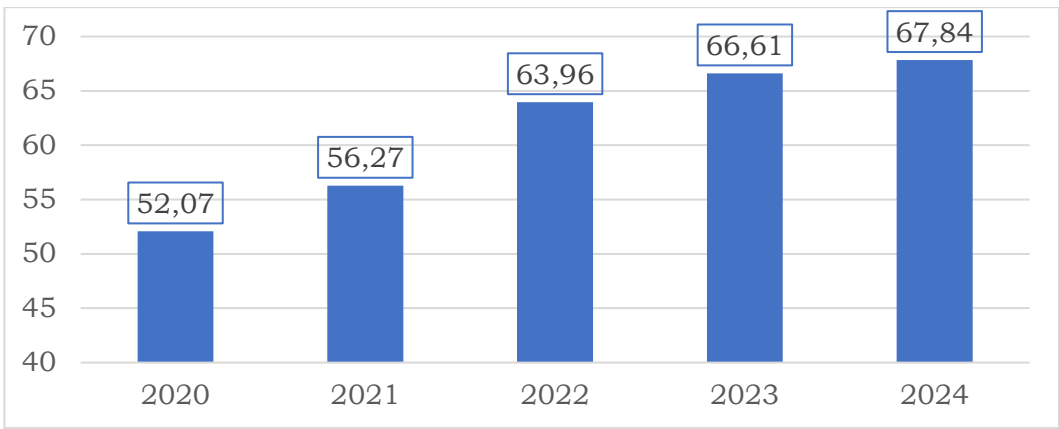


Gambar 2. 52.
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Rumah Tangga dengan Akses Internet sangat penting karena menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat keterhubungan masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi di era digital. Akses internet memungkinkan anggota rumah tangga untuk memperoleh informasi secara cepat, mengikuti pembelajaran daring, mengakses layanan publik secara digital, serta mendukung kegiatan ekonomi seperti wirausaha, pemasaran digital, dan pekerjaan jarak jauh. Selain itu, internet juga berperan penting dalam memperluas wawasan, memperkuat literasi digital, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan sosial. Oleh karena itu, semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses internet mencerminkan semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara inklusif dalam berbagai aspek kehidupan.

Di Kabupaten Cilacap, akses internet menunjukkan tren peningkatan yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses internet tercatat sebesar 52,07 persen, dan meningkat menjadi 67,84 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur digital dan peningkatan kesadaran serta kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas internet

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

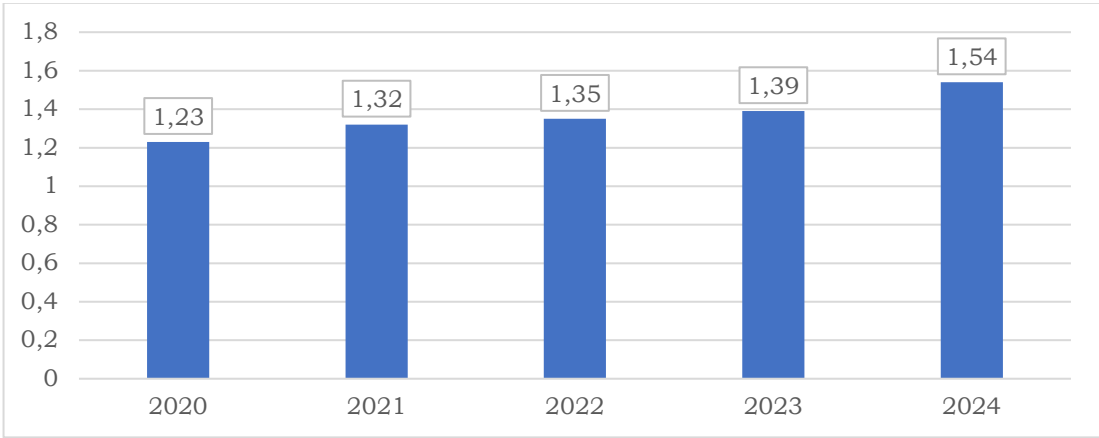


Gambar 2. 53.
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum merupakan persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan jasa makan minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana sektor pariwisata, khususnya layanan akomodasi serta makanan dan minuman, memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi proporsinya, semakin besar pula peran sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat.

Di Kabupaten Cilacap, proporsi sektor ini menunjukkan tren fluktuatif dalam kurun waktu 2020–2024, namun secara umum mengalami peningkatan, dari 1,23 persen pada tahun 2020 menjadi 1,54 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas pariwisata, baik dari sisi kunjungan wisatawan maupun pertumbuhan usaha di bidang perhotelan, restoran, dan kuliner. Peningkatan ini juga dapat diartikan sebagai peluang strategis untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

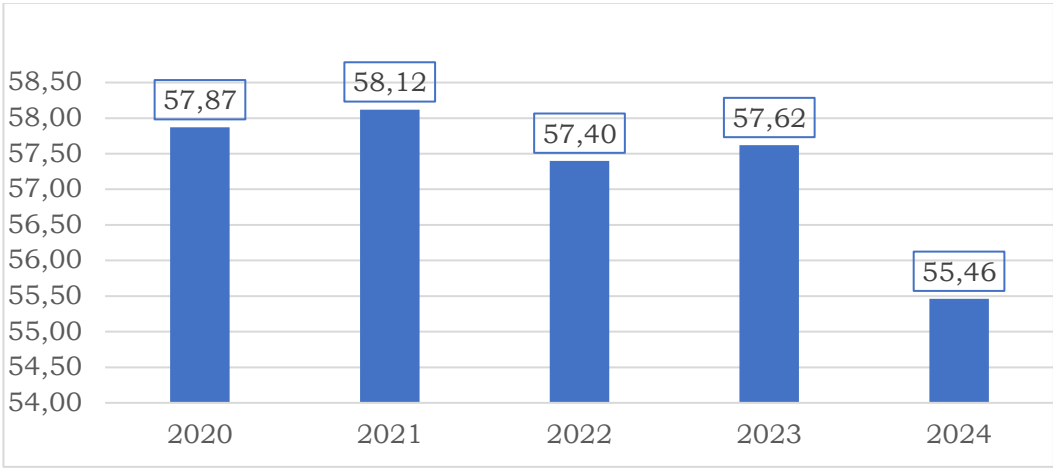


Gambar 2. 54.
PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

PDRB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana sektor industri pengolahan berperan dalam struktur dan pertumbuhan ekonomi regional. Industri pengolahan meliputi aktivitas yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, logam, dan lainnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian daerah, baik dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, maupun kontribusinya terhadap ekspor daerah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 57,87 persen dan mengalami penurunan menjadi 55,46 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan dinamika dalam kinerja sektor industri, baik yang terkait dengan migas maupun nonmigas. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan tetap menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Cilacap. Secara umum, fluktuasi tersebut tetap menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah hasil produksi. Upaya penguatan daya saing industri, diversifikasi produk, dan hilirisasi menjadi penting untuk menjaga kontribusi sektor ini secara berkelanjutan.



Gambar 2. 55.
PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

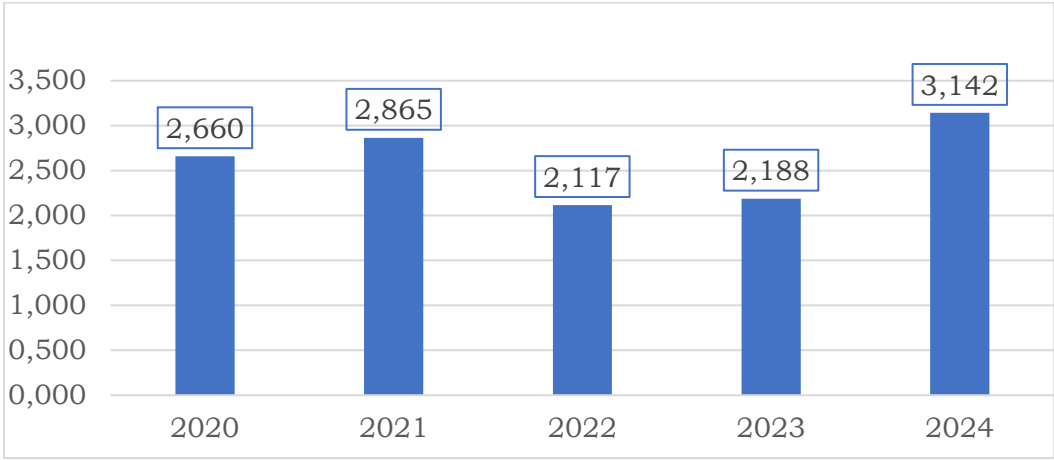
Tamu Wisatawan penting dalam peningkatan ekonomi daerah karena mereka secara langsung mendorong perputaran ekonomi melalui pengeluaran untuk akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, belanja, serta jasa hiburan dan rekreasi. Kehadiran wisatawan meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan memperluas pasar bagi produk lokal dan memperkuat identitas budaya serta daya tarik destinasi. Dalam jangka panjang, sektor pariwisata yang berkembang dengan baik berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dan menginap di hotel-hotel di Kabupaten Cilacap, semakin banyak jumlah wisatawan yang datang dan tinggal lebih lama akan berkontribusi terhadap peningkatan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja wisatawan, baik untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, maupun aktivitas lainnya selama berada di destinasi. Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan signifikan, dari 467.059 wisatawan pada tahun 2020 menjadi 1.320.706 wisatawan pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata yang positif, serta memperkuat peran sektor ini dalam mendukung perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan usaha lokal.

Rasio Kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh

tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Cilacap 2,660%, kemudian mengalami fluktuatif sampai di tahun 2024 menjadi 3,142%. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Perkembangan rasio kewirausahaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 56.
Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Cilacap terus meningkat dalam kurun waktu tiga taun terakhir. Pada tahun 2021 rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 0,30%, kemudian meningkat menjadi 0,41% di tahun 2022. Penurunan terjadi di tahun 2023 yaitu 0,17%, kemudian naik pada tahun 2024 sebesar 0,18%. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan

semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 26.
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Volume Koperasi (Juta Rupiah)	Rasio Volume Koperasi/PDRB (%)
2021	109.653.598.170.000	329.459.699.764	0,30
2022	121.021.797.780.000	492.414.043.073	0,41
2023	132.425.323.930.000	224.888.099.264	0,17
2024	139.494.759.024.787	244.349.013.533	0,18

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa mudah masyarakat di suatu daerah, seperti kabupaten atau kota, dalam mengakses layanan keuangan seperti perbankan, koperasi, asuransi, dan lainnya. IKAD menggambarkan tiga hal utama: seberapa banyak layanan keuangan tersedia (akses), seberapa sering masyarakat menggunakannya (penggunaan), dan seberapa dalam layanan itu menjangkau berbagai kelompok masyarakat (kedalaman). Indeks ini membantu pemerintah daerah mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat bisa lebih mudah dan adil dalam menggunakan layanan keuangan. Pada tahun 2024 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Cilacap sebesar 4,75. Angka ini menunjukkan tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal seperti perbankan, koperasi, dan asuransi. Semakin tinggi nilai IKAD, semakin baik pula inklusi keuangan di suatu daerah. Capaian ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cilacap telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, baik melalui peningkatan ketersediaan fasilitas dan literasi keuangan dalam mendorong pemerataan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB, menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Total dana pihak ketiga terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun cenderung fluktuatif. Pada

tahun 2020 sebesar 0,33%, kemudian mengalami fluktuatif sampai tahun 2024 menjadi 0,24%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27.
Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Dana Pihak Ketiga (Juta Rupiah)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
2020	104.542.659.550.000	349.309.770.857,00	0,33
2021	109.653.598.170.000	365.405.697.256,00	0,33
2022	121.021.797.780.000	326.947.029.021,00	0,27
2023	132.425.323.930.000	335.433.090.912,00	0,25
2024	139.494.759.024.787	341.683.257.000,00	0,24

Sumber : BPR BKK Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Total kredit terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 10 tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 0,27%, kemudian mengalami fluktuatif sampai tahun 2024 menjadi 0,22%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 28.
Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)

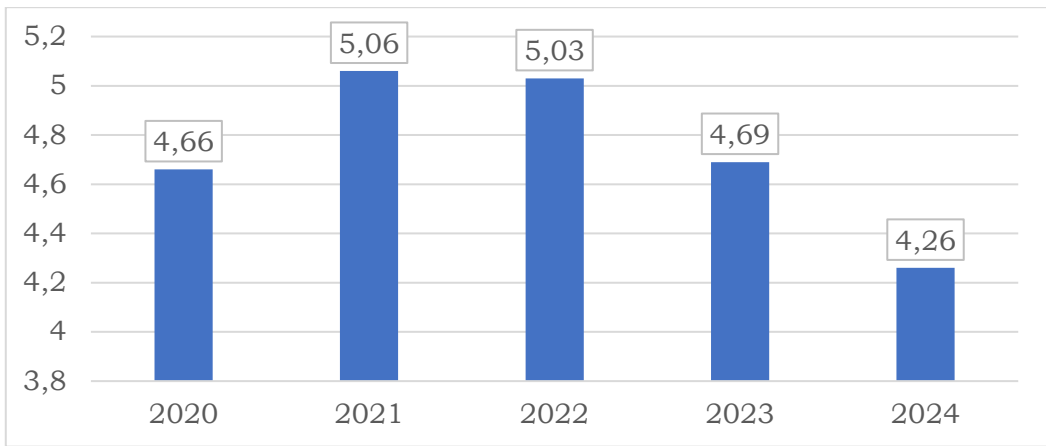
Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Total Kredit (Juta Rupiah)	Total Kredit/PDRB (%)
2020	104.542.659.550.000	283.384.894.310,00	0,27
2021	109.653.598.170.000	288.081.663.344,00	0,26
2022	121.021.797.780.000	140.693.150.000,00	0,12
2023	132.425.323.930.000	287.455.035.668,00	0,22
2024	139.494.759.024.787	310.228.274.000,00	0,22

Sumber : BPR BKK Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Return On Asset (ROA) adalah indikator yang mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset. ROA mencerminkan produktivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis pembangunan daerah, seperti menentukan sektor produktif dan menarik investasi, yang berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung menunjukan fluktuatif. Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap terendah ada di tahun 2020 sebagai akibat dari

adanya pandemi covid-19 sebesar -20,96. Semakin tinggi tingkat ROA BUMD, maka dapat diketahui tingkat produktivitas juga semakin tinggi. Sehingga pada tahun 2024 membaik sebesar 1,13. Selengkapnya terkait perkembangan *Return On Asset* (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

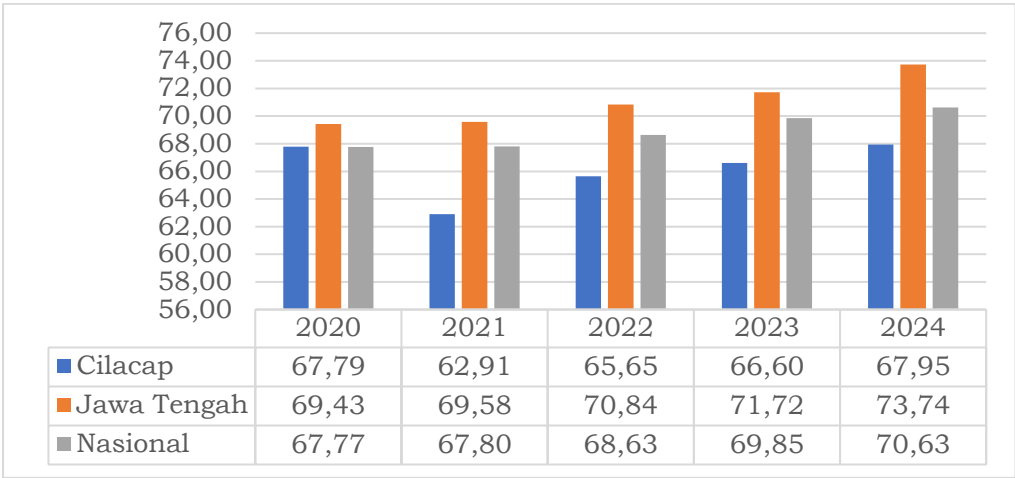


Gambar 2. 57.
Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Di Kabupaten Cilacap, perkembangan TPAK menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tren ini dapat diartikan sebagai indikasi positif terhadap dinamika pasar tenaga kerja dan potensi produktivitas daerah, meskipun tetap perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan.

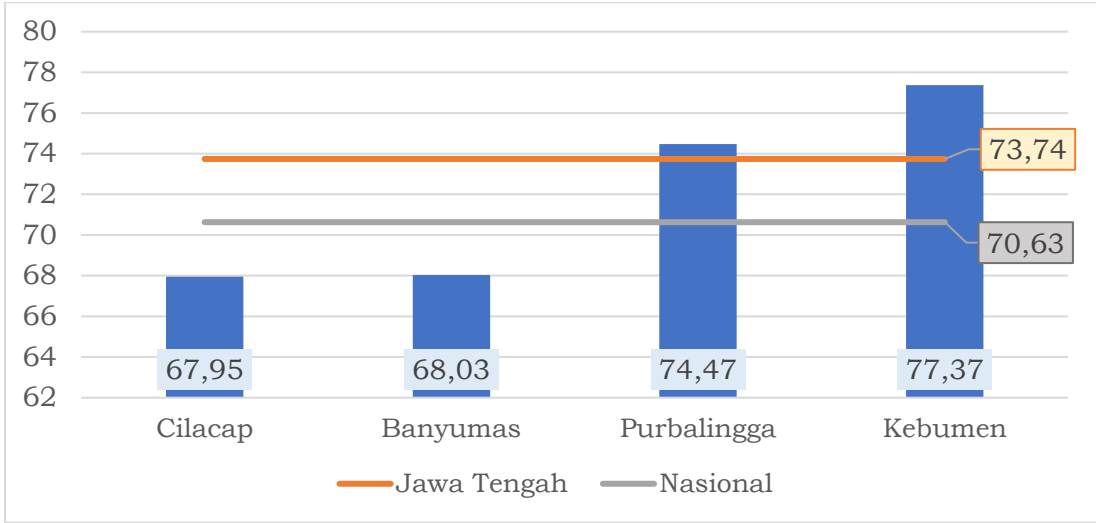
Pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 67,79 persen dan mengalami peningkatan menjadi 67,95 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap mencapai 1.079.926 orang, sementara jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.418.631 orang. Meskipun tren TPAK menunjukkan stabilitas dan sedikit peningkatan, jika dibandingkan dengan capaian TPAK Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional, TPAK Kabupaten Cilacap masih berada di posisi terbawah. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja belum optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih intensif, seperti perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pelatihan keterampilan, dan

pemberdayaan ekonomi yang menyasar kelompok usia produktif yang belum aktif secara ekonomi. Selengkapnya terdapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 58.
TPAK Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

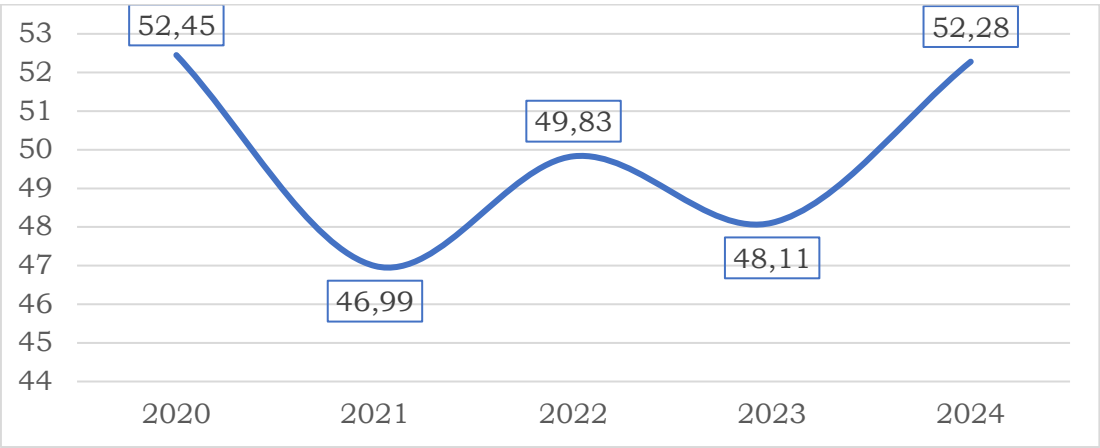
TPAK Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 berada di bawah capaian kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banyumas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk usia kerja di Kabupaten Cilacap dalam aktivitas ekonomi relatif lebih rendah dibandingkan wilayah sekitarnya.



Gambar 2. 59.
TPAK Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Di Kabupaten Cilacap, TPAK Perempuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian sebesar 52,45 persen pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 52,28 persen pada tahun 2024. Meskipun

penurunannya relatif kecil, kondisi ini mencerminkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pasar kerja belum mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal, TPAK perempuan yang tinggi menjadi indikator penting terhadap optimalisasi potensi ekonomi daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan yang lebih responsif gender untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih aktif dan setara dalam dunia kerja.



Gambar 2. 60.
TPAK Perempuan kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau memiliki peran krusial dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dewasa ini, fokus pembangunan berbasis keberlanjutan sosial dan lingkungan kerap menjadi isu penting untuk menjamin keberlanjutan sebuah pembangunan daerah. Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa jenis pengembangan sumber energi terbarukan. Potensi energi baru terbarukan (EBT) Kabupaten Cilacap berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia antara lain potensi angin (onshore) 419,0 MW; (offshore) 3347 MW; PLTS 12,2 GWp; PLTA RoR 2,0 MW; PLTA Bendungan 28,3 MW. Potensi biomassa sampah kota teknis 2,1 MW; sampah kota teoritis 7,0 MW; hutan produksi kritis 1610,6 Ha; dan potensi cadangan panas bumi sebesar 15 MW.

Ekonomi Biru merupakan salah satu strategi prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga ekosistem pesisir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024, pemerintah daerah

diwajibkan mengintegrasikan Indeks Ekonomi Biru (IEB) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan instrumen pengukuran kinerja pembangunan ekonomi biru yang secara nasional mencakup empat pilar, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, implementasi di tingkat daerah difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, sesuai dengan ketersediaan data dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap sebagai daerah pesisir dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi biru dalam arah kebijakan pembangunannya. Pada pilar ekonomi, sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan signifikan. Produksi perikanan tangkap dan budidaya meningkat dari 42.740 ton pada 2022 menjadi 65.334 ton pada 2024. Budidaya tambak juga mengalami kenaikan dari 7.396 ton pada 2022 menjadi 8.031 ton pada 2024, sedangkan produksi akuakultur berada di kisaran 8.213 ton hingga 7.935 ton dalam periode yang sama. Dari sisi logistik, volume angkutan laut mencapai lebih dari 1,5 juta ton pada 2024, memperkuat peran Cilacap sebagai simpul distribusi hasil perikanan regional.

Pada pilar lingkungan, Kabupaten Cilacap berhasil menjaga kualitas ekosistem pesisir dengan kondisi hutan mangrove yang tetap baik (94,95%) selama periode 2022–2024, disertai rehabilitasi mangrove seluas 40 hektare per tahun. Upaya pengendalian pencemaran juga terus dilakukan, meskipun jumlah sampah laut masih cukup besar, yaitu sekitar 5.686 ton pada 2024.

Dari sisi sosial, aspek kesejahteraan masyarakat pesisir menunjukkan perbaikan signifikan. Persentase nelayan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dari 6,27% pada 2022 menjadi 6,50% pada 2023, sedangkan akses jaminan kesehatan melonjak dari 5,49% menjadi 27,22% pada periode yang sama. Konsumsi ikan masyarakat terjaga di kisaran 25–26 kkal per kapita per hari, sementara infrastruktur pendidikan vokasi kemaritiman tetap tersedia melalui 2 SMK Kemaritiman aktif.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen Kabupaten Cilacap dalam mengimplementasikan konsep ekonomi biru melalui penguatan sektor perikanan, pengelolaan ekosistem pesisir, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ke depan, tantangan yang perlu menjadi perhatian mencakup pengendalian sampah laut dan darat, penguatan industri berbasis kelautan seperti produksi garam, serta pengembangan energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan. Dengan

integrasi IBEI ke dalam RPJMD, arah pembangunan Kabupaten Cilacap diharapkan semakin inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Tabel 2. 29.
Tabel Indikator IBEI Kabupaten Cilacap

Pilar	Sub-Pilar	Nama Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025 TWII
Ekonomi	Perikanan Tangkap dan Budidaya/ Akuakultur	Peran Sektor Perikanan dalam PDB (persen)	%	-	-	-	-
		Volume Produksi Perikanan (Ton)	Ton	42740	59081,4	65334	
		Volume Produksi Budidaya Tambak (Ton)	Ton	7396,98	7587	8031	1.840,89
		Volume Produksi Akuakultur (Ton)	Ton	8213	8519,59	7935,85	2,369
		Volume Produksi Budidaya Rumput Laut (Ton)	Ton	-	-	-	-
	Perdagangan, Transportasi, dan Logistik	Volume Angkutan Laut (Ton)	Ton	1.208.075 Ton	1.609.993 Ton 965 M3	1.558.380 Ton 5.235 M3	809.156 Ton 1.138 Ekor
		Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Orang)	Orang	-	-	-	-
		Jumlah Penumpang Angkutan Laut di 25 Pelabuhan Strategis (orang)	Orang	-	-	-	-
		Volume Ekspor Perikanan (Ton)	Ton	-	-	-	-
		Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Ekspor (%)	%	-	-	-	-
		Volume Ekspor Perikanan Hidup dan Segar (Ton)	Ton	-	-	-	-
	Industri Berbasis Kelautan	Volume Ekspor Ikan Olahan (Ton)	Ton	-	-	-	-
		Volume Produksi Garam (Ton)	Ton	27,85	38,74	23,69	1,75
		Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan (Unit)	Unit	9519	8483	9205	
	Pariwisata Berbasis Bahari	Jumlah Wisata Bahari	Desa	-	-	-	
		Jumlah Usaha/Perusahaan Wisata Tirta Komersial (Unit Usaha)	Unit Usaha	-	-	-	
	Teknologi	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap Laut – Kapal Motor > 30 GT (Unit)	Unit	54	190		
	Tata Kelola	Jumlah Pelabuhan Perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (Unit)	Unit	1	1	1	1
Lingkungan	Kualitas Sumber Daya dan Konservasi Laut	Kawasan Terumbu Karang Berkualitas Baik (Persen)	%	-	-	-	-
		Kawasan Lamun Berkualitas Baik (Persen)	%	-	-	-	-

Pilar	Sub-Pilar	Nama Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025 TWII
		Kawasan Hutan Mangrove Berkualitas Baik (Persen)	%	94,95	94,95	94,95	94,95
		Jumlah Desa Pesisir dengan Tempat Pembuangan Sampah (Desa)	Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
		Jumlah Desa Pesisir dengan Tempat Buang Air Besar (Desa)	Desa	-	-	-	-
		Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Lahan Gambut (Hektar)	Hektar	40	40	40	40
		Jumlah Sampah yang dibuang ke Laut (gr/m^2)	Gram / meter persegi	5.667,75 Ton/Tahun	5.673,29 Ton/Tahun	5.686,31 Ton/Tahun	4.789,9 Ton/Tahun
		Jumlah Sampah yang dibuang di Darat (Ton/tahun)	Ton	347.055,78 Ton/Tahun	348.406,57 Ton/Tahun	351.771,64 Ton/Tahun	177.111,83 Ton/Tahun
		Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta Ha)	Juta Hektar	-	-	-	-
	Energi Terbarukan	Kapasitas Terpasang PLTS (MegaWatt)	MegaWatt		7,2 MW		
		Listrik yang dihasilkan oleh PLTS (GigaWatt/Hour – GWh)	GigaWatt/Hour – GWh	-	-	-	-
		Kapasitas Terpasang PLTA (MegaWatt)	MegaWatt	-	-	-	-
		Listrik yang dihasilkan oleh PLTA (GigaWatt/Hour – GWh)	GigaWatt/Hour – GWh	-	-	-	-
Sosial	Kesejahteraan	Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Perikanan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Persen)*	%	6,27	6,50	6,03	9,1
		Jumlah Pekerja Perempuan di Sektor Perikanan (Orang)	Orang	-	-	-	-
		Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan (orang)	Orang	39.490	40.324	39.926	-
	Kesehatan	Rata-rata Konsumsi Kalori Ikan per Kapita (kkal) per Hari	kkal	25,81	25,51	26,68	-
		Rata-Rata Konsumsi Protein dari Ikan per Kapita (kkal)	kkal	4,34	4,34	4,50	-
		Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Perikanan yang Memiliki Jaminan Kesehatan (Persen)	%	5,49	26,78	27,22	-
		Persentase Penduduk Pesisir yang Hidup di	%	-	-	-	-

Pilar	Sub-Pilar	Nama Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025 TWII
	Pendidikan	Bawah Garis Kemiskinan (Persen)					
		Jumlah SMK Kemaritiman (Unit Sekolah)	Unit Sekolah	2	2	2	2
		Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan (Orang)	Orang	-	-	-	-
		Jumlah Peserta Pelatihan Perikanan (orang)	Orang	-	-	-	-
		Persentase Penduduk Sektor Perikanan dengan Pendidikan Terakhir SMA atau Sederajat (Persen)	%	-	-	-	-
		Persentase Penduduk di Sektor Perikanan dengan Ijazah Minimal SMA atau Sederajat (Persen)	%	-	-	-	-
		Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Perikanan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) (Persen)	%	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap Tahun 2025, data diolah

Asuransi nelayan memberikan jaminan finansial ketika terjadi kecelakaan kerja, kerusakan kapal, atau kehilangan alat tangkap, sehingga nelayan tidak jatuh ke dalam kemiskinan akibat kerugian mendadak. Dengan adanya perlindungan ini, nelayan lebih berani berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan, praktik penangkapan berkelanjutan, dan diversifikasi usaha perikanan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, menjaga ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak lingkungan laut. Asuransi Nelayan di Kabupaten Cilacap merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada ribuan nelayan yang rentan terhadap risiko kerja di laut. efisiensi anggaran pada masa covid 19, tidak dilaksanakan alokasi anggaran untuk asuransi nelayan baik dari pusat maupun provinsi. Berikut merupakan capaian anggaran untuk asuransi nelayan pada Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 30.
Tabel Asuransi Nelayan APBD Kabupaten Cilacap

Tahun	Sumber Anggaran			
	BPAN (KKP)	Asuransi Nelayan Jawa Tengah	Asuransi Nelayan APBD Cilacap	Sumber Pendanaan Lainnya
2016	9.265	-	-	-
2017	5.301	-	-	-
2018	7.926	-	-	-
2019	1.073	1.785	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	2.350	-	-
2022	-	2.169	-	-
2023	-	800	10.000	-
2024	-	867	10.000	-
2025	-	750	5.456	-
Jumlah	23.565	8.721	5.456	4.821
Total Keseluruhan	62.563			

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok di suatu wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Capaian luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Cilacap menunjukkan kemajuan moderat, dengan total RTH mencapai sekitar 18% dari luas wilayah, masih di bawah target minimal 30% sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007. RTH privat telah memenuhi sekitar 10%, namun RTH publik baru mencapai sekitar 8%, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 1,12% untuk memenuhi batas minimal 20% RTH publik. Untuk mencapai target, diperlukan sinergi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan lahan non-produktif, serta penguatan komitmen dalam kebijakan anggaran dan tata ruang.

Tabel 2. 31 Tabel
Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2)	Luas RTH (km2)	% RTH
			(A)	(B)	(B/A)
2024	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	2.249,28	282,63	12,57
2023	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	2.249,28	235,72	10,48
2022	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	425,65	42,19	10,09
2021	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	425,65	43,09	10,13
2020	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	425,65	41,92	9,85

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Disparitas Harga adalah perbedaan harga komoditas bahan pokok antar daerah. Semakin kecil nilai disparitas mengindikasikan semakin kecilnya perbedaan harga komoditas di suatu Kabupaten/Kota dibandingkan dengan harga di tingkat Provinsi untuk komoditas yang sama. Nilai disparitas yang rendah mencerminkan perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah, serta menurunnya kesenjangan harga komoditas. Faktor-

faktor seperti biaya transportasi, ketersediaan stok, kondisi infrastruktur, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi disparitas harga. Disparitas harga yang kecil berdampak positif pada keterjangkauan harga, stabilitas inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat 13 Komoditas Barang Pokok, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32
Disparitas Harga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2024

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras Medium	- 7,9	- 5,8	- 9,5	- 5,6	- 2,4	-1,92
2	Gula Pasir	1,2	0,3	2,9	1,2	2,0	1,21
3	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	1,7	- 4,2	1,8	1,1	- 2,9	-0,64
4	Daging Sapi Paha Belakang	- 0,3	- 2,3	8,7	0,4	- 3,0	2,26
5	Daging Ayam Ras	- 4,5	- 3,8	- 1,1	2,4	- 4,0	-0,70
6	Telur Ayam Ras	- 0,3	0,8	- 1,6	1,7	- 2,3	0,28
7	Tepung Terigu	NA	NA	NA	NA	NA	-28,62
8	Kedelai Impor	- 6,8	0,2	0,4	- 0,3	4,7	-0,81
9	Cabe Merah Keriting	- 4,1	2,5	- 10,2	- 3,3	1,4	-3,43
10	Cabe Rawit Merah	- 10,9	- 3,9	- 17,7	- 5,6	- 4,0	-7,24
11	Bawang Merah	- 5,5	- 9,4	- 7,7	- 5,9	- 3,4	-0,28
12	Bawang Putih Kating	- 5,6	- 3,0	- 4,0	- 4,1	0,5	-0,52
13	Ikan Kembung	na	na	na	na	na	9,30

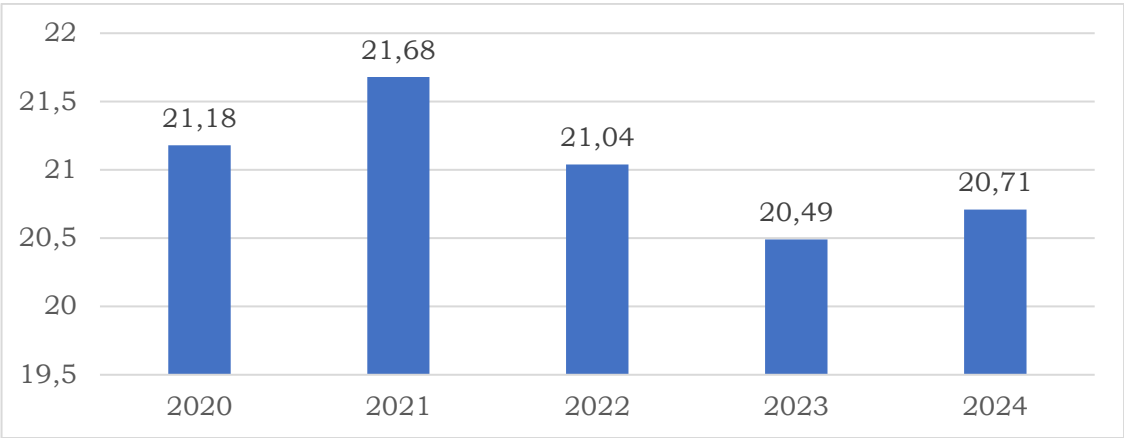
Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Disparitas harga komoditas pokok di Kabupaten Cilacap selama periode 2019-2024 menunjukkan tren fluktuatif yang signifikan, mengindikasikan dinamika pasar yang kompleks akibat faktor-faktor seperti musim, pasokan, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Secara umum, beberapa komoditas seperti Gula Pasir dan Kedelai Impor menunjukkan disparitas yang relatif stabil, sementara komoditas lain seperti Beras Medium, Cabe Rawit Merah, dan Bawang Merah mengalami fluktuasi yang tajam. Namun, terdapat tren penurunan disparitas pada beberapa komoditas, seperti Beras Medium dan Bawang Merah, yang mengindikasikan perbaikan dalam efisiensi pasar. Fluktuasi disparitas yang tinggi mengindikasikan perlunya upaya stabilisasi harga dan perbaikan sistem distribusi, serta analisis lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Cilacap.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang

modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

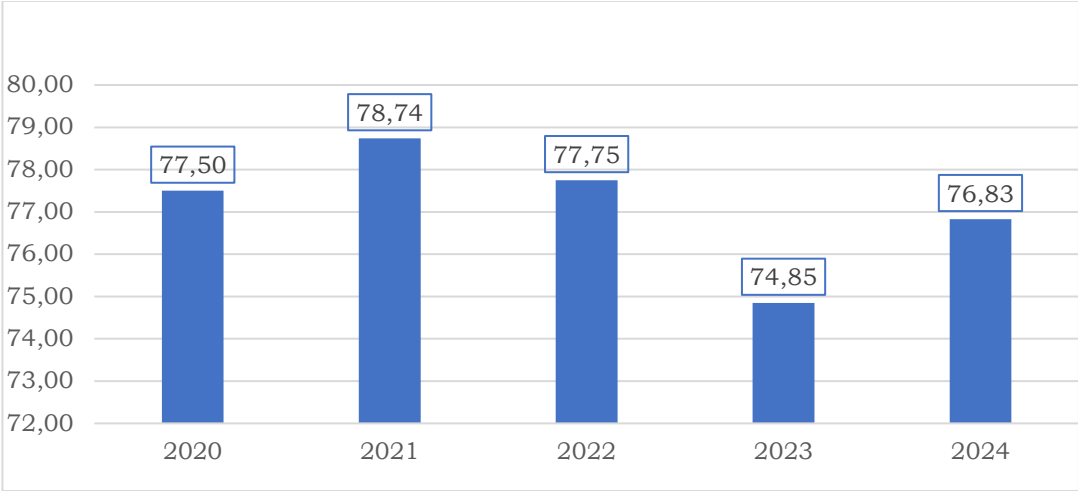
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Cilacap sebesar 21,18%, mengalami fluktuatif sampai tahun 2024 menjadi 20,71%. Selengkapnya terkait perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 61.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Cilacap
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten mencerminkan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, dan distribusi barang dan jasa. Di Kabupaten Cilacap, persentase jalan dengan kondisi permukaan mantap tercatat sebesar 77,50 persen pada tahun 2020. Namun, meskipun upaya pemeliharaan dan pembangunan jalan terus dilakukan, angkanya mengalami sedikit penurunan menjadi 76,83 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah dan aksesibilitas layanan publik.



Gambar 2. 62.
Persentase Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Kondisi jalan kabupaten yang baik di Kabupaten Cilacap menunjukkan tren peningkatan positif selama periode 2020-2024. Meskipun demikian, pada tahun 2024, persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan menjadi 58,28 persen (750,29 km) dari 61 persen (785,32 km) pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan perlu dioptimalkan untuk mendukung tujuan ke-9 SDGs, yaitu membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mempromosikan inovasi.

Tabel 2. 33.
Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Tahun	Satuan	Kondisi				Total
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2020	Km	842,998	140,59	161,788	123,830	1.269,202
		%	66,420	11,08	12,750	9,750	100,00
2	2021	Km	853,410	145,96	144,055	125,778	1.269,202
		%	67,240	11,5	11,350	9,910	100,00
3	2022	Km	863,476	123,38	125,679	156,665	1.269,202
		%	68,033	9,72	9,90	12,340	100,00
4	2023	Km	785,32	178,32	128,58	195,16	1.287,38
		%	61,00	13,85	9,99	15,16	100,00
5	2024	Km	750,29	238,76	93,77	204,55	1.287,38
		%	58,28	18,55	7,28	15,89	100,00

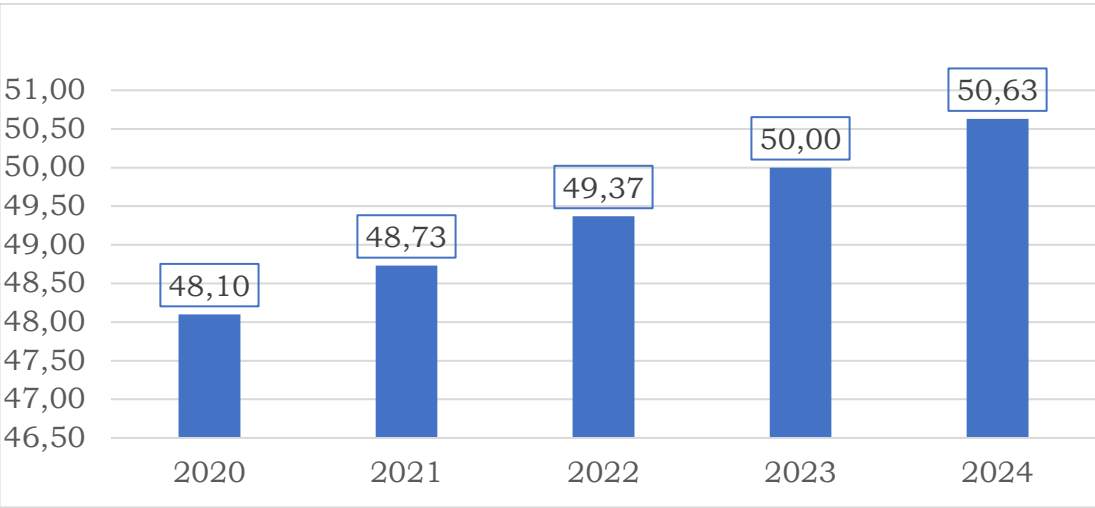
Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap, 2025

Perubahan total panjang jalan Kabupaten Cilacap didasarkan pada :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 620/436/35/Tahun 2008 meliputi 477 ruas dengan panjang 1.181,173 km.
2. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 620/420/03/Tahun 2015 meliputi 577 ruas dengan panjang 1.287,082 km.

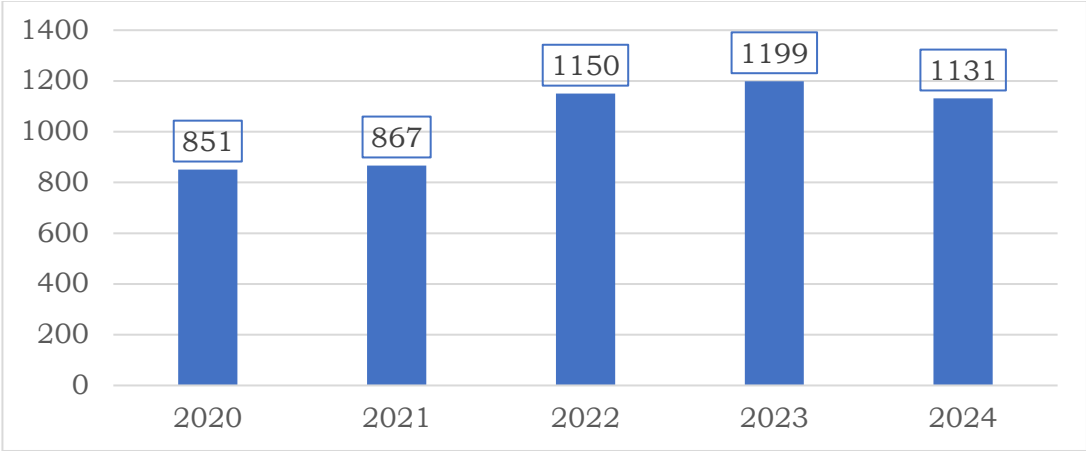
- 3. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 620/539/17/Tahun 2017 meliputi 587 ruas dengan panjang 1.269,202 km.
- 4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 620/346/17/Tahun 2023 meliputi 632 ruas dengan panjang 1.287,375 km

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Pada tahun 2020 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Cilacap sebesar 48,10% dan pada tahun 2024 sebesar 50,63%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



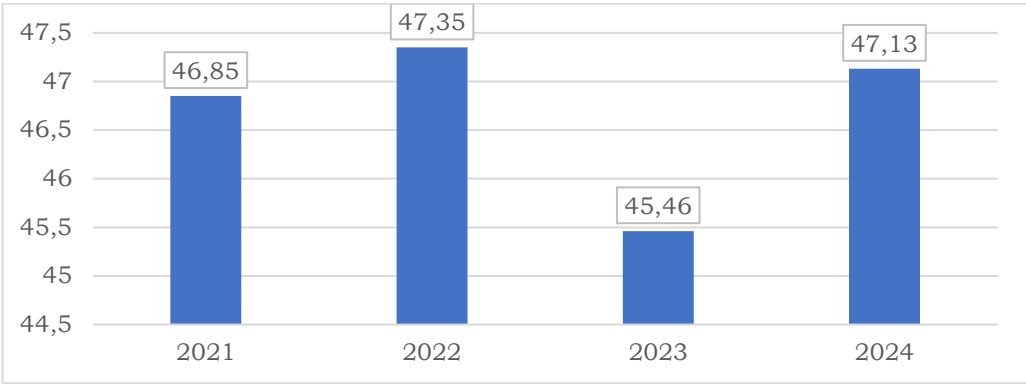
Gambar 2. 63.
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (%)
Sumber : Dishub Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Angka Kecelakaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keselamatan dan keamanan, baik di jalan raya, lingkungan kerja, maupun tempat umum. Data kecelakaan mencerminkan berbagai faktor risiko yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, serta efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki perkembangan angka kecelakaan sebesar 851 Kasus hingga pada 2024 berkembang menjadi 1131 Kasus. Hal ini juga menjadi perhatian serius jika terus adanya peningkatan kasus kecelakaan.



Gambar 2. 64.
Angka Kecelakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Polres Kabupaten Cilacap Tahun 2025

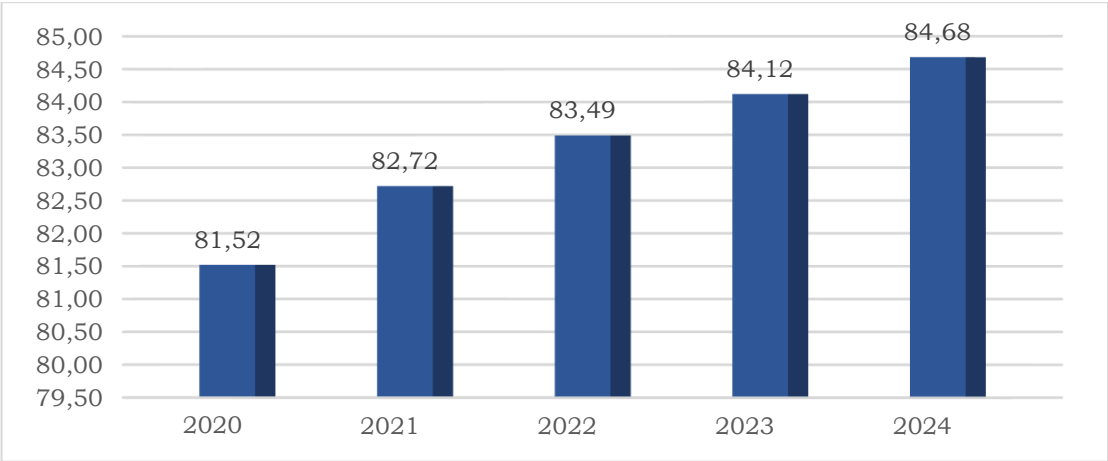
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten didefinisikan sebagai ukuran kinerja pemberian air irigasi, baik secara alamiah maupun buatan, ke lahan pertanian guna menciptakan kelembapan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem irigasi dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Di Kabupaten Cilacap, IKSI dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun bersifat gradual. Pada tahun 2021, nilai IKSI tercatat sebesar 46,85 dan meningkat menjadi 47,13 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja sistem irigasi di tingkat kabupaten, meskipun masih dibutuhkan optimalisasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi agar kinerja sistem semakin efektif dan berkelanjutan. Selengkapnya terkait perkembangan IKSI Kabupaten Cilacap tahun 2021–2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 65.
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024
Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian

layak, terjangkau, dan berkelanjutan, maka semakin baik pula kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Cilacap, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020, angkanya tercatat sebesar 81,52 persen dan meningkat menjadi 84,68 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat, termasuk melalui program pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.

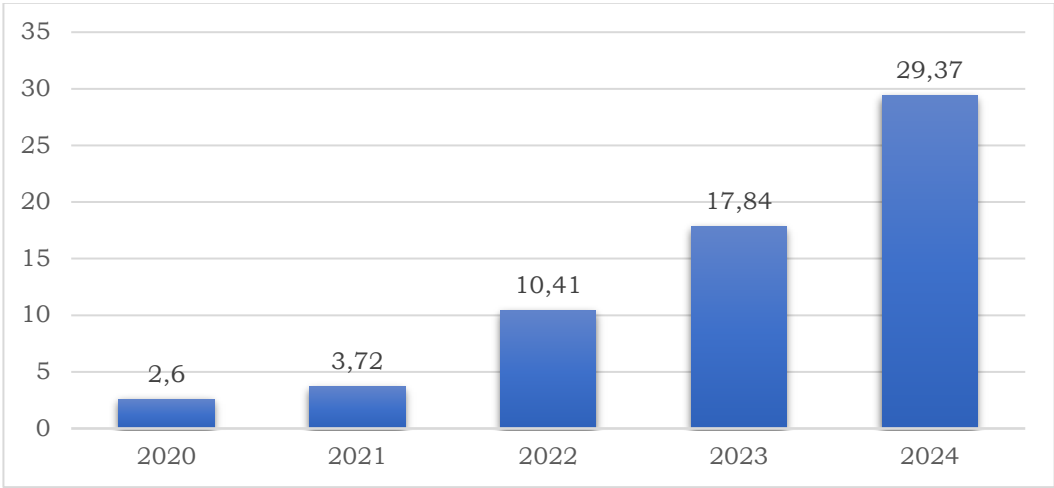


Gambar 2. 66.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap, Tahun 2025

Indeks Desa merupakan rata-rata jumlah nilai komposit layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Pada tahun 2022 Indeks Desa di Kabupaten Cilacap mencapai 0,7247. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,7455 dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 0,7679. Kemudian penilaian kemandirian desa mulai tahun 2025 akan menggunakan Indeks Desa tidak lagi Indeks Desa Membangun mendasari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024.

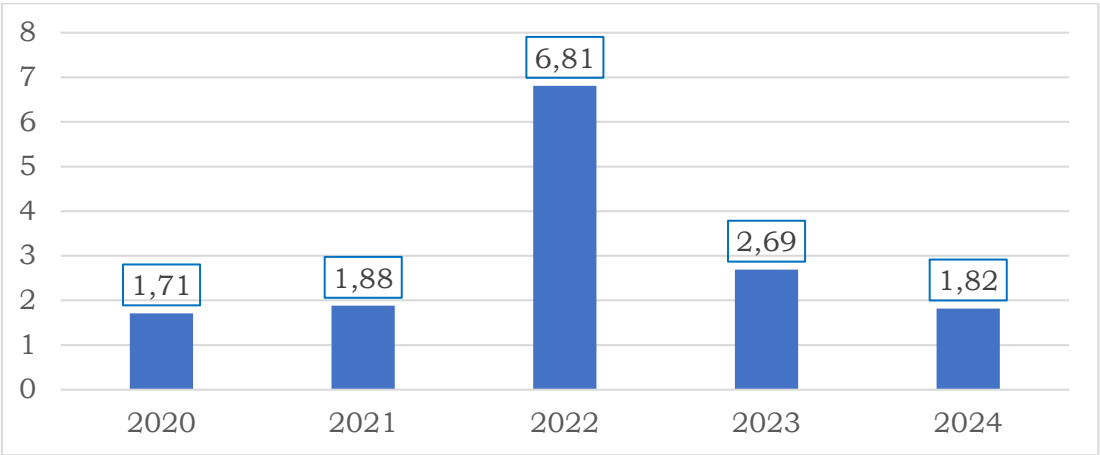
Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Persentase desa mandiri di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 sebesar 2,6%, kemudian terus meningkat menjadi 29,37% di tahun 2024. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya. Selengkapny terkait perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 67.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Dispermades Kabupaten Cilacap Tahun 2025

6. Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Di Kabupaten Cilacap, inflasi bergerak stabil rendah pada tahun 2020-2021 yaitu sebesar 1,71 dan sedikit meningkat menjadi 1,88 di tahun 2022. Kemudian Inflasi Kabupaten Cilacap tahun 2023 meningkat signifikan hingga mencapai 6,81 akibat tekanan pasokan dan kenaikan biaya energi. Laju Inflasi Kabupaten Cilacap kembali terkendali ke angka 2,69% pada 2023 dan menjadi 1,82% pada 2024. Hal tersebut dapat disebabkan dengan intervensi kebijakan fiskal-moneter dan operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.



Gambar 2. 68.
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Pajak Daerah adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipungut dari masyarakat atau badan usaha sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) menggambarkan proporsi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar rasio ini, semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian wilayah, yang menunjukkan kemandirian fiskal daerah semakin kuat. Artinya, pemerintah daerah semakin mampu mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak untuk mendanai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Di Kabupaten Cilacap, rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2019–2023. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,19 persen dan meningkat menjadi 0,28 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak, yang berpotensi memperkuat pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34.
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Rasio Pajak/PDRB (%)
2020	104.542.659.550.000	203.188.563.271	0,19
2021	109.653.598.170.000	221.377.109.179	0,20
2022	121.021.797.780.000	280.277.331.102	0,23
2023	132.425.323.930.000	296.270.228.744	0,22
2024	139.494.759.024.787	362.088.365.070	0,28

Sumber : BAPENDA Kabupaten Cilacap Tahun 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

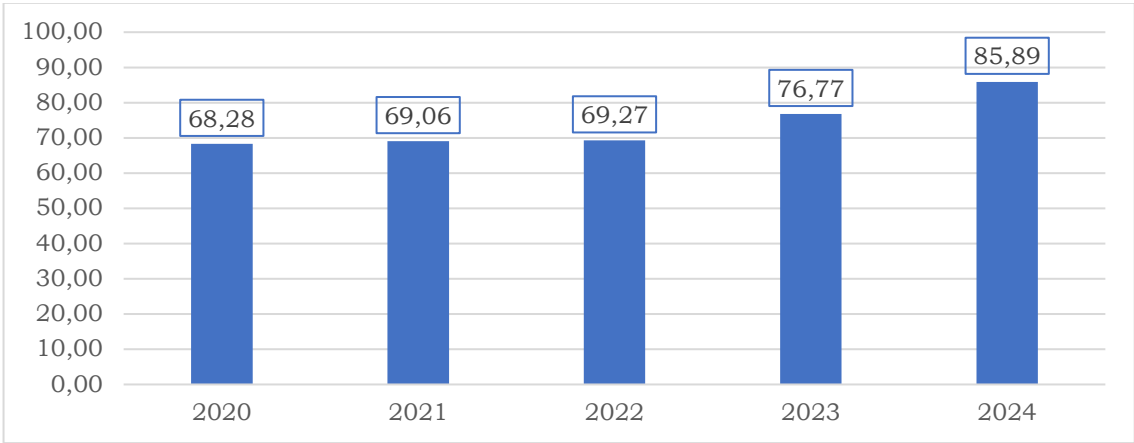
Reformasi Hukum di Kabupaten Cilacap merupakan upaya pembenahan sistem hukum yang berfokus pada peningkatan akses keadilan, transparansi, dan efisiensi layanan hukum. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan keadilan restoratif seperti penancangan Kampung Keadilan Restoratif, pembangunan Zona Integritas di lembaga penegak hukum, kerja sama hukum antara pemerintah daerah dengan kejaksaan dan pengadilan, serta digitalisasi sistem peradilan melalui implementasi e-Berpadu.

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Cilacap menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan kemajuan nyata dalam upaya pembenahan sistem hukum di daerah. Pada tahun 2023, indeks ini tercatat sebesar 45,79 dan meningkat menjadi 98,32 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Beberapa faktor yang turut

mendorong capaian ini antara lain perbaikan kebijakan hukum yang lebih responsif, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur hukum, serta partisipasi publik dalam proses reformasi hukum. Di samping itu, inovasi layanan hukum berbasis teknologi dan penerapan prinsip inklusivitas dalam kebijakan hukum turut mempercepat pencapaian reformasi hukum yang lebih adil dan akuntabel di Kabupaten Cilacap.

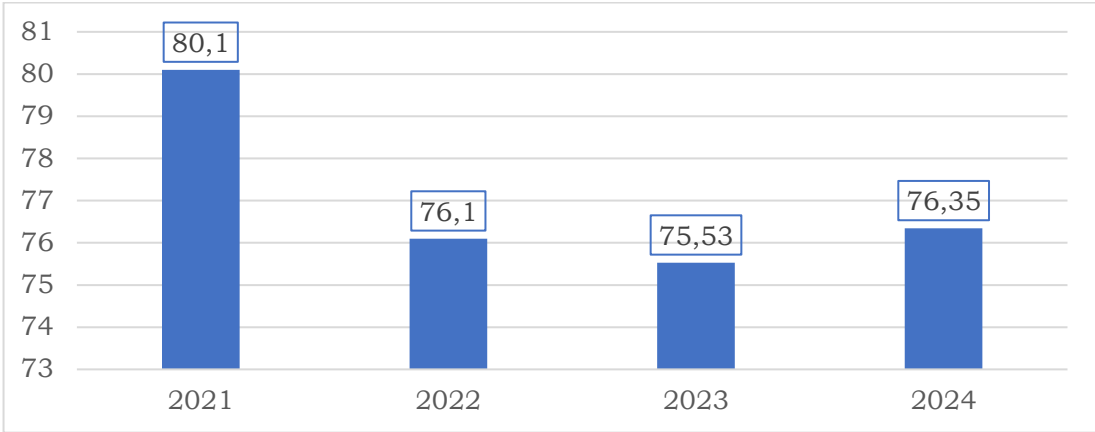
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 (*Road Map* RB 2020-2024 Nasional) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025.

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan sehingga dapat menciptakan hasil/ dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/ permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020 – 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Berikut perkembangan IRB Kabupaten Cilacap.



Gambar 2. 69.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : KemenPAN-RB Tahun 2025

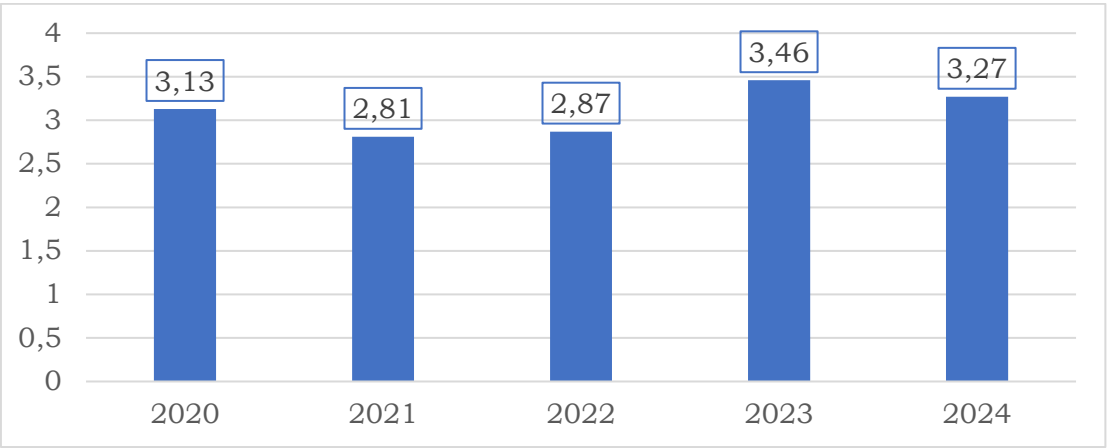
Integritas Nasional memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian gratifikasi. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Cilacap menunjukkan kecenderungan tren yang menurun dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks ini berada pada angka 80,1, kemudian menurun menjadi 76,1 pada tahun 2022, dan mencapai 76,35 pada tahun 2024. Penurunan yang masih ada ini belum dapat dikatakan bahwa cerminan perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap. Kenaikan indeks yang nantinya akan dilakukan, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penguatan regulasi antikorupsi, peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur sipil negara terhadap pentingnya integritas, serta implementasi sistem pengawasan yang lebih efektif.



Gambar 2. 70.
Indeks Integritas Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025

Indeks SPBE ini mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital, termasuk dalam aspek layanan publik, manajemen kinerja, dan keterpaduan sistem informasi.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, namun secara umum mengalami peningkatan dibanding awal periode. Pada tahun 2020, indeks SPBE tercatat sebesar 3,13, kemudian sempat menurun menjadi 2,81 pada tahun 2021 dan perlahan meningkat menjadi 3,46 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, indeks sedikit menurun kembali menjadi 3,27. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, masih diperlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel.

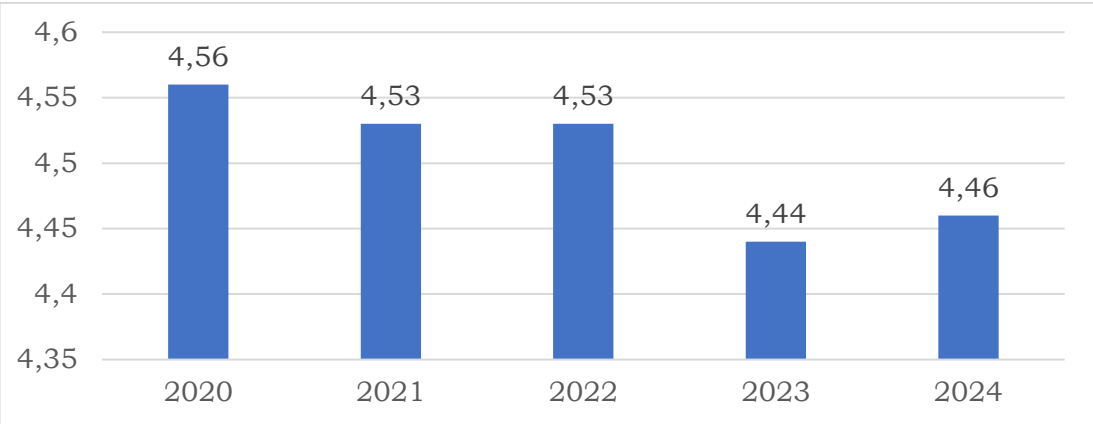


Gambar 2. 71.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Cilacap berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Indeks ini digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan, mengidentifikasi kendala atau kelemahan dalam sistem pelayanan, serta merumuskan kebijakan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dapat mengetahui sektor pelayanan mana yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Cilacap menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks ini tercatat sebesar 4,56 dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 4,46. Meskipun terdapat penurunan, secara keseluruhan indeks

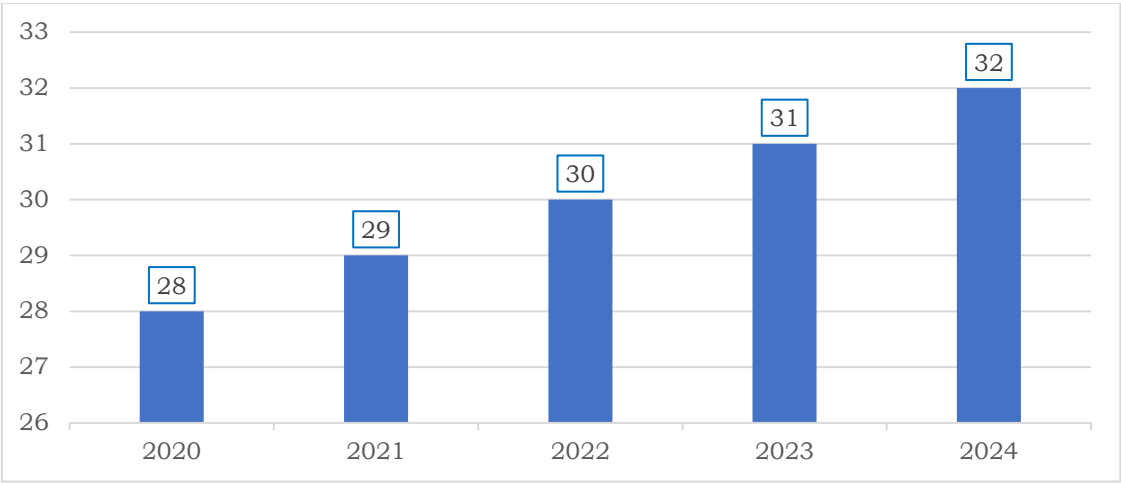
pelayanan publik tetap berada pada angka yang tinggi, mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tren peningkatan dapat dipertahankan. Evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi ini perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik terus berkembang secara optimal di masa mendatang.



Gambar 2. 72.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024
Sumber : Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2025

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan di Kabupaten Cilacap merupakan indikator penting untuk menilai kepatuhan pelaksanaan regulasi, efektivitas pengawasan, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Cilacap menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sebesar 28% dan terus meningkat dengan rata-rata 1% setiap tahunnya hingga mencapai 32% di tahun 2024. Hal tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada. Dengan peningkatan yang stabil, pemerintah Kabupaten Cilacap dapat mengidentifikasi keberhasilan program penegakkan hukum daerah, mengetahui area atau peraturan apa yang perlu perhatian khusus, seperti peningkatan sosialisasi dan kapasitas aparat, serta dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat.



Gambar 2. 73.
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cilacap, 2025

Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatar belakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan. Konflik sara di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2020-2024 tidak pernah ada kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa konduktivitas di Kabupaten Cilacap yang baik.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator yang menggambarkan kapasitas dan keunggulan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), nilai IDSD Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 3,55 pada skala 0–5. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2023), di mana nilai IDSD Kabupaten Cilacap berada pada angka 3,23.

Meskipun belum masuk dalam daftar 25 besar daerah dengan daya saing tertinggi di Jawa Tengah, nilai IDSD Cilacap hanya sedikit di bawah rata-rata provinsi, yakni sebesar 3,71. Beberapa kabupaten/kota dengan skor tertinggi di Jawa Tengah meliputi Kota Surakarta (4,39), Kota Semarang (4,31), dan Kota Magelang (4,26). Dengan nilai 3,55, posisi Kabupaten Cilacap

relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Rembang (3,53) dan Kabupaten Blora (3,58).

Peningkatan skor tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama pada pilar-pilar seperti tata kelola pemerintahan, kualitas infrastruktur dasar, serta pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan yang cukup signifikan, khususnya dalam penguatan ekosistem inovasi, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, serta perluasan akses terhadap teknologi dan pasar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu terus mengakselerasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah. Strategi tersebut mencakup penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan; penyediaan infrastruktur pendukung investasi; pengembangan UMKM berbasis inovasi; serta peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis kompetensi.

4. Kinerja setiap urusan pemerintah daerah

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Gambaran Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Cilacap Tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat baik dan stabil dalam hal partisipasi pendidikan di semua jenjang usia wajib belajar. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), usia 7–12 tahun dalam pendidikan dasar, serta usia 13–15 tahun dalam pendidikan menengah pertama secara konsisten mencapai angka 100% setiap tahunnya selama periode 2020 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah, sekaligus menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan dasar telah berjalan optimal. Keberhasilan ini perlu terus dijaga dan diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan mutu pendidikan antar wilayah di masa mendatang.

Tabel 2. 35.
Gambaran Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas P & K Kabupaten Cilacap, 2025

2) Kesehatan

Gambaran kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Cilacap selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai indikator pelayanan kesehatan. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan meningkat dari 0,06 pada tahun 2020 menjadi 1,10 pada tahun 2024, menandakan perbaikan kapasitas layanan rujukan. Seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota telah terakreditasi 100% sejak tahun 2022, mencerminkan peningkatan mutu fasilitas layanan. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, dan balita terus menunjukkan tren positif, dengan angka 100% tercapai sejak tahun 2023, menandakan bahwa hampir seluruh sasaran telah mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Pada aspek kesehatan usia produktif dan lanjut usia, cakupan skrining kesehatan meningkat pesat. Skrining usia 15–59 tahun meningkat dari 28,82% (2020) menjadi 100% (2024), sementara skrining lansia meningkat dari 62,88% menjadi 100% dalam periode yang sama. Peningkatan signifikan juga terjadi pada pelayanan penderita penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes melitus, yang keduanya mencapai cakupan pelayanan 100% pada tahun 2024. Pelayanan kesehatan jiwa untuk ODGJ berat, serta pelayanan deteksi dini HIV dan TBC, juga menunjukkan kinerja optimal dengan cakupan mencapai 100% pada akhir periode.

Tabel 2. 36.
Gambaran Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,06	0,07	1,07	1,08	1,1
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	75	69,23	100	100	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95,84	95,06	94,83	100	100
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,94	99,94	100	100	100
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,22	99,27	99,44	100	100
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,62	83,97	97,92	100	100
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,46	99,45	100	100	100
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	28,82	67,64	98,95	100	100
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	62,88	67,23	97,55	99,82	100
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	59,39	47,88	96,84	96,41	100
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,39	98,45	97,24	100	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	93,38	100	100	100	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	35,92	95,99	100	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	90,93	70,86	94,72	100	100

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap, 2025

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian positif terutama dalam perluasan akses terhadap layanan dasar infrastruktur. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi meningkat dari 85,44% pada tahun 2020 menjadi 92,56% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan

air minum yang layak dan aman bagi masyarakat. Selain itu, cakupan layanan pengolahan air limbah domestik (layak) juga menunjukkan tren peningkatan dari 90,87% pada tahun 2022 menjadi 92,68% pada tahun 2024, yang menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan sanitasi untuk mendukung lingkungan permukiman yang sehat.

Sementara itu, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mencapai 78,74% pada tahun 2021, angka ini sempat menurun hingga 74,85% pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 76,83% pada tahun 2024. Meskipun belum menunjukkan peningkatan signifikan dibanding awal periode, capaian ini tetap perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga konektivitas wilayah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, pada tahun 2024, Kabupaten Cilacap juga mulai mencatatkan rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 88,80%, sebagai langkah penting dalam penguatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang infrastruktur. Indikator lain yang belum memiliki data secara konsisten belum dapat dianalisis dalam periode ini.

Tabel 2. 37.
Gambaran Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	85,44	87,84	89,25	91,23	92,56
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	87,84	89,84	90,87	91,9	92,68
3.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	0,28	0,35	0,43	0,5	0,58
4.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	77,5	78,74	77,75	74,85	76,83
5.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	NA	NA	NA	88,8
6.	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	%	5,55	11,11	11,11	16,67	22,22

Sumber : DPUPR dan DPSDA Kabupaten Cilacap, 2025

4) Perumahan Rakyat & Permukiman Rakyat

Gambaran kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cilacap Tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dalam beberapa indikator utama. Penyediaan dan

rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah secara konsisten mencapai 100% setiap tahun selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan komitmen dan respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan hunian pascabencana dan program relokasi. Di sisi lain, penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare menunjukkan progres yang signifikan, dari 139,48 hektar pada tahun 2020 menjadi 58,10 hektar pada tahun 2024, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas permukiman warga.

Capaian lainnya yang juga menunjukkan tren membaik adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada perumahan. Persentasenya meningkat secara bertahap dari 12% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perhatian terhadap keberlanjutan dan kelayakan lingkungan permukiman baru agar sesuai standar hunian yang layak. Meskipun data terkait berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) belum tersedia, capaian-capaian yang tercatat mencerminkan arah kebijakan yang mendukung pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat secara bertahap dan terukur.

Tabel 2. 38.
Gambaran Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	hektar	138,48	88,58	63,74	59,1	58,1
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,14	16,14	16,14	15,90	15,37
5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Jalan, Drainase, RTP, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Penerangan Lingkungan, dsb) yang sudah diserahkan pengembang ke pemerintah kabupaten	%	12	20	34	46	65

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap, 2025

Perumahan Tidak Layak Huni

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah kurang lebih 1.691.660 Unit. Data BDT dimaksud merupakan data tingkat kesejahteraan penduduk yang setiap tahun dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah, yang selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (PPFM OTM).

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2011 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Adapun perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 39.
Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah (unit)
	APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kota	CSR	Swadaya/lainnya	
2020	1.470	450	531	378	83	2.912
2021	2.208	466	376	433	25	3.508
2022	1.681	520	111	269	0	2.581
2023	1.203	464	958	347	0	2.972
2024	1.806	511	70	218	0	2.605

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap, 2025

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Gambaran kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup optimal dalam berbagai aspek pelayanan dasar. Hampir semua gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang terjadi selama periode tersebut berhasil diselesaikan mendekati 100%, mencerminkan kecepatan dan efektivitas penanganan oleh aparat penegak ketertiban daerah. Demikian pula, layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta kebakaran diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat dengan capaian 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kesiapan Pemkab Cilacap dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui sistem penanggulangan bencana yang responsif dan inklusif.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), terutama capaian pada tahun 2024 yang turun signifikan dibanding tahun –

tahun sebelumnya, Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah perda dan perkada yang memuat sangsi yang bertambah banyak pada tahun 2024. Perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat penegakan hukum daerah agar capaian penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat optimal dijalankan. Di sisi lain, waktu tanggap (*response time*) dalam penanganan kebakaran menunjukkan tren fluktuatif, dari 5,2 menit di tahun 2020 menjadi 12,5 menit pada tahun 2024. Meskipun capaian ini masih dalam batas wajar, peningkatan kecepatan respons tetap menjadi perhatian penting agar risiko kerugian jiwa dan harta benda akibat kebakaran dapat diminimalkan secara maksimal.

Tabel 2. 40
Gambaran Kinerja Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,34	95,30	100,00	99,02	100,00
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	83,33	83,33	94,44	94,44	32,14
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	6,20	6,83	8,48	16,20	12,50

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cilacap, 2025

6) Sosial

Gambaran kinerja urusan sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan korban bencana. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di luar panti mencapai 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa layanan sosial luar panti telah dilaksanakan secara maksimal untuk

menjangkau kelompok rentan, sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi secara layak tanpa harus melalui pendekatan panti.

Selain itu, penanganan korban bencana alam dan sosial juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah masa tanggap darurat yang mencapai 100% setiap tahun sejak 2021. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan dan respons cepat Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Kinerja ini secara umum menunjukkan komitmen daerah dalam memastikan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

Tabel 2. 41
Gambaran Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap, 2025

B. Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan beberapa capaian positif, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Persentase kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja mencapai 84,2% pada tahun 2024, yang mencerminkan perencanaan program ketenagakerjaan yang semakin terarah. Selain itu, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan dari 31,69% pada tahun 2023 menjadi 31,72% pada tahun 2024. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak juga meningkat dari 34,63% menjadi 37,71%, yang menunjukkan komitmen dunia usaha dalam pemenuhan hak-hak pekerja melalui penerapan peraturan ketenagakerjaan.

Namun demikian, tantangan masih terlihat pada aspek produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan dari Rp122,6 juta per orang pada tahun 2022 menjadi Rp105 juta per orang pada tahun 2024, yang dapat mencerminkan perlunya peningkatan efisiensi kerja, pelatihan keterampilan, atau penyesuaian terhadap perkembangan industri. Sementara itu, persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja menunjukkan tren fluktuatif, namun kembali meningkat dari 50,65% pada tahun 2023 menjadi 59,43% pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam sistem penempatan tenaga kerja yang perlu terus diperkuat agar lebih efektif dalam mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

Tabel 2. 42.
Gambaran Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	NA	NA	NA	84,2
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	NA	NA	NA	31,69	31,72
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/orang	111,48	123,02	122,61	106,62	105,02
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	NA	NA	NA	34,63	37,71
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28,02	45,96	66,08	50,65	59,43

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2025

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan peningkatan signifikan persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD dari 4,69% pada tahun 2021 menjadi 49,13% pada tahun 2024. Seluruh anak korban kekerasan juga berhasil ditangani oleh instansi terkait setiap tahunnya, mencerminkan kesiapan dalam perlindungan anak. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, terus menurun dari 0,0001 menjadi hanya

0,000007 per 100.000 penduduk perempuan, menandakan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 43.
Gambaran Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,1	4,69	7,51	45,57	49,13
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 Penduduk Perempuan	0,0001	0,0003	0,0003	0,00004	0,00007

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap, 2025

3) Pangan

Kinerja urusan pangan di Kabupaten Cilacap selama periode 2020–2024, berdasarkan indikator persentase cadangan pangan, menunjukkan penurunan dari 14,23% pada tahun 2023 menjadi 7,081% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya kapasitas penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kerawanan pangan atau situasi darurat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat cadangan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi pengelolaan cadangan pangan, termasuk perencanaan pengadaan, penyimpanan, dan distribusinya agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

Tabel 2. 44.
Gambaran Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Cadangan Pangan	%	NA	NA	NA	14,23	7,08

Sumber : Dishanpan Kabupaten Cilacap, 2025

4) Pertanian

Kinerja urusan pertanian di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 hanya menunjukkan capaian pada satu indikator, yaitu penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi yang tercatat mencapai 100% setiap

tahunnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan secara damai dan partisipatif. Meskipun indikator lainnya belum tersedia datanya, keberhasilan dalam mediasi sengketa tanah menunjukkan komitmen dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial terkait pengelolaan tanah. Namun demikian, ke depan perlu diperkuat pencatatan dan pelaporan kinerja pada indikator lainnya agar gambaran pengelolaan pertanahan menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

Tabel 2. 45.
Gambaran Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : DPUPR Kabupaten Cilacap, 2025

5) **Lingkungan Hidup**

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan secara bertahap meskipun menghadapi tantangan dalam ketaatan perizinan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami kenaikan dari 62,39 pada tahun 2021 menjadi 65,66 pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 60,16 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan lingkungan, namun dengan fluktuasi yang perlu diperhatikan. Sementara itu, tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan cukup tinggi, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 senilai 100%, sempat menurun menjadi 95,45% pada tahun 2021 dikarenakan jumlah perusahaan yang bertambah. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Tabel 2. 46.
Gambaran Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	71,75	62,39	63,77	65,66	60,16
2.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	15,45	16,36	16,21	17,4	17,98

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	95,45

Sumber : DLH Kabupaten Cilacap, 2025

6) Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik dan konsisten dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Perekaman KTP Elektronik tetap tinggi dengan angka di atas 98%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP telah terdata secara elektronik. Capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga mengalami peningkatan dari 20,46% pada tahun 2020 menjadi 36,79% pada tahun 2024, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelayanan administrasi terhadap hak identitas anak.

Selain itu, kepemilikan akta kelahiran terus menunjukkan tren positif, meningkat dari 87,81% menjadi 95,47% selama periode lima tahun, mendekati target *universal birth registration*. Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan juga mengalami kenaikan, meskipun bertahap, dari 13,21% menjadi 19,23%, yang menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

Tabel 2. 47.
Gambaran Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,85	99,4	99,45	98,4	99,24
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	20,46	29,44	30	36,02	36,79
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	87,81	88,24	88,75	94,4	95,47
4.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	13,21	15,09	16,98	18,87	19,23

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2025

Dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), telah

dikeluarkan Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap yaitu penduduk yang berumur 17 Tahun atau lebih, penduduk yang berumur di bawah 17 tahun yang sudah berstatus kawin, penduduk yang sudah melaksanakan perekaman KTP-el dan memiliki ponsel wajib melakukan aktivasi IKD pada tahun 2024. Capaian penduduk yang sudah ber IKD pada tahun 2024 adalah sebesar 134.985 dari jumlah wajib KTP sebanyak 1.558.187. Kemudian cakupan penerbitan akta kematian Tahun 2020-2024 juga mengalami kenaikan menjadi 39,20 persen pada tahun 2024. Kenaikan cakupan penerbitan akta kematian dikarenakan adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pendaftaran penerbitan akta kematian.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan status perkawinan, memberikan kepastian hukum status suami, istri, maupun anak dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak sipil. Perkawinan yang dicatat di Catatan Sipil adalah perkawinan non muslim. Rasio perkawinan yang dicatat di Catatan Sipil tahun 2020-2024 sudah mencapai kinerja yang baik dengan capaian 100 % sejumlah 114 perkawinan. Namun demikian, Disdukcapil juga menerbitkan 18 akta perceraian pada tahun 2024.

7) **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya dalam peningkatan status desa mandiri. Persentase desa yang berstatus mandiri meningkat tajam dari 2,60% pada tahun 2020 menjadi 29,37% pada tahun 2024, menandakan keberhasilan berbagai program pemberdayaan yang mendorong kemandirian desa dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, partisipasi masyarakat, fasilitasi dalam kerja sama antar desa, serta pemanfaatan dana desa secara efektif.

Tabel 2. 48.
Gambaran Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	71,43	100	100	100
2.	Persentase Desa Mandiri	%	2,60	3,72	10,41	17,84	29,37

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Cilacap, 2025

8) **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan arah yang cukup positif, khususnya dalam menurunkan angka kelahiran total (TFR) dari 2,11 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1,72 jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pendekatan program keluarga berencana yang berkelanjutan. Di sisi lain, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) juga mengalami penurunan dari 15,53% menjadi 13,86%, yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan pelayanan terhadap alat dan metode kontrasepsi.

Namun, terdapat penurunan pada indikator pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), dari 67,57% pada tahun 2020 menjadi 61,92% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat menjadi perhatian khusus, karena berpotensi mempengaruhi keberlangsungan capaian program KB ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan edukasi, distribusi alat kontrasepsi, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi agar capaian positif dalam pengendalian penduduk tetap terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 2. 49.
Gambaran Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,11	2,04	1,92	1,81	1,72
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	67,57	67,13	65,49	66,87	61,92
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	15,53	15,46	14,96	13,77	13,86

Sumber : Dinkes KB Kabupaten Cilacap, 2025

9) **Perhubungan**

Kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi pada aspek konektivitas dan kapasitas lalu lintas. Rasio konektivitas mengalami penurunan dari 0,83 pada tahun 2020 menjadi 0,66 pada 2022, namun kembali membaik menjadi 0,76 pada tahun 2023 dan bertahan di angka yang sama pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan keterhubungan antarwilayah meskipun sempat mengalami penurunan. Sementara itu, V/C Ratio (*Volume/Capacity Ratio*) pada jalan kabupaten/kota tercatat meningkat dari 0,34 pada tahun 2020 menjadi 0,37 pada tahun 2022, mengindikasikan adanya peningkatan volume lalu lintas, namun masih berada dalam ambang batas wajar. Capaian

ini menjadi dasar penting untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur transportasi yang efisien dan merata.

Tabel 2. 50.
Gambaran Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio konektivitas	Indeks	0,83	0,71	0,66	0,76	0,76

Sumber : Dishub Kabupaten Cilacap, 2025

10) Komunikasi Dan Informatika

Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang beragam. Seluruh perangkat daerah telah 100% terhubung dengan akses internet dari Dinas Kominfo secara konsisten sejak tahun 2020, yang menandakan tersedianya infrastruktur dasar komunikasi yang baik untuk mendukung layanan pemerintahan. Namun demikian, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi justru mengalami penurunan dari 55,00% pada tahun 2023 menjadi 50,00% pada tahun 2024. Selain itu, persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah juga menurun dari 73,00% menjadi 56,84% dalam periode yang sama. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi komunikasi publik dan percepatan transformasi digital guna meningkatkan keterjangkauan informasi serta kualitas layanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Tabel 2. 51.
Gambaran Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100,00
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	NA	NA	55	50,00
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	NA	NA	NA	73	56,84

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap, 2025

11) Koperasi dan UMKM

Kinerja urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cilacap selama tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang berbeda antara dua indikator utama. Persentase koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan yang konsisten dari 41,62% pada tahun 2020 menjadi 65,00% pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan tata kelola, pembinaan kelembagaan, dan penguatan peran koperasi dalam perekonomian daerah. Sebaliknya, persentase usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha justru menunjukkan tren penurunan, dari 57,03% pada tahun 2020 menjadi 35,96% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong transformasi usaha mikro menjadi wirausaha produktif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan akses pasar, permodalan, dan pendampingan berkelanjutan.

Tabel 2. 52.
Gambaran Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	35,73	36,04	36,33	42,82	42,79
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	8,33	8,81	10,02	11,27	12,62

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap, 2025

12) Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Cilacap menunjukkan perbaikan yang signifikan selama periode 2020–2024. Setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar -44,69% dan -66,19%, tren investasi mulai berbalik arah dengan peningkatan sebesar 13,84% pada tahun 2022, 29,42% pada tahun 2023, dan mencapai 89,15% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih menarik melalui perbaikan layanan perizinan, promosi potensi daerah, dan penguatan infrastruktur pendukung, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2. 53.
Gambaran Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	-44,69	-66,19	13,84	29,42	89,15

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap, 2025

13) **Kepemudaan dan Olahraga**

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Cilacap tahun 2022–2024 menunjukkan perkembangan positif. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri meningkat cukup signifikan dari 0,036% pada tahun 2022 menjadi 1,18% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan tumbuhnya semangat kemandirian ekonomi di kalangan pemuda, yang dapat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan daerah berbasis potensi generasi muda.

Selain itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan juga mengalami peningkatan bertahap, dari 9,708% pada tahun 2022 menjadi 9,750% pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan keterlibatan yang konsisten dan terus tumbuh dalam aktivitas sosial, yang berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial serta kepemimpinan pemuda di tingkat lokal. Sementara itu, peningkatan prestasi olahraga tercatat naik dari 2,00% pada tahun 2023 menjadi 4,00% pada tahun 2024, menandakan hasil positif dari pembinaan olahraga yang mulai menunjukkan dampaknya.

Tabel 2. 54.
Gambaran Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	NA	NA	0,036	0,06	1,182
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	NA	9,685	9,708	9,728	9,750
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	NA	NA	NA	2,04	4,00

Sumber : Disparpora Kabupaten Cilacap, 2025

14) **Statistik**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap. Penerapan Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu sudah diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabuapten Cilacap dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap

Nomor 500.14/6690/33/Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap yang berlaku bagi seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Cilacap adalah 2,03 dengan predikat Cukup. Walaupun indeks di atas IPS Nasional 1,78, masih sangat perlu peningkatan terkait Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2024, nilai IPS Kabupaten Cilacap meningkat menjadi 2,93 dengan predikat Baik, masih di atas IPS Nasional 2,35. Hal ini dapat diperoleh dengan Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap secara lebih menyeluruh oleh penyelenggara Satu Data Indonesia. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam penerapan dan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Cilacap.

Kinerja urusan statistik di Kabupaten Cilacap selama periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Seluruh perangkat daerah tercatat 100% menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah telah berbasis data yang akurat dan terukur, sesuai dengan prinsip perencanaan yang partisipatif dan berbasis bukti.

Konsistensi ini menunjukkan peran strategis unit statistik daerah dalam menyediakan data yang relevan dan dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pengelolaan data, peningkatan kapasitas SDM statistik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. 55.
Gambaran Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap, 2025

15) Persandian

Kinerja urusan persandian di Kabupaten Cilacap menunjukkan fluktuasi dalam tingkat keamanan informasi pemerintah selama periode 2020–2024. Setelah mencapai 62,64% pada tahun 2022, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 52,87%, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 75,5% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami tantangan dalam menjaga keamanan informasi, pemerintah daerah berhasil melakukan perbaikan dan penguatan sistem keamanan informasi di tahun berikutnya. Capaian pada tahun 2024 mencerminkan upaya serius dalam meningkatkan perlindungan data dan informasi strategis guna mendukung tata kelola pemerintahan yang aman dan andal.

Tabel 2. 56.
Gambaran Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	62,64	52,87	75,5

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap, 2025

16) Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan bertahap dalam pelestarian cagar budaya, dari 26,73% pada tahun 2021 menjadi 29,49% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya lokal melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya. Meskipun peningkatan terjadi secara gradual, hal ini menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dalam memperkuat identitas budaya daerah. Ke depan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses pelestarian dan memperluas jangkauan edukasi budaya kepada masyarakat.

Tabel 2. 57.
Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	21,87	26,73	27,45	28,85	29,49

Sumber : Dinas P&K Kabupaten Cilacap, 2025

17) Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Cilacap selama tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal minat baca dan pembangunan literasi masyarakat. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat dari 56,49 pada tahun 2022 menjadi 68,99 pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya keberhasilan program dan layanan perpustakaan dalam menarik minat baca masyarakat, baik melalui penguatan koleksi, layanan digital, maupun kegiatan promosi budaya baca di berbagai lapisan usia.

Peningkatan yang lebih mencolok terlihat pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang melonjak dari 46,39 pada tahun 2022 menjadi 80,69 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memperluas akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan serta meningkatkan kualitas layanan literasi. Kinerja ini juga mencerminkan komitmen dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 58.
Gambaran Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	NA	NA	56,49	63,25	68,99
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	NA	NA	46,39	45,50	64,41

Sumber : Dinas Arpus Kabupaten Cilacap, 2025

18) Kearsipan

Gambaran kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Cilacap selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup konsisten, khususnya sejak tahun 2022. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan pertanggungjawaban nasional mengalami peningkatan dari 75,29% pada tahun 2022 menjadi 76,29% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip agar lebih mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Selain itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara juga menunjukkan tren positif. Dimulai dari capaian 66,67% pada tahun 2022, indikator ini meningkat menjadi 72,09% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap telah meningkatkan kualitas pengelolaan arsip untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah untuk memastikan keberlanjutan dan kesempurnaan tata kelola kearsipan di masa mendatang.

Tabel 2. 59.
Gambaran Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	NA	NA	75,29	75,96	76,29
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	NA	66,67	71,64	72,09

Sumber : Dinas Arpus Kabupaten Cilacap, 2025

C. Urusan Pemerintah Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) naik dari 40.456,71 ton pada tahun 2020 menjadi 65.334,41 ton pada tahun 2024. Lonjakan produksi ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya penguatan sektor perikanan, seperti peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, pengembangan sarana dan prasarana, serta perluasan akses pasar. Capaian ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 60.
Gambaran Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	40.456,71	40.098,16	42.740,10	59.081,41	65.334,41

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, 2025

2) **Pariwisata**

Kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama dari sisi kontribusi terhadap PDRB dan PAD, meskipun terdapat penurunan pada indikator kunjungan wisatawan di tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meningkat dari 1,23% pada tahun 2020 menjadi 1,54% pada tahun 2024, dan kontribusi terhadap PAD juga naik dari 1,32% pada 2021 menjadi 2,81% pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 2,43% pada 2024. Tingkat hunian akomodasi juga mengalami pertumbuhan yang stabil dari 22,02% pada tahun 2021 menjadi 27,62% pada 2024. Namun demikian, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mengalami penurunan drastis pada 2024, masing-masing sebesar -38,17% dan -89,3%, yang mengindikasikan adanya tantangan serius dalam daya tarik atau aksesibilitas wisata pascapandemi atau faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi promosi yang lebih agresif, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan sinergi antar pelaku pariwisata untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor ini.

Tabel 2. 61.
Gambaran Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Bangsa	%	NA	NA	NA	54,9	-38,17
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	NA	NA	26,54	35,63	-8,93
3.	Tingkat hunian akomodasi	%	NA	22,02	24,47	26,96	27,62
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,23	1,32	1,35	1,39	1,54
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	NA	1,32	2,05	2,81	2,43

Sumber : Disparpora Kabupaten Cilacap, 2025

3) **Pertanian**

Kinerja urusan pertanian di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas. Produktivitas padi mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi 67,32 kw/ha pada tahun 2021, namun menurun menjadi 61,22 kw/ha pada tahun 2024. Komoditas bawang merah dan cabai rawit cenderung stabil dengan tren positif, di mana produktivitas bawang merah meningkat menjadi 91,62 kw/ha dan cabai rawit mencapai 109,39 kw/ha pada tahun 2024. Sebaliknya, produktivitas kelapa menunjukkan penurunan dari 1,27 ton/ha pada 2023 menjadi 0,99

ton/ha pada 2024. Di sisi lain, pengendalian penyakit hewan menular menunjukkan hasil yang konsisten dengan penurunan kejadian kasus di kisaran -23% hingga -24% setiap tahun, mencerminkan efektivitas upaya kesehatan hewan dalam menjaga sektor peternakan tetap aman dan produktif.

Tabel 2. 62.
Gambaran Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun :						
a.	Produktivitas Padi	Kw/Ha	60,93	67,32	62	64,27	61,22
b.	Produktivitas Bawang Merah	Kw/Ha	94,35	82,18	91,29	83,78	91,62
c.	Produktivitas Cabai Rawit	Kw/Ha	76,58	109,47	132,61	86,64	109,39
d.	Produktivitas Kelapa	Ton/Ha	1,12	1,13	1,1	1,27	0,99
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-23,4	-24,8	-23,99	-24,97	-24,5

Sumber : Dispertan Kabupaten Cilacap, 2025

4) Perdagangan

Kinerja terkait pemenuhan sarana pendukung sektor pertanian dan perdagangan di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif. Persentase kinerja realisasi pupuk mengalami peningkatan meskipun bersifat gradual, dari 32,00% pada tahun 2020 menjadi 33,10% pada tahun 2024, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam penyediaan pupuk bersubsidi atau tepat sasaran bagi petani. Sementara itu, capaian pada alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) menunjukkan kemajuan signifikan, di mana persentase UTTP bertanda tera sah meningkat tajam dari 48,56% pada 2022 menjadi 100% pada 2023 dan tetap terjaga di 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengawasan metrologi legal dalam menjamin perlindungan konsumen serta menciptakan keadilan dalam transaksi perdagangan.

Tabel 2. 63.
Gambaran Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	32,00	32,21	32,88	32,88	33,10
2.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	30,48	47,00	53,58	60,73	60,77

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap, 2025

5) Perindustrian

Kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM). Pertambahan jumlah IKM meningkat secara konsisten dari 5,80% pada tahun 2020 menjadi 9,00% pada tahun 2024, yang mencerminkan dinamika sektor industri rakyat yang terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Di sisi lain, persentase hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) besar mulai tercatat sejak 2023 dan mengalami sedikit peningkatan dari 2,22% menjadi 2,36% pada 2024, menandakan adanya langkah awal dalam penguatan fungsi pengawasan industri besar. Sementara itu, penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini tetap terjaga pada indeks 95,00 sejak tahun 2022 hingga 2024, mendukung keterbukaan data dan akses informasi yang penting bagi pengembangan industri daerah.

Tabel 2. 64.
Gambaran Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	5,80	8,00	8,00	8,50	9,00
2.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	2,22	2,36
3.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	NA	NA	95,00	95,00	95,00

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2025

D. Urusan Penunjang Pemerintah

1) Keuangan

Tabel 2. 65.
Gambaran Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	24,94	9,15	28,19	28,69	13,67
2.	Rasio PAD	%	0.897	1,06	21,27	22,11	23,38
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	48,39	63,47	64,8	65,5	68,48
4.	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	100
5.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	11,75	8,69	5,28	2,24	3,079

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	4,309	5,23	1,37	1,43	12,51
7.	Assets Management	%	4	4	4	4	100
8.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	10,59	10,51	5,53	5,46	3,53
9.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	89,01	100	100	95,41	96,78
10.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Cilacap, 2025

2) Pengawasan

Kinerja pengawasan dan pengendalian internal pemerintah di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan konsistensi dan perbaikan secara bertahap. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengalami peningkatan dari 3,038 pada tahun 2020 menjadi 3,259 pada tahun 2024, yang menandakan penguatan sistem pengendalian intern dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Sementara itu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) konsisten berada di Level 3 sepanjang lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa peran pengawasan internal telah berada pada tingkat yang mampu memberikan layanan konsultasi dan memastikan efektivitas pengendalian secara berkesinambungan.

Tabel 2. 66.
Gambaran Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,038	3,038	3,217	3,249	3,259
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Cilacap, 2025

3) Kepegawaian

Kinerja urusan kepegawaian di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024, ditinjau dari rasio pegawai berpendidikan tinggi terhadap menengah/dasar (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), menunjukkan tren peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Rasio ini meningkat dari 64,06% pada tahun

2020 menjadi 76,82% pada tahun 2024, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 78,15%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas pegawai dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan.

Tabel 2. 67.
Gambaran Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	64,06	66,37	74,92	78,15	76,82
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,00	19,64	15,80	12,96	24,08
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15,07	13,28	21,39	42,89	36,36

Sumber : BKPSDM Kabupaten Cilacap, 2025

4) Sekretariat Daerah

Kinerja pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Cilacap tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan efektivitas dan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menurun dari 39,8% pada tahun 2020 menjadi 34,62% pada tahun 2024, perlunya upaya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Rasio nilai belanja melalui pengadaan juga relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 42,17% pada 2020 menjadi 42% pada 2024. Sementara itu, penggunaan produk dalam negeri serta produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM) terus meningkat, dari 3,79% menjadi 10%, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui kebijakan pengadaan yang berpihak.

Tabel 2. 68
Gambaran Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	16,5	21,8	24,07	46,6	63,7
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	24,9	35,6	51,5	41,6	18,9
3.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	NA	NA	3,79	7,78	-1,7

Sumber : Setda Kabupaten Cilacap, 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur APBD terdiri dari komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Secara umum komponen APBD Kabupaten Cilacap terdiri atas: (1) komponen pendapatan daerah, yang di dalamnya terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) komponen belanja daerah, yang di dalamnya terdapat belanja operasi, belanja modal belanja tidak terduga dan belanja transfer; dan (3) komponen pembiayaan daerah, yang di dalamnya terdapat penerimaan pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan-pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari bantuan/hibah.

Pendapatan daerah Kabupaten Cilacap dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada awal periode dan mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 3,15 triliun, meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi Rp. 3,84 triliun. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang terus tumbuh mulai tahun 2021. Akan tetapi peningkatan terbesar tahun 2021 terjadi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah yang didominasi oleh realisasi Pendapatan BLUD. Lonjakan pendapatan tersebut didorong oleh pemulihan layanan rumah sakit pasca pembatasan akibat pandemi Covid-19, optimalisasi klaim JKN/BPJS, serta peningkatan jumlah kunjungan pasien seiring bertambahnya kapasitas dan layanan kesehatan yang tersedia. Kemudian pendapatan menurun tahun 2022, dikarenakan Pendapatan BLUD kembali pada kondisi normal. Setelah itu, selama lima tahun mengalami peningkatan atau pertumbuhan rata rata per tahun sebesar 5,21%.

Komponen pendapatan asli daerah, memiliki rata-rata peningkatan sebesar 11,4% yang didapat dari komponen pajak daerah, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan pertumbuhan tertinggi didapat dari hasil pengelolaan retribusi. Peningkatan cukup signifikan retribusi terjadi pada tahun 2024 yaitu pertumbuhannya sebesar 4,13% hal ini dikarenakan terjadi perpindahan rekening Pendapatan BLUD yang sebagian besar menjadi retribusi pelayanan kesehatan.

Komponen pendapatan transfer juga mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,95% Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat selama lima tahun mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,31%, namun pada tahun 2024 pendapatan ini mengalami penurunan. Komponen pendapatan transfer antar daerah juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,27%.

Komponen lain-lain pendapatan yang Sah selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 karena tidak ada pendapatan hibah sama sekali. Lain-lain pendapatan yang

sah ini adalah pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan hibah dana BOS. Mulai tahun 2022 komponen hibah dana BOS penyalurannya melalui DAK non Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Jika dilihat dari kecenderungan persentase masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten Cilacap, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari pendapatan transfer mengalami kecenderungan penurunan namun demikian ketergantungan Kabupaten Cilacap pada pemerintah pusat masih sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendapatan transfer rata rata selama lima tahun sebesar yaitu dari 75,69%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan dan kontribusi tertinggi di tahun 2024 dan rata rata kontribusi PAD selama lima tahun sebesar 21,46%.

Derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan, sedangkan rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kabupaten Cilacap selama 5 tahun menunjukkan tren berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat, semula derajat kemandirian pada tahun 2020 sebesar 18,76% hingga sebesar 23,02% pada tahun 2024. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Cilacap mengalami fluktuasi dari yang semula sebesar 93,19% pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,88% pada tahun 2024. Kondisi pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap relatif baik, yang dapat mengarah pada terwujudnya kemandirian daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Komponen belanja daerah meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; belanja modal (belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset tak berwujud dan belanja modal aset lainnya); belanja tidak terduga; belanja transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan). Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,74%. Pos belanja tidak terduga setelah tahun 2020 menurun karena penggunaan penanganan Pandemi Covid-19. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Cilacap selama 5 tahun menunjukkan realisasi meningkat, yang semula pada tahun 2020 sebesar Rp. 3,088 triliun menjadi sebesar Rp. 3,853 triliun pada tahun 2024.

Selama periode 2020-2024 belanja terbesar merupakan belanja operasi dengan proporsi rata-rata mencapai 69,2% dan nilai rata-rata pada kurun waktu 2020-2024 sebesar Rp.2,380 triliun per tahun. Setelah itu berturut-turut adalah belanja transfer dengan nilai rata-rata proporsi terhadap total belanja 16,2% per tahun dan belanja transfer dengan nilai rata-rata sebesar 14,5%.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja terbesar pada pos belanja operasi ini adalah belanja pegawai dengan porsi rata-rata mencapai 38,21% dari seluruh belanja. Belanja pegawai meningkat antara lain dikarenakan mulai dibayarkannya Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan

dan kesehatan. Anggaran belanja pegawai juga sejalan dengan bertambahnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada pos DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Belanja operasi terbesar selanjutnya adalah belanja barang dan jasa yang mencapai 39,7%.

Belanja terbesar kedua adalah belanja modal dengan proporsi mencapai rata-rata 15,38% per tahun. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penurunan belanja modal mulai tahun 2022 dikarenakan peralihan rekening belanja modal ke belanja barang jasa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi JITUT. Komponen belanja modal rata-rata terbesar di dalam belanja modal adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 49,4% per tahun dari total belanja modal.

Selanjutnya, belanja transfer dengan proporsi rata-rata per tahun mencapai 16,07% mayoritas digunakan untuk belanja bantuan keuangan nilai rata-rata Rp. 527,534 miliar per tahun.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Terkait dengan hal tersebut kemandirian keuangan daerah dalam konteks pembiayaan daerah merupakan kemampuan daerah untuk menutup defisit APBD tanpa bergantung dari dana APBN. Hal tersebut karena dalam hal APBD mengalami defisit tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Besaran defisit yang ditunjukkan dengan nilai negatif menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah atau dengan kata lain belanja lebih besar dari pendapatan.

Penerimaan pembiayaan daerah, terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian- pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kabupaten Cilacap mengalami defisit pada tahun 2022 sebesar Rp.108,903 Miliar atau sebesar 3,31%, tahun 2023 sebesar Rp.24,593 Miliar atau sebesar 0,71%, dan tahun 2024 sebesar Rp.11,645 Miliar jika dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun bersangkutan. Nilai defisit tersebut masih bisa ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 2. 69.

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (Rp.000)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH	3.152.402.455,71	3.334.300.290,66	3.293.132.139,34	3.476.512.675,65	3.842.571.231,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	591.343.787,16	739.133.833,86	700.428.762,45	768.640.705,77	884.443.305,10
Pajak Daerah	203.188.563,27	221.377.109,18	280.277.331,10	296.270.228,74	362.088.365,07
Retribusi Daerah	18.969.873,12	18.619.623,09	19.813.134,11	19.684.990,11	344.865.875,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.675.178,66	56.112.553,45	57.360.038,80	61.133.781,99	59.866.939,66
Lain-lain PAD yang Sah	324.510.172,11	443.024.548,15	342.978.293,44	391.551.704,92	117.622.124,94
PENDAPATAN TRANSFER	2.346.223.145,23	2.403.370.709,95	2.563.412.247,06	2.684.312.641,68	2.953.373.887,67
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.123.408.420,65	2.137.587.242,27	2.286.284.520,50	2.404.202.119,34	2.660.745.994,17
Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.814.724,58	265.783.467,68	277.127.726,56	280.110.522,35	292.627.893,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	214.835.523,32	191.795.746,84	29.291.129,83	23.559.328,20	4.754.039,00
Pendapatan Hibah	17.076.061,65	17.642.977,03	29.291.129,83	23.559.328,20	4.754.039,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	197.759.461,67	174.152.769,82	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	3.088.834.820,26	3.329.814.716,68	3.402.035.620,73	3.501.105.821,33	3.854.216.238,38
BELANJA OPERASI	2.118.332.170,80	2.210.981.437,44	2.320.737.241,79	2.443.369.777,40	2.808.031.595,25
Belanja Pegawai	1.145.443.814,43	1.216.467.089,07	1.276.549.760,53	1.347.024.602,98	1.582.456.838,28
Belanja Barang dan Jasa	881.429.804,13	896.942.503,67	927.982.437,49	946.328.971,74	1.055.771.843,44
Belanja Subsidi	0,00	0	0	370.902,00	538.883,40
Belanja Hibah	40.366.842,25	91.467.844,69	110.755.993,77	148.484.800,68	168.947.030,13
Belanja Bantuan Sosial	51.091.710,00	6.104.000,00	5.449.050,00	1.160.500,00	317.000,00
BELANJA MODAL	462.431.933,78	583.816.848,98	537.110.858,82	468.852.514,72	423.250.109,25
Belanja Modal Tanah	14.242.054,65	2.879.943,86	3.763.063,24	908.341,51	9.527.364,64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.580.137,02	135.811.712,71	119.231.474,14	123.847.686,04	108.945.427,61

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.032.862,64	117.320.453,27	128.439.041,22	156.897.597,70	97.879.072,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.551.341,35	320.292.686,55	276.909.438,41	175.239.473,87	195.722.012,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.867.458,13	6.467.884,90	8.767.841,81	11.534.095,11	10.160.746,12
Belanja Modal Aset Lainnya	158.080,00	1.044.167,70	0	425.320,50	1.015.486,60
BELANJA TIDAK TERDUGA	26.975.323,08	4.935.080,67	4.204.295,32	279.100,21	364.493,04
Belanja Tidak Terduga	26.975.323,08	4.935.080,67	4.204.295,32	279.100,21	364.493,04
BELANJA TRANSFER	481.095.392,60	530.081.349,59	539.983.224,80	588.604.429,00	622.570.040,84
Belanja Bagi Hasil	21.470.790,30	22.190.613,12	23.312.112,40	29.206.572,70	28.480.836,80
Belanja Bantuan Keuangan	459.624.602,30	507.890.736,47	516.671.112,40	559.397.856,30	594.089.204,04
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	280.865.946,06	324.581.581,51	314.067.155,49	185.663.674,10	140.070.528,42
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	280.865.946,06	324.581.581,51	314.067.155,49	185.663.674,10	140.070.528,42
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.852.000,00	15.000.000,00	19.500.000,00	21.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	19.852.000,00	15.000.000,00	19.500.000,00	21.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	261.013.946,06	309.581.581,51	294.567.155,49	164.663.674,10	140.070.528,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	324.581.581,51	314.067.155,49	185.663.674,10	140.070.528,42	128.425.521,81

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 (audited)

2.2.3. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar).

Aset pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Pada tahun 2020, aset yang dimiliki mencapai Rp. 4.304.460.941,39, meningkat menjadi sebesar Rp. 5.231.001.245,91 ditahun 2024. Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Cilacap yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas. Neraca Kabupaten Cilacap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 70.
Neraca Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2023 (Rp.000)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
Aset Lancar	324.872.679,82	314.168.685,78	185.684.336,97	140.115.190,26	128.475.771,78
Piutang Pendapatan	13.776.231,84	101.744.258,22	94.366.174,85	103.049.502,20	108.675.550,58
Jumlah Aset Lancar	338.648.911,66	415.912.944,00	280.050.511,82	243.164.692,46	237.151.322,36
Investasi Jangka Panjang	1.298.408.087,11	1.339.287.250,90	1.373.902.736,51	1.383.382.298,58	1.395.295.422,10
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen					1.395.295.422,10
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.298.408.087,11	1.339.287.250,90	1.373.902.736,51	1.383.382.298,58	1.395.295.422,10
Aset Tetap					
Jumlah Aset Tetap	4.194.060.979,38	4.477.105.727,23	4.806.934.020,56	5.016.611.511,14	5.103.470.171,84
Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Aset Lainnya					
Jumlah Aset Lainnya	110.399.962,01	112.772.375,05	170.154.946,60	125.075.156,83	127.531.074,07
Properti Investasi					
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	44.786.138,50	44.646.076,62
Jumlah Aset	4.304.460.941,39	4.589.878.102,28	4.977.088.967,16	5.141.686.667,97	5.231.001.245,91
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	31.710.226,07	63.918.905,14	31.735.676,22	56.310.386,74	75.847.694,81
Kewajiban Jangka Panjang					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	31.710.226,07	63.918.905,14	31.735.676,22	56.310.386,74	75.847.694,81
Ekuitas					
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	6.047.267.120,67	6.345.078.297,18	6.631.042.215,51	6.813.019.797,51	6.908.094.066,98

Konteks kondisi kemampuan keuangan daerah pada bagian ini adalah bagaimana kemampuan suatu daerah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya serta seberapa jauh suatu daerah dapat dibiayai dengan hutang. Kemampuan keuangan tersebut dapat diukur menggunakan metode analisis rasio, yakni analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis leverage.

2.2.4. Ratio Likuiditas

Analisis likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah dengan kewajiban lancar (hutang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Pada tahun 2020 *current ratio* Pemerintah Kabupaten Cilacap mencapai nilai 10,68 mengalami penurunan menjadi 3,13 pada tahun 2024 karena peningkatan kewajiban lancar dan penurunan aktiva lancar secara signifikan pada 2024. Kemampuan keuangan Kabupaten Cilacap dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang cukup fluktuatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71.
Current Ratio Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.000)	Kewajiban Lancar (Rp.000)	Current Ratio
2020	338.648.911,66	31.710.226,08	10,68
2021	415.912.944,00	63.918.905,13	6,51
2022	280.050.511,82	31.735.676,22	8,82
2023	243.164.692,46	56.310.386,74	4,32
2024	237.151.322,36	75.847.694,81	3,13

Rasio cepat (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang telah dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat menunjukkan likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio cepat pada tahun 2020 sebesar 9,64 mengalami penurunan tahun 2024 menjadi 2,54.

Tabel 2. 72.
Quick Ratio Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.000)	Persediaan (Rp.000)	Kewajiban Lancar (Rp.000)	Quick Ratio
2020	338.648.911,66	32.941.359,79	31.710.226,08	9,64
2021	415.912.944,00	47.398.925,41	63.918.905,13	5,77
2022	280.050.511,82	54.824.439,01	31.735.676,22	7,10
2023	243.164.692,46	43.161.474,98	56.310.386,74	3,55
2024	237.151.322,36	51.210.711,03	75.847.694,81	2,45

2.2.5. Analisis Solvabilitas

Kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, dapat diketahui dari rasio solvabilitas. Suatu pemerintah daerah dikatakan solvable apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*.

Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Cilacap pada periode 2020–2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai rasio solvabilitas sebesar 135,74 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 156,83. Rasio tersebut sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 68,97 pada tahun 2024 karena menurunnya total aktiva dan peningkatan total kewajiban.

Tabel 2. 73.
Rasio Solvabilitas Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	Total Aktiva (Rp.000)	Total Kewajiban (Rp.000)	Ratio solvabilitas
2020	4.304.460.941,39	31.710.226,08	135,74
2021	4.589.878.102,28	63.918.905,13	71,81
2022	4.977.088.967,16	31.735.676,22	156,83
2023	5.141.686.667,97	56.310.386,74	91,31
2024	5.231.001.245,91	75.847.694,81	68,97

2.2.6. Analisis Leverage

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana beban risiko hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan terlihat pada rasio hutang (leverage). Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage yaitu rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio/DER*). *DER* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Rasio ini mengindikasikan serapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan hutang (*over-leveraged*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian hutang semakin besar.

Rasio hutang (*leverage*) ini sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio hutang Pemerintah Kabupaten Cilacap terlihat cenderung menurun pada periode 2020 –2024. Kenaikan rasio hutang pada tahun 2021 terjadi karena peningkatan total kewajiban dan ekuitas secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan unatuk tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukan peningkatan disebabkan adanya peningkatan untuk kewajiban dan ekuitas.

Tabel 2. 74.
Rasio Leverage Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban (Rp.000)	Total Ekuitas (Rp.000)	Ratio Leverage
2020	31.710.226,08	6.015.556.894,60	0,005
2021	63.918.905,13	6.281.159.392,04	0,010
2022	31.735.676,22	6.599.306.539,29	0,005
2023	56.310.386,74	6.756.709.410,77	0,008
2024	75.847.694,81	6.832.246.372,17	0,011

2.2.7. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Pada periode tahun 2026-2030 kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
 - 1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah dalam penetapan targetnya dapat dilakukan secara optimal.
 - 2) Mengoptimalkan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi.
 - 3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas dalam pengelolaan pajak daerah.
 - 4) Melakukan sosialisasi (penyuluhan) guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - 5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, serta melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung pada wajib pajak daerah potensial.
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
 - 7) Memperkuat digitalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 8) Melakukan intensifikasi dalam penagihan piutang pajak, khususnya PBB-P2 dengan melibatkan Satpol PP dan Camat.
 - 9) Menambah jumlah pemasangan Tapping Box sebagai sarana pemantauan omset wajib pajak.
- b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD dan mengevaluasi ketentuan terkait pembagian dividen pada perda tentang BUMD, yang berdampak terhadap pendapatan dari bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.

- c. Pemanfaatan asset daerah untuk meningkatkan PAD. Perhitungan indeks pengelolaan asset diharapkan mampu mendorong pencapaian retribusi,
- d. Upaya peningkatan kinerja untuk memperoleh peningkatan Dana Insentif Daerah (DID). Peningkatan kinerja yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan melalui dana insentif daerah adalah dengan meningkatkan upaya penetapan APBD tepat waktu, pengiriman LPPD tepat waktu, Opini BPK harus WTP, penggunaan *e-procurement*, penggunaan *e-budgeting*; Kategori Kinerja (Batas Nilai Minimal = 76 (B) yaitu kesehatan fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inflasi daerah, pelayanan dasar bidang pendidikan (APM, peta mutu pendidikan); pelayanan dasar bidang kesehatan (Balita mendapatkan imunisasi lengkap, penanganan Balita Stunting, persalinan fasilitas kesehatan); pelayanan dasar bidang infrastruktur (akses sanitasi layak, sumber air minum layak); Pelayanan dasar bidang perumahan dan permukiman (Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni); pelayanan dasar bidang sosial (PPKS yang terlayani); pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum (penanganan korban penertiban oleh trantibum) kesejahteraan masyarakat (IPM); Penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan), pelayanan umum pemerintahan (inovasi pelayanan publik, inovasi pemerintahan daerah, penghargaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, SAKIP), peningkatan ekspor, peningkatan investasi dan pengelolaan sampah.
- e. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.
- f. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
- g. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku.
- h. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- i. Proporsi belanja infrastruktur ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 40% dari total belanja.
- j. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025-2030 di atas, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025-2030 disusun dengan berbasis pada asumsi:

- 1) Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2020-2024 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD.
- 2) Efisiensi sebagaimana yang diperintahkan Pemerintah Pusat mampu mendorong belanja infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Belanja perjalanan dinas menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi.
- 3) Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan RPJMN tahun 2020-2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2026-2030 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengalami pertumbuhan dan besarnya sama dengan tahun 2024.
- 4) Asumsi Inflasi Kabupaten Cilacap yang digunakan untuk proyeksi adalah 2% - 4%.
- 5) Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2026-2030 sebesar 2% - 5% per tahun.
- 6) Pada tahun 2025 dan lima tahun ke depan kondisi keuangan negara semakin membaik sehingga transfer ke daerah berimbang meningkat didukung dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dengan semakin meningkatnya *herd immunity* dengan vaksin seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi yang dilakukan Pemerintah yang semakin baik.

2.2.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2026-2030 didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen PAD. Asumsi tersebut termasuk telah memperhitungkan kondisi global yang berpotensi mempengaruhi resiko fiskal atas optimalisasi PAD.

- 1) Proyeksi pajak daerah Tahun 2026-2030, didasarkan atas baseline tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2020–2024 sebesar 7,90%. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 proyeksi Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2024 diasumsikan dapat tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2024 terdapat pengalihan dana transfer dari bagi hasil pajak kendaraan menjadi opsen pada PAD, sehingga proyeksi PAD juga memperhatikan hal tersebut. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan Optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB yang dilaksanakan oleh Kecamatan sehingga data yang terhimpun lebih akurat selain juga selalu meningkatkan koordinasi dan sinergitas sebagai bentuk dari perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Proyeksi Retribusi daerah tahun 2026-2030. Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi ini dapat ditingkatkan melalui pengelolaan asset daerah dan pengelolaan kegiatan di perangkat daerah yang mengandung retribusi.
- 3) Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari perusda yang ada di Kabupaten Cilacap didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang tinggi, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,14% per tahun pada periode 2026-2030, dengan baseline

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Realisasi tahun 2024.

- 4) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2017–2021 dengan rata-rata pertumbuhan 4,51% hal ini berdasarkan pada pertimbangan untuk pertumbuhan lain-lain PAD yang sah periode 2020-2024 cenderung menunjukkan adanya penurunan. Sumber terbesar pendapatan lain-lain pad yang sah, bersumber dari pendapatan layanan badan layanan umum daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2024 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2023-2026 serta undang-undang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat share pendapatan transfer pusat, rata-rata tahun 2020-2024 mencapai 69,71% terhadap total pendapatan daerah, yang diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan dana insentif daerah (DID).

Pencermatan terhadap dana transfer, bersumber dari kebijakan *efisiensi* anggaran dalam pelaksanaan *asta cita* dan *Quick Win* RPJMN 2025-2030, baik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil serta DAK (Fisik dan Non Fisik). Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi baseline DAK Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 tidak terdapat pertumbuhan. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak dapat diprediksi, karena ini tergantung dari capaian prestasi daerah.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2024. Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2025–2030. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota akan disinkronkan dengan pembangunan Kabupaten

Cilacap ke depan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah akan berdampak terhadap pendapatan bagi hasil dari provinsi menurun dikarenakan Kabupaten/Kota akan mendapatkan Opsen PKB.

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Berdasarkan data 2020-2024 belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, barang dan jasa, subsidi dan bantuan sosial diproyeksikan meningkat. Belanja pegawai dalam 5 (empat) tahun ke depan dialokasikan untuk pemenuhan gaji pegawai, dengan adanya tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Proyeksi belanja barang dan jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 31,75% per tahun terhadap total belanja pada tahun 2026–2030.

Rencana penggunaan belanja barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Kabupaten Cilacap guna pencapaian sasaran prioritas Daerah. Kebijakan belanja hibah antara lain untuk sarpras keagamaan, pendidikan, lembaga/organisasi masyarakat dan instansi pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Cilacap menganggarkan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cilacap pada tahun 2029 untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang diarahkan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan antara lain bantuan pendidikan dan bantuan rehab rumah tidak layak huni.

b. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2026 diproyeksikan dengan proporsi sebesar 9,78% dari total belanja dan pada tahun 2030 meningkat menjadi sebesar 13,60%. Komponen terbesar pada belanja modal adalah pada belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dengan proporsi 65,87% dari total belanja modal di tahun 2030.

c. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga dialokasikan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga diprioritaskan

untuk tanggap darurat bencana dan penanganan atau pemulihan pandemi atau kejadian luar biasa.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Alokasi belanja transfer Kabupaten Cilacap terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan di mana anggaran yang dialokasikan ditransfer ke pemerintah desa dalam bentuk Dana Desa, Alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di Kabupaten Cilacap diberikan dengan maksud mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif melalui semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara umum belanja daerah tahun 2026-2030 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026–2030 diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- 2) Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
- 3) Mengedepankan program-program yang menunjang pengentasan kemiskinan, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas, kompetensi guru dan kesejahteraan guru (kesejahteraan GTT-PTT dan pendidik keagamaan); fungsi kesehatan; dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Memenuhi belanja prioritas Kepala Daerah dan prioritas nasional.



3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025–2030

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. SiLPA tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Cilacap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari data APBD tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



Tabel 2. 75.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026-2030

Uraian	Baseline	Proyeksi (Rp.)				
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	3.842.291.231.762	3.982.191.815.458	4.048.580.033.020	4.121.005.708.826	4.199.607.388.782	4.251.651.086.627
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	884.443.305.096	1.113.599.129.458	1.179.987.347.020	1.252.413.022.826	1.331.014.702.782	1.383.058.400.627
Pajak Daerah	362.088.365.068	522.294.000.000	547.472.000.000	573.793.000.000	602.952.000.000	623.292.000.000
Retribusi Daerah	344.865.875.423	409.181.310.788	443.504.709.806	483.031.740.856	524.353.758.903	552.857.456.748
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	59.866.939.663	74.712.528.717	78.077.806.104	81.541.212.051	86.680.277.009	87.814.277.009
Lain-lain PAD yang Sah	117.622.124.943	107.411.289.953	110.932.831.110	114.047.069.919	117.028.666.870	119.094.666.870
PENDAPATAN TRANSFER	2.953.373.887.666	2.868.592.686.000	2.868.592.686.000	2.868.592.686.000	2.868.592.686.000	2.868.592.686.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.745.994.168	2.693.425.211.000	2.693.425.211.000	2.693.425.211.000	2.693.425.211.000	2.693.425.211.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	292.627.893.498	175.167.475.000	175.167.475.000	175.167.475.000	175.167.475.000	175.167.475.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.474.039.000	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	4.474.039.000	0	0	0	0	0
BELANJA	3.853.936.238.376	4.062.191.815.458	4.128.580.033.020	4.201.005.708.826	4.299.607.388.782	4.331.651.086.627
BELANJA OPERASI	2.807.751.595.245	3.066.263.480.903	3.011.757.640.655	3.057.284.380.327	3.155.809.159.554	3.135.038.475.170
Belanja Pegawai	1.582.456.838.280	1.702.599.153.871	1.572.520.228.222	1.572.520.228.222	1.572.520.228.222	1.572.520.228.222
Belanja Barang dan Jasa	1.055.491.843.437	1.243.370.244.142	1.296.466.425.399	1.352.217.415.718	1.363.925.123.685	1.423.049.048.919
Belanja Subsidi	538.883.400	1.038.609.600	1.090.540.080	1.145.067.084	1.202.320.438	1.262.436.460
Belanja Hibah	168.947.030.128	114.542.223.290	136.731.534.455	126.205.311.177	212.705.311.177	132.477.776.736
Belanja Bantuan Sosial	317.000.000	4.713.250.000	4.948.912.500	5.196.358.125	5.456.176.031	5.728.984.833
BELANJA MODAL	423.250.109.253	397.371.128.165	515.510.085.975	540.164.122.109	538.241.022.838	589.055.405.067
Belanja Modal Tanah	9.527.364.644	8.410.100.000	8.830.605.000	9.272.135.250	9.735.742.013	10.222.529.113
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.945.427.605	84.361.763.283	88.579.851.447	93.008.844.020	97.659.286.220	102.542.250.532

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025 - 2029



Uraian	Baseline	Proyeksi (Rp.)				
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.879.072.153	61.358.428.779	94.426.350.218	97.647.667.729	71.030.051.115	74.581.553.671
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.722.012.129	231.987.133.803	311.856.891.895	327.828.268.325	346.788.376.365	388.030.126.270
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.160.746.122	10.118.602.300	10.624.532.415	11.155.759.036	11.713.546.988	12.299.224.337
Belanja Modal Aset Lainnya	1.015.486.600	1.135.100.000	1.191.855.000	1.251.447.750	1.314.020.138	1.379.721.144
BELANJA TAK TERDUGA	364.493.038	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Tak Terduga	364.493.038	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
BELANJA TRANSFER	622.570.040.840	588.557.206.390	591.312.306.390	593.557.206.390	595.557.206.390	597.557.206.390
Belanja Bagi Hasil	28.480.836.800	55.105.899.000	57.860.999.000	60.105.899.000	62.105.899.000	64.105.899.000
Belanja Bantuan Keuangan	594.089.204.040	533.451.307.390	533.451.307.390	533.451.307.390	533.451.307.390	533.451.307.390
SURPLUS / (DEFISIT)	11.645.006.614)	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)	(100.000.000.000)	(80.000.000.000)
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.070.528.423	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	100.000.000.000	85.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.070.528.423	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan					15.000.000.000	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000
Pembentukan dana cadangan		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	140.070.528.423	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	100.000.000.000	80.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	128.425.521.809	-	-	-	-	-

2.2.9. Alternatif Sumber Pendanaan Lain

Pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelenggarakan keuangan daerahnya. Akan tetapi, daerah masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu masih ada kesenjangan pendanaan yang dilihat dari tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan dibandingkan dengan ketersediaan dana pembangunan pemerintah. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur daerah untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana non-pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Pendanaan alternatif selain APBD Kabupaten Cilacap ditempuh di antaranya dengan mendorong pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran serta BUMN, BUMD dan perusahaan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya.

Peningkatan peran BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta melalui TJSLP/program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Cilacap merupakan wujud sinergitas perusahaan untuk berperan serta dalam mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 76.
Realisasi Pelaksanaan TJSLP/CSR di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta	Jumlah Program	Realisasi
2019	10	5	37.395.576.139
2020	30	20	36.640.791.349
2021	34	24	27.435.353.528
2022	32	30	32.748.104.240
2023	34	30	29.405.580.398
2024	33	43	31.116.141.917

Sumber : Sinergi cilacap online tahun 2019-2024

Berdasarkan data tersebut di atas jumlah perusahaan yang melaporkan realisasi TJSLP/CSR mengalami peningkatan hal tersebut menunjukan kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan TJSLP/CSR meningkat. Jumlah program yang dilaksanakan oleh perusahaan menunjukan peningkatan sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah Kab. Cilacap dan jumlah realisasi TJSLP/CSR dari waktu ke waktu menunjukkan kondisi fluktuatif.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan uraian pada Bab II terkait gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi berdasarkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka rumusan permasalahan pembangunan daerah masing-masing aspek adalah sebagai berikut :

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Wilayah

Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah, topografi, dan klimatologi yang beragam, menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Kekayaan geografis ini menawarkan peluang signifikan untuk berbagai sektor, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Tak hanya itu, area perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat yang seharusnya menjadi gerbang ekonomi dan pariwisata, juga belum menunjukkan perkembangan maksimal. Sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, hingga perhubungan di wilayah strategis

ini masih menghadapi tantangan serius dalam pengembangannya, menghambat potensi Cilacap untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Bagian Selatan.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi luas wilayah, topografi dan klimatologi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Perbatasan wilayah dengan Provinsi Jawa Barat yang belum optimal dikembangkan baik pariwisata, perdagangan, perindustrian maupun perhubungan. Selain itu potensi bencana alam masih sangat tinggi. Semua jenis bencana ada di Kabupaten Cilacap, dan seluruh kecamatan merupakan daerah rawan bencana berdasarkan dokumen RTRW. Sementara kecamatan, desa, kelurahan belum semua menjadi wilayah Tangguh bencana.

2. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan data pada gambaran umum disebutkan bahwa daya dukung dan daya tampung perlu mendapat perhatian. Hasil analisis KLHS menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap telah mengalami penurunan kapasitas lingkungan, baik daya dukung dan daya tampung air maupun daya dukung dan daya tampung pangan. Kabupaten Cilacap yang merupakan penyangga pangan ini harus memiliki daya dukung dan daya tampung air yang baik.

3. Belum Optimalnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Cilacap masih menghadapi tantangan dalam mencapai ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang optimal. Sektor pangan menunjukkan ketersediaan yang belum stabil dan kurangnya keanekaragaman, menyebabkan masih adanya daerah rentan pangan. Akses terhadap air siap minum perpipaan juga terbatas, dengan mayoritas penduduk mengandalkan sumber non-perpipaan. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Cilacap secara umum baik, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) justru berfluktuasi dan masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional. Dalam upaya kemandirian energi, Cilacap telah memulai implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTS dan biogas, namun penerapannya masih dalam skala terbatas.

Dalam mendukung kemandirian pangan permasalahan yang muncul adalah masih belum optimalnya ketersediaan pangan terutama pada masa tertentu dan belum optimalnya keanekaragaman pangan sehingga masih muncul daerah rentan pangan.

4. Belum Optimalnya Lingkungan Hidup Berkualitas

Kabupaten Cilacap masih berjuang mencapai lingkungan hidup berkualitas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan fluktuasi, bahkan menurun signifikan pada tahun 2022, menandakan tekanan pada kualitas air, udara, dan lahan. Akses sanitasi aman juga sangat rendah (hanya 2,79% rumah tangga di 2024), dan penanganan sampah fluktuatif serta menurun. Namun, Cilacap menunjukkan tren positif dalam mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), menunjukkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meski ada kemajuan, upaya strategis lebih lanjut pada sanitasi dan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas lingkungan Cilacap.

Kontribusi pada penurunan GRK masih belum optimal hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi atau masyarakat masih memberikan menghasilkan bahan yang meningkatkan GRK. Kualitas lingkungan hidup belum optimal, masih ditemuinya kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan yang belum optimal. Pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap telah mengalami kemajuan baik melalui RDF maupun 3R, namun belum mampu menyelesaikan sampah yang ada.

5. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Bonus Demografi

Sampai dengan tahun 2024 bonus demografi masih berlangsung di Kabupaten Cilacap, ini masih menjadi potensi dan ancaman pada pembangunan 5 tahun kedepan apabila penduduk usia produktif ini belum memiliki pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata juga menjadi permasalahan kedepan, pada kecamatan dengan tingkat kepadatan yang tingkat maka menjadi potensi terjadinya kekumuhan, dan kemiskinan.

6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar dalam ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim, karena hampir seluruh jenis bencana teridentifikasi di tiap kecamatan. Namun, kesiapsiagaan di tingkat desa dan kelurahan masih belum merata. Meskipun ada kemajuan dalam pengurangan emisi GRK, hal ini belum menjamin kesiapan daerah menghadapi berbagai ancaman. Oleh karena itu, pembangunan resiliensi yang meliputi infrastruktur tahan bencana, penataan ruang berbasis risiko, dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi agenda penting yang harus terus diperkuat.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Menurunnya Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan serius, ditandai oleh klasifikasi "Maju Tapi Tertekan" akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat meskipun PDRB per kapita tinggi. Permasalahan ini diperberat oleh belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja, minimnya penanaman modal, dan keterbatasan inovasi produk. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indeks Gini yang masih tinggi dan kemiskinan yang belum tertangani efektif, diperburuk oleh akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan permodalan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dibedakan pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas. Sampai dengan 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di keduanya, namun masih diatas kondisi Jawa Tengah dan Nasional. Belum optimal dalam peningkatan potensi Cilacap dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Cilacap merupakan daerah Maju Tapi Tertekan (PDRB perkapita relatif besar namun selama lima tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan relatif rendah). Untuk mengatasi kondisi ini, Cilacap perlu kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, investasi infrastruktur, inovasi industri, dan peningkatan daya saing tenaga kerja agar pertumbuhan ekonominya kembali meningkat. Berdasarkan analisis diatas sektor unggulan adalah Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor potensial adalah pertanian dan industri pengolahan.

2. Belum Meratanya Kesehatan untuk Semua

Permasalahan pemerataan kesehatan di Kabupaten Cilacap menjadi tantangan signifikan, meskipun angka Usia Harapan Hidup (UHH) telah mencapai 74,97 tahun pada 2024 dan melampaui rata-rata nasional. Kondisi ini belum mencerminkan kualitas kesehatan yang merata, ditandai oleh tren peningkatan kematian ibu dan bayi, serta tingginya prevalensi penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD) dan penyakit tidak menular yang berkontribusi pada angka kematian. Lebih lanjut, perilaku hidup sehat masyarakat belum optimal, dan layanan kesehatan primer maupun rujukan masih belum merata, baik dari segi tenaga medis, alat kesehatan, maupun ketersediaan farmasi.

Ketimpangan juga terlihat dalam pencapaian program keluarga berencana dan indeks pembangunan keluarga, menegaskan bahwa pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Cilacap masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pembentuk Indek Pembangunan Manusia, unsur kesehatan miliki angka tertinggi. Usia Harapan Hidup mencapai angka diatas Jawa Tengah dan Nasional, namun kondisi ini tidak sebanding dengan kematian ibu dan bayi yang mengalami peningkatan, kondisi kesehatan masyarakat yang belum optimal, penyakit menular dan tidak menular mengalami peningkatan, TBC belum mencapai eliminasi, HIV AIDS mengalami peningkatan, DBD, dan penyakit tidak menular memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kematian di Kabupaten Cilacap. Usia lanjut yang diharapkan merupakan usia lanjut yang sehat dan tanpa kecacatan juga masih menjadi permasalahan. Kondisi ini juga dikarenakan perilaku hidup sehat yang belum optimal dan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang belum merata dan belum optimal baik tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

Kematian ibu dan bayi yang masih menjadi permasalahan dikarenakan salah satunya adalah ketercapaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum optimal. Pencapaian indeks pembangunan keluarga juga belum optimal.

3. Belum Optimalnya Pendidikan Berkualitas yang Merata

Belum optimal kualitas pendidikan hal ini dapat terlihat dari data rata rata lama sekolah yang masih diatas Jawa Tengah dan Nasional. Masih ditemukannya anak tidak sekolah, belum optimalnya penyelenggaraan kesetaraan menjadi pemicu pada rata rata lama sekolah yang belum mencapai angka optimal. Kualitas sekolah dan guru juga masih menjadi permasalahan yang akan diselesaikan pada 5 tahun ke depan

4. Belum Optimalnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

Penanganan kemiskinan belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan ketimpangan pendapatan dan belum optimalnya cakupan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti penduduk miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana. Selain itu, cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan mengalami fluktuasi, mencerminkan kurang stabilnya akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja. Masih rendahnya akurasi program bantuan sosial, ketidakterpaduan sistem administrasi

kependudukan, serta terbatasnya kesempatan bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan juga menjadi hambatan utama. Kondisi ini diperparah oleh risiko bencana yang belum diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai.

Penanganan kemiskinan masih menjadi permasalahan untuk dicarikan pemecahan di 5 tahun yang akan datang. Ketimpangan pendapatan yang dilihat dari indek gini juga menjadi permasalahan. Penanganan dan pemberian perlindungan sosial pada penduduk miskin dan pemerlu kesejahteraan yang lain masih menjadi permasalahan juga.

5. Belum Optimalnya Pemajuan Masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan yang ditandai dengan belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; dan masih rentannya Kabupaten Cilacap dalam perwujudan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama

6. Belum Optimalnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi permasalahan. Pemenuhan hak anak juga belum optimal, implementasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak anak, Desa/Kelurahan layak anak masih menjadi permasalahan dalam rangka mendukung perlindungan anak.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Menurunnya Daya Saing Ekonomi Daerah

- Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Cilacap menjadi permasalahan saat ini. Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.
- Investasi Kabupaten Cilacap didominasi investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja. Pelayanan perijinan dalam Mall Pelayanan Publik masih belum optimal.
- Belum optimalnya ekspor produk unggulan Cilacap, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas.
- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri, belum optimalnya pengembangan kluster industri potensi, belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah.

2. Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat.
- b. Belum optimalnya kearsipan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Digitalisasi kearsipan belum optimal
- c. Tingginya pengangguran disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja, belum optimalnya kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan dalam konsep pendidikan vokasi.

3. Belum Optimalnya Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

- a. Menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dibutuhkan kualitas infrastruktur yang optimal. Masih ditemukannya jalan yang rusak dan kondisi drainase yang belum optimal. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi layak dan aman. Penggunaan tata ruang yang belum sesuai peruntukannya juga menjadi perhatian ke depan, terutama pada perwujudan produktivitas pertanian.
- b. Kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, pemenuhan rumah masih menjadi prioritas. Masih ditemukannya rumah tidak layak huni dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat apabila pemenuhan rumah tidak terselesaikan. Kawasan kumuh juga belum terselesaikan.
- c. Ketimpangan pembangunan dan konektivitas antar wilayah menjadi permasalahan tersendiri. Masih terjadinya kemacetan di beberapa titik yang disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan. Kemacetan terjadi pada waktu tertentu. Kebiasaan masyarakat memakai kendaraan sendiri karena murah dan cepat menyebabkan tingkat kemacetan. Belum dibukanya konektivitas antara wilayah dengan Kabupaten sekitar terutama pada wilayah Cilacap Bagian Barat.
- d. Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik menjadi isu pembangunan. Digitalisasi semua lini menjadi tantangan bagi daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Pelayanan kepada masyarakat yang cepat juga menjadi permasalahan sampai dengan 2024 ini.

D. Aspek Pelayanan Umum

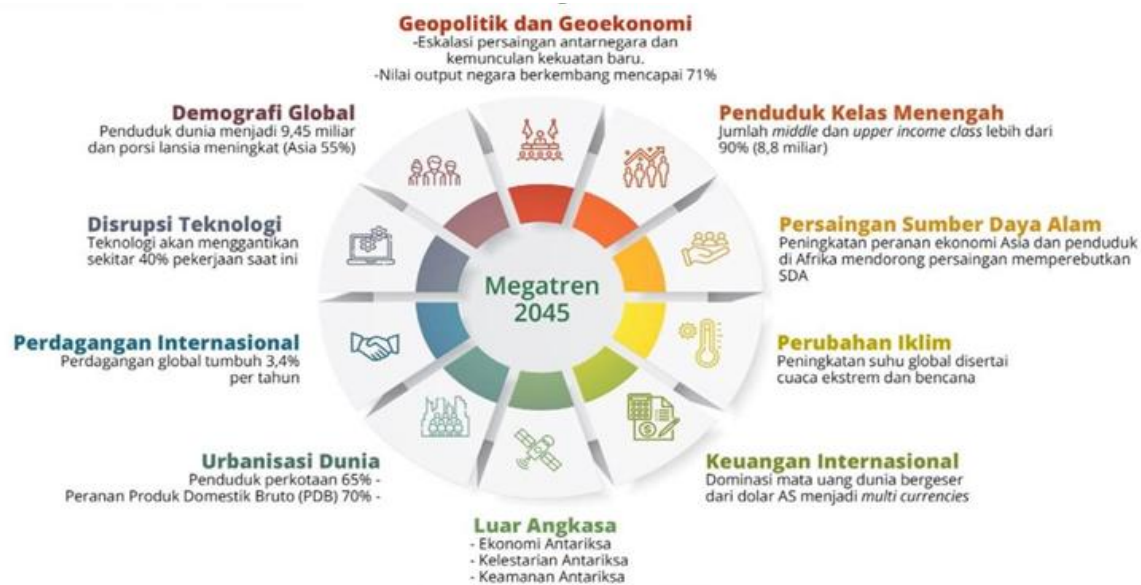
1. Belum optimalnya reformasi birokrasi yang dikarenakan belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik, belum optimalnya kualitas dan kapasitas fiskal keuangan, belum optimalnya kualitas kepegawaian dalam mendukung Merit System dan belum optimalnya pengawasan pembangunan. Masih rendahnya kepemilikan KIA. Riset dan inovasi belum mewarnai dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Reformasi hukum menjadi hal yang perlu mendapat prioritas dalam rangka mendorong penegakan perda dan Perkada.
2. Tingkat pemanfaatan statistik dalam pembangunan masih belum optimal. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.
3. Keamanan informasi masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di era digitalisasi. Permasalahan yang muncul adalah kelemahan infrastruktur teknologi, kurangnya kesadaran akan keamanan informasi dan kurangnya kebijakan keamanan yang jelas serta ancaman serangan siber

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Isu Strategis Internasional/Global

Isu strategis internasional dalam RPJPN tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (*global megatrend*), sebagai berikut :



Sumber: Bappenas (2022)

Gambar 2. 74.
Megatren Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (*Global Megatrend*) diuraikan di bawah ini.

Tabel 2. 77.
Isu Global dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

No	Isu Global	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait dengan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geoekonomi	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru dari negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Distrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada di perkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya julah kelas menengah pada tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya

No	Isu Global	Tantangan Pembangunan
		penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumber Daya Alam	Tantangan terbatasnya sumber daya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

2. Isu Jangka Panjang Nasional

Berdasarkan RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

Tabel 2. 78.
Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3. Isu Kewilayahan Jawa Bali dari Evaluasi Pembangunan

- a. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah karena persebaran pembangunan ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- b. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- c. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai dan polusi udara akibat industri.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- e. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- f. Belum optimalnya upaya penanganan kemiskinan dalam mengarungi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.

4. Isu Jangka Menengah Nasional

- Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia.
- Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.
- Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level Global.
- Tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan
- Aging population* negara maju.

5. Isu Strategis Transformasi

a. Isu Strategis Transformasi Sosial

1) Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah.

- AKI masih tinggi (189/100.000)
- Stunting masih tinggi (21,6%)
- Prevalensi obesitas 21,6%
- Kasus baru TB peringkat ke-2 dunia
- Kasus kusta peringkat ke-3 dunia
- 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis Nakes sesuai standar
- 24,7% RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- 36,5% Rumah Sakit terakreditasi paripurna
- 56,4% FKTP terakreditasi

2) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- Layanan pendidikan belum merata
- Kualitas pendidikan masih rendah
- Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas
- Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah
- Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah

- f) Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah

3) **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan sosial yang adaptif ditunjukkan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

- a) Akurasi program bantuan sosial masih rendah
- b) Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
- c) Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan
- d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
- e) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
- f) Program Jaminan Sosial belum optimal

b. **Isu Strategis Transformasi Ekonomi**

1) **Industri**

- a) Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022)
- b) Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022)
- c) Kompleksitas dan daya saing produk, produk UNCTAD industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk *knowledge intensive* (Basri, 2023; 2021)
- d) Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh *unskilled labour* (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017)
- e) *Mismatched* produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengekspor produk

yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023)

- f) Rendahnya kemampuan inovasi, dalam *Global Innovation Index* tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara
- g) Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022)

2) **Pariwisata**

- a) Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (overtourism) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- b) Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- c) Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- d) Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat 4 rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- e) Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan 5 rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

3) **Ekonomi Kreatif**

- a. Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
 - Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023)
 - Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100
- b. Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
- c. Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- d. Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual

- e. Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah

4) UMKM dan Koperasi

- a) Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta 1 minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.

5) Ketenagakerjaan

- a) Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah 1 rata-rata negara kawasan ASEAN), menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

6) Badan Usaha Milik Negara

- a) Kinerja BUMN
- Masih rendahnya ROA BUMN (3,05% di tahun 2022)
 - Masih rendahnya Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan negara (Rp573,6 Triliun pada tahun 2022)
- b) Daya Saing BUMN
- Jumlah BUMN Indonesia yang masuk peringkat global masih di bawah 10 BUMN
 - Masih rendahnya Total Asset Turnover BUMN (0,3% pada tahun N (0,3% pada tahun 2022)
- c) Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan
- Masih rendahnya Rasio capex BUMN terhadap PDB (1,3% pada tahun 2022)
 - Masih rendahnya rasio Jumlah TJSL BUMN yang disalurkan kepada masyarakat terhadap laba bersih BUMN (1,5% pada tahun 2022)/Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep Creating Shared Value (CSV)

7) Percepatan Transisi Energi

- a) Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
- b) Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi;
- c) Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil

- d) Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai
- e) Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi
- f) Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang
- g) Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran
- h) Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan
- i) Ketergantungan pada produksi impor
- j) Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga
- k) Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi
- l) Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi)

8) Ekonomi Sirkuler Industri

- a) Pemanfaatan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU (*Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)) yang belum optimal
- b) Rendahnya kapasitas pengolahan limbah elektronik (*e-waste*)
- c) Rendahnya tingkat pengumpulan sisa material untuk suplai industri daur ulang
- d) Ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri
- e) Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan bakar dan bahan baku industri masih terbatas
- f) Industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas
- g) Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang
- h) Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional kegiatan usaha pariwisata
- i) Kurangnya fasilitas pengumpulan sisa produk dan material tekstil dan elektronik
- j) Belum adanya standar pengelolaan limbah sisa konstruksi
- k) Belum adanya rantai pasok bahan baku sirkular yang terintegrasi

- l) Beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk proses daur ulangnya
- m) Tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal.

9) **Tenaga Kerja Hijau**

- a) Rendahnya pemahaman mengenai pekerjaan hijau (*green jobs*)
- b) Terbatasnya data dan informasi mengenai pasar kerja hijau
- c) Belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau (*green jobs*)
- d) Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau
- e) Belum memadainya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
- f) Terbatasnya panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*) baik di tingkat nasional maupun daerah
- g) Masih lemahnya peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)

10) **Pengelolaan Hutan Lestari**

- a) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional masih rendah
- b) Rendahnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
- c) Belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan
- d) Belum tuntasnya tata batas kawasan hutan
- e) Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal
- f) Terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 6
- g) Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif
- h) Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal.

11) **Digital**

- a) Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional

- 78% ekonomi nasional terpusat di Jawa dan Sumatera (BPS, 2022).
 - Setiap 1% peningkatan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 1996-2016, hanya mampu mendorong peningkatan PDB per kapita sebesar 1,4%, berbeda dengan China sebesar 3%. (*World Bank*, 2019).
- b) Digitalisasi Sektor Strategis
- Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI)
 - Adopsi digital bagi para pelaku UMKM masih rendah (*e-commerce*)
 - Inovasi dan pengembangan keuangan digital (*FinTech*)
 - Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik dan industri berbasis teknologi
- c) Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital
- Keamanan siber nasional
 - Perlindungan data pribadi dan privasi
 - Literasi digital masyarakat belum merata
 - Penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai dan menerapkan adopsi teknologi
 - Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, *Blockchain*

12) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- a) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
- Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
 - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
 - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
 - Pembangunan wilayah tidak merata
 - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan
- b) Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal

Supply Side :

- Keterkaitan rantai nilai antarwilayah masih rendah serta ekspor serta terpusat di Pulau Jawa
- Masih rendahnya *awareness* daerah untuk diversifikasi ekspor
- Masih rendahnya daya saing ekspor domestik
- Pembiayaan ekspor masih terhambat
- Masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan
- Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa
- Sektor jasa memiliki regulasi yang saling tumpang tindih
- Standarisasi produk ekspor yang masih belum optimal
- Masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha

Demand Side :

- Daya saing produk sektor jasa yang masih rendah
 - Minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global.
 - Adanya kebijakan dekarbonisasi (*decarbonization policies*) di beberapa negara Peningkatan kebijakan proteksionisme serta *trade barriers* yang tinggi (bea masuk, NTMs) di beberapa negara.
- c) Belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global
- Infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas.
 - Perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi.
 - Biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi.
- d) Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat
- Masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha
 - Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi

- Tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur.
- Koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi moda transportasi.

13) Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- a) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
 - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
 - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
 - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
 - Pembangunan wilayah tidak merata
 - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan
- b) Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif
 - Hanya daerah perkotaan di 14 Provinsi memiliki akses <0,5 km terhadap shelter angkutan umum (BPS, 2022)
 - RT perkotaan mendiami rumah layak huni sebesar 63,45% dan dengan akses air minum sebesar 41,95% (BPS, 2022)
- c) Tata kelola yang Belum Terpadu, Inovatif, dan Kolaboratif
 - Peran Pemerintah Provinsi dalam mendorong kerjasama pengelolaan Wilayah Metropolitan masih rendah (Pemkot Mataram, 2022)
 - Dari 2000 RDTR pada 514 kab/kota, baru tercapai 357 RDTR, dengan 40 RDTR merupakan RDTR Kota Otonom (Kemen ATR/BPN, 2022)
- d) Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan
 - Angka rasio gini perkotaan 0,409 d lebih tinggi dibandingkan perdesaan (BPS, 2022).
 - Terdapat 47,62% proporsi lapangan kerja informal di perkotaan (BPS, 2022).
 - Tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,29% (BPS, 2022).
- e) Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak

- Sumber utama urbanisasi adalah reklasifikasi desa menjadi kota sebesar 43% pada tahun 2000-2010 (World Bank, 2019).
- Pertumbuhan kawasan terbangun pinggiran kota berciri perdesaah sebesar 62,9% karena tumbuh industri dan aglomerasi penduduk baru (World Bank, 2019).

f) Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana

- 75% Kawasan Perkotaan Indonesia berada di daerah pesisir, rentan banjir, dan kenaikan muka air (World Bank, 2021).
- Kecenderungan keberhasilan pengurangan risiko bencana lebih besar terjadi pada Kota Besar dibandingkan Kota Kecil (Bappenas, 2019)

c. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

1) Integritas Partai Sosial

- a) Integrasi Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal)

2) Sistem Pengajian Tunggal

- b) Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif

3) Kualitas Regulasi

- a) Hiper regulasi, kewenangan regulasi yang tersebar, belum memadai SDM regulasi, partisipasi yang belum optimal

4) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

- a) Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas

5) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

- b) Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat

6) Manajemen Talenta

- a) Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN)

7) Integrasi Proses Bisnis

- a) Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi

d. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

1) Stabilitas Makro

- a) Risiko *climate action*; *Deglobalisasi*; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis. utang, Konfrontasi geoekonomi; *Asset bubble burst*; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga *higher for longer*; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS da Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi.

2) Pertahanan

- a) Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya

3) Politik Luar Negeri

- a) Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

4) Hukum

- a) Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan;

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kualitas SDM
3. Pengangguran Terbuka
4. Kemiskinan
5. Tata Kelola Pemerintahan
6. Inovasi
7. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup

8. Pemerataan Pembangunan
9. Bencana dan Kondusivitas

8. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap

1. Belum optimalnya perwujudan perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan;
2. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar;
3. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas cerdas, sehat, dan mandiri;
4. Belum optimalnya perwujudan masyarakat yang sejahtera, aman, dan didukung kepastian hukum;
5. Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
6. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam perubahan iklim dan kebencanaan.

9. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cilacap

Dalam rangka perumusan isu strategis Kabupaten Cilacap dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2. 79.
Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Cilacap

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
- Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bagian Selatan bersama dalam Kawasan Barlingmascakeb. - Pengembangan sarana dan prasarana jalan bagi konektivitas antar wilayah, irigasi pertanian, lahan pertanian yang subur hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang surplus dan tersedianya pasar di daerah - Kabupaten Cilacap memiliki jaringan jalan raya bagian Selatan Jawa, jaringan kereta api dan pelabuhan laut dan bandar udara serta terdapat proyek strategis nasional (KSN) yang berkembang (minyak, gas, pupuk, semen dan perikanan). - Kabupaten Cilacap mengalami surplus hasil pertanian tanaman pangan, hasil Perkebunan dan hasil hutan serta perikanan laut. - Masyarakat Kabupaten Cilacap dengan jumlah	- Masalah pengelolaan lingkungan hidup yang semakin menurun, potensi sumber daya alam yang belum secara optimal dimanfaatkan sesuai keunggulan daerah, potensi kebencanaan termasuk kategori sedang yang perlu mendapatkan perhatian dengan peningkatan tanggap bencana dan tanggap perubahan iklim global. - Belum meratanya pembangunan desa dan kawasan perdesaan, konektivitas antar perdesaan- perkotaan, akses perekonomian desa, pelayanan dasar baik air bersih, pendidikan, kesehatan dan transportasi umum - Masalah kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu dan balita dan perlindungan sosial belum optimal - Masalah tata pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan desa.	- Belum Optimalnya pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan - Belum Optimalnya ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar - Belum optimalnya perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah dan ekonomi kerakyatan - Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri - Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum	- Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja - Produksi dan konsumsi berkelanjutan - Perubahan iklim - Kemiskinan - Kesehatan - Pendidikan - Pangan dan gizi - Masyarakat inklusif dan damai akses keadilan dan membangun kelembagaan - Gender - Kesenjangan kota dan permukiman - Infrastruktur - Sumberdaya kelautan - Energi - Air bersih dan sanitasi - Ekosistem daratan - Kemitraan global	- Isu ekonomi : rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pembangunan ekonomi. - Isu sosial : kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. - Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas - Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional,	- Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Penurunan Tingkat kemiskinan Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - Keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana - Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia - Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	- Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi - Belum optimalnya daya saing dan kemandirian sumber daya manusia - Belum optimalnya perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam perubahan iklim dan kebencanaan - Belum optimalnya kondusivitas daerah - Belum optimalnya implementasi tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Belum meratanya pembangunan wilayah terutama pada kualitas infrastruktur

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
penduduk yang besar dan memiliki kondusivitas daerah yang baik, solidaritas sosial dan masyarakat yang agamis dan toleran. 6. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cilacap termasuk baik dalam transparansi dan akuntabilitas. Hal sejalan dengan capaian keberhasilan pembangunan dan perwujudan reformasi birokrasi dan Sistem Merit di daerah.	5. Jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat Pendidikan, Kesehatan yang rendah sehingga produktivitas tenaga kerja relatif rendah. Bonus demografi belum dapat secara optimal dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Kesetaraan gender belum optimal sehingga tenaga kerja perempuan sumbangannya terbatas.	6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel		stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh. 5. Isu ketahanan budaya dan ekologi 6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 7. Isu kesinambungan pembangunan : konsistensi perencanaan, penganggaran, konsistensi perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas.		

Berdasar analisis permasalahan, potensi, tantangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, isu strategis KLHS RPJMD, maka isu strategis Jangka Menengah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Isu strategis terkait dengan pengelolaan ekonomi lokal dan pemanfaatan unggulan daerah Kabupaten Cilacap yang beragam bagi pengembangan perekonomian, terutama pertanian, perikanan dan perkebunan, telah mendukung ketahanan pangan, potensi usaha UMKM dan perdagangan dan jasa-jasa. Potensi ekonomi lokal, tingkat produktivitas tenaga kerja masih rendah, kurangnya tenaga kerja terampil, penanaman modal, inovasi produk dan perluasan pasar hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan serta UMKM dan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

2. Belum optimalnya daya saing dan kemandirian sumber daya manusia

Isu strategis terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia belum optimal terutama pendidikan, kualitas kesehatan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja perempuan semakin meningkat. Pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta inovasi sesuai dengan perkembangan industri dan persaingan pasar tenaga kerja sehingga tenaga kerja terampil dapat masuk pasar kerja industri pengelolaan, perdagangan dan jasa-jasa modern lainnya.

3. Belum optimalnya perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat

Isu strategis terkait perwujudan masyarakat semakin sejahtera dengan akses pendidikan makin baik, putus sekolah menurun, kemiskinan dan pengangguran menurun, jaminan sosial dan akses permodalan usaha akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Demikian pula belum meratanya inovasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam peningkatan UMKM berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan ekspor agar sumber-sumber penghidupan masyarakat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif meningkatkan kesejahteraan.

4. **Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim dan kebencanaan**

Isu strategis terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas daerah aliran sungai, pengelolaan sampah dan limbah. Dampak adanya perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap usaha pertanian, perikanan, perkebunan berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah serta kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Potensi ancaman bencana Kabupaten Cilacap termasuk kategori sedang antara lain banjir, kekeringan, kebakaran, tanah longsor/ pergeseran tanah dan tsunami di kawasan pesisir. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah semakin meningkatnya desa tanggap bencana di Kabupaten Cilacap dan kesadaran masyarakat terkait dengan kebencanaan.

5. **Belum optimalnya kondusivitas daerah**

Isu strategis tentang kondusivitas daerah terkait erat dengan upaya mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang bermartabat, tertib hukum dan kelembagaan masyarakat semakin baik. Pentingnya kondusivitas daerah terkait erat dengan lingkungan masyarakat yang toleran, rukun dan gotong royong semakin baik, terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan sosial makin baik sehingga masyarakat aman dan tenteram, dunia usaha dan dunia industri makin meningkat dan nyaman melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Cilacap.

6. **Belum optimalnya implementasi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

Isu strategis mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) baik dilingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan terwujudnya reformasi birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik sejalan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), profesionalisme dan Sistem Merit yang semakin baik. Sumberdaya aparatur semakin berintegritas, Ber-AKHLAK, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan sumber daya aparatur yang profesional yang mendorong terwujudnya demokrasi yang bermartabat.

Isu strategis daerah belum meratanya pembangunan prasarana dan sarana dasar terutama pemenuhan air bersih, sanitasi aman, rumah layak huni dan aman dari bencana serta akses litrik bagi rumah tangga dan industri. Pengembangan jaringan jalan dan transportasi memudahkan konektivitas yang lebih cepat dan mudah antara daerah produsen dengan pasar hasil pertanian dan industri termasuk UMKM. Pembangunan jaringan jalan, saluran irigasi, air bersih dan kelengkapan dalam layanan transportasi dan perhubungan mendorong perkembangan pembangunan daerah dan konektivitas kawasan perdesaan dengan perkotaan dalam perluasan pasar di daerah.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah "gambaran masa depan yang diinginkan" atau "tujuan yang ingin dicapai" dalam jangka waktu tertentu. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang diinginkan, yang mencakup tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang mencakup sasaran dan target yang ingin diraih, serta merupakan rencana strategis yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, calon kepala daerah menyusun visi dan misi untuk dikampanyekan dalam pemilihan umum. Visi misi kepala daerah terpilih akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka menengah. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah ditetapkan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Dr. Syamsul Auliya Rachman, S.STP., M.Si. dan Ammy Amalia Fatma Surya S.H., M.Kn. Visi Kepala Daerah tahun 2025–2030 adalah **MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)**. Visi ini akan menjadi Visi dalam Dokumen RPJMD 2025-2029. Yang dimaksud MAJU dan BESAR dalam Visi di atas adalah :

1. Maju memiliki pengertian Kabupaten Cilacap akan menjadi Cilacap Mandiri yaitu mewujudkan kemandirian daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. aman memiliki pengertian menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat serta bagi para pelaku usaha dan investor dan juara memiliki pengertian menjadikan Cilacap daerah yang unggul dan juara dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat.
2. Berbudaya memiliki pengertian mewujudkan Cilacap menjadi daerah yang menjunjung tinggi nilai budaya, seni dan adat istiadat lokal untuk memajukan Cilacap. Selain itu berbudaya disini yang dimaksud adalah memiliki budaya kerja yang baik, mendorong reformasi birokrasi, menjadi Kabupaten Cilacap yang smart dan religius.
3. Sejahtera memiliki pengertian bahwa lima tahun ke depan masyarakat Cilacap akan sejahtera memiliki pendapatan yang baik mendorong jiwa

- entrepreneur* dalam memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Adil memiliki pengertian pembangunan di Kabupaten Cilacap akan mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan perlindungan sosial.
 - Merata memiliki pengertian pembangunan dilaksanakan diseluruh wilayah, mendorong infrastruktur baik di semua wilayah Kabupaten Cilacap.

Visi Kabupaten Cilacap selaras dan mendukung semboyan/sesanti Kabupaten Cilacap ("Cilacap Bercahaya"). Cilacap Bercahaya menggambarkan kondisi ideal Kabupaten Cilacap yang Bersih, Elok, Rapi, Ceria, Hijau, Aman, dan Jaya. Slogan ini mencerminkan cita-cita pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan Cilacap sebagai daerah yang nyaman, indah, dan sejahtera. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan citra daerah melalui upaya menjaga kebersihan lingkungan, mempercantik kota, menata ruang publik, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kebahagiaan di antara warga, yang didukung oleh potensi kekayaan alam dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Kolaborasi Visi Kepala Daerah terpilih dengan sesanti Kabupaten Cilacap, membentuk tagline/slogan **"CILACAP BERCAHAYA MAJU BESAR"** tahun 2025-2029.

Misi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah "tugas atau peran yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi". Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah terpilih:

- Misi 1 Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal.

Misi pertama ini untuk mencapai Visi Maju. Misi ini dalam rangka meningkatkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui penguatan manajemen dan mutu pendidikan, serta mendorong terwujudnya pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dan meningkatkan literasi masyarakat. Pada misi ini juga mendorong pembangunan

kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk penguatan pelayanan kesehatan lansia, kesehatan mental serta mendorong pengendalian pertumbuhan penduduk.

2. Misi 2 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Misi ini dalam rangka mewujudkan Visi Maju. Dalam misi dua ini melakukan penguatan pondasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memperkuat pencapaian kemandirian pangan melalui dorongan produksi pertanian dan perikanan. Misi ini juga memiliki pengertian untuk melakukan penguatan potensi unggulan pembangunan ekonomi di bidang pariwisata, mendorong kolaborasi program dalam pengembangan destinasi, sarana akomodasi dan restoran dan penguatan pondasi pengembangan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dengan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Pada misi ini juga mengandung tujuan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dengan mendorong keterpaduan antara pendidikan dan peluang kerja, serta menciptakan pendidikan vokasi selain itu dalam rangka mencapai itu semua diperlukan Penguatan riset dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Misi 3 Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif.

Pada misi 3 ini sesuai dengan Visi Berbudaya, Adil dan Sejahtera. Misi ini dalam rangka mencapai peningkatan pemajuan kebudayaan melalui penguatan kelestarian cagar budaya dan budaya tak benda serta pemanfaatan museum, perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemenuhan hak anak dan pengarusutamaan gender dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta mendorong penanganan kemiskinan yang dengan kegotongroyongan dan mendorong karakter bangsa.

4. Misi 4 Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini dalam rangka mendorong pencapaian Visi Merata, Adil dan Mandiri Pada misi ini mendorong pemantapan jaringan jalan dan konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas jalan menuju pusa-pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian



dan pariwisata, perwujudan Desa Mandiri melalui penguatan kualitas pembangunan desa dengan fokus pada pemerataan pembangunan dan sinergitas anggaran desa dengan prioritas kabupaten dan perwujudan kualitas lingkungan hidup dan mendorong penurunan gas rumah kaca, termasuk penguatan pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah, peningkatan pengangkutan sampah serta pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan

5. Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Misi ini dalam rangka mencapai Visi Maju, Merata dan Berbudaya. Pada Misi ini akan mendorong Penguatan tata kelola pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi, difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan pengelolaan aset daerah, efisiensi dan efektifitas, peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi dan penguatan pencapaian Merit System melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan penguatan sistem kepegawaian.

Kesesuaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJPD
Kabupaten Cilacap

Visi dan Misi RPJMD	Visi dan Misi RPJPD
MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR).	CILACAP PENDUKUNG PANGAN JAWA TENGAH YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN.
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	1. Misi tersebut selaras dengan Misi RPJPD: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan	2. Selaras dengan Misi RPJPD: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata
3. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif	3. Selaras dengan Misi RPJPD: Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	4. Misi tersebut selaras dengan Misi RPJPD: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	5. Misi tersebut selaras dengan Misi RPJPD: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Dinamis

Kesesuaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)	JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	(1)Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan	(2)Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan (6)Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
3. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif	(5)Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	(4)Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	(3)Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas

Kesesuaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai berikut:

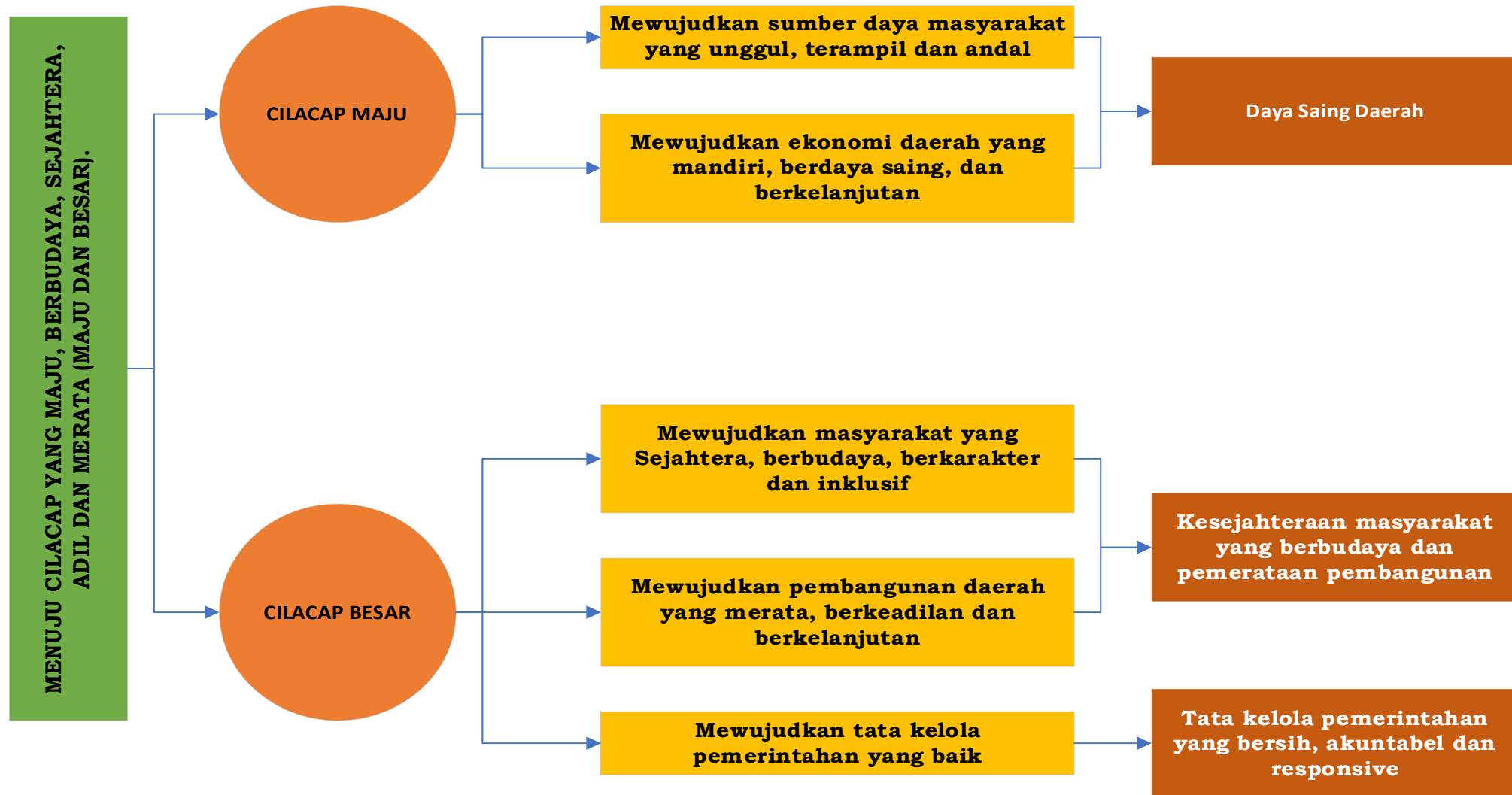


Tabel 3.3.
Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029
dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)	VISI BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	(4)Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan	(2)Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. (5)Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif	(6)Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	(3)Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (8)Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	(7)Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. (1)Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

3.1.2. Tujuan dan sasaran

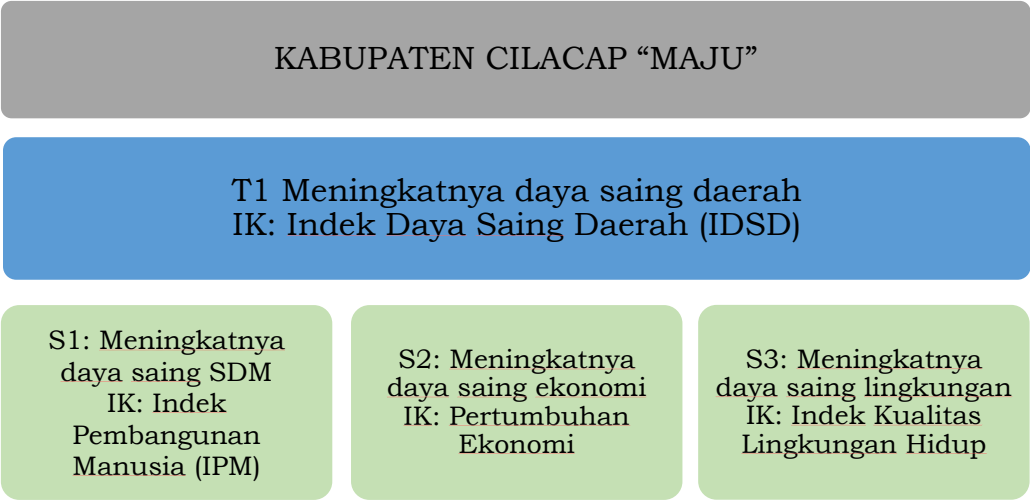
Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 dirumuskan melalui *logframe* pembangunan Kabupaten Cilacap sebagai berikut :



Gambar 3.1.
Logframe Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029

Berdasarkan *logframe* di atas berikut ini penjabaran untuk setiap frasa Visi:

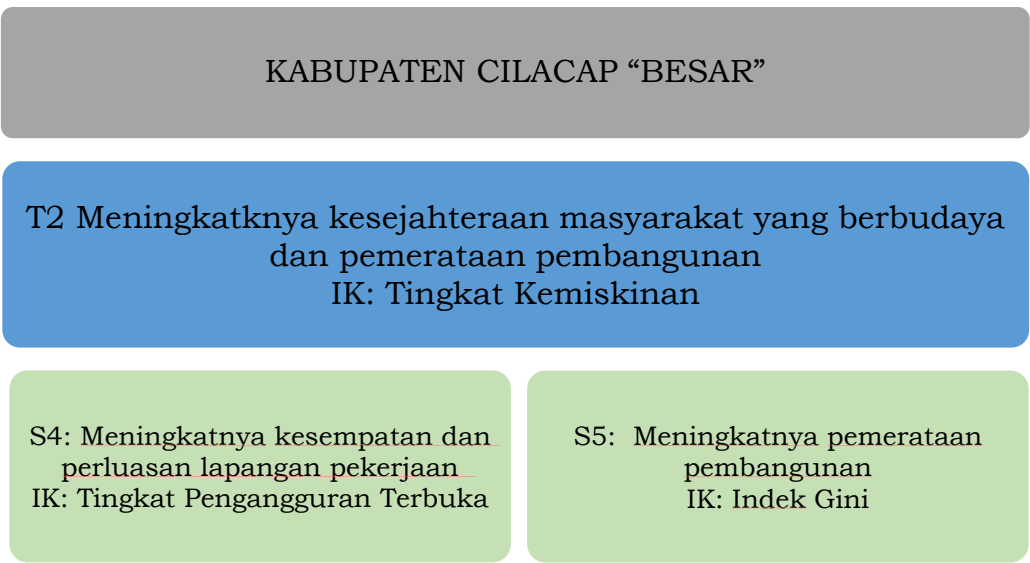
1. Frasa Visi Kabupaten Cilacap Maju



Pada Logframe 1 Menuju Kabupaten Cilacap Maju memiliki tujuan meningkatnya daya saing Kabupaten Cilacap dengan sasaran sebagai berikut :

- S1. Meningkatnya daya saing SDM dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- S2. Meningkatnya daya saing ekonomi dengan indikator Nilai Pertumbuhan ekonomi.
- S3. Meningkatnya daya saing lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Fase Visi Kabupaten Cilacap Besar



Pada Logframe 2 Menuju Kabupaten Cilacap Besar memiliki tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan pemerataan pembangunan dengan sasaran sebagai berikut :

- S4. Meningkatnya kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.
- S5. Meningkatnya pemerataan pembangunan dengan indikator Indeks Gini.

3. Frase Visi Kabupaten Cilacap Besar

KABUPATEN CILACAP “BESAR”

T3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan responsif
IK: Indek Reformasi Birokrasi

S6: Meningkatnya akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan,
dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital
IK: Indek Reformasi Birokrasi General

Pada log frame 3 menuju Kabupaten Cilacap Besar memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan responsive dengan sasaran sebagai berikut :

- S6. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General

Berdasarkan penjelasan Logframe di atas, berikut adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 :

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPJMD	Satuan	Base Line 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)											
Misi 1 Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal Misi 2 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan	T1 Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,55	3,60	3,70	3,80	3,85	3,90	4,00
		Sasaran 1 Meningkatnya daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,55	72,91	73,32	73,68	74,06	74,44	74,82
		Sasaran 2 Meningkatnya daya saing ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	2,65	5,40-6,10	2,80-3,00	4,10-5,00	4,60-5,50	5,20-6,00	5,70-6,30
				%	5,01	5,40-6,10	2,80-3,00	4,10-5,00	4,60-5,50	5,20-6,00	5,70-6,30
		Sasaran 3 Meningkatnya daya saing lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,16	75,10	75,15	75,20	75,24	75,29	75,34
Misi 3 Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif Misi 4 Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	T2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan pemerataan pembangunan		Tingkat Kemiskinan	%	10,68	10,66-10,14	10,34-10,08	10,08-9,15	9,15-8,65	8,65-8,15	8,15-7,16
		Sasaran 4 Meningkatnya kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,83	7,82-7,73	7,73-7,43	7,62 – 7,32	7,42– 7,12	7,11– 6,78	6,82– 6,36
		Sasaran 5 Meningkatnya pemerataan pembangunan	Indeks Gini	Indeks	0,355	0,350	0,345	0,340	0,335	0,330	0,325

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPJMD	Satuan	Base Line 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,89	86,93	87,97	89,00	90,04	91,08	93,12
		Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai	77,06	77,51	77,88	78,25	78,63	79,01	79,39

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

3.2.1. Strategi

Strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Meningkatnya daya saing SDM akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas daya saing pendidikan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, mutu dan akses pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, mendorong sekolah inklusi, mendorong partisipasi masyarakat untuk berpendidikan tinggi melalui pencapaian standar pelayanan minimal pada PAUD, SD dan SMP dan wajib belajar 13 tahun; mempersiapkan peta lokasi untuk pembangunan SMA/SMK sebagaimana kewenangan provinsi; Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan gerakan masyarakat, perilaku pola hidup sehat, aktivitas fisik, kualitas lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, mendorong kualitas fasilitas kesehatan di tingkat dasar dan rujukan baik sarana prasarana maupun kompetensi tenaga kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu dan anak sesuai standar pelayanan minimal dan peningkatan gizi masyarakat dimulai dari penyediaan gizi sejak bayi dan balita, mendorong penanganan stunting sejak dalam kandungan, pengembangan integrasi layanan primer dalam pencegahan dan pengendalian permasalahan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas hidup lansia, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
 - c. Meningkatkan keluarga yang berkualitas melalui pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup berupa daya dukung maupun daya tampung lingkungan.
 - d. Penguatan perencanaan dan penganggaran responsive gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan peran pentahelix, penguatan kelurahan/desa ramah anak dan

- perlindungan perempuan mendorong perwujudan Kecamatan BERDAYA, Peningkatan kualitas pemuda melalui penyediaan ruang kreativitas.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga para-olimpiade untuk difabel. Penguatan organisasi olahraga, SDM olahraga untuk pencairan bibit atlet dan sarana prasarana olahraga.
 - f. Pengembangan kurikulum pendidikan berkarakter pada setiap jenjang.
2. Sasaran 2 meningkatnya daya saing ekonomi akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :
- a. Pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara pengembangan sektor pertanian sebagai sektor utama mendukung kemandirian pangan, peningkatan prasarana pertanian baik irigasi, jalan menuju pertanian, embung, prasarana berbasis teknologi, peningkatan kemudahan akses pupuk dan pestisida, peningkatan dan pengembangan kualitas bibit pertanian. peningkatan peran pemuda menjadi pertanian millennial dan mempertahankan LP2B, hilirisasi dan modernisasi pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertanian, penguatan kelembagaan dalam rantai pasok pertanian untuk mendukung ekonomi hijau.
 - b. Meningkatkan kualitas produksi perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan perikanan terpadu, peningkatan pemanfaatan teknologi, pengembangan produk unggulan perikanan dengan rantai dingin, dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan Samudra Cilacap dalam mendukung ekonomi biru.
 - c. Mengembangkan industri pengolahan dengan Optimalisasi kawasan peruntukan industri sebagai tempat pengembangan sentra/kluster industri kecil di Cilacap, peningkatan kualitas produk, peningkatan pemasaran dan jejaring, kemudahan perijinan berusaha dan pemanfaatan Sistem Industri Nasional dalam pembinaan industri kecil, mendukung ekonomi serkuler dan ekonomi hijau.
 - d. Mengembangkan jiwa kewirausahaan Cilacap melalui Peningkatan Pendidikan dan pelatihan bagi pemuda, baik pelatihan produksi, pemasaran maupun perijinan, Fasilitasi akses permodalan bagi

- wirusaha, Peningkatan jejaring, Pengembangan Inkubasi Wirausaha.
- e. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan melalui Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, Peningkatan perlindungan konsumen, Peningkatan kualitas produk UMKM, pemasaran dan perijinan, Pembinaan pelaku usaha/UMKM yang memiliki potensi ekspor, pengembangan koperasi merah putih, menjamin ketersediaan barang pokok dan barang penting serta kestabilan harga, Penguatan kemitraan pedagang.
 - f. Mengembangkan daya saing sektor pariwisata melalui Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata, Peningkatan kualitas industri pariwisata (meningkatkan kualitas perhotelan berstandar, meningkatkan kualitas jasa makan minum/restoran yang mendukung kunjungan pada destinasi wisata), pengembangan destinasi wisata unggulan, salah satunya wisata desa melalui promosi dan mendorong wisata desa yang dikembangkan oleh desa, mendorong kualitas pelaku usaha serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai pelengkap kunjungan destinasi.
 - g. Peningkatan investasi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja melalui investasi padat modal, mempermudah perijinan melalui peningkatan kualitas Mall Pelayanan Publik, optimalisasi peta potensi investasi. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu memenuhi investor Cilacap baik tenaga kerja yang memiliki kompetensi maupun tenaga kerja yang terlatih, mengembangkan sistem karir pada pencari kerja berbasis teknologi yang terpadu antara pengusaha, pencari kerja dan pemerintah.
 - h. Meningkatkan kondusivitas daerah melalui Mitigasi potensi konflik sosial, Penegakan perda dan perkara, Perlindungan masyarakat dan Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, baik bencana alam maupun sosial.
 - i. Meningkatkan kapabilitas inovasi melalui penciptaan inovasi di masyarakat, perangkat daerah, mendorong kemampuan riset dalam mencari pemecahan masalah (*problem solving*), meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, swasta dalam penciptaan riset dan inovasi.
3. Sasaran 3 Meningkatnya daya saing lingkungan hidup akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas air tanah, kualitas udara melalui peningkatan ruang terbuka hijau, mendorong peran stakeholder dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan pengurangan sampah melalui pendekatan sirkuler ekonomi, 3R (*reuse reduce dan recycle*), dan pengembangan RDF, pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sektor industri dan limbah domestik.
 - b. Pengendalian emisi gas rumah kaca dengan mendorong peningkatan kualitas lingkungan udara melalui implementasi pembangunan rendah karbon, penggunaan energi ramah lingkungan, dekarbonisasi transportasi, industri ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, peningkatan tutupan lahan dengan mendorong ruang terbuka hijau dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Sasaran 4 Meningkatnya kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :
- a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan dan penempatan kerja, Pengembangan sistem tenaga kerja berbasis teknologi, meningkatkan kerjasama antar tripartite dalam hubungan industrial dalam pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja baik upah maupun jaminan ketenagakerjaan, melakukan kerjasama pada sekolah SMK vokasi dan perguruan tinggi vokasi untuk peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.
 - b. Pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi dalam rangka menurunkan beban pengeluaran penduduk rentan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang telah dipadankan dengan data Admindukcapil guna penetapan kebijakan dalam fasilitasi dan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - c. Peningkatan perlindungan kebudayaan baik budaya benda maupun tak benda melalui pelestarian kebudayaan dan adat istiadat Cilacap dengan kolaborasi multi event yang mampu menggerakkan kegotong-royongan masyarakat dalam memperlancar pembangunan serta memperluas peluang ekonomi.
5. Sasaran 5 Meningkatnya pemerataan pembangunan akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan perekonomian perdesaan melalui pengembangan potensi lokal pedesaan, pengembangan BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan ekonomi desa, Peningkatan peran stakeholder

- dan kelembagaan desa/kelurahan, Peningkatan akuntabilitas pembangunan desa.
- b. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui, peningkatan kualitas jalan kabupaten, desa dan lingkungan, peningkatan akses perhubungan yang baik, peningkatan kepemilikan sanitasi layak menuju aman dan ketersediaan air minum layak menuju aman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, menjamin aksesibilitas jaringan internet melalui kerjasama penyedia layanan jaringan internet sehingga menjamin informasi sampai ke desa menuju digitalisasi tata kelola desa. Peningkatan kualitas drainase dalam rangka mengurangi banjir dan penanganan kawasan rob dalam rangka mengurangi kumuh daerah pantai. Penciptaan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi baru terbarukan bersumber energi hydro, surya, biogas dan angin.
 - c. Penataan perumahan dan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kumuh dan penyediaan prasarana sarana Utilitas. Penyediaan rumah layak huni terutama pada korban bencana dan kegiatan proyek sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pencegahan Kawasan kumuh juga dilakukan dalam rangka mempersempit luasan wilayah kumuh.
6. Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan disiplin budaya kerja, meningkatkan kualitas kebijakan daerah, meningkatnya reformasi hukum, meningkatnya kelembagaan yang agile dan penataan organisasi yang mampu mendorong efisiensi dan efektifitas.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terukur, seimbang dan berkeadilan, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
 - c. Meningkatkan kualitas sistem merit dengan memperkuat kompetensi aparatur sipil negara.
 - d. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan target pendapatan asli daerah dan optimalisasi sumber pendanaan lainnya.

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, mudah diakses dan murah, Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pembangunan ekosistem *Smart City* dan digitalisasi layanan publik.
- g. Peningkatan kualitas satu data dan keamanan informasi serta digitalisasi kearsipan.
- h. Peningkatan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan.

Prioritas pembangunan dalam rangka mencapai Visi MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR) adalah sebagai berikut :

1. Daya saing sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, andal, berbudaya, dan sejahtera
2. Daya saing ekonomi daerah yang mandiri, dan berkelanjutan
3. Pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berbasis digital.

Prioritas pembangunan ini sejalan dengan Prioritas Nasional. Berikut ini persandingan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap dengan prioritas Nasional sebagai berikut :

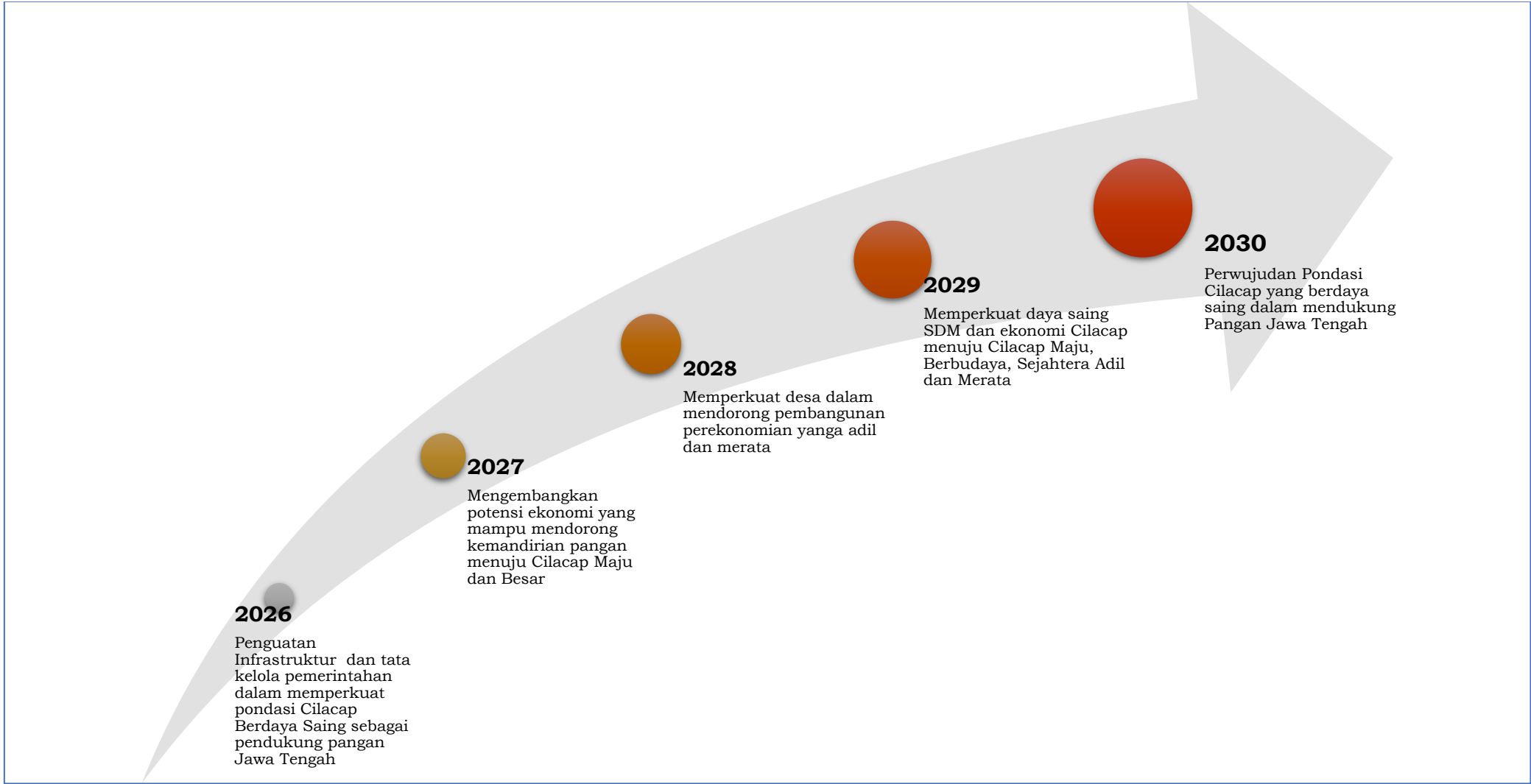
Tabel 3.5.
Keselarasan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
Daya saing sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, andal, berbudaya, dan sejahtera	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Daya saing ekonomi daerah yang mandiri, dan berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
Pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berbasis digital	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak manusia (HAM).
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi.

3.2.2. Pentahapan Strategi setiap tahun

Dalam rangka implementasi strategi di atas berikut ini strategi pentahapan dalam 5 tahun periode RPJMD 2025-2030 sebagai periode pertama RPJPD yaitu mewujudkan “**Penguatan Pondasi Cilacap Berdaya Saing**” sebagai berikut :



Gambar 3.2.
Tema Pentahapan Strategi

Tabel 3.6.
Keselarasn Pentahapan RPJMD Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah

Pentahapan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan
RPJMD Kabupaten Cilacap	Penguatan Infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dalam memperkuat pondasi Cilacap Berdaya Saing sebagai pendukung pangan Jawa Tengah	Mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap Maju dan Besar	Memperkuat desa dalam mendorong pembangunan perekonomian yang adil dan merata	Memperkuat daya saing SDM dan ekonomi Cilacap menuju Cilacap Maju, Berbudaya, Sejahtera Adil dan Merata	Perwujudan Pondasi Cilacap yang berdaya saing dalam mendukung Pangan Jawa Tengah

Tahap pertama 2026 **Penguatan Infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dalam memperkuat pondasi Cilacap Berdaya Saing sebagai pendukung pangan Jawa Tengah.** Pada tahun pertama prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Daya saing ekonomi daerah yang mandiri, dan berkelanjutan dengan fokus:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas unggulan pertanian dengan pemberian insentif pada petani yang masuk dalam Kawasan LP2B yaitu akses pupuk murah, bibit unggul dan peningkatan kapasitas pengelolaan pertanian modern. Hilirisasi pertanian akan dimulai pada tahun 2026 dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Mendorong petani milenial untuk melakukan produksi pertanian yang mendukung ekonomi hijau.
 - b. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Cilacap yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan jalan menuju akses produksi pertanian.
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pertanian baik jalan, drainase, maupun irigasi. Peningkatan akses pada sarana pertanian berupa benih unggul dan bibit berkualitas yang mendukung kontinuitas produksi pangan.
 - d. Pengembangan potensi ekonomi lokal dengan memperkuat UMKM di setiap wilayah Kabupaten Cilacap.
 - e. Penguatan dan pembentukan koperasi terutama koperasi merah putih.
 - f. Memperkuat destinasi wisata terutama mendorong penguatan dan pengembangan desa wisata.
 - g. Perintisan penerapan Ekonomi Sirkular pada pelaku usaha.
 - h. Penyusunan rekomendasi penerima subsidi BBM dan asuransi nelayan.
 - i. Pengembangan industri perikanan terpadu dari hulu ke hilir dalam mendukung ketahanan pangan.
 - j. Pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi.
2. Pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan fokus
 - a. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan.

- b. Peningkatan pelayanan dan pembangunan rumah layak huni, pemberian rumah layak huni pada korban bencana, peningkatan penanganan kumuh.
 - c. Peningkatan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah dan peningkatan keselamatan pengguna angkutan.
 - d. Peningkatan kualitas pembangunan desa menuju desa mandiri.
 - e. Peningkatan pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan wilayah.
 - f. Penguatan pengendalian emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran air udara dan pengendalian tutupan lahan. Peningkatan pengelolaan sampah dengan memperkuat RDF dan 3R.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berbasis digital dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil dari lahir sampai meninggal dunia; pelayanan dari desa, kecamatan sampai kabupaten); peningkatan kinerja birokrasi, pencegahan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).
 - b. Peningkatkan kualitas budaya kerja ASN yang lebih baik, penguatan pelayanan publik yang cepat dan murah dengan digitalisasi pelayanan.
 - c. Peningkatan kualitas digitalisasi pelaksanaan pemerintahan.
 - d. Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Pusat dan Provinsi.
 - e. Pengembangan investasi pendidikan Perguruan Tinggi untuk mendorong kualitas ASN melalui bantuan beasiswa.
4. Daya saing sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, andal, berbudaya, dan sejahtera dengan fokus
 - a. Peningkatan angka partisipasi sekolah, mendorong penyelesaian Anak Tidak Sekolah dengan berbagai program yang bersinergi dengan stakeholder. Berkolaborasi dalam penyediaan sekolah rakyat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaiki sistem pendidikan dan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat.
 - b. Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis pada masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular menuju eliminasi yang ditetapkan, peningkatan keselamatan ibu dan anak, pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis.

- c. Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting
- d. Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
- e. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan
- f. Peningkatan literasi dan pemanfaatan perpustakaan

Tahap kedua 2027 **Mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap Maju dan Besar.**

Prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai berikut :

1. Daya saing ekonomi daerah yang mandiri, dan berkelanjutan dengan fokus
 - a. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.
 - b. Penguatan ekonomi syariah melalui penguatan sertifikat halal, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi kreatif.
 - c. Pemantapan hilirisasi produk unggulan daerah dalam rangka memberikan nilai tambah produk. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam konsep mendorong hilirisasi dan ekonomi sirkuler. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan, dengan mendorong kualitas produk potensi ekspor.
 - d. Pengembangan jiwa kewirausahaan dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - e. Pengembangan zona kawasan ekonomi sirkuler berbasis keterpaduan antara pertanian, perikanan dan perindustrian.
 - f. Sinkronisasi Perusda dengan Koperasi Merah Putih, BUMDes dan Bumdesma serta perusahaan swasta.
2. Daya saing sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, andal, berbudaya, dan sejahtera dengan fokus
 - a. Meningkatkan keaktifan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - b. Penguatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, serta merintis implementasi pelayanan pendidikan swasta gratis.

- c. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong implementasi integrasi layanan primer, meningkatkan digitalisasi pelayanan kesehatan. Peningkatan perilaku hidup sehat dalam rangka mengendalikan penyakit menular dan tidak menular.
 - d. Peningkatan kualitas perpustakaan dalam meningkatkan tingkat gemar membaca.
 - e. Penguatan keluarga berkualitas, serta mendorong pengendalian penduduk.
 - f. Peningkatan event budaya dan olahraga, pembangunan fasilitas seni budaya.
3. Pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan fokus
- a. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.
 - b. Peningkatan konektivitas daerah perbatasan Provinsi Jawa Barat
 - c. Pengembangan TPA Tritih lor dan pengelolaan persampahan. Peningkatan keanekaragaman hayati yang mendorong peningkatan kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran udara dari limbah pabrik dan pertanian serta pengendalian pencemaran air dari limbah pabrik dan domestik.
 - d. Penataan, perawatan dan optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
 - e. Penyusunan dokumen tata ruang dan melakukan revisi dokumen RTRW.
 - f. Pemantapan pembangunan kewilayahan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah baru di daerah Cilacap Barat.
 - g. Pengembangan desa mandiri, penguatan tata kelola desa.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berbasis digital dengan fokus
- a. Pemantapan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik dan infrastruktur menyeluruh.
 - b. Pemantapan kapasitas fiskal, pengelolaan keuangan dan aset.
 - c. Penguatan merit system, pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas karir dan budaya kerja.
 - d. Penguatan satu data, data sektoral dan keamanan informasi.
 - e. Penguatan digitalisasi kearsipan sebagai bagian reformasi birokrasi.

- f. Penguatan kualitas kebijakan reformasi hukum dan akuntabilitas pembangunan.

Tahap ketiga 2028 **Memperkuat desa dalam mendorong pembangunan perekonomian yang adil dan merata.** Pada tahap ketiga prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan fokus
 - a. Penguatan pembangunan desa mandiri dengan memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.
 - b. Memperkuat pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah (jalan, perhubungan, sanitasi, air minum, ruang terbuka hijau) terutama daerah perbatasan
 - c. Membangun Kawasan perdesaan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
 - d. Pengelolaan sampah yang terintegratif menuju *zero waste*
 - e. Pengendalian emisi GRK dengan meningkatkan kualitas pembangunan pertanian, transportasi dan peningkatan penanaman pohon. Peningkatan keanekaragaman hayati yang mendorong peningkatan kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran udara dari limbah pabrik dan pertanian serta pengendalian pencemaran air dari limbah pabrik dan domestik.
2. Daya saing sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, andal, berbudaya, dan sejahtera dengan fokus
 - a. Mengembangkan budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.
 - b. Penguatan layanan pendidikan dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter dan inovatif.
 - c. Memperkuat perilaku hidup sehat dalam mencapai populasi bebas penyakit, tanpa masalah gizi dan pelayanan yang mudah terjangkau serta murah.
 - d. Persiapan Pengembangan layanan kesehatan rumah sakit di Cilacap Timur/Barat dengan pengembangan RS Tipe D.
3. Daya saing ekonomi daerah yang mandiri, dan berkelanjutan dengan fokus
 - a. Pemantapan pembangunan ekonomi di wilayah potensi baru dengan pemberdayaan ekonomi lokal (penguatan Koperasi Merah

- Putih, pengembangan wisata desa dan produk unggulan desa) didukung dengan infrastruktur berkelanjutan.
- b. Memantapkan daya saing produk pertanian, dan perikanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Pengembangan pertanian modern dan agrowisata yang didukung oleh petani muda dan milenial.
 - d. Penguatan swasembada pangan dengan mendorong pangan sehat dan aman
 - e. Peningkatan zona kawasan ekonomi sirkuler berbasis pertanian, perikanan dan perindustrian.
 - f. Pengembangan Kawasan peruntukan industri yang terintegrasi.
 - g. Pengembangan potensi unggulan daerah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berbasis digital dengan fokus
- a. Pemantapan reformasi birokrasi desa/kelurahan.
 - b. Pengembangan kerja sama dengan stakeholder dalam membangun pemerintahan Cilacap yang akuntabel.
 - c. Pelayanan publik yang semakin mudah dan smart berbasis digitalisasi dalam rangka mencapai pelayanan 0 km.
 - d. Memantapkan kapasitas fiskal pengelolaan keuangan dan aset
 - e. Pemantapan kualitas kompetensi ASN dalam merit system
 - f. Terwujudnya akuntabilitas pembangunan
 - g. Penguatan zona integritas dan kapabilitas APIP

Tahap keempat 2029 **Memperkuat daya saing SDM dan ekonomi Cilacap menuju Cilacap Maju, Berbudaya, Sejahtera Adil dan Merata.**

Pada tahun ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Daya saing sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, andal, berbudaya, dan sejahtera dengan fokus
 - a. Memperkuat SDM yang memiliki kompetensi dan berbudaya
 - b. Memperkokoh layanan pendidikan fokus pada pencapaian pendidikan 13 tahun
 - c. Memperkokoh kualitas kesehatan yang semakin baik dengan mewujudkan lanjut usia yang sehat tanpa kesakitan dan kecacatan.
 - d. Optimalisasi penyaluran bantuan ke PPKS di Kabupaten Cilacap.
 - e. Pemantapan keluarga berencana dan berkualitas dan pembangunan responsive gender.

- f. Penguatan budaya baca atau literasi baca.
2. Daya saing ekonomi daerah yang mandiri, dan berkelanjutan dengan fokus
 - a. Memperkokoh pondasi daya saing ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan melalui pengembangan sentra perikanan dan peternakan terpadu dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
 - b. Penguatan lumbung pangan dan keanekaragaman pangan serta mendorong fortifikasi pangan
 - c. Penguatan industri pengolahan berbasis sentra industri, dan pengembangan kualitas UMKM naik kelas.
 - d. Penguatan distribusi perdagangan dalam mendorong ekspor.
 - e. Peningkatan kualitas destinasi wisata dan budaya yang mampu mendorong kunjungan wisata
 - g. Peningkatan kondusivitas wilayah sehingga investasi meningkat, demokratisasi mantap mendukung daya saing ekonomi
3. Pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan fokus
 - a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah dalam upaya peningkatan dan pemasaran hasil pertanian, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong investasi dan pengembangan destinasi wisata dikembangkan daerah perbatasan.
 - b. Peningkatan penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni.
 - c. Penyediaan sanitasi dan air minum layak menuju aman.
 - d. Penataan lanskap Kota Cilacap.
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang mampu menciptakan kualitas udara yang bersih, emisi gas karbon yang terkendali dan kualitas air yang tidak mengandung bahan pencemar dari limbah domestik dan limbah pabrik.
 - f. Pengembangan Kawasan perdesaan dan aglomerasi ekonomi di daerah perbatasan Jawa Bawat.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berbasis digital dengan fokus
 - a. Memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta digitalisasi pelayanan publik
 - b. Memperkokoh kapasitas fiskal, pengelolaan keuangan dan asset daerah

- c. Meningkatkan integritas pembangunan dengan memperkuat Zona integritas

Tahap kelima 2030 **Perwujudan Pondasi Cilacap yang berdaya saing dalam mendukung Pangan Jawa Tengah.** Tahap ini merupakan tahap transisi pada periode kedua RPJMD dalam dokumen RPJPD. Prioritas pembangunan pada tahap ini adalah: perwujudan pondasi Cilacap yang berdaya saing dengan peningkatan daya saing ekonomi, SDM, tata kelola, lingkungan dan ketahanan pangan yang mendukung pangan Jawa Tengah. Pada tahap ini difokuskan pada:

- a. Layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu
- b. Layanan kesehatan berbasis digitalisasi dengan mutu rumah sakit dan puskesmas sesuai standar
- c. *Good Governance* dan *Clean Government*, Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi
- d. Daya saing ekonomi yang adil dan merata
- e. Infrastruktur mantap
- f. Kualitas lingkungan yang terkendali
- g. Kabupaten Cilacap sebagai pendukung pangan Jawa Tengah

3.2.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penguatan daya saing pendidikan melalui peningkatan manajemen dan mutu pendidikan, mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mewujudkan sekolah vokasi, mendorong sekolah kesetaraan, dan peningkatan peran lintas sektor dalam mendorong terwujudnya pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.
2. Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan penyelesaian stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC). Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental.
3. Peningkatan keluarga berkualitas untuk mendorong terciptanya sumberdaya yang unggul, terampil dan handal.
4. Pengendalian Laju dan Pertumbuhan penduduk melalui penguatan perencanaan keluarga bahagia, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS yang memiliki risiko tinggi atas kelahiran.

5. Pengembangan pemuda dan pembangunan olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga para-olimpiade untuk difabel.
6. Penguatan pondasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memperkuat pondasi pencapaian kemandirian pangan dengan mendorong produksi pertanian, dan perikanan. Hilirisasi produk pertanian sebagai pendorong nilai tambah pertanian dalam arti luas, sudah dimulai ditahap ini, penguatan pondasi agroindustri. Penguatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagai potensi unggulan daerah. Penguatan sarana prasarana pertanian dalam pencapaian agroindustri, penguatan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Mendorong ketaatan pada lahan pertanian berkelanjutan untuk mencapai produktivitas pertanian.
7. Penguatan perindustrian sebagai penopang ekonomi Cilacap difokuskan pada perindustrian yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan sentra/kluster industri potensi daerah.
8. Penguatan pondasi perekonomian diutamakan pada perwujudan kewirausahaan masyarakat, penyediaan jaminan permodalan dan pengembangan jaringan pemasaran serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Peningkatan kualitas akomodasi, restoran dalam mendukung kunjungan wisatawan dan pengembangan wisata alam yang dikelola Masyarakat. Peningkatan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif.
9. Peningkatkan kondusivitas daerah dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun sosial dalam rangka mendukung lingkungan investasi dan aktivitas ekonomi.
10. Penguatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas SDM dan perekonomian daerah.
11. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, perlindungan perempuan dan anak dan memperkuat data kesejahteraan sosial dalam mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan perwujudan pembangunan yang inklusif dengan meningkatkan peran masyarakat rentan dan difabel.
12. Pengembangan budaya cilacap dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya daerah baik tak benda maupun cagar alam, mendorong pertunjukkan kebudayaan dan melakukan kolaborasi dengan pembangunan pariwisata, penguatan kesenian daerah sampai ke desa.

- 13. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan fokus memperkuat pembangunan desa, infrastruktur dasar dan penanganan perumahan serta kumuh.
- 14. Mendorong pengembangan layanan angkutan aglomerasi.
- 15. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru serta fokus pada pencegahan dan penanganan pencemaran udara air serta memperkuat keanekaragaman hayati dan mengelola sampah dengan memperkuat RDF.
- 16. Perwujudan reformasi birokrasi dengan fokus penataan kelembagaan, akuntabilitas, efisiensi, melakukan sinergitas pembangunan dengan provinsi dan pemerintah pusat serta mendorong perwujudan pemerintahan yang bersih.

Berikut ini tabel Arah Kebijakan untuk setiap misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7.
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Misi 1 Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	Penguatan daya saing pendidikan melalui peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan, baik jenjang PAUD, SD maupun kesetaraan serta kerjasama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi.
		Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan penyelesaian stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC). Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental.
		Peningkatan keluarga berkualitas untuk mendorong terciptanya sumberdaya yang unggul, terampil dan handal.
		Pengendalian Laju dan Pertumbuhan penduduk melalui penguatan perencanaan keluarga bahagia, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS yang memiliki risiko tinggi atas kelahiran.
		Pengembangan pemuda dan pembangunan olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga para-olimpiade untuk difabel.
2.	Misi 2 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan	Penguatan pondasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memperkuat pondasi pencapaian kemandirian pangan dengan mendorong produksi pertanian, dan perikanan. Hilirisasi produk pertanian sebagai pendorong nilai tambah pertanian dalam arti luas, sudah dimulai di tahap ini, penguatan pondasi agroindustri. Penguatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagai potensi unggulan daerah. Penguatan sarana prasarana pertanian dalam pencapaian agroindustri, penguatan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Mendorong ketaatan pada lahan pertanian berkelanjutan untuk mencapai produktivitas pertanian.

No.	Misi	Arah Kebijakan
		Penguatan perindustrian sebagai penopang ekonomi Cilacap difokuskan pada perindustrian yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan sentra/kluster industri potensi daerah.
		Penguatan pondasi perekonomian diutamakan pada perwujudan kewirausahaan masyarakat, penyediaan jaminan permodalan dan pengembangan jaringan pemasaran serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Peningkatan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Peningkatkan kondusivitas daerah dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun sosial dalam rangka mendukung lingkungan investasi dan aktivitas ekonomi.
		Penguatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas SDM dan perekonomian daerah.
		Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru serta fokus pada pencegahan dan penanganan pencemaran udara air serta memperkuat keanekaragaman hayati dan mengelola sampah dengan memperkuat RDF.
3.	Misi 3 Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif	Peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, penanganan kemiskinan ekstrem, memperkuat data kesejahteraan sosial dalam mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan perwujudan pembangunan yang inklusif dengan meningkatkan peran masyarakat rentan dan difabel. Pengembangan budaya cilacap dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya daerah baik tak benda maupun cagar alam, mendorong pertunjukkan kebudayaan dan melakukan kolaborasi dengan pembangunan pariwisata, penguatan kesenian daerah sampai ke desa.
4.	Misi 4 Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan fokus memperkuat pembangunan desa, infrastruktur dasar dan penanganan perumahan serta kumuh. Mendorong pengembangan layanan angkutan aglomerasi.
5.	Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan reformasi birokrasi dengan fokus penataan kelembagaan, akuntabilitas, efisiensi, melakukan sinergitas pembangunan dengan provinsi dan pemerintah pusat serta mendorong perwujudan pemerintahan yang bersih.

3.2.4. Program Prioritas

Program prioritas terdiri dari, program prioritas dalam mencapai Visi Misi Tujuan dan Sasaran daerah, juga program prioritas dalam mencapai janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati. Pada program prioritas ini juga dalam rangka mencapai 35 kegiatan Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten Kota. Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 3.8.
Program Prioritas RPJMD dalam Mencapai Sasaran Daerah

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)							
Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	Maju	T1. Meningkatnya daya saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)			
			S1. Meningkatnya daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Program pengelolaan pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar
							Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun
						Meningkatnya Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP
							Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP
							Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina
					Meningkatnya Ketepatsasaran Bantuan Operasional Pendidikan		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Persentase Fasyankes memiliki Sarana, Prasarana dan ALat Kesehatan Sesuai Standar
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terakreditasi paripurna
							Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional
							Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
					Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status Gizi		Cakupan ANC sesuai standar 12 T
							Jumlah Kematian Bayi
					Meningkatnya Populasi bebas penyakit menular		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
							Angka Keberhasilan pengobatan TB
							Cakupan imunisasi bayi Lengkap
							Persentase desa/kelurahan STBM

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
						Meningkatnya Populasi bebas penyakit tidak menular	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
							Persentase Depresi yang mendapatkan layanan
							Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun
							Prevalensi Obesitas > 18 tahun
							Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup
							Persentase Lanjut Usia yang mandiri
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
						Meningkatnya Perempuan yang menjadi Calon Legislatif	Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif
						Meningkatnya Organisasi Wanita yang Aktif	Persentase Organisasi wanita yang aktif
					Program Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)
							Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Wirausaha Muda
							Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga
					Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemanfaatan Perpustakaan	Persentase Tingkat pemanfaatan perpustakaan

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
Misi 2: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan			S2. Meningkatkan daya saing ekonomi	Pertumbuhan ekonomi		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan
							Produktivitas Hortikultura
							Produktivitas Perkebunan
						Meningkatnya produktivitas ternak	Persentase ternak produktif
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
					Program Pemasaran pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dipromosikan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pertumbuhan volume usaha koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
					Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Kapasitas Usaha UMKM	Persentase UMKM yang meningkat kualitasnya
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Sentra Industri Terbina	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Keterjangkauan Harga Pangan	Koefisien Variasi (CV) Harga Pangan Pokok Antar Waktu Antar Wilayah
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan
						Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi di Kabupaten Cilacap
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang memenuhi SLA
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
						Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Perda/Perkada	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan
						Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa yang memiliki SDM Linmas terlatih
					Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas layanan informasi rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
						Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
						Meningkatnya kapasitas dalam penanganan tanggap darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
						Meningkatnya Kapasitas Kabupaten/Kota dalam pemulihan pasca bencana	persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana
					Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Publikasi Ilmiah
						Meningkatnya Penerapan IPTEK	Indeks kekayaan intelektual dan indikasi geografis

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif	Besar	T2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan pemerataan pembangunan	S3. Meningkatnya daya saing lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Prosentase peningkatan kualitas air dan udara
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman Hayati dan ruang terbuka hijau	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Kualitas Lahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
					Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah
						Meningkatnya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah
			S4. Meningkatnya kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka			
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
					Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tatakelola Kerja Layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
					Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Daya Tarik Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya kualitas pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan
					Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
							Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi KPM	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
Misi 4: Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan			S5. Meningkatnya pemerataan pembangunan	Indeks Gini	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Infrastruktur Aparatur Kondisi Baik
							Persentase Desa Yang Diusulkan Untuk Pemekaran, Penggabungan Dan Penghapusan Sesuai Dengan Kewenangan Dan Potensi Desa
							Persentase desa cepat berkembang
							Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	Persentase BUMDES Berkembang
							Persentase desa dan kelurahan dengan tingkat perkembangan desa kategori swasembada
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Terlindungi	Persentase jaringan irigasi yang dipelihara dan ditingkatkan
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya layanan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
					Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Presentase Bangunan Gedung pemerintah dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Presentase perencanaan penataan kawasan
							Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
							Persentase Peningkatan Dokumen Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
							Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)
					Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
							Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik
							Persentase Panjang jalan desa dalam kondisi baik
							Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Jalan, Drainase, RTP, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Penerangan Lingkungan, dsb) yang sudah diserahkan pengembang ke pemerintah kabupaten
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya perlengkapan jalan	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan
						Meningkatnya sosialisasi keselamatan lalu lintas	Persentase masyarakat sadar berlalu lintas
						Meningkatnya layanan angkutan umum (darat dan penyeberangan)	Persentase Kinerja Angkutan Umum (Darat dan Penyeberangan)
						Meningkatnya kenyamanan transportasi	Persentase Kelayakan Prasarana Transportasi
							Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR
					Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		T3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan responsif	S6. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi General			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti
						Meningkatnya Kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti
						Meningkatnya persentase harmonisasi produk hukum	Persentase harmonisasi produk hukum
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Komponen belanja pengadaan	Persentase Komponen belanja Pengadaan
						Meningkatnya realisasi fisik terhadap target	Persentase Realisasi Fisik
						Meningkatnya BUMD dalam kondisi sehat	Persentase BUMD dengan kondisi sehat
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Hukum dan Perundang-undangan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
						Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Rapat dan Aspirasi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Rapat dan Aspirasi yang diselenggarakan
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat	Nilai Sinergi komponen Indeks Perencanaan Pembangunan
						Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Valid dan Update	Persentase Ketersediaan Data yang Esensial dan Valid untuk Perencanaan Pembangunan
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu
						Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya
						Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Manajemen Asset
					Program pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya Basis Data dan Pengembangan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pelaporan atau Pendataan Objek Pajak
						Meningkatnya Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah
						Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah
					Program kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN yang Tepat Kebutuhan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN
						Meningkatnya Kualitas Penempatan ASN	Persentase penempatan pegawai kedalam jabatan manajerial sesuai kompetensi
						Meningkatnya Kapasitas ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
						Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase ASN dengan predikat kinerja minimal Baik
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)
					Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat	Perekaman KTP elektronik
						Meningkatnya layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Visi Misi	Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
						Meningkatnya kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Layanan Dokumentasi dan Publikasi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya penggunaan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
					Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase sistem elektronik yang diamankan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap
					Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Sadar Tertib Arsip Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai pengawasan daerah yang telah berkategori Baik
						Meningkatnya Pemanfaatan dan Kelestarian Arsip	Persentase Arsip yang dilayankan melalui simpul jaringan dalam SIKN/JIKN
							Persentase Perangkat Daerah yang menyerahkan Arsip Statis
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%)
							Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

Tabel 3.9.

Program Prioritas RPJMD dalam Mencapai Prioritas Kerja Bupati

Visi / Misi	Prioritas Kerja Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program
Menuju Cilacap Yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil Dan Merata (Maju Dan Besar)			
Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	Perbaikan sistem di dunia pendidikan SD & SMP dengan target sekolah Tanpa Sumbangan, Evaluasi sistem 5 hari sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	• Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar • Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun • Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP • Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP • Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina • Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	Pengembangan investasi pendidikan Perguruan Tinggi & Universitas untuk mendorong kualitas SDM dan Ekonomi Sirkular	kolaborasi bersama pemerintah pusat/swasta	
	Pemberian insentif untuk Guru TPK Madin	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti • Persentase Kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti • Persentase harmonisasi produk hukum
	Program Kesehatan Gratis dengan peningkatan anggaran kesehatan untuk keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Persentase Fasyankes memiliki Sarana, Prasarana dan ALat Kesehatan Sesuai Standar • Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terakreditasi paripurna • Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional • Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Cakupan ANC sesuai standar 12 T • Jumlah Kematian Bayi • Prevalensi Wasting • Angka Keberhasilan pengobatan TB • Cakupan imunisasi bayi Lengkap • Presentase desa/kelurahan STBM • Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengembangan layanan kesehatan rumah sakit di Cilacap Timur/Barat dengan pengembangan RS tipe D		
	Pengembangan & optimalisasi Puskesmas Rawat Inap di tiap-tiap Puskesmas		

Visi / Misi	Prioritas Kerja Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program
			- Persentase Depresi yang mendapatkan layanan - Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun - Prevalensi Obesitas > 18 tahun - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup - Persentase Lanjut Usia yang mandiri
	Pengembangan RSKO (RS Ketergantungan obat)	kolaborasi bersama pemerintah pusat/ swasta	
Misi 2: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan	Optimalisasi kawasan industri yang sudah ada (Cilacap timur Karangandri, Adipala, Binangun dan Cilacap Barat kawasan Cipari)	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Realisasi Investasi di Kabupaten Cilacap
	Pengembangan peternakan terpadu Cilacap sentra daging nasional	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produktivitas Tanaman Pangan - Produktivitas Hortikultura - Produktivitas Perkebunan - Persentase ternak produktif
	Pengembangan zona kawasan economic sirkuler berbasis keterpaduan antara pertanian		
	Rekom subsidi Pupuk dan operasional KP3		
	Asuransi nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	Pengembangan industri perikanan terpadu	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
	Pengembangan infrastruktur daerah wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
	Pengembangan ekonomi kreatif, optimalisasi pemberdayaan UMKM yang mendukung program event seni budaya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan
	Optimalisasi pelayanan perijinan berbasis digital dan ramah investor (murah, mudah, tanpa pungutan)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang memenuhi SLA
	Penataan, perawatan dan optimalisasi pemanfaatan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Kualitas Lahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
	Penataan TPA Tritih Lor	Program Pengelolaan Persampahan	- Persentase pengurangan sampah - Persentase penanganan sampah

Visi / Misi	Prioritas Kerja Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program
Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif	Perbaikan sistem sosial (data base DTKS atau kemiskinan berbasis realistis)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan - Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
	Penambahan event-event seni budaya & olah raga (event bulanan, tahunan, kejuaraan kab & kejuaraan nasional) berbasis APBD dan CSR atau TJSLP.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dipromosikan
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga
	Pengembangan seni budaya sampai tingkat desa melalui Bantuan Keuangan Khusus	Program pengelolaan keuangan daerah	Presentase penyaluran dana transfer ke desa
Misi 4: Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Percepatan penyelesaian infrastruktur jalan kabupaten di tahun 2029 dan tanggap cepat perbaikan jalan (<i>Tambal Jalan to response time</i>)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
	Percepatan Infrastruktur Desa melalui bantuan keuangan khusus	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	- Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik - Persentase Panjang jalan desa dalam kondisi baik - Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Jalan, Drainase, RTP, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Penerangan Lingkungan, dsb) yang sudah diserahkan pengembang ke pemerintah kabupaten
	Pembangunan gedung seni/budaya sebagai pusat pengembangan seni dan event ekonomi kreatif	Program Penataan Bangunan Gedung	- Presentase Bangunan Gedung pemerintah dalam kondisi baik - Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan
	Penataan alun-alun	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Presentase perencanaan penataan kawasan
	Penyusunan dokumen tata ruang dengan melakukan <i>updated</i> dokumen RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Persentase Peningkatan Dokumen Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan - Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)
	Perbaikan sistem Bansus desa atau BASO	Program penataan desa	Persentase desa yang memiliki infrastruktur aparatur kondisi baik

Visi / Misi	Prioritas Kerja Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program
			Persentase desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dan potensi desa
	Sinkronisasi Perusda dengan BUMDes atau Bumdesma dan badan usaha milik organisasi di cilacap	Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Persentase desa cepat berkembang - Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Persentase BUMDES Berkembang - Persentase desa dan kelurahan dengan tingkat perkembangan desa kategori swasembada
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi implementasi <i>ReInventing Government</i> (Miskin Struktur Kaya Fungsi Berbasis Digitalisasi)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
	Beasiswa PNS Berprestasi, Guru/Tenaga Kesehatan	Program Kepegawaian Daerah	- Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) - Persentase ASN dengan predikat kinerja minimal Baik - Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN - Persentase penempatan pegawai kedalam jabatan manajerial sesuai kompetensi
	Pakta integritas JPT, Administrator dan Pengawas		
	Optimalisasi implementasi <i>clean and good governance</i> (tidak ada korupsi dan jual beli jabatan)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)
		Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)
	Keterbukaan pelayanan dan komunikasi masyarakat dg Pemda (optimalisasi pemanfaatan medsos oleh seluruh OPD dan kanal aduan bupati dan wabup)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah
	Peningkatan PAD melalui optimalisasi Perusda (Audit Independent Perusda dan Perbaikan SDM Perusda),	Program Perekonomian Dan Pembangunan	- Persentase Komponen belanja Pengadaan - Persentase Realisasi Fisik - Persentase BUMD dengan kondisi sehat

Visi / Misi	Prioritas Kerja Bupati	Program Nomenklatur	Indikator Program
	Digitalisasi Pajak Daerah untuk mengurangi kebocoran Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase Peningkatan Pelaporan atau Pendataan Objek Pajak - Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah - Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah
	Optimalisasi Penataan aset Pemda (aset pemda yg tidak termanfaatkan atau mangkrak utk disewakan, ditukar guling atau lainnya sesuai ketentuan perundangan)	Program pengelolaan barang milik daerah	Manajemen Asset
	Dana insentif RT dan RW	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu - Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD



Keterkaitan antara perumusan misi, tujuan dan sasaran daerah dengan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan per pentahapan Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cilacap

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)									
Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil dan andal	Tujuan 1: Meningkatnya daya saing Cilacap	Sasaran 1: Meningkatnya daya saing SDM	Meningkatkan kualitas daya saing pendidikan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, mutu dan akses pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, mendorong sekolah inklusi, mendorong partisipasi masyarakat untuk berpendidikan tinggi melalui pencapaian standar pelayanan minimal pada PAUD, SD dan SMP dan wajib belajar 13 tahun; mempersiapkan peta lokasi untuk pembangunan SMA/SMK sebagaimana kewenangan provinsi; Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat.	Penguatan daya saing pendidikan melalui peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan, baik jenjang PAUD, SD maupun kesetaraan serta kerjasama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi	Peningkatan angka partisipasi sekolah, mendorong penyelesaian Anak Tidak Sekolah dengan berbagai program yang bersinergi dengan stakeholder. Berkolaborasi dalam penyediaan sekolah rakyat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat	Penguatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, serta merintis implementasi pelayanan pendidikan swasta gratis.	Penguatan layanan pendidikan dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter dan inovatif.	Memperkokoh layanan pendidikan fokus pada pencapaian pendidikan 13 tahun	Layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu
			Pengembangan kurikulum pendidikan berkarakter pada setiap jenjang		Peningkatan literasi dan pemanfaatan perpustakaan	Peningkatan kualitas perpustakaan dalam meningkatkan tingkat gemar membaca.	Penguatan budaya baca atau literasi baca		
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan gerakan	Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas	Memperkuat pelayanan kesehatan dalam	Penguatan pelayanan kesehatan dasar	Persiapan Pengembangan layanan	Memperkokoh kualitas kesehatan	Layanan kesehatan berbasis

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			masyarakat, perilaku pola hidup sehat, aktivitas fisik, kualitas lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, mendorong kualitas fasilitas kesehatan ditingkat dasar dan rujukan baik sarana prasarana maupun kompetensi tenaga kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu dan anak sesuai standar pelayanan minimal dan peningkatan gizi masyarakat dimulai dari penyediaan gizi sejak bayi dan balita, mendorong penanganan stunting sejak dalam kandungan, pengembangan integrasi layanan primer dalam pencegahan dan pengendalian permasalahan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas hidup lansia, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Peningkatan kepesertaan jaminan Kesehatan	pelayanan kesehatan meliputi pelayanan penyelesaian stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC). Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental.	pelayanan pemeriksaan gratis pada masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular menuju eliminasi yang ditetapkan, peningkatan keselamatan ibu dan anak, pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis.	dengan mendorong implementasi integrasi layanan primer, meningkatkan digitalisasi pelayanan kesehatan. Peningkatan perilaku hidup sehat dalam rangka mengendalikan penyakit menular dan tidak menular	kesehatan rumah sakit di Cilacap Timur dan Barat dengan pengembangan RS Tipe D	yang semakin baik dengan mewujudkan lanjut usia yang sehat tanpa kesakitan dan kecacatan.	digitalisas i dengan mutu rumah sakit dan puskesmas s sesuai standar
					Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting	Meningkatkan keaktifan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Memperkuat perilaku hidup sehat dalam mencapai populasi bebas penyakit, tanpa masalah gizi dan pelayanan yang mudah terjangkau serta murah		
			Meningkatkan keluarga yang berkualitas melalui pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup	Peningkatan keluarga berkualitas untuk mendorong terciptanya sumberdaya yang unggul, terampil dan handal	Penguatan keluarga berkualitas, serta mendorong pengendalian penduduk				

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			berupa daya dukung maupun daya tampung lingkungan						
			Penguatan perencanaan dan penganggaran responsive gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan peran pentahelix, penguatan kelurahan/desa ramah anak dan perlindungan perempuan mendorong perwujudan Kecamatan BERDAYA, Peningkatan kualitas pemuda melalui penyediaan ruang kreativitas	Pengendalian Laju dan Pertumbuhan penduduk melalui penguatan perencanaan keluarga bahagia, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS yang memiliki risiko tinggi atas kelahiran	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan			Pemantapan keluarga berencana dan berkualitas dan pembangunan <i>responsive gender</i>	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga para olimpiade untuk difabel. Penguatan organisasi olahraga, SDM olahraga untuk pencairan bibit atlet dan sarana prasarana olahraga	Pengembangan pemuda dan pembangunan olahraga baik olahraga prestasi, rekreasi maupun para-olimpiade untuk difabel	Peningkatan event budaya dan olahraga, pembangunan fasilitas seni budaya				
Misi 2: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan		Sasaran 2: Meningkatkan daya saing ekonomi	Pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara pengembangan sektor pertanian sebagai sektor utama mendukung kemandirian pangan, peningkatan prasarana pertanian baik irigasi, jalan menuju pertanian, embung, prasarana berbasis teknologi, peningkatan kemudahan	Penguatan pondasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memperkuat pondasi pencapaian kemandirian pangan dengan mendorong produksi pertanian, dan perikanan. Hilirisasi produk pertanian sebagai pendorong nilai	Peningkatan produksi dan produktivitas unggulan pertanian dengan pemberian insentif pada petani yang masuk dalam Kawasan LP2B yaitu akses pupuk murah, bibit unggul dan	Pemantapan hilirisasi produk unggulan daerah dalam rangka memberikan nilai tambah produk. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam konsep mendorong	Peningkatan zona kawasan ekonomi sirkuler berbasis pertanian, perikanan dan perindustrian	Penguatan distribusi perdagangan dalam mendorong ekspor	Daya saing ekonomi yang adil dan merata

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			akses pupuk dan pestisida, peningkatan dan pengembangan kualitas bibit pertanian. peningkatan peran pemuda menjadi pertanian millennial dan mempertahankan LP2B, hilirisasi dan modernisasi pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertanian, penguatan kelembagaan dalam rantai pasok pertanian untuk mendukung ekonomi hijau	tambah pertanian dalam arti luas, sudah dimulai di tahap ini, penguatan pondasi agroindustri. Penguatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagai potensi unggulan daerah. Penguatan sarana prasarana pertanian dalam pencapaian agroindustri, penguatan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan. Mendorong ketaatan pada lahan pertanian berkelanjutan untuk mencapai produktivitas pertanian	peningkatan kapasitas pengelolaan pertanian modern. Hilirisasi pertanian akan dimulai pada tahun 2026 dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Mendorong petani milenial untuk melakukan produksi pertanian yang mendukung ekonomi hijau	hilirisasi dan ekonomi sirkuler. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan, dengan mendorong kualitas produk potensi ekspor			
					Pembangunan infrastruktur Kabupaten Cilacap yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan jalan menuju akses produksi pertanian		Penguatan swasembada pangan dengan mendorong pangan sehat dan aman	Penguatan lumbung pangan dan keanekaragaman pangan serta mendorong fortifikasi pangan	Kabupaten Cilacap sebagai pendukung pangan Jawa Tengah
					Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pertanian baik jalan, drainase, maupun irigasi. Peningkatan		Memantapkan daya saing produk pertanian, dan perikanan dalam meningkatkan	memperkokoh pondasi daya saing ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan melalui pengembangan sentra perikanan dan peternakan terpadu dalam rangka	

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
					akses pada sarana pertanian berupa benih unggul dan bibit berkualitas yang mendukung kontinuitas produksi pangan		pertumbuhan ekonomi	pengentasan kemiskinan dan pengangguran	
			Meningkatkan kualitas produksi perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan perikanan terpadu, peningkatan pemanfaatan teknologi, pengembangan produk unggulan perikanan dengan rantai dingin, dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan Samudra Cilacap dalam mendukung ekonomi biru		Pengembangan industri perikanan terpadu dari hulu ke hilir dalam mendukung ketahanan pangan	Pengembangan zona kawasan ekonomi sirkuler berbasis keterpaduan antara pertanian, perikanan dan perindustrian	Pengembangan Kawasan peruntukan industri yang terintegrasi		
				Penyusunan rekomendasi penerima subsidi BBM dan asuransi nelayan					
			Mengembangkan industri pengolahan dengan Optimalisasi kawasan peruntukan industri sebagai tempat pengembangan sentra/kluster industri kecil di Cilacap, peningkatan kualitas produk, peningkatan pemasaran dan jejaring, kemudahan perijinan berusaha dan pemanfaatan Sistem Industri Nasional dalam pembinaan industri kecil, mendukung ekonomi sirkuler dan ekonomi hijau	Penguatan perindustrian sebagai penopang ekonomi Cilacap difokuskan pada perindustrian yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan sentra/kluster industri potensi daerah.	Pengembangan potensi ekonomi lokal dengan memperkuat UMKM disetiap wilayah Kabupaten Cilacap	Penguatan ekonomi syariah melalui penguatan sertifikat halal, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi kreatif	Pengembangan potensi unggulan daerah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru		

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Mengembangkan jiwa kewirausahaan Cilacap melalui Peningkatan Pendidikan dan pelatihan bagi pemuda, baik pelatihan produksi, pemasaran maupun perijinan, Fasilitasi akses permodalan bagi wirausaha, Peningkatan jejaring, Pengembangan Inkubasi Wirausaha	Penguatan pondasi perekonomian diutamakan pada perwujudan kewirausahaan masyarakat, penyediaan jaminan permodalan dan pengembangan jaringan pemasaran serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Peningkatan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif		Pengembangan jiwa kewirausahaan dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat			
			Meningkatkan daya saing sektor perdagangan melalui Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, Peningkatan perlindungan konsumen, Peningkatan kualitas produk UMKM, pemasaran dan perijinan, Pembinaan pelaku usaha/UMKM yang memiliki potensi ekspor, pengembangan koperasi merah putih, menjamin ketersediaan barang pokok dan barang penting serta kestabilan harga, Penguatan kemitraan pedagang		Penguatan dan pembentukan koperasi terutama koperasi merah putih	Sinkronisasi Perusda dengan Koperasi Merah Putih, BUMDes dan Bumdesma serta perusahaan swasta	Pemantapan pembangunan ekonomi di wilayah potensi baru dengan pemberdayaan ekonomi lokal (penguatan Koperasi Merah Putih, pengembangan wisata desa dan produk unggulan desa) didukung dengan infrastruktur berkelanjutan.		
			Mengembangkan daya saing sektor pariwisata melalui Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata, Peningkatan kualitas industri pariwisata (meningkatkan kualitas perhotelan berstandar, meningkatkan kualitas jasa makan minum/restoran yang mendukung kunjungan pada destinasi wisata), pengembangan destinasi wisata unggulan, salah		Memperkuat destinasi wisata terutama mendorong penguatan dan pengembangan desa wisata	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan	Pengembangan pertanian modern dan agrowisata yang didukung oleh petani muda dan milenial.	Peningkatan kualitas destinasi wisata dan budaya yang mampu mendorong kunjungan wisata	

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			satunya wisata desa melalui promosi dan mendorong wisata desa yang dikembangkan oleh desa, mendorong kualitas pelaku usaha serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai pelengkap kunjungan destinasi						
			Peningkatan investasi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja melalui investasi padat modal, mempermudah perijinan melalui peningkatan kualitas Mall Pelayanan Publik, optimalisasi peta potensi investasi. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu memenuhi investor Cilacap baik tenaga kerja yang memiliki kompetensi maupun tenaga kerja yang terlatih, mengembangkan sistem karir pada pencari kerja berbasis teknologi yang terpadu antara pengusaha, pencari kerja dan pemerintah		Penguatan industri pengolahan berbasis sentra industri, dan pengembangan kualitas UMKM naik kelas				
			Meningkatkan kondusivitas daerah melalui Mitigasi potensi konflik sosial, Penegakan perda dan perkara, Perlindungan masyarakat dan Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, baik bencana alam maupun sosial	Peningkatan kondusivitas daerah dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun sosial dalam rangka mendukung lingkungan investasi dan aktivitas ekonomi	Peningkatan kondusivitas wilayah sehingga investasi meningkat, demokratisasi mantap mendukung daya saing ekonomi				
			Meningkatkan kapabilitas inovasi melalui penciptaan inovasi di masyarakat, perangkat daerah,	Penguatan riset dan inovasi dalam mendorong kualitas	Pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi				

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			mendorong kemampuan riset dalam mencari pemecahan masalah (problem solving), meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, swasta dalam penciptaan riset dan inovasi	SDM dan perekonomian daerah					
		Sasaran 3: Meningkatkan daya saing lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air tanah, kualitas udara melalui peningkatan ruang terbuka hijau, mendorong peran stakeholder dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan pengurangan sampah melalui pendekatan sirkuler ekonomi, 3R (reuse reduce dan recycle), dan pengembangan RDF, pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sektor industri dan limbah domestik	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru serta fokus pada pencegahan dan penanganan pencemaran udara air serta memperkuat keanekaragaman hayati dan mengelola sampah dengan memperkuat RDF	Perintisan penerapan Ekonomi Sirkular pada pelaku usaha	Pengembangan TPA Tritih lor dan pengelolaan persampahan. Peningkatan keanekaragaman hayati yang mendorong peningkatan kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran udara dari limbah pabrik dan pertanian serta pengendalian pencemaran air dari limbah pabrik dan domestik	Pengelolaan sampah yang terintegratif menuju <i>zero waste</i>		
			Pengendalian emisi gas rumah kaca dengan mendorong peningkatan kualitas lingkungan udara melalui implementasi pembangunan rendah karbon, penggunaan energi ramah lingkungan, dekarbonisasi transportasi, industri ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, peningkatan tutupan lahan dengan mendorong ruang		Penguatan pengendalian emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran air udara dan pengendalian tutupan lahan.	Penataan, perawatan dan optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Pengendalian emisi GRK dengan meningkatkan kualitas pembangunan pertanian, transportasi dan peningkatan penanaman pohon. Peningkatan keanekaragaman	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang mampu menciptakan kualitas udara yang bersih, emisi gas karbon yang terkendali dan kualitas air yang tidak	Kualitas lingkungan yang terkendali

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			terbuka hijau dan pengelolaan keanekaragaman hayati		Peningkatan pengelolaan sampah dengan memperkuat RDF dan 3R		hayati yang mendorong peningkatan kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran udara dari limbah pabrik dan pertanian serta pengendalian pencemaran air dari limbah pabrik dan domestik	mengandung bahan pencemar dari limbah domestik dan limbah pabrik	
Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, berbudaya, berkeadilan dan inklusif	Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan pemerataan pembangunan	Sasaran 4: Meningkatkan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan	Peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan dan penempatan kerja, Pengembangan sistem tenaga kerja berbasis teknologi, meningkatkan kerjasama antar tripartite dalam hubungan industrial dalam pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja baik upah maupun jaminan ketenagakerjaan, melakukan kerjasama pada sekolah SMK vokasi dan perguruan tinggi vokasi untuk peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi dalam rangka menurunkan beban pengeluaran penduduk rentan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang telah dipadankan dengan data	Peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, penanganan kemiskinan ekstrem, memperkuat data kesejahteraan sosial dalam mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan perwujudan pembangunan yang inklusif dengan meningkatkan peran masyarakat rentan dan difabel.	Perbaiki sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)		Mengembangkan budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Optimalisasi penyaluran bantuan ke PPKS di Kabupaten Cilacap	

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Admindakapil guna penetapan kebijakan dalam fasilitasi dan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem						
			Peningkatan perlindungan kebudayaan baik budaya benda maupun tak benda melalui pelestarian kebudayaan dan adat istiadat Cilacap dengan kolaborasi multi event yang mampu menggerakkan kegotong-royongan masyarakat dalam memperlancar pembangunan serta memperluas peluang ekonomi	Pengembangan budaya cilacap dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya daerah baik tak benda maupun cagar alam, mendorong pertunjukkan kebudayaan dan melakukan kolaborasi dengan pembangunan pariwisata, penguatan kesenian daerah sampai ke desa.	Peningkatan event budaya dan olahraga, pembangunan fasilitas seni budaya			Memperkuat SDM yang memiliki kompetensi dan berbudaya	
Misi 4: Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan		Sasaran 5: Meningkatkan pemerataan pembangunan	Meningkatkan perekonomian perdesaan melalui pengembangan potensi lokal pedesaan, pengembangan BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan ekonomi desa, Peningkatan peran stakeholder dan kelembagaan desa/kelurahan, Peningkatan akuntabilitas pembangunan desa	Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan fokus memperkuat pembangunan desa, infrastruktur dasar dan penanganan perumahan serta kumuh.	Peningkatan kualitas pembangunan desa menuju desa mandiri	Pengembangan desa mandiri, penguatan tata kelola desa	Penguatan pembangunan desa mandiri dengan memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa	Pengembangan Kawasan perdesaan dan aglomerasi ekonomi di daerah perbatasan Jawa Barat	

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui, peningkatan kualitas jalan kabupaten, desa dan lingkungan, peningkatan akses perhubungan yang baik, peningkatan kepemilikan sanitasi layak menuju aman dan ketersediaan air minum layak menuju aman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, menjamin aksesibilitas jaringan internet melalui kerjasama penyedia layanan jaringan internet sehingga menjamin informasi sampai ke desa menuju digitalisasi tata kelola desa. Peningkatan kualitas drainase dalam rangka mengurangi banjir dan penanganan kawasan rob dalam rangka mengurangi kumuh daerah pantai. Penciptaan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi baru terbarukan bersumber energi hydro, surya, biogas dan angin		Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar wilayah	Memperkuat pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah (jalan, perhubungan, sanitasi, air minum, ruang terbuka hijau) terutama daerah perbatasan	Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah dalam upaya peningkatan dan pemasaran hasil pertanian, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong investasi dan pengembangan destinasi wisata dikembangkan daerah perbatasan	Infrastruktur mantap
				Mendorong pengembangan layanan angkutan aglomerasi	Peningkatan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah dan peningkatan keselamatan pengguna angkutan	Peningkatan konektivitas daerah perbatasan Provinsi Jawa Barat	Membangun Kawasan perdesaan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penyediaan sanitasi dan air minum layak menuju aman	
								Penataan lanskap Kota Cilacap	

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
					Peningkatan pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan wilayah	Pemantapan pembangunan kewilayahan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah baru di daerah Cilacap Barat		Pengembangan Kawasan perdesaan dan aglomerasi ekonomi didaerah perbatasan Jawa Barat	
			Penataan perumahan dan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kumuh dan penyediaan prasarana sarana Utilitas. Penyediaan rumah layak huni terutama pada korban bencana dan kegiatan proyek sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pencegahan Kawasan kumuh juga dilakukan dalam rangka mempersempit luasan wilayah kumuh	Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan fokus memperkuat pembangunan desa, infrastruktur dasar dan penanganan perumahan serta kumuh.	Peningkatan pelayanan dan pembangunan rumah layak huni, pemberian rumah layak huni pada korban bencana, peningkatan penanganan kumuh	Penyusunan dokumen tata ruang dan melakukan revisi dokumen RTRW	Peningkatan penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni		
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan responsive	Sasaran 6: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital	Meningkatkan disiplin budaya kerja, meningkatkan kualitas kebijakan daerah, meningkatnya reformasi hukum, meningkatnya kelembagaan yang agile dan penataan organisasi yang mampu mendorong efisiensi dan efektifitas	Perwujudan reformasi birokrasi dengan fokus penataan kelembagaan, akuntabilitas, efisiensi, melakukan sinergitas pembangunan dengan provinsi dan pemerintah pusat serta mendorong perwujudan pemerintahan yang bersih.	Peningkatkan kualitas budaya kerja ASN yang lebih baik, penguatan pelayanan publik yang cepat dan murah dengan digitalisasi pelayanan	Penguatan kualitas kebijakan reformasi hukum dan akuntabilitas pembangunan	Penguatan zona integritas dan kapabilitas APIP	Meningkatkan integritas pembangunan dengan memperkuat Zona integritas	Good Governance dan Clean Government, Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terukur, seimbang dan berkeadilan, meningkatkan kualitas monitoring dan				Pengembangan kerja sama dengan stakeholder dalam membangun		

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			evaluasi kinerja, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja				pemerintahan Cilacap yang akuntabel		
			Meningkatkan kualitas sistem merit dengan memperkuat kompetensi aparatur sipil negara		Pengembangan investasi pendidikan Perguruan Tinggi untuk mendorong kualitas ASN melalui bantuan beasiswa	Penguatan merit system, pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas karir dan budaya kerja	Pemantapan kualitas kompetensi ASN dalam merit system		
			Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan target pendapatan asli daerah dan optimalisasi sumber pendanaan lainnya		Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Pusat dan Provinsi	Pemantapan kapasitas fiskal, pengelolaan keuangan dan aset.	Memantapkan kapasitas fiskal pengelolaan keuangan dan aset	Memperkokoh kapasitas fiskal, pengelolaan keuangan dan asset daerah	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, mudah diakses dan murah, Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Peningkatan digitalisasi pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil dari lahir sampai meninggal dunia; pelayanan dari desa, kecamatan sampai kabupaten); peningkatan kinerja birokrasi, pencegahan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme)	Penguatan satu data, data sektoral dan keamanan informasi	Pelayanan publik yang semakin mudah dan smart berbasis digitalisasi dalam rangka mencapai pelayanan 0 km	Memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta digitalisasi pelayanan publik	

VISI/ MISI	TUJUAN PEMKAB	SASARAN PEMKAB	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN RPJMD				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Pembangunan ekosistem <i>Smart City</i> dan digitalisasi layanan publik		Peningkatan kualitas digitalisasi pelaksanaan pemerintahan	Pemantapan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik dan infrastruktur menyeluruh	Terwujudnya akuntabilitas pembangunan		
			Penguatan digitalisasi kearsipan sebagai bagian reformasi birokrasi						
			Peningkatan kualitas satu data dan keamanan informasi serta digitalisasi kearsipan						
			Peningkatan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan		Pemantapan reformasi birokrasi desa/kelurahan				

Dalam rangka mendukung 35 Kegiatan Delegasi Provinsi Jawa Tengah, berikut ini tabel dukungan Kabupaten Cilacap :

Tabel 3.11.
Dukungan Kabupaten Cilacap terhadap 35 Kegiatan yang Didelegasikan Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kabupaten/Kota	
		Rencana Aktivitas Riil	Program Nomenklatur
1	2	3	4
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Desa Lunas Tercepat	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Gebyar Doorprize Pelunasan PBB P2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Peningkatan Insentif Distribusi SPPT PBB-2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Penyelenggaraan Pendidikan Penjenjangan Struktural	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa se-Kabupaten Cilacap	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Pengelolaan Bantuan Tugas Belajar (beasiswa ASN)	Program Kepegawaian Daerah
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	Program Perlindungan Khusus Anak
		Pelayanan Pendampingan Korban KtP dan TPPO	Program Perlindungan Perempuan
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Pendidikan Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Pendidikan Desa Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
4	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Hibah Kepada Masjid/Mushola	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata untuk menciptakan Pramuwisata sopan dan profesional	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5	Taruna karya mandiri melalui program kartu milenial untuk membuka lapangan kerja	Penyusunan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
6	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Persiapan Kecamatan Berdaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Pelatihan Ecoprint Muslimat NU; Pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Pelatihan Tata Boga	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Fasilitasi Desa Wisata (5 Desa Wisata)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Program Delegasi	Dukungan Kabupaten/Kota	
		Rencana Aktivitas Riil	Program Nomenklatur
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Sosialisai Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Desa Wisata dan DTW	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Peningkatan dan Pengembangan Standarisasi Mutu IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
9	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Bantuan gerobag dan tenda serta sarpras lainnya untuk UMKM	Program Pengembangan UMKM
		Bimbingan Teknis dan Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha untuk UMKM	Program Pengembangan UMKM
10	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
11	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
12	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Bantuan peralatan digital dan konten kreator	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
13	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pembinaan Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani	Program Penyuluhan Pertanian
14	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)	Pembangunan Sistem Pemantauan dan Penguatan Kelembagaan BUMDes	Program Administrasi Pemerintahan Desa
15	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Sertifikasi Juru Sembelih halal	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Renovasi dan penataan lingkungan RPH dan Puskesmas Cilacap	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
16	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Pendampingan dan Pembinaan bagi kelompok masyarakat pesisir	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
17	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	FKUB Pemuda Lintas Iman	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
18	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
19	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		FKUB Pemuda Lintas Iman	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Bantuan Hibah Uang Kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Bantuan Hibah Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program Delegasi	Dukungan Kabupaten/Kota	
		Rencana Aktivitas Riil	Program Nomenklatur
20	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
21	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pengembangan & optimalisasi Puskesmas Rawat Inap di tiap-tiap Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
22	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Hibah Kepada Sekolah Swasta	Program Pengelolaan Pendidikan
		Hibah Kepada Sekolah Swasta/lembaga pendidikan kewenangan Kemenag	Program Perekonomian Dan Pembangunan
23	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Penyediaan Anggaran untuk Bonus Atlet Porprov	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		HIBAH KONI	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
24	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Pelatihan Manajemen Kelembagaan Dikmas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
25	Peningkatan operasional kader Posyandu	Kegiatan Posyandu tingkat Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Kegiatan Posyandu tingkat Kelurahan/Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Posyandu	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
26	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program Delegasi	Dukungan Kabupaten/Kota	
		Rencana Aktivitas Riil	Program Nomenklatur
27	Cek kesehatan gratis	Program Kesehatan Gratis dengan peningkatan anggaran kesehatan untuk keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan	Program Pemenuhan UKP dan UKM
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
28	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
29	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Biaya Operasional BSPS/RTLH	Program Kawasan Permukiman
		Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
30	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana
		Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
31	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Operasional/Pemeliharaan Rumah Singgah	Program Rehabilitasi Sosial
		Peningkatan Kapasitas PSKS	Program Pemberdayaan Sosial
		Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi PPKS	Program Rehabilitasi Sosial
32	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Operasional Pengelolaan Persampahan (RDF)	Program Pengelolaan Persampahan
33	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan TAGANA	Program Penanganan Bencana
		Sosialisasi, Pelatihan, dan Simulasi Kampung Siaga Bencana	Program Penanganan Bencana
34	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Penataan Alun-alun Kabupaten Cilacap	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Pemeliharaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
35	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Pengembangan sentra/kluster industri kecil, pengembangan daya saing sentra/kluster industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Dukungan Layanan Angkutan Aglomerasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

3.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat 5 pembagian kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal- Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo- Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;
2. Kawasan komoditas Unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas Tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati-Rembang, dan Cilacap;
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan) :
 - a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan dan Batang);
 - b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng-Serayu-Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung – Tuntang – Serang – Lusi – Juwana (Kab. Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
4. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu - Merapi, TN Karimunjawa dan Geopark Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. Kabupaten Cilacap merupakan WP Sepuluh WP Cibalingmas, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Cibalingmas berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program unggulan dan program strategis selama 5 tahun ke depan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut :

1. Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Baturaden-Serang Purbalingga dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan)

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
- 1) Peningkatan dan standarisasi ruas Jalan Provinsi yang terhubung dengan Jalan Nasional serta kawasan Eco Tourism Baturaden dan Segara Anakan (Buntu-Slarang, Menganti-Kesugihan);
 - 2) Pengembangan transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar kota/wilayah untuk mempermudah/mendukung akses pariwisata diantaranya melalui penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga) yang terkoneksi dengan Trans Banyumas dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata dan perindustrian;
 - 3) Revitalisasi Terminal Purbalingga sebagai simpul layanan Trans Jateng;
 - 4) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Purwokerto – Baturaden dan Adipala-Bodo Karangbolong;
 - 5) Mendorong pengembangan dan optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga dengan rencana dukungan daerah melalui : peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi menuju Bandara dan inisiasi perpanjangan layanan Trans Jateng ke Bandara (jika sudah terdapat layanan penerbangan regular);
 - 6) mendorong optimalisasi Bandara Tunggal Wulung sebagai home base flying school;
 - 7) Mendorong penyediaan infrastruktur perkeretaapian (reaktivasi rel non aktif Banyumas – Purbalingga – Wonosobo);
 - 8) Mendorong pembangunan jalan tol Cilacap-Pejagan.

- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Mendorong Kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan pariwisata sabuk Gunung Slamet;
 - 2) Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing;
 - 3) Mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan Industri Kecil menengah mendukung Pariwisata;
 - 4) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - 5) Fasilitasi pengembangan berbagai event kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain: Sedekah Bumi/Laut, Festival Perahu, Festival Gunung Slamet, Festival Budaya dsb;
 - 6) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global.

2. Pengembangan Industri (ikan, gula, jamu, minyak atsiri) Cilacap – Banyumas – Purbalingga

- a. Mendorong perwujudan Kawasan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
- c. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap-BanyumasPurbalingga melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
- d. Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Cibalingmas Koridor Cilacap - Banyumas) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya (Trans Jateng Koridor Purwokerto - Purbalingga dan Trans Banyumas) termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;

- e. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
 - f. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana Tanjung Intan sebagai Pelabuhan Ekspor dan Impor, melalui optimalisasi dan pemenuhan fasilitas Pelabuhan;
 - g. Mendorong revitalisasi dryport Banyumas;
 - h. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Industri berbasis lingkungan;
 - i. Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
 - j. Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi ruas jalan Adipala - Bodo/Ayah dan Jladri -Karangbolong - Bodo/Ayah untuk mendukung logistik dan aksesibilitas jalur selatan Jawa Tengah;
 - k. Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - l. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
 - m. Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cilacap.
- 3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, cabai, durian, susu, garam, serta perikanan budidaya (sidat) dan tangkap)**
- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Peningkatan pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan prasarana pertanian;
 - 2) Peningkatan sistem jaringan irigasi diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Banjaran-Banyumas, Serayu, Tajum, Banjarcahyana, Lokbok/Maganti (Kewenangan Pusat);
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, di antaranya mendorong pembangunan Bendungan Matenggeng dan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas;
 - 4) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
 - 5) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
 - 6) fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 7) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
 - 8) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 9) Pengembangan pelabuhan perikanan;
 - 10)Pengelolaan kawasan konservasi;

- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
 - 2) Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, cold storage dan sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Cibalingmas, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- b. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap;
- b. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/Industri Kecil Menengah dan sektor pariwisata;

- c. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- b. Mendorong sinergi pengelolaan kawasan konservasi Gunung Slamet dan Segara Anakan;
- c. Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir selatan;
- d. Mendorong optimalisasi fungsi Kabupaten Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
- e. Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Maslancip;
- f. Pembangunan IPLT Regional Purbalingga – Banjarnegara;
- g. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- h. Mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang berkelanjutan;
- i. Mendorong Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap;
- j. Mendorong Pembangunan infrastruktur PLTP Baturraden.

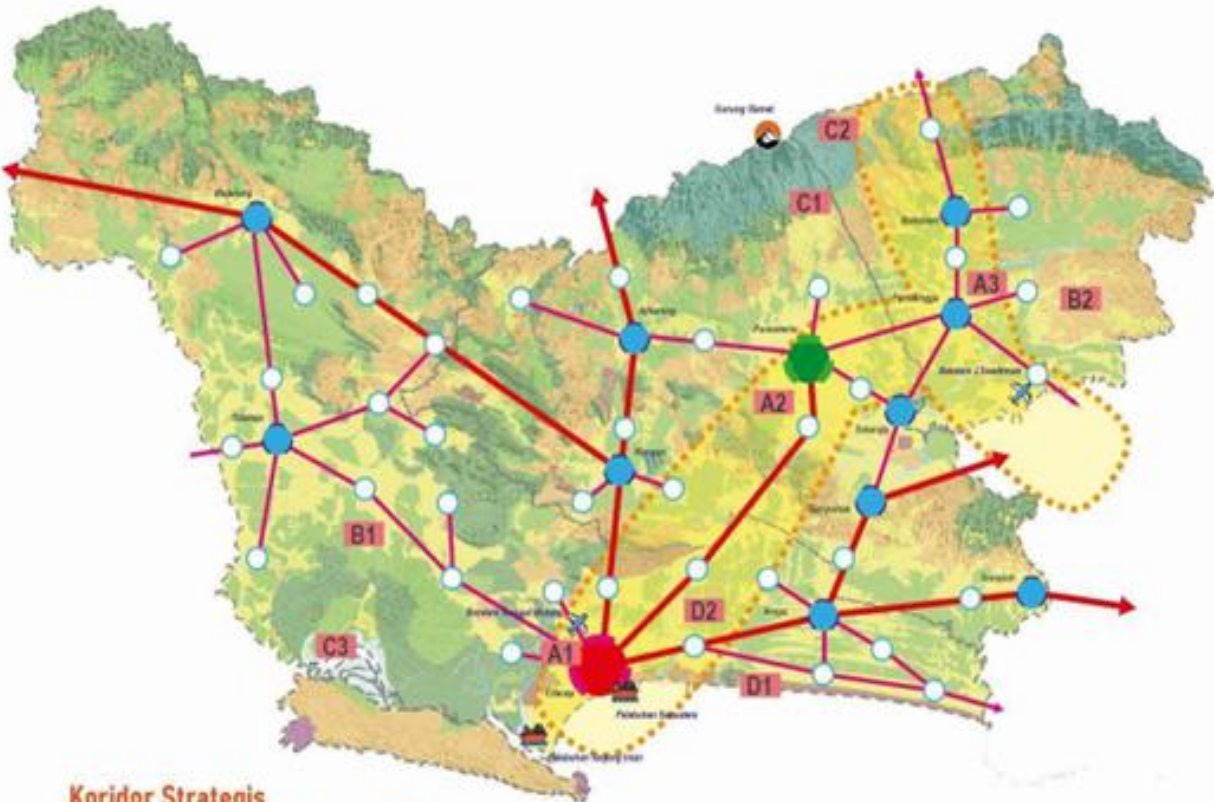
WP CIBALINGMAS

PROGRAM UNGGULAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Baturaden – Serang Purbalingga dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan)

PROGRAM STRATEGIS PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Pengembangan Kluster Industri Cilacap – Banyumas – Purbalingga
2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, cabai, durian, susu, garam, serta perikanan budidaya (sidat) dan tangkap)



Koridor Strategis Purbalingga - Purwokerto - Cilacap

1. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata
2. Mendorong penyediaan infrastruktur perkeretaapian (relaktif Banyumas – Purbalingga – Wonorebo)
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi menuju Bandar Udara Jenderal Soediman
4. Mendorong optimalisasi dan pemenuhan fasilitas dan pengembangan sarana dan prasarana Tanjung Intan sebagai Pelabuhan Ekspor dan Impor
5. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap Banyumas Purbalingga melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan
6. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian

Keterangan



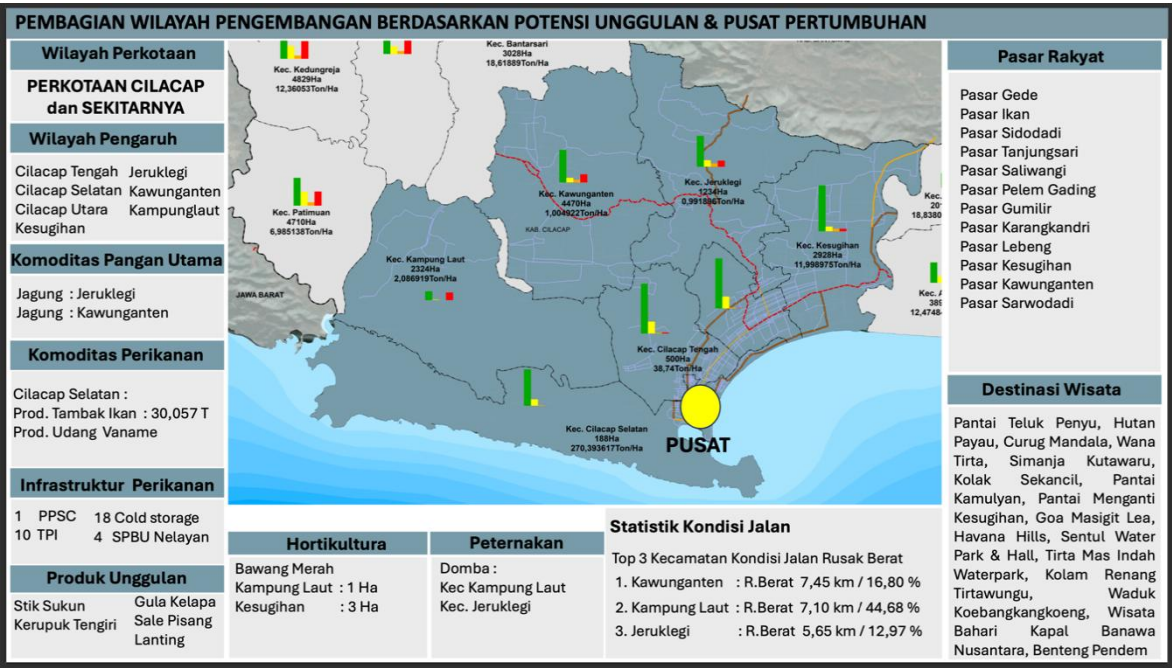
- A. Pengembangan Industri**
- A1 Kabupaten Cilacap
 - A2 Kabupaten Banyumas
 - A3 Kabupaten Purbalingga
- B. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Pertanian Padi, Gula Semut, dan Karet**
- B1 Kabupaten Cilacap (Padi, Gula Semut, Karet)
 - B2 Kabupaten Purbalingga (Karet)
- C. Integrated Eco-Tourism Sabuk Slamet**
- C1 Baturaden Kabupaten Banyumas
 - C2 Serang Kabupaten Purbalingga
 - C3 Segaran Kabupaten Cilacap
- D. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Pertanian Garam, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya**
- D1 Kabupaten Brebes
 - D2 Kabupaten Tegal
 - D3 Kabupaten Pemalang

Gambar 3.3.
Arahan Kebijakan WP Cibanglinmas
Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Pengembangan wilayah berdasarkan potensi dan pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Cilacap Perkotaan dan Sekitarnya

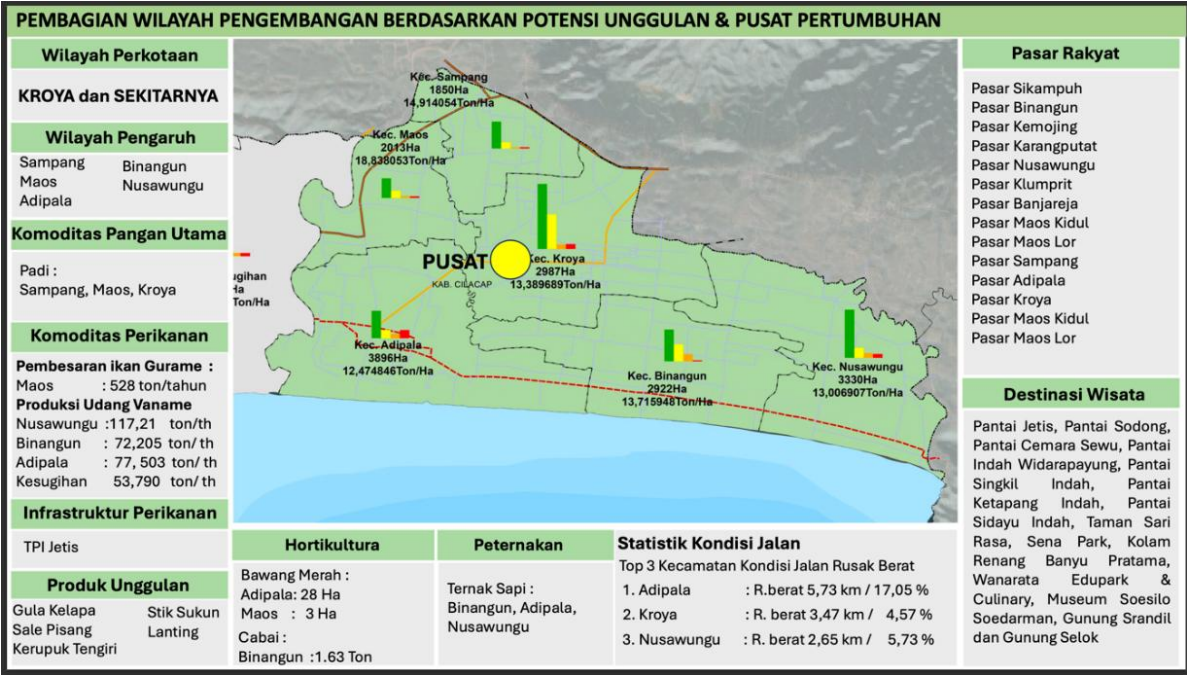
Cilacap perkotaan dan sekitarnya terdiri dari kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kawunganten, Jeruklegi, Cilacap Utara, Kesugihan dan Kampunglaut. Potensi pangan utama di wilayah ini adalah jagung. Potensi Horitikultura adalah bawang merah sedangkan peternakan adalah domba. Produk unggulan Stik Sukun, Gula Aren, kerupuk tengiri dan sale pisang serta lanting.



Gambar 3.4.
Pengembangan Wilayah Perkotaan Cilacap dan Sekitarnya

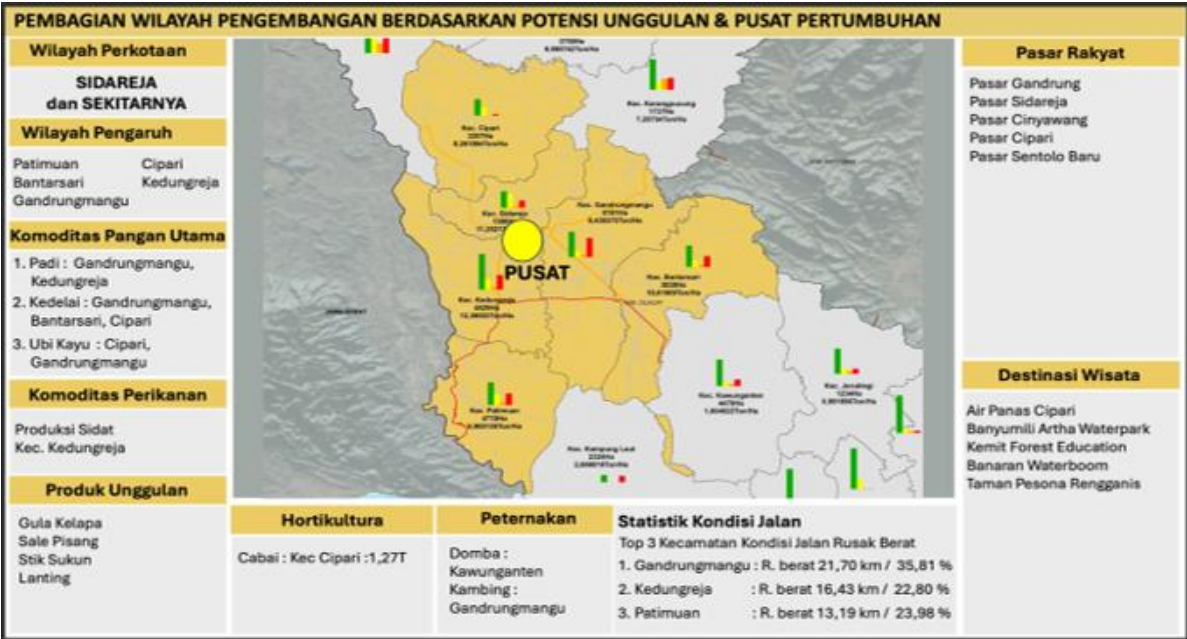
2. Wilayah Kroya dan sekitarnya

Wilayah Kroya dan sekitarnya terdiri dari kecamatan Sampang, Maos, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Potensi pangan utama di wilayah ini adalah padi. Potensi Horitikultura adalah bawang merah dan cabai sedangkan peternakan adalah sapi. Produk unggulan gula kelapa, sale pisang, kerupuk tengiri, stik sukun dan lanting.



Gambar 3.5.
Pengembangan Wilayah Perkotaan Kroya dan Sekitarnya

2. Wilayah Sidareja dan sekitarnya
- Wilayah Sidareja dan sekitarnya meliputi kecamatan Patimuan, Bantarsari, Gandrungmangu, Cipari dan Kedungreja. Potensi hortikultura berupa cabai. Komoditas pangan utamanya meliputi padi, kedelai dan ubi kayu. Komoditas perikanan berupa sidat dan komoditas ternak berupa domba dan kambing. Produk unggulan untuk wilayah Sidareja dan sekitarnya berupa gula kelapa, stik sukun, sale pisang dan lanting.



Gambar 3.6.
Pengembangan Wilayah Perkotaan Sidareja dan Sekitarnya

3. Wilayah Majenang dan Sekitarnya
- Wilayah Majenang dan sekitarnya meliputi kecamatan Karangpucung, Cimanggu, wanareja dan Dayeuhluhur. Potensi hortikultura berupa cabai. Komoditas pangan utamanya meliputi padi, jagung dan ubi kayu. Komoditas hortikultura berupa cabai teropong dan bawang merah dan komoditas ternak berupa sapi, domba dan kambing. Produk unggulan untuk wilayah Sidareja dan sekitarnya berupa gula kelapa, stik sukun, sale pisang dan lanting.



Gambar 3.7.
Pengembangan Wilayah Perkotaan Majenang dan Sekitarnya

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Cilacap berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis PD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawasan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kewilayahan, meliputi:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah, peningkatan akses sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan ketepatan sasaran bantuan operasional pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Pada target pencapaian peningkatan partisipasi anak usia sekolah, terdapat 2 (dua) indikator program yang penentuan target tahun 2026 lebih rendah dari capaian Tahun 2024, yaitu pada indikator “Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar” dan “Angka partisipasi sekolah 5 – 6 tahun”. Hal ini terjadi karena untuk target tahun 2025 - 2030 pada kedua indikator tersebut telah ditentukan oleh Kemendikdasmen.

b. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

2. Kesehatan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada peningkatan pemerataan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar, peningkatan kesehatan ibu, anak, dan status gizi, peningkatan populasi bebas penyakit menular, peningkatan populasi bebas penyakit tidak menular. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian SPM Bidang Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.
Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan obat, makanan dan minuman.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan gaya hidup sehat.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi dan peningkatan fungsi saluran pembuang
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada peningkatan rumah tangga dengan akses air minum terlindungi di daerah kabupaten/kota
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada peningkatan layanan SPALD
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebinamargaan
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga konstruksi. Pada target pencapaian peningkatan kompetensi tenaga konstruksi, terdapat indikator program yang penentuan target tahun 2026 lebih rendah dari capaian Tahun 2024, yaitu pada indikator “Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi”. Hal ini terjadi karena kebutuhan tenaga konstruksi di wilayah Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan sejak tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024. Kebutuhan tenaga konstruksi pada tahun 2024 yang semula adalah 1.839 orang, kemudian naik pada tahun 2025 menjadi 2.633 orang. Akibat dari meningkatnya kebutuhan tenaga konstruksi tersebut berpengaruh pada penentuan

target “Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi” untuk tahun 2026.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penetapan Dokumen Rencana Tata Ruang dengan fokus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan.

j. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan persampahan regional

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penurunan kawasan kumuh.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada peningkatan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan PSU Perumahan.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum, peningkatan Ketaatan dan Kepatuhan Perda/Perkada, peningkatan Perlindungan Masyarakat.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran serta peningkatan Kecepatan Pelayanan Kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan Kapasitas layanan informasi rawan Bencana, peningkatan Kapasitas Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, peningkatan kapasitas dalam penanganan tanggap darurat bencana, dan peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota dalam pemulihan pasca bencana.

6. Sosial.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS.

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi KPM.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada peningkatan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan Penempatan Tenaga Kerja.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada peningkatan Perusahaan yang Menerapkan Tatakelola Kerja Layak.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
Program ini diarahkan pada peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD, peningkatan Perempuan yang menjadi Calon Legislatif, peningkatan Organisasi Wanita yang Aktif.
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada penurunan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO.
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program ini diarahkan pada Tercapainya Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada peningkatan Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak yang memenuhi standar.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada penurunan kekerasan terhadap anak.
- f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada peningkatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya.

3. Pangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada peningkatan Ketersediaan Pangan dan peningkatan cadangan pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada Keterjangkauan Harga Pangan dan peningkatan penganeekaragaman Pangan.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada penurunan daerah rentan rawan pangan dan gizi.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada peningkatan keamanan pangan.

4. Pertanian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- c. Program Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

5. Lingkungan hidup;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini difokuskan untuk peningkatan Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk penjabaran rencana program prioritas urusan lingkungan hidup. Dokumen pendukung perencanaan pengelolaan lanskap darat dan laut terintegrasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Salah satu dokumen utama yang disusun adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang memuat arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengelolaan lingkungan sesuai kondisi dan potensi daerah.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman Hayati dan ruang terbuka hijau melalui penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada peningkatan Pengelolaan Limbah B3.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan pada peningkatan ketaatan lingkungan. Saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap telah menindaklanjuti (PP) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 600.1/320/23/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada target pencapaian peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat indikator program yang penentuan target tahun 2026 lebih rendah dari capaian Tahun 2024, yaitu pada indikator “Persentase Sekolah Adiwiyata”. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan definisi operasional atau rumus penghitungan capaian pada indikator tersebut. Untuk penargetan capaian tahun 2020–2024 pada indikator tersebut, semula menggunakan rumus penghitungan “jumlah sekolah adiwiyata dibagi dengan jumlah sekolah yang dibina”. Sementara untuk penargetan capaian tahun 2025-2030, rumus penghitungan yang digunakan adalah “jumlah sekolah adiwiyata dibagi total sekolah di Kabupaten Cilacap”. Akibat dari perubahan definisi operasional tersebut berpengaruh pada penentuan target “Persentase Sekolah Adiwiyata” untuk tahun 2026.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada peningkatan Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Pelanggaran Lingkungan.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan sampah dan pengurangan sampah.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat, layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat, dan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada peningkatan tingkat keakuratan data kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyajian data kependudukan.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penataan desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan Efektivitas Kerjasama Desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan Upaya Pengendalian Penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

9. Perhubungan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada peningkatan perlengkapan jalan, sosialisasi keselamatan lalu lintas, layanan angkutan umum (darat

dan penyeberangan), kenyamanan transportasi, dan kenyamanan transportasi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah yang didukung dengan fasilitas dermaga yang memadai.

10. Komunikasi dan informatika;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan Layanan Dokumentasi dan Publikasi.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada peningkatan Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat. Pada target pencapaian peningkatan Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat, terdapat indikator program yang penentuan target tahun 2026 lebih rendah dari capaian Tahun 2024, yaitu pada indikator “Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota”. Hal ini terjadi karena jumlah koperasi aktif di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan yang signifikan sejak kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih (KDMP) digagas oleh Pemerintah Pusat pada medio tahun 2025. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 yang semula adalah 300 koperasi aktif, kemudian naik secara signifikan menjadi 535 koperasi aktif di tahun 2025. Akibat dari peningkatan jumlah koperasi aktif tersebut berpengaruh pada penentuan target capaian “Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota” untuk tahun 2026.

b. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan Jumlah Pengelola Koperasi yang memiliki Kompetensi.

c. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan Pertumbuhan volume usaha koperasi.

- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan UMKM binaan yang memiliki produk terstandar dan terakses pasar.

- e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada peningkatan Kapasitas Usaha UMKM.

12. Penanaman modal;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan Promosi Penanaman Modal.

- c. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan Kepatuhan LKPM Pelaku Usaha UMK/Non UMK.

- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

13. Pemuda dan Olahraga;

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan.

- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan Pembudayaan dan Prestasi Olahraga.

14. Statistik;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Statistik Sektoral yang diarahkan pada peningkatan penggunaan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada peningkatan tingkat keamanan informasi pemerintah.

16. Kebudayaan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diarahkan pada peningkatan Daya Tarik Kebudayaan Lokal.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas Kesenian Tradisional.
- c. Program pembinaan sejarah
Program ini diarahkan pada peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya
Program ini diarahkan pada peningkatan registrasi cagar budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas Layanan Pemanfaatan Perpustakaan dan Kualitas Kelembagaan Perpustakaan.

18. Kearsipan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip yang akan diarahkan pada peningkatan Sadar Tertib Arsip Perangkat Daerah serta Pemanfaatan dan Kelestarian Arsip.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan tangkap.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi olahan hasil perikanan dan cakupan wilayah yang terfasilitasi gemar makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi pariwisata.

b. Program Pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan promosi pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan produktivitas ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan prasarana pertanian dalam kondisi baik.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan bencana pertanian.

d. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas petani.

e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan dan pencegahan penyakit ternak/hewan.

4. Perdagangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan peningkatan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada peningkatan ekspor produk lokal ke luar negeri
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diarahkan pada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

5. Perindustrian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada peningkatan sentra industri terbina.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan izin usaha industri.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada peningkatan manfaat Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pemerintah dan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan diarahkan pada peningkatan komponen belanja pengadaan, realisasi fisik terhadap target, dan BUMD dalam kondisi sehat.
- c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada peningkatan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti,

kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti, dan persentase harmonisasi produk hukum.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada peningkatan fasilitasi hukum dan perundang-undangan dan fasilitasi pelayanan rapat dan aspirasi.

3. Perencanaan Pembangunan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Valid dan Update.

- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tercapai, Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tercapai, dan Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam tercapai.

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah, kualitas penganggaran keuangan daerah, dan kualitas penatausahaan keuangan daerah.

- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan aset daerah.

- c. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini diarahkan untuk peningkatan Basis Data dan Pengembangan Pajak Daerah, Ketetapan Pajak Daerah, dan Realisasi Pajak Daerah.

5. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan pada peningkatan Kualitas Perencanaan dan

Pengadaan ASN yang Tepat Kebutuhan, Kualitas Penempatan ASN, kapasitas ASN, dan kinerja ASN.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diarahkan pada peningkatan kompetensi ASN.

7. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Riset dan Inovasi Daerah yang diarahkan pada peningkatan penguasaan IPTEK dan penerapan IPTEK.

8. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian Tindak Lanjut LHP APIP dan BPK

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

9. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada peningkatan Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada peningkatan etika dan budaya politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada peningkatan ketertiban organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan konflik sosial yang diselesaikan.

10. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah.
- b. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada peningkatan Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum.
- d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas Fasilitas Forkopimcam.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

4.1.5. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kapasitas keuangan berikut ini target dan pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029. Secara rinci untuk penjabaran program beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1. Pendidikan														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					311.546.382.670		312.929.545.458		14.381.866.384		315.906.803.358		317.507.987.179	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar	%	98,92	98,88		99,1		99,31		99,53		99,74		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	78,69	78,43		81,47		84,44		87,41		90,38		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP	%	38,92	40,85		41,82		42,79		43,76		44,72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP	%	58,33	67,01		72,08		77,16		82,23		87,31		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina	%	70,38	71,62		72,69		73,76		74,82		75,89		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya Ketepatan sasaran Bantuan Operasional Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					8.692.687.525		9.127.321.901		9.583.687.996		10.062.872.396		10.566.016.016	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	%	92,24	94,22		95,21		96,2		97,19		98,18		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	97,09	97,91		98,43		98,95		99,10		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.067.969.299.205		996.663.717.208		997.395.355.456		998.163.575.625		998.970.206.789	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
2. Kesehatan														
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.418.965.400		1.423.575.220		1.428.415.531		1.433.497.858		1.438.834.300	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Distribusi SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	65,79	71,05		73,68		73,68		76,32		78,95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					168.897.271.570		202.127.431.979		205.519.100.407		179.080.352.258		182.819.666.701	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Persentase Fasyankes memiliki Sarana, Prasarana dan ALat Kesehatan Sesuai Standar	%	78,62	82,3		84,14		85,98		87,81		89,65		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terakreditasi paripurna	%	75	78,13		79,38		81,88		83,75		85		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	50,55	72,36		80		83,64		85,82		87,64		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	62,23	62,43		62,53		62,63		62,73		62,83		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status Gizi	Cakupan ANC sesuai standar 12 T	%	41	66		69		72		75		78		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Jumlah Kematian Bayi	kasus	104	104		103		103		102		102		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	5,3 (SSGI)	5,2		5,2		5,1		5		5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya Populasi bebas penyakit menular	Angka Keberhasilan pengobatan TB	%	85	89		89		89		89		89		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi Lengkap	%	96,25	97		98		99		99		99		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
	Persentase desa/kelurahan STBM	%	32,04	80		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya Populasi bebas penyakit tidak menular	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	%	1	1,5		2		2		2		2,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	%	9,4	12,4		11,4		10,4		9,4		8,4		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	23,4	23,39		23,38		23,37		23,36		23,35		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	42,85		65		72,8		80		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase Lanjut Usia yang mandiri	%	74	77		79		81		83		83		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					573.955.000		579.738.360		585.810.888		592.187.042		598.882.005	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan gaya hidup sehat	Persentase Puskesmas dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	%	70,18	88,6		90,35		92,98		94,74		96,49		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					463.323.890		465.291.785		467.358.074		469.527.677		471.805.761	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	81	83		84		85		85		86		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	54	58		62		66		70		70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					698.464.835.243		711.932.438.786		751.430.707.062		794.320.899.228		843.855.363.422	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	tingkat Kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan	%	89,24	89,84		90,09		90,44		90,69		90,82		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	tingkat Kepuasan pasien di fasilitas kesehatan Primer	%	82,54	83,62		84,18		85,25		85,81		86,89		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					25.380.008.450		26.596.132.273		27.873.062.286		29.213.838.800		30.621.654.140	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang dipelihara dan ditingkatkan	%	5,95	8,95		10,45		11,95		13,45		14,45		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya fungsi saluran pembuang	Persentase pengendalian daya rusak air	%	9,61	10,25		10,5		10,75		11,00		11,25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.550.000.000		2.677.500.000		2.811.375.000		2.951.943.750		3.099.540.938	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas drainase	Persentase drainase yang dipelihara dan ditingkatkan	%	50	50,2		50,3		50,4		50,5		50,6		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.361.862.250		2.479.955.363		2.603.953.131		2.734.150.787		2.870.858.327	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	92,56	95,07		96,46		97,04		98,12		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.125.207.613		18.299.635.773		18.617.936.931		18.952.153.146		19.303.080.172	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					10.947.923.710		11.495.319.896		12.070.085.890		12.673.590.185		13.307.269.694	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
														Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	77,72	78,72		79,22		79,72		80,22		80,72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	0,58	0,9		1,04		1,19		1,34		1,49		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.000.000.000		4.200.000.000		4.410.000.000		4.630.500.000		4.862.025.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase perencanaan penataan kawasan	%	5	5		15		25		35		45		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang dioptimalisasi	%	9,59	15,07		17,81		20,55		23,29		26,03		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					296.838.550		311.680.478		327.264.501		343.627.726		360.809.113	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	88,80	72,01		73,00		74,02		75,01		76,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					158.111.714.907		236.830.989.254		252.788.176.456		219.891.963.353		253.513.986.813	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	58,28	62		64		66		68		70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.570.000.000		2.055.000.000		2.225.000.000		1.605.000.000		1.765.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Dokumen Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	%	25,37	30,59		34,32		38,06		41,79		45,52		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	%	22,22	33,33		44,44		55,55		66,67		83,33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					13.350.724.174		13.534.410.183		13.727.280.492		13.929.794.316		14.142.433.832	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya layanan SPALD	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	2,51	5,30		6,80		8,30		10,30		12,30		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.888.008.533		29.308.343.207		30.644.868.356		30.167.834.272		30.630.072.760	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Perumahan														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					4.291.462.500		4.506.035.625		4.731.337.406		4.967.904.277		5.216.299.490	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					259.142.910		272.100.056		285.705.058		299.990.311		314.989.827	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Menurunnya Kawasan Kumuh	Pengurangan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang tertangani	hektar	58,1	38,1		28,1		18,1		8,1		0		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					97.855.689.027		98.331.368.274		98.830.831.483		99.355.267.853		99.905.926.041	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	87,00	88,50		89		89,5		90		90,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Panjang jalan desa dalam kondisi baik	%	60,00	63,04		66,08		69,12		72,16		75,2		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Jalan, Drainase, RTP, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Penerangan Lingkungan, dsb) yang sudah diserahkan pengembang ke pemerintah kabupaten	%	65	72,59		76,43		80		83,33		86,45		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					99.599.680		104.579.664		109.808.647		115.299.080		121.064.034	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pengelolaan PSU Perumahan	Persentase peningkatan pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	2	6		8		10		12		14		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					4.320.000.000		4.536.000.000		4.762.800.000		5.000.940.000		5.250.987.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	%	3,49	3,87		4,17		4,51		4,88		5,3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5. Trantibumlinmas														
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.968.348.610		4.166.766.041		4.375.104.342		4.593.859.560		4.823.552.537	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Perda/Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	32,14	33		33		33		34		34		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa yang memiliki SDM Linmas	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.149.023.450		2.349.066.094		2.432.769.400		2.554.407.870		2.682.128.264	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Kebakaran	Rata-Rata Respon Time	menit	12,5	15		15		15		15		15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.070.873.071		13.073.352.260		13.199.693.730		13.298.602.274		13.402.456.247	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					972.693.785		1.321.328.474		1.372.394.898		1.426.014.643		1.482.315.375	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas layanan informasi rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas dalam penanganan tanggap darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas Kabupaten/Kota dalam pemulihan pasca bencana	persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.557.921.153		9.070.733.444		9.201.093.340		9.337.971.232		9.481.693.018	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial														
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					879.781.170		923.770.229		969.958.740		1.018.456.677		1.069.379.511	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	%	1,3	1,4		1,45		1,5		1,55		1,6		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					573.488.965		602.163.413		632.271.584		663.885.163		697.079.421	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	persentase korban bencana alam, sosial/ dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab /kota	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					873.190.435		916.849.957		962.692.455		1.010.827.077		1.061.368.431	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persentase PSKS yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	%	45,27	26,02		26,63		29,66		30,53		31,83		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.454.562.245		1.469.597.472		1.485.384.461		1.501.960.799		1.519.365.954	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi KPM	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	43,47	40,63		40,20		39,90		39,45		39,10		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					40.849.920		42.892.416		45.037.037		47.288.889		49.653.333	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	59,75	60,75		61,25		61,75		62,25		62,75		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.263.439.596		9.705.058.225		9.831.480.983		9.964.224.878		10.103.605.968	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1. Tenaga Kerja														
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					32.000.000		33.600.000		35.280.000		37.044.000		38.896.200	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	84,2	85,7		86,1		86,5		86,8		87,2		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.429.714.900		4.600.950.645		4.780.748.177		4.969.535.586		5.167.762.365	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	31,72	37,68		38,16		38,64		39,12		39,6		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					182.429.910		191.551.406		201.128.976		211.185.425		221.744.696	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	59,43	60,61		61,21		61,82		62,43		63,05		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					734.451.100		742.949.655		751.873.138		761.242.795		771.080.934	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tatakelola Kerja Layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	37,71	39,24		39,95		40,53		41,11		41,71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,31	60,6		63,74		67,05		70,52		73,66		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.032.085.115		8.514.940.939		8.616.284.028		8.722.694.270		8.834.425.025	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.301.949.400		1.367.046.870		1.435.399.214		1.507.169.174		1.582.527.633	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	49,13	50,5		51		51,5		52		52,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Perempuan yang menjadi Calon Legislatif	Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif	%	34	25		25		25		25		25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Organisasi Wanita yang Aktif	Persentase Organisasi wanita yang aktif	%	97,14	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					24.837.800		26.079.690		27.383.675		28.752.858		30.190.501	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 pddk	0,00007	0,00005		0,00004		0,00003		0,00002		0,00001		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					115.052.680		120.805.314		126.845.580		133.187.859		139.847.252	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	n.a	60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Cakupan keluarga yang terlayani PUSPAGA	%	0,00012	0,00032		0,00042		0,00052		0,00062		0,00072		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					33.000.000		34.650.000		36.382.500		38.201.625		40.111.706	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tercapainya Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	Persentase Keterisian Gender dan Anak dalam SIGA oleh Perangkat daerah (%)	%	75	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					91.889.640		96.484.122		101.308.328		106.373.745		111.692.432	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kecamatan/Desa/Kelurah an Layak Anak yang memenuhi standar	Persentase Kecamatan/Desa/Kelurah an Layak Anak yang memenuhi standar	%	75,35	80		85		90		95		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					750.518.925		768.011.871		786.379.465		805.665.438		825.915.710	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0,000112	0,000100		0,000090		0,000080		0,000070		0,000060		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3. Pangan														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					4.341.143.730		4.550.700.917		4.770.735.962		5.001.772.760		5.244.361.398	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	%	139	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	%	7,08	20,00		25,00		28,00		30,00		32,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4.617.130.240		4.747.986.752		4.885.386.090		5.029.655.394		5.181.138.164	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Keterjangkauan Harga Pangan	Koefisien Variasi (CV) Harga Pangan Pokok Antar Waktu Antar Wilayah	%	7,38	7,02		6,84		6,66		6,48		6,3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					369.540.600		388.017.630		407.418.512		427.789.437		449.178.909	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Menurunnya daerah rentan rawan pangan dan gizi	Persentase Desa Rawan Pangan Dan Gizi	%	9,15	8,45		8,10		7,75		7,39		7,04		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
	Skor PPH Konsumsi	skor	87,9	88,5		88,7		89		89,5		89,7		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan	Angka kecukupan Energi	%	89,6	91		92		93		94		95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
	Angka Kecukupan Protein	%	94,56	95,5		96		96,5		97		97,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					113.401.500		119.071.575		125.025.154		131.276.411		137.840.232	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diawasi Dan Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	76,00	78,00		79,00		80,00		81,00		84		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.089.347.970		5.702.936.361		5.756.729.118		5.813.211.511		5.872.518.025	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
4. Pertanian														
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					215.261.830		226.024.922		237.326.168		249.192.476		261.652.100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					36.507.870		38.333.264		40.249.927		42.262.423		44.375.544	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
Meningkatnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					121.996.135		128.095.942		134.500.739		141.225.776		148.287.065	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
5. Lingkungan Hidup														
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					62.500.000		65.625.000		68.906.250		72.351.563		75.969.141	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan LH yang ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					427.828.235		449.219.647		471.680.629		495.264.661		520.027.894	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	%	31,0344828	34,48275862		36,20689655		37,93103448		39,65517241		41,37931034		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.600.507.630		1.660.533.012		1.723.559.662		1.789.737.645		1.859.224.527	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman Hayati dan ruang terbuka hijau	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Kualitas Lahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,11	0,15		0,17		0,19		0,22		0,24		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Kegiatan/Usaha (yang menjadi kewenanganKab/Kota) yang telah melakukan Pengelolaan Limbah B3	%	18,74	21,36		22,67		23,98		25,28		26,59		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					24.999.800		26.249.790		27.562.280		28.940.393		30.387.413	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Ketaatan Lingkungan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	95,45	96,15		96,15		96,15		96,30		96,30		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					38.261.280		40.174.344		42.183.061		44.292.214		46.506.825	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	81,8	11,96		12,45		12,93		13,41		13,90		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.682.188		9.116.297	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Pelanggaran Lingkungan	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.540.783.462		9.917.822.635		10.313.713.767		10.729.399.455		11.165.869.428	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	%	13,58	13,6		13,61		13,62		13,63		13,64		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	%	65,22	65,30		65,34		65,38		65,42		65,46		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.022.069.611		18.348.669.576		18.722.106.953		19.114.216.198		19.525.930.906	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
PROGRAM PENATAAN DESA					6.282.073.227		6.561.976.888		6.855.875.733		7.164.469.519		7.488.492.995	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa yang memiliki infrastruktur aparatur kondisi baik	%	7,81	17,84		31,78		50,37		70,82		93,12		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dan potensi desa	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					93.519.230		98.195.192		103.104.951		108.260.199		113.673.209	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	33,82	46,67		53,33		60,00		64,00		66,67		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					495.094.910		514.849.656		535.592.138		557.371.745		580.240.332	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang	%	72,86	73,61		74,35		76,21		78,07		81,78		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	80,00	80,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase BUMDES Berkembang	%	27,88	31,60		33,46		35,32		37,17		39,03		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa dan kelurahan dengan tingkat perkembangan desa kategori swasembada	%	15,49	17,61		18,31		19,01		19,72		20,42		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.090.849.880		1.145.392.374		1.202.661.993		1.262.795.092		1.325.934.847	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif (PKK, LPMD, RT/RW, Posyandu, Karangtaruna)	%	99,75	99,82		99,83		99,84		99,85		99,86		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa yang memiliki posyantek	%	37,24	40,00		41,38		42,76		44,83		46,21		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.035.616.929		6.644.094.178		6.727.389.447		6.814.849.479		6.906.682.513	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					692.000.100		692.700.105		693.435.110		694.206.866		695.017.209	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun	14,7	11,3		10,2		9,5		8,9		8,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	61,92	63,35		63,94		64,48		65,17		66,25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.004.276.920		7.056.571.266		7.111.480.329		7.169.134.846		7.229.672.088	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	%	13,86	13,6		13,55		13,45		13,38		13,34		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)	%	83,9	84,2		84,4		84,6		84,7		84,7		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					9.630.424.150		9.638.395.358		9.646.765.125		9.655.553.382		9.664.781.051	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	63,48	65,9		67		68		69		70		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8. Perhubungan														
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					30.311.478.513		31.827.052.439		33.418.405.061		35.089.325.314		36.843.791.579	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya perlengkapan jalan	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	51,44	60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase masyarakat sadar berjalan lintas	%	8	10		12		14		16		20		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya layanan angkutan umum (darat dan penyeberangan)	Persentase Kinerja Angkutan Umum (Darat dan Penyeberangan)	%	41,41	60		70		80		90		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya kenyamanan transportasi	Persentase Kelayakan Prasarana Transportasi	%	73,08	75		87,5		87,5		87,5		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Kendaraan yang Berstandar Keselamatan	Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR	%	67,88	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					63.335.940		66.502.737		69.827.874		73.319.268		76.985.231	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah yang didukung dengan fasilitas dermaga yang memadai	Persentase peningkatan konektivitas antar wilayah yang didukung dengan fasilitas dermaga yang memadai	%	17	33		50		67		83		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.750.483.363		26.616.443.647		27.454.484.490		28.334.427.376		29.258.367.406	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
9. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.426.038.580		1.497.340.509		1.572.207.534		1.650.817.911		1.733.358.807	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat	Perekaman KTP elektronik	%	99,24	99,86		99,87		99,88		99,89		99,90		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	36,79	37,5		38		38,5		39		40		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	19,23	23,08		25,00		26,92		28,85		30,77		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					54.798.400		57.538.320		60.415.236		63.435.998		66.607.798	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,47	95,49		95,5		95,51		95,52		95,53		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					289.512.750		303.988.388		319.187.807		335.147.197		351.904.557	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya tingkat keakuratan data kependudukan	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD)	%	8,53	11,65		13,23		14,80		16,38		17,96		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					10.400.000		10.920.000		11.466.000		12.039.300		12.641.265	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas penyajian data kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.871.624.238		12.218.202.058		12.394.785.744		12.580.198.615		12.774.882.129	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10. Komunikasi dan Informatika														
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					801.777.688		665.274.372		698.538.091		733.464.995		770.138.245	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Layanan Dokumentasi dan Publikasi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	85	87		88		88		89		89		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.040.423.612		3.991.937.471		4.191.534.344		4.401.111.061		4.621.166.614	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	44,23	44,23		50		55,77		59,62		61,54		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.453.839.304		9.360.966.293		9.496.601.896		9.639.019.280		9.788.557.532	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					32.500.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000		40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	25,33	14,95		15,7		16,45		17,2		17,94		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					35.821.650		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Jumlah Pengelola Koperasi yang memiliki Kompetensi	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	66,6	72,19		74,44		76,69		78,94		81,18		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000		40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Pertumbuhan volume usaha koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	66,34	1,85		1,85		1,86		1,86		1,86		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya UMKM binaan yang memiliki produk terstandar dan terakses pasar	Persentase UMKM binaan yang telah memasarkan produk berstandar minimal	%	35,96	36,03		36,33%		36,48%		36,61		36,72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.478.403.030		1.531.192.575		1.576.083.862		1.669.419.716		1.767.622.362	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Kapasitas Usaha UMKM	Persentase UMKM yang meningkat kualitasnya	%	89,9	90,87		91,22		92,56		93,67		94,61		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.894.280.643		15.251.841.671		15.533.175.557		15.828.576.138		16.138.746.748	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
12. Penanaman Modal														
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					73.033.990		76.685.690		80.519.974		84.545.973		88.773.271	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi di Kabupaten Cilacap	%	237,92	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					58.269.260		61.182.723		64.241.859		67.453.952		70.826.650	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi peminatan investasi	%	N/A	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					16.174.400		16.983.120		17.832.276		18.723.890		19.660.084	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Sektor Potensial	%	16,15	17,65		18		19		20		22		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					80.681.520		84.715.596		88.951.376		93.398.945		98.068.892	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang memenuhi SLA	%	98	98,25		98,75		99		99,5		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					13.450.000		14.122.500		14.828.625		15.570.056		16.348.559	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kepatuhan LKPM Pelaku Usaha UMK/Non UMK	Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	74,34	80		82		84		86		88		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.522.131.404		8.074.020.716		8.184.973.367		8.301.473.650		8.423.798.947	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
13. Pemuda dan Olahraga														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.033.205.620		1.091.364.746		1.120.932.983		1.151.979.632		1.184.578.614	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Wirausaha Muda	%	24,26	25,26		25,76		26,26		26,76		27,26		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					29.998.900		-		-		-		-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya pembinaan pramuka	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	%	100	100										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.694.951.840		11.109.699.432		11.545.184.404		12.002.443.624		12.482.565.805	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkaatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
14. Statistik														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					150.960.820		158.508.861		166.434.304		174.756.019		183.493.820	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
15. Persandian														

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					66.287.890		69.602.285		73.082.399		76.736.519		80.573.345	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
Meningkatnya sistem elektronik yang diamankan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap	Persentase sistem elektronik yang diamankan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap	%	N/A	98,52		98,89		99,26		99,63		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
16. Kebudayaan														
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					108.000.000		113.400.000		119.070.000		125.023.500		131.274.675	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya registrasi cagar budaya	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	26,83	28,46		29,27		30,08		30,89		31,71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	46990	48230		48850		49470		50090		50170		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.163.820.910		1.222.011.956		1.283.112.553		1.347.268.181		1.414.631.590	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya Daya Tarik Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,0322	0,0394		0,0430		0,0465		0,0501		0,0537		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					289.590.000		304.069.500		319.272.975		335.236.624		351.998.455	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	50	63,64		72,73		81,82		90,91		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya Pembinaan Sejarah Lokal	Persentase sejarah lokal yang dibina	%	11,11	13,33		14,44		15,56		16,67		17,78		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
17. Kearsipan														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					544.049.960		571.252.458		599.815.081		629.805.835		661.296.127	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya Sadar Tertib Arsip Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai pengawasan daerah yang telah berkategori Baik	%	48,37	59,25		65,18		96,08		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya Pemanfaatan dan Kelestarian Arsip	Persentase Arsip yang dilayankan melalui simpul jaringan dalam SIKN/JIKN	%	5,15	17,93		22,93		27,93		32,93		37,93		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
	Persentase Perangkat Daerah yang menyerahkan Arsip Statis	%	5,77	40,38		42,31		44,23		46,15		48,08		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.754.967.446		7.341.369.930		7.440.092.414		7.543.751.022		7.652.592.561	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
18. Perpustakaan														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					731.432.050		768.003.653		806.403.835		846.724.027		889.060.228	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemanfaatan Perpustakaan	Persentase Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,21	0,49		0,76		1,03		1,29		1,56		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	%	5,10	5,55		5,78		6,01		6,24		6,46		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
1. Kelautan dan Perikanan														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					4.027.227.570		4.118.588.949		4.214.518.396		4.315.244.316		4.421.006.532	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	47.967,17	51.000,00		52.500,00		54.000,00		55.500,00		57.000,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.648.956.390		2.781.404.210		2.920.474.420		3.066.498.141		3.219.823.048	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	17.367,24	18.400,00		18.900,00		19.400,00		19.900,00		20.400,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					14.450.370		15.172.889		15.931.533		16.728.110		17.564.515	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif	%	61,29	65		75		82,5		92,5		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					276.810.620		290.651.151		305.183.709		320.442.894		336.465.039	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah olahan hasil perikanan	ton	11.359,00	11860		12110		12360		12610		12860		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya cakupan wilayah yang terfasilitasi Gemar Makan Ikan	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi Gemar Makan Ikan	%	1,41	3,52		5,28		7,04		8,8		10,56		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.049.887.457		7.579.552.678		7.666.246.760		7.757.275.546		7.852.855.772	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
3. Pariwisata														
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.102.056.635		1.132.159.467		1.163.767.440		1.196.955.812		1.231.803.603	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Orang	1.320.706	1375000		1400000		1425000		1450000		1475000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.101.482.400		1.146.556.520		1.193.884.346		1.243.578.563		1.295.757.491	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Promosi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dipromosikan	%	24	19,51		19,51		19,51		19,51		21,96		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	%	N/A	1,43		2,86		4,64		6,79		8,93		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					181.544.880		190.622.124		200.153.230		210.160.892		220.668.936	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kualitas SDM Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan (%)	%	25	20		40		60		80		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.024.126.517		7.657.229.607		7.782.877.014		7.914.806.791		8.053.333.057	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
4. Pertanian														

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					18.494.913.660		19.257.060.093		20.057.313.848		20.897.580.290		21.779.860.055	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan	kw/ ha	66,64	66,47		66,53		66,59		66,65		66,71		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
	Produktivitas Hortikultura	kw/ ha	424,45	433,00		437,33		441,71		446,12		450,58		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
	Produktivitas Perkebunan	kg/ ha	2.816,43	2.863,28		2.886,45		2.909,85		2.933,38		2.957,26		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya produktivitas ternak	Persentase ternak produktif	%	72,4	72,43		72,45		72,46		72,48		72,50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					28.487.931.405		29.210.303.475		29.968.794.149		30.765.209.357		31.601.445.324	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	59,97	63,97		65,97		67,97		69,87		71,97		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100.000.000		105.000.001		110.250.000		115.762.500		121.550.625	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Penanganan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani	%	0,93	1,5		2		2,5		3		3,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.733.631.000		4.738.668.050		4.743.956.953		4.749.510.300		4.755.341.315	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Kapasitas petani	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	9,34	10,50		11,00		11,50		12,00		12,50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					925.194.780		932.574.519		940.323.245		948.459.407		957.002.378	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya penanganan dan pencegahan penyakit ternak/ hewan	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-24,54	-24,7		-24,8		-24,9		-25		-25,1		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.731.357.669		28.741.033.564		28.997.037.939		29.265.842.532		29.548.087.356	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
5. Perindustrian														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.132.765.760		3.230.404.048		3.332.924.250		3.440.570.463		3.553.598.986	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Sentra Industri Terbina	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	67,63	77		82		85		88		90		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.013		2.552.563	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,36	2,94		3,04		3,13		3,24		3,35		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					23.203.430		24.363.602		25.581.782		26.860.871		28.203.914	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Manfaat Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Informasi Industri yang Update	%	95	96		97		98		99		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
6. Perdagangan														
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					-		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan	Tertib Usaha	%	79,88	82,13		82,75		83,38		84,04		84,67		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.068.133.200		1.078.133.200		1.088.133.200		1.108.133.200		1.128.133.200	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	10	20		40		60		80		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					418.500.000		518.500.000		618.500.000		668.500.000		718.500.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga	%	-2,39	± 10		± 10		± 10		± 10		± 10		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					115.947.760		121.745.148		127.832.405		134.224.026		140.935.227	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya ekspor produk lokal ke luar negeri	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-83	1,65		1,9		2,1		2,25		2,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					61.893.570		64.988.249		68.237.661		71.649.544		75.232.021	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Metrologi Legal	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	60,77	64,13		64,13		64,31		64,31		64,49		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					473.025.900		514.877.195		523.121.055		531.777.107		540.865.963	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	35	45		50		55		60		60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
1. Sekretariat Daerah														
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					21.043.081.950		38.557.436.048		23.122.507.850		40.740.833.242		25.415.074.904	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	42,11	60		63		66		69		72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	%	44,44	60		63		66		69		72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya persentase harmonisasi produk hukum	Persentase harmonisasi produk hukum	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					13.458.335.530		14.106.242.652		14.786.545.129		15.500.862.731		16.250.896.212	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya Komponen belanja pengadaan	Persentase Komponen belanja Pengadaan	%	60	64		66		68		70		72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya realisasi fisik terhadap target	Persentase Realisasi Fisik	%	99,51	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya BUMD dalam kondisi sehat	Persentase BUMD dengan kondisi sehat	%	60	75		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.712.414.218		47.025.883.034		47.936.100.953		48.891.829.769		49.895.345.025	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan pemerintah	SKM Setda	Nilai	89	89,1		89,15		89,2		89,25		89,25		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	38,72	39,5		40		40,5		40,5		40,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
2. Perencanaan														
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.312.961.450		2.428.609.523		2.550.039.999		2.677.541.999		2.811.419.098	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat	Nilai Sinergi komponen Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	19,26	20,28		20,79		21,30		21,81		22,32		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Valid dan Update	Persentase Ketersediaan Data yang Esensial dan Valid untuk Perencanaan Pembanguna n	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.456.903.260		1.529.748.423		1.606.235.844		1.686.547.636		1.770.875.018	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tercapai	Nilai Kesesuaian antara isu strategis, program kegiatan dan proyek Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tercapai	Nilai kesesuaian antara isu strategis, program, kegiatan dan proyek Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam tercapai	Nilai kesesuaian antara isu strategis, program, kegiatan dan proyek Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.378.019.023		12.779.201.821		12.993.642.219		13.218.804.636		13.455.225.174	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
3. Sekretariat DPRD														
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					30.768.100.210		32.306.505.221		33.921.830.482		35.617.922.006		37.398.818.106	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Fasilitas Hukum dan Perundang-undangan	Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	%	45,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Rapat dan Aspirasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Rapat dan Aspirasi yang diselenggarakan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					53.280.698.636		53.287.357.586		53.981.014.604		54.709.354.472		55.474.111.334	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Terpenuhinya layanan administrasi pekantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran setiap tahun	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas pelayanan umum	% fasilitas pelayanan umum setiap tahun	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
4. Keuangan														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.001.572.550		9.451.651.177		9.924.233.736		10.420.445.423		10.941.467.694	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya Basis Data dan Pengembangan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pelaporan atau Pendataan Objek Pajak	%	0,06	0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	23,10	4,8		4,8		4,8		4,8		4,8		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	22,21	6,38		4,82		4,807		5,08		3,37		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.958.906.516		24.973.995.746		25.106.624.862		25.245.885.436		25.392.109.038	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					600.595.199.690		603.452.199.355		605.804.094.003		607.916.438.384		610.034.399.984	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,83	2,87		2,49		2,16		1,87		1,62		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,023	-0,045		-0,040		-0,035		-0,030		-0,030		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					10.593.527.106		11.123.203.461		11.679.363.634		12.263.331.816		12.876.498.407	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Manajemen Asset	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.208.174.034		18.788.946.611		19.266.396.372		19.767.718.622		20.294.106.984	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
5. Kepegawaian														
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.162.303.900		5.345.419.095		5.537.690.050		5.739.574.552		5.951.553.280	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN yang Tepat Kebutuhan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	%	60,55	37,24		37,24		37,24		37,24		37,24		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penempatan ASN	Persentase penempatan pegawai kedalam jabatan manajerial sesuai kompetensi	%	34,43	46,89		55,88		62,28		70,42		76,12		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Kapasitas ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,82	79,22		80,76		82,22		83,64		84,95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase ASN dengan predikat kinerja minimal Baik	%	99,93	99,93		99,93		99,93		99,93		99,93		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.897.862.628		15.738.670.567		15.854.497.801		15.976.116.397		16.103.815.923	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.935.180.040		2.031.939.042		2.133.535.994		2.240.212.794		2.352.223.433	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	66,92	73,42		74,78		76,15		77,51		78,88		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
7. Penelitian dan Pengembangan														
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.377.376.960		1.446.245.808		1.518.558.098		1.594.486.003		1.674.210.303	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Publikasi Ilmiah	Indeks	2,96	3,00		3,02		3,04		3,06		3,08		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Penerapan IPTEK	Indeks kekayaan intelektual dan indikasi geografis	Indeks	1,57	1,61		1,63		1,65		1,67		1,69		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian Dan Pengembangan
8. Pengawasan														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.647.097.330		2.779.452.197		2.918.424.806		3.064.346.047		3.217.563.349	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut LHP APIP dan BPK	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)	%	97,63%	97,73%		97,78%		97,83%		97,88%		97,93%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	%	94,94%	95,04%		95,09%		95,14%		95,19%		95,24%		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					5.323.387.480		5.589.556.854		5.869.034.697		6.162.486.432		6.470.610.753	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Indeks	94,55	94,75		94,85		94,95		95,05		95,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.703.240.830		23.012.865.733		23.535.449.503		24.084.162.461		24.660.311.066	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Inspektorat Daerah
9. Kesatuan Bangsa dan Politik														
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					778.156.990		817.064.840		857.918.081		900.813.986		945.854.685	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					761.646.000		799.728.300		839.714.715		881.700.451		925.785.473	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	N.A	75		80		85		90		95		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.213.634.000		3.374.315.700		3.543.031.485		73.720.183.059		3.906.192.212	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya etika dan budaya politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%)	%	72,23	N.A		N.A		N.A		74		N.A		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	29	32		35		38		41		45		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	70	80		85		90		95		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.371.830.117		5.067.766.663		5.129.390.520		5.194.095.569		5.262.035.871	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
UNSUR KEWILAYAHAN														
1. Kecamatan Adipala														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					21.009.200		22.059.660		23.162.643		24.320.775		25.536.814	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.345.212.334		3.128.588.879		3.156.467.392		3.185.739.831		3.216.475.892	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.068.020		44.171.421		46.379.992		48.698.992		51.133.941	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.400.000		3.570.000		3.748.500		3.935.925		4.132.721	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					43.790.240		45.979.752		48.278.740		50.692.677		53.227.310	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					34.683.420		36.417.591		38.238.471		40.150.394		42.157.914	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
2. Kecamatan Bantarsari														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					27.547.800		28.925.190		30.371.450		31.890.022		33.484.523	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.181.917.627		2.960.085.038		2.980.528.099		3.001.993.313		3.024.531.788	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					34.499.630		36.224.612		38.035.842		39.937.634		41.934.516	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.500.000		3.675.000		3.858.750		4.051.688		4.254.272	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					35.400.000		37.170.000		39.028.500		40.979.925		43.028.921	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4.400.000		4.620.000		4.851.000		5.093.550		5.348.228	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDs dengan RPJMDs	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
3. Kecamatan Binangun														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					20.197.930		21.207.827		22.268.218		23.381.629		24.550.710	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.398.909.497		3.154.622.519		3.173.639.977		3.193.608.309		3.214.575.057	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					41.855.720		43.948.506		46.145.931		48.453.228		50.875.889	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					12.499.820		13.124.811		13.781.052		14.470.104		15.193.609	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					36.438.520		38.260.446		40.173.468		42.182.142		44.291.249	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					12.180.970		12.790.019		13.429.519		14.100.995		14.806.045	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
4. Kecamatan Cilacap Selatan														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					61.246.000		64.308.300		67.523.715		70.899.901		74.444.896	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.212.677.749		8.695.812.420		8.803.268.715		8.916.097.825		9.034.568.390	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.384.830.360		6.417.534.961		6.425.624.791		6.434.119.113		6.443.038.151	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
	Persentase penyerapan alokasi dana kelurahan	%	99,43	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					33.500.000		35.175.000		36.933.750		38.780.438		40.719.459	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					49.999.660		52.499.643		55.124.625		57.880.856		60.774.899	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.000.000		-		-		-		-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		-		-		-		-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
5. Kecamatan Cilacap Tengah														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					53.837.440		56.529.312		59.355.778		62.323.566		65.439.745	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.744.738.221		9.182.157.876		9.289.714.364		9.402.648.675		9.521.229.703	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.335.073.930		6.360.364.427		6.367.792.998		6.375.432.648		6.383.569.280	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
	Persentase penyerapan alokasi dana kelurahan	%	98,32	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.799.620		24.989.601		26.239.081		27.551.035		28.928.587	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					29.116.000		33.438.800		35.100.390		37.005.410		38.890.680	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.956.000		-		-		-		-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		-		-		-		-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
6. Kecamatan Cilacap Utara														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					65.000.000		68.250.000		71.662.500		75.245.625		79.007.906	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.975.213.769		9.425.916.845		9.546.250.531		9.672.600.901		9.805.268.790	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.151.737.700		6.168.255.185		6.174.707.944		6.181.483.341		6.188.597.509	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
	Persentase penyerapan alokasi dana kelurahan	%	96,64	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.875		3.646.519	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					31.414.000		32.984.700		34.633.935		36.365.632		38.183.913	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					10.372.000		-		-		-		-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDdes dengan RPJMDdes	%	100	100		-		-		-		-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
7. Kecamatan Cimanggu														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					24.900.000		26.145.000		27.452.250		28.824.863		30.266.106	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.358.109.746		3.133.512.555		3.158.751.146		3.185.251.668		3.213.077.215	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					31.462.000		33.035.100		34.686.855		36.421.198		38.242.258	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.500.000		8.925.000		9.371.250		9.839.813		10.331.803	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN					30.390.880		31.910.424		33.505.945		35.181.242		36.940.305	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.964.000		22.012.200		23.112.810		24.268.451		25.481.873	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
8. Kecamatan Cipari														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.214.600		23.325.330		24.491.597		25.716.176		27.001.985	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.815.291.081		2.624.675.830		2.644.940.749		2.666.218.915		2.688.560.989	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.682.800		44.816.940		47.057.787		49.410.676		51.881.210	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.329.300		2.445.765		2.568.053		2.696.456		2.831.279	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					44.175.600		46.384.380		48.703.599		51.138.779		53.695.718	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					13.596.040		14.275.842		14.989.634		15.739.116		16.526.072	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
9. Kecamatan Dayeuhluhur														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					20.925.000		21.971.250		23.069.813		24.223.303		25.434.468	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.826.493.522		2.632.430.163		2.651.740.566		2.672.016.490		2.693.306.210	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					46.419.590		48.740.570		51.177.598		53.736.478		56.423.302	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.875		3.646.519	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					23.500.000		24.675.000		25.908.750		27.204.188		28.564.397	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					18.574.000		19.502.700		20.477.835		21.501.727		22.576.813	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
10. Kecamatan Gandrungmangu														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					24.270.000		25.483.500		26.757.675		28.095.559		29.500.337	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.594.944.346		3.341.996.093		3.364.199.535		3.387.513.149		3.411.992.445	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					44.194.300		46.404.015		48.724.216		51.160.427		53.718.448	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.386.100		2.505.405		2.630.675		2.762.209		2.900.319	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					40.440.200		42.462.210		44.585.321		46.814.587		49.155.316	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					10.656.238		11.189.050		11.748.502		12.335.928		12.952.724	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
11. Kecamatan Jeruklegi														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.400.000		23.520.000		24.696.000		25.930.800		27.227.340	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.144.686.124		2.911.856.507		2.926.828.960		2.942.550.036		2.959.057.165	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					40.250.000		42.262.500		44.375.625		46.594.406		48.924.127	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.500.000		3.675.000		3.858.750		4.051.688		4.254.272	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					39.100.000		41.055.000		43.107.750		45.263.138		47.526.294	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.750.000		21.787.500		22.876.875		24.020.719		25.221.755	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
12. Kecamatan Kampunglaut														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					21.192.300		22.251.915		23.364.511		24.532.736		25.759.373	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.285.594.332		3.090.289.112		3.124.389.667		3.160.195.250		3.197.791.113	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					40.216.890		42.227.735		44.339.121		46.556.077		48.883.881	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.355.680		14.023.464		14.724.637		15.460.869		16.233.913	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					29.362.390		30.830.510		32.372.035		33.990.637		35.690.169	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					17.972.840		18.871.482		19.815.056		20.805.809		21.846.099	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
13. Kecamatan Karangpucung														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.535.000		19.461.750		20.434.838		21.456.579		22.529.408	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.579.959.046		3.337.159.018		3.362.769.840		3.389.661.203		3.417.897.134	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					50.983.950		53.533.148		56.209.805		59.020.295		61.971.310	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.013	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					53.195.550		55.855.328		58.648.094		61.580.499		64.659.523	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					23.100.450		24.255.473		25.468.246		26.741.658		28.078.741	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
14. Kecamatan Kawunganten														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.934.140.664		3.654.299.602		3.677.433.330		3.701.723.744		3.727.228.677	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					36.500.000		38.325.000		40.241.250		42.253.312		44.365.978	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					33.300.000		34.965.000		36.713.250		38.548.913		40.476.358	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					9.050.000		9.502.500		9.977.625		10.476.506		11.000.332	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDDes dengan RPJMDDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
15. Kecamatan Kedungreja														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					21.658.000		22.740.900		23.877.945		25.071.842		26.325.434	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.965.633.721		2.764.462.900		2.785.665.183		2.807.927.580		2.831.303.097	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					35.373.880		37.142.574		38.999.703		40.949.688		42.997.172	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.000.090		3.150.095		3.307.599		3.472.979		3.646.628	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					41.679.190		43.763.150		45.951.307		48.248.872		50.661.316	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					6.600.000		6.930.000		7.276.500		7.640.325		8.022.341	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDDes dengan RPJMDDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
16. Kecamatan Kesugihan														

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.258.000		19.170.900		20.129.445		21.135.917		22.192.713	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.389.358.705		3.148.179.770		3.168.075.792		3.188.966.615		3.210.901.979	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					33.578.660		35.257.593		37.020.473		38.871.496		40.815.071	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.875		3.646.519	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					29.159.400		30.617.370		32.148.239		33.755.650		35.443.433	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					33.299.310		34.964.276		36.712.489		38.548.114		40.475.519	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
17. Kecamatan Kroya														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.379.800		19.298.790		20.263.730		21.276.916		22.340.762	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.185.592.039		2.961.540.456		2.981.251.692		3.001.948.491		3.023.680.130	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					40.499.900		42.524.895		44.651.140		46.883.697		49.227.882	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.875		3.646.519	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					28.604.000		30.034.200		31.535.910		33.112.706		34.768.341	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					10.400.000		10.920.000		11.466.000		12.039.300		12.641.265	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
18. Kecamatan Majenang														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.920.000		19.866.000		20.859.300		21.902.265		22.997.378	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.785.908.294		3.550.506.196		3.585.813.414		3.622.885.992		3.661.812.199	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					33.005.690		34.655.975		36.388.773		38.208.212		40.118.622	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.013		2.552.563	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					29.467.400		30.940.770		32.487.809		34.112.199		35.817.809	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					8.934.560		9.381.288		9.850.352		10.342.870		10.860.014	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
19. Kecamatan Maos														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.439.000		23.560.950		24.738.998		25.975.947		27.274.745	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.231.388.427		3.004.552.026		3.024.714.501		3.045.885.101		3.068.114.230	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN					43.864.770		46.058.009		48.360.909		50.778.954		53.317.902	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.441.020		7.813.071		8.203.725		8.613.911		9.044.606	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					39.459.440		41.432.412		43.504.033		45.679.234		47.963.196	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					15.206.200		15.966.510		16.764.836		17.603.077		18.483.231	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
20. Kecamatan Nusawungu														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					23.366.400		24.534.720		25.761.456		27.049.529		28.402.005	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.610.465.510		3.361.230.119		3.385.378.708		3.410.734.727		3.437.358.546	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					37.500.000		39.375.000		41.343.750		43.410.938		45.581.484	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					48.736.400		51.173.220		53.731.881		56.418.475		59.239.399	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Forkopimcam	Persentase fasilitasi Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.070.400		20.023.920		21.025.116		22.076.372		23.180.190	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
21. Kecamatan Patimuan														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.124.890		27.431.135		28.802.691		30.242.826		31.754.967	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.966.559.114		2.759.558.365		2.778.547.663		2.798.486.427		2.819.422.129	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.338.850		44.455.793		46.678.582		49.012.511		51.463.137	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.236.670		6.548.504		6.875.929		7.219.725		7.580.711	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN					41.396.430		43.466.252		45.639.564		47.921.542		50.317.619	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7.973.180		8.371.839		8.790.431		9.229.952		9.691.450	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
22. Kecamatan Sampang														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.329.937.436		3.100.019.603		3.122.273.529		3.145.640.151		3.170.175.108	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					38.000.000		39.900.000		41.895.000		43.989.750		46.189.237	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.682.188		9.116.297	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.312	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					30.900.000		32.445.000		34.067.250		35.770.612		37.559.143	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
23. Kecamatan Sidareja														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					21.916.000		23.011.800		24.162.390		25.370.510		26.639.035	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.586.001.709		3.326.506.826		3.345.893.271		3.366.249.039		3.387.622.595	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.998.810		45.148.751		47.406.188		49.776.497		52.265.322	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.200.000		8.610.000		9.040.500		9.492.525		9.967.151	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					45.915.400		48.211.170		50.621.729		53.152.815		55.810.456	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.945.750		7.293.038	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
24. Kecamatan Wanareja														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					28.980.600		30.429.630		31.951.112		33.548.667		35.226.100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

RPJMD KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
Meningkatnya kualitas dan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah	Persentase SOP dan SP yang diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.382.776.989		3.162.457.784		3.190.163.187		3.219.253.861		3.249.799.068	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					28.856.510		30.299.336		31.814.302		33.405.017		35.075.268	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.210.000		4.420.500		4.641.525		4.873.601		5.117.281	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Aman dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					33.453.350		35.126.018		36.882.318		38.726.434		40.662.756	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Forkopimcam	Persentase fasilitas Forkopimcam	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.488.520		5.762.946		6.051.093		6.353.648		6.671.330	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kecamatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan ekonomi Migas	%	5,40 - 6,10	2,80 - 3,00	4,10 - 5,00	4,60 - 5,50	5,20 - 6,00	5,70 - 6,30
	Pertumbuhan ekonomi non Migas	%	5,40 - 6,10	2,80 - 3,00	4,10 - 5,00	4,60 - 5,50	5,20 - 6,00	5,70 - 6,30
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,91	73,32	73,68	74,06	74,44	74,82
3	Tingkat Kemiskinan	%	10,66 - 10,14	10,34 - 10,08	10,08 - 9,15	9,15 - 8,65	8,65 - 8,15	8,15 - 7,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,82- 7,73	7,73- 7,43	7,62- 7,32	7,42- 7,12	7,11- 6,78	6,82- 6,36
5	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	86,93	87,97	89,00	90,04	91,08	93,12

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Penyelenggaraan kinerja daerah RPJMD Kabupaten Cilacap bertujuan untuk memberikan bentuk target dari beberapa indikator yang telah ditargetkan melalui RPJPD dan penentuan RPJMD. Terdiri dari Indikator utama pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Indikator Kinerja Kunci serta Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Berikut ini Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2030:

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
	Indeks Ketahanan Pangan	angka	84,65	84,9	85,15	85,4	85,64	85,88
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	10,57	10,2	9,68	9,01	8,27	7,39
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,4	31,3	34,2	37,1	40	43,5
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,1	75,15	75,2	75,24	75,29	75,34
	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,3	5,3	6,8	8,3	10,3	12,3
	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	%	18,45	21,88	22,63	23,13	23,62	24,12
	Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	TonCO2eq	2.203.232,00	2.394.438,35	2.593.780,90	2.801.259,88	3.016.875,28	3.419.125,32
	Indeks Risiko Bencana	angka	94,88 - 93,1	93,67 - 91,16	92,46 - 89,22	91,25 - 87,27	90,05 - 85,33	88,84 - 83,38
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Tingkat Kemiskinan	%	10,66 - 10,14	10,34 - 10,08	10,08 - 9,15	9,15 - 8,65	8,65 - 8,15	8,15 - 7,16
	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	71,37-71,85	74,09	76,91	79,84	82,88	95,48
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,82- 7,73	7,73-7,43	7,62 – 7,32	7,42 – 7,12	7,11 – 6,78	6,82 – 6,36
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,67-19,87	19,89	20,11	20,33	20,55	20,78
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,97	75,24	75,54	75,84	76,15	76,45
	Prevalensi Stunting	%	10,77	10,42	10,07	9,72	9,37	9,02
	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	13	12	12	11	11
	Jumlah Kasus Kematian Balita	Kasus	112	112	111	111	110	110
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	88	89	90	91	93	94
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	89	89	89	89	89	89
	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,11	2,1	2,1	2,09	2,09	2,09

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Cakupan penerima pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	36	46	55	61	70	70
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	97	97	98	99	99	99
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	15	20	25	30	35	40
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	28,57	42,85	65	72,8	80	100
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	7,76	7,82	7,88	7,94	8	8,06
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,29	13,33	13,37	13,41	13,45
	Angka Literasi/Numerasi							
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,14	64,85	65,56	66,28	67,01	67,75
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	58,11	59,27	60,46	61,67	62,9	64,16
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	55,12	56,61	58,14	59,71	61,32	62,97
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	63,3	63,93	64,57	65,22	65,87	66,53
	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	75,39	78,43	81,47	84,44	87,41	90,38
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,91	4,96	5,02	5,07	5,13	5,19
	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,22	0,49	0,76	1,03	1,29	1,56
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota	%	57,22	60,6	63,74	67,05	70,52	73,66
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	62,33	62,43	62,53	62,63	62,73	62,83
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	97,38	97,91	98,43	98,95	99,1	100
	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	37,48	38,6	39,32	40	40,65	40,95
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,7	19,1	19,44	19,97	20,31	20,49
	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	47.610	48.230	48.850	49.470	50.090	50.170

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,375-0,364	0,372-0,352	0,370-0,340	0,366-0,329	0,363-0,317	0,360-0,305
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	angka	64,7	65,9	67	68	69	70
	Indeks Zakat Nasional	angka	0,6	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
III ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,53	52,74	52,97	53,14	53,31	53,45
	Kapabilitas Inovasi	angka	2,7	2,77	2,84	2,91	3	3,08
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	69,1	70,38	71,68	73	74,35	75,73
	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	1,6
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,43	34,64	34,83	35	35,16	35,3
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	332	337	342	347	352	357
	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,98	3,06	3,26	3,42	3,61	3,64
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,6	1,68	1,73	1,85	1,9	2
	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	1,01	1,11	1,21	1,31	1,41	1,51
	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	0,58	0,68	0,78	0,88	0,98	1,08
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4,79	4,81	4,83	4,85	4,87	4,88
	Return on Aset (ROA) BUMD	%	4,75	4,89	5,03	5,17	5,31	5,46
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	20,93	20,95	20,97	20,99	21,01	21,03
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	78	79	80	81	82	83
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,316	51,899	52,532	53,165	53,797	54,43
	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	48,85	49,55	50,55	51,55	52,55	53,85
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	86,21	86,61	87,01	87,41	88	88,4

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Desa Mandiri	%	46,47	47,48	48,49	49,5	50,51	51,52
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	98,36
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5	3,51
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,16		81		83	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,93	87,97	89	90,04	91,08	93,12
	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0
V	INDIKATOR KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IKK/TUJUAN SASARAN PD)							
	Pendidikan							
	Indeks Pencapaian SPM bidang Pendidikan	Indeks	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan							
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	per 1000 Penduduk	1,96	2	2,03	2,035	2,04	2,045
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	53,38	54,03	54,8	55,44	56,34	57,12

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Angka Populasi Bebas Penyakit tidak Menular	%	51,31	52,63	55,26	58,55	62,5	65,13
	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	60,52	63,15	65,78	71,05	73,68	76,31
	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	%	15	19	21	23	25	26
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	46,16	46,56	46,96	47,36	47,76	48,16
	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	26,22	26,42	26,62	26,82	27,02	27,22
	Akses rumah tangga terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (perkotaan dan perdesaan)	%	28,9	31,8	34,7	37,6	40,5	44
	Persentase Kinerja Infrastruktur Wilayah	%	64,73	65,73	66,73	67,73	68,73	69,73
	Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota	%	78	79	80	81	82	83
	Persentase Bangunan Publik dalam kondisi baik	%	6,2	7	8	9	10	11
	Persentase perwujudan ruang yang sesuai tata ruang	%	84,26	84,31	84,36	84,41	84,46	84,51
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	94,24	95,07	96,46	97,04	97,58	98,12
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93,97	94,97	95,97	96,97	97,97	98,97

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	0,74	0,9	1,04	1,19	1,34	1,49
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	78	79	80	81	82	83
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	64,57	72,01	73	74,02	75,01	76
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Persentase Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	%	85,96	86,96	87,96	88,96	89,96	89,96
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	59,35	69,38	75,72	81,84	87,96	92,96
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	14,83	14,34	13,85	13,36	12,87	12,38
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Jalan, Drainase, RTP, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Penerangan Lingkungan, dsb) yang sudah diserahkan pengembang ke pemerintah kabupaten	%	70	72,59	76,43	80	83,33	86,45
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat							
	Indeks Rasa Aman (Dimensi Trantibum)	Angka	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9	80
	Indeks Pencapaian SPM Bidang Trantibum	%	100	100	100	100	100	100
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	33	33	33	33	34	34
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15
	Sosial							
	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	%	56,5	57	58	59	59,5	60
	Persentase PPKS yang ditangani	%	49,5	50	50,5	51	51,5	52
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
	Tenaga Kerja							
	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	%	68,2	68,46	68,71	68,96	69,21	69,46
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/tenaga kerja	107,4	108,31	109,43	110,77	112,34	116,56
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	85,3	85,7	86,1	86,5	86,8	87,2
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	37,19	37,68	38,16	38,64	39,12	39,6
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	38,48	39,24	39,95	40,53	41,11	41,71
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	60,02	60,61	61,21	61,82	62,43	63,05
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,66	87,83	87,85	87,9	87,95	88
	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	717	717	719	719	721	721
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	50	50,5	51	51,5	52	52,5
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/ 100.000 pddk prpuan	0,00006	0,00005	0,00004	0,00003	0,00002	0,00001
	Pangan							
	Angka Ketersediaan Energi	kkal/ kap/ hari	2856	2860	2864	2868	2872	2876
	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Pokok 3-5% (Beras)	%	5	4,6	4,56	4,35	4,01	3,65
	Persentase Cadangan Pangan	%	14	20	25	28	30	32
	Pertanahan							
	Persentase Layanan Aduan yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Layanan Pengadaan Tanah Pemerintah yang Terasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100
	Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Air	Indeks	69,37	69,47	69,57	69,67	69,77	69,87
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,58	87,59	87,6	87,61	87,62	87,63
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	61,88	61,9	61,92	61,94	61,96	61,98
	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu (Air Dan Udara)	%	76,92	77,13	77,34	77,55	77,75	77,96
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	53,94	53,99	54,04	54,09	54,14	54,19
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	96	96,15	96,15	96,15	96,3	96,3
	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	83,25	84,35	84,9	85,45	86	86,55
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,15	94,36	94,57	94,78	94,99	95,2
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89	99,9

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	37	37,5	38	38,5	39	40
	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,48	95,49	95,5	95,51	95,52	95,53
	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	21,15	23,08	25	26,92	28,85	30,77
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
	Indeks Desa	%	77,76	78,77	79,78	80,79	81,8	82,81
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	0
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	3,51	7,14	15,38	25	36,36	50
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	%	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	62,65	63,35	63,94	64,48	65,17	66,25
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	13,75	13,62	13,49	13,34	13,21	13,15
	Perhubungan							
	Indeks Layanan Transportasi	indeks	65,5	66,3	66,8	67,3	67,8	68,4
	Persentase Capaian Kecepatan Lalu lintas	%	80	80,25	80,5	80,75	81	81,5
	Persentase Kinerja Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi	%	71,5	72,75	73	73,25	73,5	73,75
	Persentase penduduk yang menggunakan jasa angkutan umum	%	45	46	47	48	49	50
	Rasio konektivitas	indeks	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78
	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,32-0,40	0,32-0,40	0,32-0,40	0,32-0,40	0,32-0,40	0,32-0,40
	Komunikasi Dan Informatika							
	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	91	91,3	91,5	91,7	91,9	92

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	44,23	44,23	50	55,77	59,62	61,54
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50	50	50	50	50	50
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	73	73	73	73	73	73
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	96,78	96,78	96,78	96,78	96,78	96,78
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100
	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	%	7,24	7,25	7,26	7,27	7,28	7,29
	Persentase Pertumbuhan omset UMKM	%	3,58	3,58	3,59	3,6	3,61	3,62
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	63,93	64,52	65,08	65,63	66,15	66,67
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	36,2	36,42	36,69	36,87	37,02	37,21
	Penanaman Modal							
	Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Cilacap	Rupiah	1.659.161.679.792	1.752.240.650.028	1.845.284.628.545	1.938.286.973.824	2.031.324.748.567	2.145.282.066.962
	Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Cilacap	Proyek	34009	35607	37281	39033	40867	44953
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,9	86	86,1	86,15	86,2	86,25
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	4,8	5,61	5,31	5,04	4,8	5,61

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemuda dan Olahraga							
	Indeks Pembangunan Pemuda	%	56,58	56,83	57,08	57,33	57,58	57,83
	Indek Pembangunan Olahraga	Indeks	0,316	0,321	0,326	0,332	0,336	0,34
	Persentase Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga pendidikan & olahraga masyarakat)	%	5,77	7,27	8,47	9,38	10	10,39
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,185	1,188	1,192	1,195	1,198	1,201
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	9,754	9,76	9,763	9,766	9,769	9,774
	Statistik							
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,93	2,95	2,95	2,97	2,97	2,99
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persandian							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	42,27	42,81	43,36	43,9	44,44	45
	Kebudayaan							
	Persentase Cagar Budaya (CB) yang ditetapkan	%	17,48	19,58	21,68	23,78	25,87	27,97
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	%	2,96	3,55	4,14	4,73	5,33	5,92
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	30,22	30,94	31,65	32,37	33,09	33,81
	Perpustakaan							
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	69	69	70	71	72	73

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,41	64,51	64,61	64,71	66	67
	Kearsipan							
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Cilacap	Nilai	75	80	82,5	85	87,5	90
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Cilacap	Nilai	71	76	78,5	81	83,5	86
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	75,34	77,34	79,34	81,34	83,34	85,34
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71	71,25	71,5	71,75	72	72,25
	Kelautan Dan Perikanan							
	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	1,1	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13
	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	35,5	36,25	37	37,75	38,5	39,25
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	67.400,00	69.400,00	71.400,00	73.400,00	75.400,00	77.400,00
	Pariwisata							
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	1,47	1,48	1,49	1,5	1,51	1,52
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	2,22	2,23	2,24	2,25	2,26	2,27
	Tingkat hunian akomodasi	%	25,85	25,9	25,95	26	26,05	26,1

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	nilai	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,44	2,45	2,46	2,47	2,48	2,49
	Pertanian							
	Kontribusi Sektor pertanian dalam PDRB	%	8,04	8,05	8,06	8,07	8,075	8,08
	Produksi Tanaman Pangan	ton	922.250	929.894	937.603	945.375	953.213	961.115
	Produksi Hortikultura	ton	115.729	117.471	119.239	121.033	122.855	124.704
	Produksi Perkebunan	ton	63.879,27	64.410,40	64.947,05	65.489,28	66.034,44	66.588,03
	Produksi Peternakan	ton	19.349,55	19.379,83	19.412,73	19.448,68	19.487,80	19.530,69
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	66,41	66,47	66,53	66,59	66,65	66,71
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-24,6	-24,7	-24,8	-24,9	-25	-25,1
	Perdagangan							
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,84	5,85	5,86	5,87	5,88	5,89
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	32,43	30,38	30,38	30,38	30,38	30,38
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	61,29	64,13	64,13	64,31	64,31	64,49
	Perindustrian							
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,43	34,64	34,83	35	35,16	35,3
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	4,16	4,25	4,44	4,74	4,93	5,12
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	1,3	1,45	1,6	1,75	1,9	2,05

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,64	2,94	3,04	3,13	3,24	3,35
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	95	96	97	98	99	100
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	72	77	82	85	88	90
Sekretariat Daerah								
	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	88,65	88,85	89	89,2	89,4	89,4
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,5	85,63	88,76	91,89	95,02	98,15
	Kontribusi Laba BUMD terhadap PAD	%	5,99	6,05	5,95	5,86	5,89	5,71
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	75,9	76,4	76,9	77,4	77,9	78,4
	Nilai Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	56	60	63	66	69	72
	Indeks Kematangan UKPBJ	Nilai	9	9	9	9	9	9
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	48	48	49	49	49	49
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	45	45	46	47	48	48
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	12,22	14,44	16,66	18,88	21,1	23,32
Perencanaan								
	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	76,49	77,47	78,45	79,43	80,41	81,39
	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan komponen Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	63,13	64,25	65,37	66,49	67,61	68,73

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sekretariat DPRD							
	Nilai Penilaian Kinerja OPD	poin	89,83	89,85	89,87	89,89	90,91	90,93
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,5	84	84,5	85	85,5	86
	Keuangan							
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	26,32	26,87	27,42	27,97	28,52	29,07
	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	%	71,16	72,35	71,15	71,48	71,73	72,39
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	75.346	75.746	76.146	76.546	76.946	77.346
	Indeks Pengelolaan Asset	%	74,58	74,6	74,63	74,65	74,67	74,68
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	13,67	32,02	28,83	28,33	27,69	27,69
	Rasio PAD	%	27,19	27,72	28,96	30,2	31,5	31,83
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	69,97	69,86	69,49	69,12	68,3	68,16
	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-0,05	-0,045	-0,04	-0,035	-0,03	-0,03
	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
	Manajemen Asset	%	100	100	100	100	100	100
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,29	2,87	2,49	2,16	1,87	1,62
	Kepegawaian							
	Nilai Sistem Merit	Nilai	320	325	325	330	330	335
	Nilai 5 Aspek Sistem Merit (Perencanaan, Pengadaan, Karir, Promosi Mutasi, Sistem Informasi)	Nilai	209	214	214	219	219	224

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,69	79,22	80,76	82,22	83,64	84,95
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,34	24,69	25,04	25,39	25,74	26,09
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,44	42,27	43,08	43,86	44,63	45,37
Pendidikan dan Pelatihan								
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,12	80	82	84	85,5	87
Penelitian dan Pengembangan								
	Indeks Ekosistem Inovasi	Angka	3,73	3,8	3,87	3,94	4,01	4,08
Pengawasan								
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,264	3,269	3,274	3,279	3,284	3,289
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	3,333	3,338	3,343	3,348	3,353	3,358
Kesatuan Bangsa dan Politik								
	Persentase potensi konflik sosial yang berhasil dicegah sebelum eskalasi	%	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	72	73	74	75	76	77
	Indeks Kinerja Ormas	Angka	65	66	67	68	69	70
	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,98	6,99	7	7,01	7,02	7,03

BAB V
P E N U T U P

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memegang peran krusial, karena dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah terpilih selama masa jabatan 5 (lima) tahun. RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pengembangan wilayah, manajemen keuangan daerah, serta program kolaboratif antar lembaga. Proses penyusunannya selaras dengan dokumen perencanaan hierarkis, seperti RPJPD Kabupaten Cilacap 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, dan selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2025-2029. Di bawah ini dijabarkan kaidah operasional dan pedoman transisi yang tercantum dalam RPJMD Cilacap Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang juga memperhatikan pembangunan gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)

- Tahun 2025–2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025–2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
3. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial sebagai prinsip dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara;
 4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan, guna mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi hambatan sejak dini, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi serta sesuai dengan ketersediaan pendanaan;
 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya untuk lembaga perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Cilacap;
 6. RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan; 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi kebijakan nasional);
 7. Perubahan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
 8. RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cilacap.

5.2. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD.

BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIYA RACHMAN